

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, adalah suatu ungkapan puji dan syukur kepada sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pembolak balik hati, pemberi semua nikmat yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Sehingga dengan anugerah dan karuniaNya kepada semua tim yang terlibat beserta keluarga masing-masing, sehingga kami mampu menunaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2022 dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.

Tidak lupa juga kami persembahkan selalu shalawat serta salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Shallallahu `Alaihi wa Sallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan semua ummatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman, semoga kelak kita diberikan syafaat oleh beliau sebagai ganjaran banyak bershalawat dan keterikatan hati dengan beliau. .

Sesuai dengan amanat konstitusional kepala daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara prinsip penyusunan laporan keuangan ini wajib dilakukan yakni berbunyi LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK guna dilakukan pemeriksaan (audit) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan ini adalah laporan keuangan konsolidasian, yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal yakni Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Konsolidasi sebagai proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dengan mengeliminasi akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu pelaporan entitas tunggal adalah jalan untuk mendapatkan laporan keuangan gabungan.

Dalam hal ini laporan keuangan ini merupakan konsolidasian dari 28 (dua puluh delapan) OPD/SKPD, yang merupakan entitas akuntansi dan juga pelaporan yang berada dalam lingkup entitas pelaporan yang lebih besar yaitu Pemerintah Kota Bukittinggi.

Laporan yang disajikan oleh OPD/SKPD sebagai entitas pelaporan terdiri dari 5 (lima) laporan yaitu (1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan menggunakan kaidah-kaidah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kemudian Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai entitas pelaporan yang lebih besar melakukan penggabungan/ konsolidasian, sehingga 7 (tujuh) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (6) Laporan Arus Kas (LAK) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, LKPD ini disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah paling lama 2 (dua) bulan BPK RI melakukan serangkaian pemeriksaan, BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi natinya.

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan beserta laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dapat memberikan informasi serta pengungkapan yang memadai (*full disclosure*) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi kedepannya.

Wabillahit taufiq wal hidayah

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Bukittinggi, 16 Agustus 2023
WALIKOTA BUKITTINGGI

RAMADAN SAFAR

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | v |
| PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA | |
| I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
| II. RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI | |
| III. RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN..... | |
| IV. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, DAN KEGIATAN..... | |
| V. REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA | |
| VI. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH | |
| VII. LAPORAN ARUS KAS | |
| VIII. LAPORAN OPERASIONAL | |
| IX. NERACA..... | |
| X. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | |
| XI. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB | |
| BAB I INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI | |
| 1.1 Umum | 1 |
| 1.2 Domisili dan Bentuk Geografis..... | 2 |
| 1.3 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah..... | 4 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan | 7 |
| 1.5 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan | 8 |
| 1.6 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan..... | 10 |
| BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN | |
| 2.1 Kebijakan Keuangan Fiskal..... | 13 |
| 2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro | 30 |

| | |
|--|----|
| 2.3 Penetapan APBD, Pergeseran serta Perubahan APBD APBD Tahun 2022..... | 41 |
|--|----|

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan | 43 |
| 3.2 Hambatan/Kendala Dan Faktor Pendukung Dalam Pencapaian Target Kinerja | 51 |

BAB IV DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

| | |
|---|----|
| 4.1 Struktur Laporan Keuangan | 52 |
| 4.2 Kebijakan Konversi..... | 55 |
| 4.3 Asumsi Dasar Akuntansi..... | 56 |
| 4.4 Pengguna Laporan Keuangan..... | 57 |
| 4.5 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan | 57 |
| 4.6 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyajian Laporan Keuangan | 59 |
| 4.7 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian..... | 60 |
| 4.7.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan..... | 60 |
| 4.7.2 Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan Dan Andal..... | 60 |
| 4.7.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan..... | 61 |
| 4.7.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan | 61 |
| 4.7.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan | 62 |
| 4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan..... | 62 |
| 4.8.1 Akuntansi Anggaran | 62 |
| 4.8.2 Akuntansi Pendapatan LRA..... | 62 |
| 4.8.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan..... | 63 |
| 4.8.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan | 63 |
| 4.8.5 Akuntansi Pendapatan LO | 64 |
| 4.8.6 Akuntansi Beban..... | 66 |
| 4.8.7 Aset | 67 |
| 4.8.8 Kewajiban..... | 87 |
| 4.8.9 Ekuitas..... | 91 |
| 4.8.10 Badan Layanan Umum Daerah | 91 |

BAB V.PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

| | |
|--|-----|
| 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan | 94 |
| 5.1.1 Pendapatan Daerah | 98 |
| 5.1.2 Belanja Daerah | 108 |
| 5.1.3 Surplus / Defisit..... | 121 |

| | |
|--|-----|
| 5.1.4 Pembiayaan Daerah | 115 |
| 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran..... | 123 |
| 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | 125 |
| 5.3 Neraca..... | 127 |
| 5.3.1 Aset | 127 |
| 5.3.2 Kewajiban | 222 |
| 5.3.4 Ekuitas..... | 236 |
| 5.4 Laporan Operasional..... | 236 |
| 5.4.1 Pendapatan - LO..... | 238 |
| 5.4.2 Beban LO | 252 |
| 5.5 Laporan Arus Kas | 264 |
| 5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi..... | 266 |
| 5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi..... | 267 |
| 5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan | 268 |
| 5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas..... | 269 |
| 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas | 271 |

BAB VI INFORMASI LAINNYA

| | |
|--|-----|
| 6.1 Aset (Tanah) dalam Penelusuran | 272 |
| 6.2 Kewajiban Kontingensi | 273 |
| 6.3 Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 Untuk Penanggulangan dan Penanganan Pandemi COVID | 276 |
| 6.4 Informasi Dana Aset Yang Bersumber dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi..... | 291 |
| 6.5 Kebijakan / Pembatasan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Selama Tahun 2022 | 293 |
| 6.6 Informasi Sengketa Tanah untuk Pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi | 293 |

BAB VII PENUTUP

DAFTAR TABLE

| | | |
|----------------|---|-----|
| Tabel 1.2.1 | Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota–Kota di Sumatera | 2 |
| Tabel 1.2.2 | Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah dan posisi Geografis per Menurut Kecamatan..... | 3 |
| Tabel 1.3.1 | Daftar SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022..... | 4 |
| Tabel 2.1.1 | Perubahan Target Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 | 16 |
| Tabel 2.1.2 | Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2022..... | 17 |
| Tabel 2.1.3 | Perubahan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2022..... | 20 |
| Tabel 2.1.4 | Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022..... | 22 |
| Tabel 2.1.2.1 | Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d Tahun 2023..... | 27 |
| Tabel 2.1.3.1 | Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d 2022 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023..... | 29 |
| Tabel 2.2.1 | Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi | 32 |
| Tabel 2.2.3.1 | Indek Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d 2022 | 35 |
| Tabel 2.2.5.1 | Penduduk Miskin Kota Bukittinggi..... | 38 |
| Tabel 2.2.6.1 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2018 s.d 2022..... | 39 |
| Tabel 2.2.7.1 | Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015 s.d 2022 | 40 |
| Tabel 3.1.1 | Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan 2021..... | 44 |
| Tabel 3.1.2 | Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 | 48 |
| Tabel 3.1.3 | Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021..... | 50 |
| Tabel 4.8.7.1 | Kapitalisasi Aset Tetap | 73 |
| Tabel 4.8.10.1 | UPTD yang Telah Menerapkan PPK BLUD | 92 |
| Tabel 5.1.1 | Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2022..... | 95 |
| Tabel 5.1.2 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021 | 97 |
| Tabel 5.1.1.1 | Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021 | 98 |
| Tabel 5.1.1.2 | Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021 | 99 |
| Tabel 5.1.1.3 | Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021 | 100 |
| Tabel 5.1.1.4 | Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021 | 101 |
| Tabel 5.1.1.5 | Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2002 dan 2021 | 102 |
| Tabel 5.1.1.6 | Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021 | 103 |
| Tabel 5.1.1.7 | Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021 | 104 |
| Tabel 5.1.1.8 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan 2021..... | 100 |
| Tabel 5.1.1.9 | Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021 | 105 |
| Tabel 5.1.1.10 | Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan 2021..... | 106 |
| Tabel 5.1.1.11 | Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan 2021 | 106 |
| Tabel 5.1.1.14 | Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021 | 107 |
| Tabel 5.1.1.15 | Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan dan Organisasi Tahun 2022 dan 2021 | 107 |

| | | |
|-----------------|--|-----|
| Tabel 5.1.1.16 | Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah dan Fungsi Tahun 2022 dan 2021 | 110 |
| Tabel 5.1.1.17 | Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021 | 113 |
| Tabel 5.1.2.1 | Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021 | 113 |
| Tabel 5.1.2.2 | Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021..... | 114 |
| Tabel 5.1.2.3 | Belanja Barang dan Jasa..... | 115 |
| Tabel 5.1.2.3.1 | Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 dan 2021 | 115 |
| Tabel 5.1.2.4 | Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021..... | 116 |
| Tabel 5.1.2.5 | Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 | 117 |
| Tabel 5.1.2.6 | Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 (Menurut Jenis Belanja)..... | 118 |
| Tabel 5.1.2.7 | Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 (Menurut Jenis Belanja) | 120 |
| Tabel 5.1.2.8 | Rincian SiLPA Tahun 2022..... | 123 |
| | | |
| Tabel 5.3.1.1 | Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah..... | 128 |
| Tabel 5.3.1.2 | Mutasi Kas Bendahara BLUD Tahun 2022 | 132 |
| Tabel 5.3.1.3 | Saldo Kas Tunai dan Bank Pada bendahara BLUD | 132 |
| Tabel 5.3.1.4 | Mutasi Kas Pada bendahara BOS Sekolah Negeri Tahun 2022 | 133 |
| Tabel 5.3.1.5 | Saldo Kas Tunai dan Bank Pada Bendahara BOS Sekolah Negeri | 136 |
| Tabel 5.3.1.6 | Sisa Kas Dana BOS Sekolah Swasta..... | 138 |
| Tabel 5.3.1.7 | Sisa Kas Dana BOS PAUD Swasta..... | 140 |
| Tabel 5.3.1.8 | Sisa Kas Dana BOS Kesetaraan..... | 144 |
| Tabel 5.3.4 | Penyajian Piutang Pada Neraca Tahun 2022 dan 2021..... | 144 |
| Tabel 5.3.5 | Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022 | 145 |
| Tabel 5.3.6 | Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022 | 146 |
| Tabel 5.3.7 | Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2022 | 147 |
| Tabel 5.3.8 | Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022..... | 150 |
| Tabel 5.3.9 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 | 150 |
| Tabel 5.3.11 | Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022..... | 152 |
| Tabel 5.3.12 | Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 | 157 |
| Tabel 5.3.13 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 | 159 |
| Tabel 5.3.15 | Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2021 | 161 |
| Tabel 5.3.17 | Piutang Lainnya Tahun 2022..... | 162 |
| Tabel 5.3.18 | Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2022 | 163 |
| Tabel 5.3.19 | Persediaan Per SKPD Tahun 2022 dan 2021..... | 164 |
| Tabel 5.3.20 | Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2022..... | 165 |
| Tabel 5.3.4.15 | Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir Per Kecamatan Tahun 2022..... | 167 |
| Tabel 5.3.4.16 | Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2022..... | 168 |
| Tabel 5.3.4.17 | Penyisihan Pinjaman Tahun 2022..... | 170 |
| Tabel 5.3.4.18 | Kas Bendahara dan Bank Tahun 2022 | 172 |
| Tabel 5.3.4.19 | Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2022 | 173 |
| Tabel 5.3.4.20 | Kondidi Kelompok UEM-SP di Bukittinggi Tahun 2022..... | 174 |
| Tabel 5.3.4.21 | Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022..... | 177 |
| Tabel 5.3.4.22 | Perhitungan Equity Method untuk Investasi Pemko Bukittinggi Pasa PT.BPRS Jam Gadang Perseroda Tahun 2022..... | 180 |
| Tabel 5.3.21 | Kelompok Aset Tetap | 187 |
| Tabel 5.3.22 | Rekap Data Aset Tetap Tanah Per SKPD..... | 188 |
| Tabel 5.3.24 | Daftar Aset Tanah yang Masih Dalam Penelusuran | 189 |
| Tabel 5.3.25 | Daftar Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain Tahun 2022 | 198 |
| Tabel 5.3.26 | Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan | 199 |

| | | |
|----------------|--|-----|
| Tabel 5.3.27 | Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan..... | 204 |
| Tabel 5.3.28 | Rincian Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya..... | 207 |
| Tabel 5.3.29 | Rincian Aset Tetap – Konstruksi dalam Pengerjaan | 209 |
| Tabel 5.3.30 | Akumulasi Penyusutan Aset tetap..... | 210 |
| Tabel 5.3.48 | Mutasi Tagihan Jangka Panjang Tahun 2022 | 212 |
| Tabel 5.3.48 | Aset Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS) | 213 |
| Tabel 5.3.49 | Daftar Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pihak Ketiga di Pertokoan Pasar Simpang Aur | 214 |
| Tabel 5.3.50 | Daftar Pemegang Sertifikat HGB di atas HPL di Pertokoan Pasar Simpang Aur..... | 196 |
| Tabel 5.3.2.1 | Kewajiban Tahun 2022 | 222 |
| Tabel 5.3.2.2 | Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 | 222 |
| Tabel 5.3.2.4 | Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka..... | 224 |
| Tabel 5.3.2.5 | Daftar Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 | 225 |
| Tabel 5.3.2.6 | Daftar Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022..... | 228 |
| Tabel 5.3.2.7 | Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022..... | 230 |
| Tabel 5.3.2.8 | Daftar Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022 | 232 |
| Tabel 5.3.2.9 | Daftar Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022..... | 233 |
| Tabel 5.3.3.30 | Daftar Mutasi Utang Kelebihan Transfer Tahun 2022 | 234 |
| Tabel 5.4.1 | Realisasi Laporan Operasional Tahun 2022 | 237 |
| Tabel 5.4.1.1 | Kegiatan Operasional Tahun 2022..... | 238 |
| Tabel 5.4.1.2 | Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022..... | 239 |
| Tabel 5.4.1.3 | Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022..... | 240 |
| Tabel 5.4.1.4 | Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LO dengan LRA Tahun 2022 | 240 |
| Tabel 5.4.1.5 | Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan LO Tahun 2022..... | 241 |
| Tabel 5.4.1.6 | Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 | 242 |
| Tabel 5.4.1.7 | Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per SKPD Tahun 2022..... | 242 |
| Tabel 5.4.1.8 | Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2022..... | 244 |
| Tabel 5.4.1.9 | Perbandingan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 | 245 |
| Tabel 5.4.1.10 | Realisasi Lain – lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2022..... | 246 |
| Tabel 5.4.1.11 | Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022..... | 248 |
| Tabel 5.4.1.12 | Realisasi Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022 | 249 |
| Tabel 5.4.1.13 | Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LO Tahun 2022..... | 250 |
| Tabel 5.4.1.14 | Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 | 251 |
| Tabel 5.4.1.15 | Beban Tahun 2022..... | 252 |
| Tabel 5.4.1.16 | Beban Pegawai Tahun 2022 | 253 |
| Tabel 5.4.1.17 | Beban Persediaan Tahun 2022..... | 255 |
| Tabel 5.4.1.18 | Beban Jasa Tahun 2022..... | 256 |
| Tabel 5.4.1.19 | Beban Pemeliharaan Tahun 2022..... | 258 |
| Tabel 5.4.1.20 | Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 | 259 |
| Tabel 5.4.1.21 | Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2022 | 260 |
| Tabel 5.4.1.22 | Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 | 261 |
| Tabel 5.4.1.23 | Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 | 261 |
| Tabel 5.4.1.24 | Beban Penyusutan Tahun 2022..... | 262 |
| Tabel 5.4.1.25 | Beban Non Operasional Tahun 2022 | 263 |
| Tabel 5.5.1 | Ringklasan Laporan Arus Kas Tahun 2022 dan 2021 | 264 |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| Tabel 5.5.2 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 266 |
| Tabel 5.5.3 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi..... | 268 |
| Tabel 5.5.4 | Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris | 269 |
| Tabel 5.5.5 | Saldo Kas dari Arus Kas | 270 |
| Tabel 5.6.1 | Laporan Perubahan Ekuitas | 271 |
| Tabel 6.1.1 | Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran | 272 |
| Tabel 6.1.2 | Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) | 275 |
| Tabel 6.1.2.1.2 | Daftar Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang diperuntukkan untuk Program Perlindungan Sosial | 277 |
| Tabel 6.1.2.1.3 | Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang Diperuntukan untuk Program Pemberdayaan Ekonomi..... | 279 |
| Tabel 6.1.2.3 | Laporan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial..... | 284 |
| Tabel 6.1.2.4 | Realisasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus | 288 |
| Tabel 6.2.1.1 | Daftar Aset Non APBD..... | 292 |
| Tabel 6.4.0.1 | Langkah dan Upaya Pengamanan Barang Milik Daerah yang Dilakukan | 294 |

BABI

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1.1. UMUM

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi secara berkala merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah, yang diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung urusan pemerintah daerah secara keseluruhan. Dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan serta program kegiatan di masa yang akan datang untuk meningkatkan penyediaan pembangunan manusia serta infrastruktur Pemerintah Kota Bukittinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang telah diterima secara umum yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terlebih dahulu telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Kota Bukittinggi, selanjutnya disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta kemudian disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan.

1.2. DOMISILI DAN BENTUK GEOGRAFIS

Kondisi daerah dan masyarakat yang semakin berkembang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi menghendaki pembangunan manusia serta sarana dan prasarana (*mandatory spending*) yang cepat dan dinamis tentunya dengan menyesuaikan dan memanfaatkan kondisi alam, letak, berbagai sumber daya termasuk kondisi masyarakat yang ada.

Penyelenggaraan pembangunan tahun 2022 sebagai bentuk implementasi dan pencapaian visi Kota Bukittinggi telah dimuat dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. APBD juga disusun dalam rangka konsistensi dan sinkronisasi program pembangunan serta kebijakan yang dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan visi dan misi Walikota Bukittinggi yang mengacu kepada visi dan misi umum daerah Kota Bukittinggi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak sangatlah penting. Koordinasi dan kerja sama itu diantaranya adalah dengan forum pimpinan daerah, instansi vertikal dan horizontal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, forum diskusi serta insan pers yang menggagas rencana pembangunan ke depan. Di samping itu juga kerjasama dengan pemerintah daerah lain, kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terus diupayakan untuk perkembangan serta mendorong kemajuan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara Geografis Kota Bukittinggi terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat dan di tengah-tengah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi terletak pada Koordinat $100^{\circ}, +6221'$ – $100^{\circ}, 25'$ Bujur Timur dan $00^{\circ}, 19'$ - $00^{\circ}, 19'$ Lintang Selatan dengan Luas Wilayah $25,239 \text{ Km}^2$ atau 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 km dengan melalui jalan yang menanjak, menurun, bergelombang dan berliku terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya. Berikut perkiraan jarak Kota Bukittinggi dengan kota-kota sekitarnya dan kota provinsi tetangga adalah:

Tabel 1.2.1 Jarak Kota Bukittinggi Dengan Kota-Kota di Sumatera

| Kota-Kota | Jarak Km ² |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| Bukittinggi – Medan | 730,00 Km ² |
| Bukittinggi - Banda Aceh | 1,337,00 Km ² |

| Kota-Kota | Jarak Km ² |
|------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) |
| Bukittinggi – Jambi | 537,00 Km ² |
| Bukittinggi – Pekanbaru | 221,00 Km ² |
| Bukittinggi – Palembang | 795,00 Km ² |
| Bukittinggi – Bengkulu | 779,00 Km ² |
| Bukittinggi - Tanjung Karang | 1,222,00 Km ² |
| Bukittinggi - Padang Panjang | 19,00 Km ² |
| Bukittinggi - Padang | 91,00 Km ² |
| Bukittinggi – Pariaman | 77,00 Km ² |
| Bukittinggi – Painan | 168,00 Km ² |
| Bukittinggi – Tapan | 304,00 Km ² |
| Bukittinggi – Solok | 73,00 Km ² |
| Bukittinggi – Sawahlunto | 104,00 Km ² |
| Bukittinggi – Sijunjung | 136,00 Km ² |
| Bukittinggi – Payakumbuh | 33,00 Km ² |
| Bukittinggi – Batusangkar | 49,00 Km ² |
| Bukittinggi - Lubuk Sikaping | 77,00 Km ² |
| Bukittinggi - Simpang Empat | 199,00 Km ² |
| Bukittinggi - Air Bangis | 256,00 Km ² |
| Bukittinggi – Sitiung | 242,00 Km ² |
| Bukittinggi - Muaro Labuah | 143,00 Km ² |

Sumber: Laporan Dishubkominfo Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.2.2 Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah dan Posisi Geografis per Menurut Kecamatan

| Kecamatan | Kelurahan | Luas Daerah (Km ²) | Prosentase Luas Kecamatan | Posisi Geografis |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Guguk Panjang | 7 | 6.831 | 27,07 | 100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40" LS |
| Mandiangan Koto Selayan | 9 | 12.156 | 48,16 | 100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS |

| Kecamatan | Kelurahan | Luas Daerah (Km2) | Prosentase Luas Kecamatan | Posisi Geografis |
|--------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Aur Birugo Tigo Baleh | 8 | 6.252 | 24,77 | 100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS |

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Nagari Guguak dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

1.3. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk kemudian digabungkan pada entitas pelaporan.

Dalam hal ini entitas akuntansi adalah 28 (dua puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi termasuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berada pada OPD Sekretariat Daerah, DPRD pada OPD Sekretariat DPRD dan juga fungsi PPKD yang berada pada OPD Badan Keuangan.

**Tabel 1.3.1. Daftar SKPD
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022**

| KODE | NAMA |
|---------|---|
| 1.01.01 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.02.01 | Dinas Kesehatan |
| 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.04.01 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 1.05.01 | Dinas Kebakaran |
| 1.05.02 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| KODE | NAMA |
|---------|--|
| 1.05.03 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 1.06.01 | Dinas Sosial |
| 2.02.01 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bere ncana |
| 2.05.01 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2.06.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2.09.01 | Dinas Perhubungan |
| 2.10.01 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2.11.01 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 2.12.01 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 2.17.01 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3.02.01 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 3.03.01 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 4.01.01 | Sekretariat Daerah |
| 4.02.01 | Inspektorat |
| 4.03.01 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| 4.04.01 | Badan Keuangan |
| 4.05.01 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4.08.01 | Sekretariat DPRD |
| 4.11.01 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 4.11.02 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 4.11.03 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 4.12.01 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2021 telah dilakukan penyusunan draft rancangan peraturan daerah terkait penyesuaian terhadap Perangkat Daerah.

Penyesuaian tersebut ditetapkan tanggal 11 Oktober 2022 melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi;
2. Melakukan penataan kembali terhadap perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Pada tanggal 5 Desember 2022 ditetapkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah peraturan walikota sebagai turunan dari peraturan daerah yang ditetapkan, yang tidak mengalami perubahan adalah 3 (tiga) kecamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan kelurahan-kelurahan.

Terhadap perubahan susunan perangkat daerah tersebut, Walikota telah melantik pejabat-pejabat yang dibutuhkan untuk mengisi perangkat-perangkat daerah serta termasuk mutasi dan rotasi pada tanggal 30 Desember 2022. Perubahan perangkat daerah tersebut berlaku untuk 1 Januari 2023 dan tidak mengubah entitas dan jumlah entitas yang melakukan penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022, serta yang menandatangani laporan keuangan tahun 2022 masih pejabat lama. Hal ini ditegaskan dalam Edaran Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi tanggal 6 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Entitas Akuntansi menyusun 5 (lima) laporan keuangan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Badan Keuangan disamping sebagai entitas akuntansi juga berfungsi sebagai entitas pelaporan yang memegang peranan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menyusun 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yakni ditambah dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas (LAK).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasian. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam hal ini penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 mencakup transaksi keuangan yang berasal dari APBD dan pelaksanaannya pada seluruh SKPD maupun transaksi keuangan tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, LKPD ini tidak mencakup transaksi entitas pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun tetap mencantumkan Laporan Keuangan BUMD sebagai lampiran LKPD ini.

Khusus untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD

yang ada yakni RSUD Kota Bukittinggi dan 7 (tujuh) Puskesmas) menyusun 7 (tujuh) Laporan Keuangan lengkap yang macamnya sama dengan LKPD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.4.1. Maksud

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan serta memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang merupakan pengguna LKPD (jajaran pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Secara spesifik, tujuan penyusunan LKPD Kota Bukittinggi adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan,
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai,
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas,
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.5. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengacu pada ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015, tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015.
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2020.
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.sebagaimana diubah
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020.
26. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi.
27. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.
28. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomsor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

31. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan dalam memahami LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi, maka Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I :** Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.1. Umum
 - 1.2. Domisili dan Bentuk Geografis
 - 1.3. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4.1. Maksud
 - 1.4.2. Tujuan
 - 1.5. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi
 - 1.6. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- BAB II :** Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro
- 2.1. Kebijakan Keuangan/ Fiskal
 - 2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
 - 2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
 - 2.1.3. Gini Rasio
 - 2.1.4. Laju Inflasi
 - 2.1.5. Tingkat Kemiskinan
 - 2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia
 - 2.1.8. Indeks Gini/Koefisien Gini
- BAB III :** Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target keuangan
 - 3.2. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target

- BAB IV : Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Struktur Laporan Keuangan
 - 4.2. Kebijakan Konversi
 - 4.3. Asumsi Dasar Akuntansi.
 - 4.4. Pengguna Laporan Keuangan.
 - 4.5. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan.
 - 4.6. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
 - 4.7. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian
 - 4.8. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- BAB V : Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
- 5.1. Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.2. Belanja Daerah
 - 5.1.3. Pembiayaan Daerah
 - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas Dana
 - 5.4. Laporan Operasional
 - 5.4.1. Kegiatan Operasional
 - 5.4.1.1. Pendapatan
 - 5.4.1.2. Beban
 - 5.4.2. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.3. Surplus/ Defisit- LO
 - 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran
 - 5.5.5. Kenaikan/ Penurunan Kas
 - 5.5.6. Kas Awal dan Kas Akhir.

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

5.7. Pengungkapan Informasi yang belum disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan

BAB VI: Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah

6.1 Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 Untuk Penanggulangan Dan Penanganan Pandemi Covid-19; dan

6.2 Informasi Dana Dan Aset Yang Bersumber Dari Dana Non APBD Kota Bukittinggi.

BAB VII: Penutup

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN/FISKAL DAN EKONOMI MAKRO

2.1. KEBIJAKAN KEUANGAN/ FISKAL

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada dunia, telah menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami kebangkrutan dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan pendanaan pada kegiatan dalam rangka mendukung penanganan pasca pandemi yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Bukittinggi mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada Dana Transfer untuk pendanaan belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional/rutin kantor, belanja pembangunan dan sebagainya.

Untuk maksimalisasi pengalokasian dana transfer, pengalokasian belanja wajib dan pendukung, pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi serta penyampaian informasi dan laporan tahun 2022, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa aturan yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.7/2021 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
13. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2021 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Laporan Dana Insentif Daerah.

Beberapa catatan penting dari pelaksanaan dana transfer tahun 2022 maupun arahan untuk menggunakan APBD Tahun 2022 yang telah dilaksanakan Kota Bukittinggi yaitu:

1. Kewajiban Penganggaran Belanja Wajib Daerah yakni belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja wajib yang bersumber dari DTU.
2. Penganggaran dana kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19, perlindungan sosial dan pengendalian inflasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial.
3. Mekanisme penyaluran DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah yang langsung ke masing-masing SD dan SMP. Pada APBD Kota Bukittinggi untuk negeri dianggarkan di kegiatan belanja operasional terkait dan swasta dianggarkan pada Belanja Hibah pos Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

4. Mekanisme penyaluran DAK Non Fisik - Bantuan Operasional PAUD yang langsung ke masing-masing PAUD. Pada APBD Kota Bukittinggi untuk negeri dianggarkan di kegiatan belanja operasional terkait dan swasta dianggarkan pada Belanja Hibah pos Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi.

Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Mengacu pada capaian sampai dengan tahun 2021 dan mengakomodir arahan yang tertuang pada Pemutakhiran RKP Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 maka dilakukan penyesuaian terhadap target indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Perubahan Target Makro Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022

| No | URAIAN | CAPAIAN | | | | | TARGET | |
|----|----------------------------------|---------|-------|-------|--------|-------|-----------------|---------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | RKPD Tahun 2022 | Perubahan RKPD Tahun 2022 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,08 | 6,02 | 5,88 | (1,74) | 3,61 | 3,00 | 4,23 |
| 2 | Tingkat Inflasi (%) | 1,37 | 2,99 | 1,31 | 2,02 | 1,69 | 2,90 | 2,90 |
| 3 | Indeks Gini | 0,313 | 0,337 | 0,267 | 0,265 | 0,286 | 0,264 | 0,264 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6,75 | 6,32 | 6,00 | 6,01 | 6,98 | 4,59 | 4,69 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 6,94 | 7,24 | 6,20 | 7,51 | 6,09 | 7,16 | 6,25 |
| 6 | Indeks Pembangunan Manusia | 79,11 | 79,80 | 80,11 | 80,71 | 80,58 | 81,14 | 81,14 |

Tumbuhnya ekonomi Kota Bukittinggi ke angka 3,61 persen tahun 2021 menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi telah berhasil lebih cepat dari pada yang ditargetkan sebelumnya, sehingga target awal pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 3,00 persen perlu dikoreksi dengan menyesuaikan perubahan target ekonomi nasional pada pemutakhiran RKP Tahun 2022 dan Perubahan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 menjadi 4,23 persen.

Begitu juga dengan penyesuaian target tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, target capaian tingkat pengangguran yang ditetapkan pada tahun 2022 perlu dikoreksi atas capaian tahun 2021 menjadi 6,25 dan target capaian tingkat kemiskinan yang terlalu optimis dikoreksi berdasarkan capaian dan perubahan target nasional dan provinsi menjadi 4,69 persen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD

dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pendapatan, belanja dan juga pembiayaan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 telah digambarkan kerangka pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian telah dioperasionalkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022. Selanjutnya pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini, setelah melalui evaluasi terhadap APBD pada tahun berjalan terjadi beberapa perubahan terhadap target pendapatan, perubahan belanja dan juga pembiayaan.

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- 3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan target pendapatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Perubahan Target Pendapatan Tahun Anggaran 2022

| NO | URAIAN | TARGET | | SELISIH |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 717.647.532.987,00 | 706.442.102.795,00 | (11.205.430.192,00) |
| 04.01 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 139.976.857.262,00 | 130.007.723.401,00 | (9.969.133.861,00) |
| 04.01.01 | Pajak Daerah | 50.549.852.262,00 | 50.019.852.262,00 | (530.000.000,00) |
| 04.01.02 | Retribusi Daerah | 55.190.619.000,00 | 45.409.034.000,00 | (9.781.585.000,00) |
| 04.01.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.505.000.000,00 | 7.505.000.000,00 | - |
| 04.01.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 26.731.386.000,00 | 27.073.837.139,00 | 342.451.139,00 |
| 04.02 | PENDAPATAN TRANSFER | 577.670.675.725,00 | 576.434.379.394,00 | (1.236.296.331,00) |
| 04.02.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 547.804.286.317,00 | 541.958.240.857,00 | (5.846.045.460,00) |
| 04.02.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 29.866.389.408,00 | 34.476.138.537,00 | 4.609.749.129,00 |
| 04.03 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | - | - |
| 04.03.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | - | - | - |

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2022 yang dominan didasari oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan, dimana terjadi pengurangan sebesar Rp11.205.430.192,00 atau 1,56% dari target awal sebesar Rp717.647.532.987,00 menjadi Rp706.442.102.795,00. Target pendapatan daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sebesar Rp9.969.133.861,00 yang berasal dari penurunan target Pajak Daerah sebesar Rp530.000.000,00, penurunan target Retribusi Daerah sebesar Rp9.781.585.000,00, dan penambahan pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp342.451.139,00.

Penurunan target pajak daerah berasal dari penurunan beberapa uraian target pajak daerah sebagai berikut:

- a. Pajak rumah penginapan dan sejenisnya, mengalami penurunan sebesar Rp200.000.000,00 dari target awal Rp350.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00 yang disebabkan karena beberapa penginapan tidak beroperasi dan tidak ada penambahan objek pajak baru pada golongan ini.
- b. Pajak reklame papan/megatron, dan videotron mengalami penurunan sebesar Rp100.000.000,00 dari target awal RKPD sebesar Rp900.000.000,00 menjadi Rp800.000.000,00 yang disebabkan karena penyesuaian atas realisasi dan tidak adanya penambahan objek pajak baru.
- c. Pajak air tanah mengalami penurunan target sebesar Rp230.000.000,00 dari Rp300.000.000,00 menjadi Rp70.000.000,00 yang disebabkan karena target awal dihitung berdasarkan usulan yang ada pada Ranperwako tentang tarif pajak air tanah yang mengacu pada Peraturan Gubernur tentang tarif pajak air tanah, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka pembahasan Ranperwako Kota Bukittinggi tentang tarif pajak air tanah ditunda oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penurunan target retribusi daerah pada perubahan RKPD tahun 2022 berasal dari penyesuaian beberapa uraian target retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Penurunan target retribusi pelayanan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp349.136.000,00 dari target awal sebesar Rp1.550.000.000,00 menjadi Rp1.200.864.000,00
- b. Pengurangan retribusi pada Dinas Perhubungan dari target awal sebesar Rp3.724.619.000,00 menjadi Rp2.491.670.000,00 atau sebesar Rp1.232.949.000,00 yang berasal dari penurunan retribusi penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp619.257.000,00,

Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp72.146.000,00, retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebesar Rp533.716.000,00, dan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum Rp7.830.000,00.

- c. Pengurangan target retribusi daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp13.115.500.000,00 dari target awal sebesar Rp27.345.000.000,00 menjadi Rp14.229.500.000,00. Penurunan target retribusi daerah pada SKPD ini berasal dari pengurangan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan/kebersihan sebesar Rp150.000.000,00, retribusi pelayanan pasar sebesar Rp212.500.000,00, retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp3.000.000,00, retribusi jasa usaha sebesar Rp13.250.000.000,00. Sedangkan untuk retribusi penyediaan penyedotan kakus mengalami kenaikan target sebesar Rp500.000.000,00
- d. Retribusi daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja mengalami penurunan target sebesar Rp570.000.000,00 dari Rp820.000.000,00 menjadi Rp250.000.000,00
- e. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan satu-satunya SKPD pengelola PAD yang mengalami kenaikan target capaian pada perubahan RKPD tahun 2022 dari target awal sebesar Rp20.220.000.000,00 menjadi Rp26.000.000.000,00 atau mengalami kenaikan target sebesar Rp5.780.000.000,00, yang bersumber dari retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- f. Penurunan target retribusi pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp150.000.000,00 yang berasal dari pengurangan retribusi daerah pada pelayanan rumah potong hewan.
- g. Penurunan target retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp144.000.000,00 yang berasal dari pengurangan retribusi daerah pada retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Pada komponen dana transfer terjadi penurunan target pendapatan sebesar Rp1.236.296.331,00,00 atau 0,21% dari target semula sebesar Rp577.670.675.725,00 menjadi Rp576.434.379.394,00.

Penurunan terjadi karena adanya:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:
 - 1) Pemotongan DAU (P3K Guru) sebesar Rp3.539.197.900,00
 - 2) Pemotongan DAU Sisa DAK Non Fisik 2021 sebesar Rp1.123.847.560,00
 - 3) Pemotongan DAU (Covid) sebesar Rp1.183.000.000,00
- b. Kurang salur DBH Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp4.609.749.129,00

2. Belanja Daerah

Secara umum, belanja daerah Kota Bukittinggi pada Perubahan RKPD Tahun 2022 berkurang sebesar Rp2.307.830.894,00 dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp842.475.552.719,00 sehingga menjadi Rp840.167.721.825,00.

Daftar berikut merupakan gambaran kebijakan perubahan Belanja Tahun Anggaran 2022 sesuai Perubahan KUA Tahun 2022, yaitu:

Tabel 2.1.3
Perubahan Rencana Belanja Tahun Anggaran 2022

| No | URAIAN | JUMLAH PAGU | | |
|-------|---|-----------------|--------------------|---|
| | | RKPD 2022 Rp | APBD 2022 Rp | Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2022 |
| 01.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan | 257.292.097.351 | 185.266.674.371,00 | 185.777.374.981,00 |
| 01.02 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | 112.707.172.196 | 106.108.638.856,00 | 114.604.044.215,00 |
| 01.03 | Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 183.495.017.897 | 86.608.499.943,00 | 66.351.697.769,00 |
| 01.04 | Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 27.424.001.400 | 17.830.766.377,00 | 17.347.122.047,00 |
| 01.05 | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 43.979.441.751 | 31.724.475.866,00 | 33.394.454.195,00 |
| 01.06 | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | 30.815.672.523 | 6.654.609.514,00 | 7.344.363.614,00 |
| 02.07 | Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja | 1.367.673.010 | 499.735.184,00 | 687.444.384,00 |
| 02.08 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 9.246.124.166 | 7.381.917.593,00 | 7.533.083.739,00 |
| 02.09 | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan | 11.284.343.975 | 9.915.873.750,00 | 10.250.535.738,00 |
| 02.10 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | 648.185.254 | 484.152.910,00 | 559.638.165,00 |
| 02.11 | Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup | 70.082.744.068 | 46.073.641.256,00 | 43.902.233.429,00 |
| 02.12 | Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6.966.260.838 | 5.563.716.786,00 | 6.078.620.326,00 |
| 02.14 | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.271.756.304 | 3.648.084.260,00 | 3.622.458.736,00 |
| 02.15 | Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan | 51.370.450.273 | 17.646.954.081,00 | 19.407.333.748,00 |
| 02.17 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi | 17.359.837.295 | 9.755.195.295,00 | 10.064.190.618,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | dan Informatika | | | |
| 02.18 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 10.813.745.327 | 12.957.420.326,00 | 12.143.895.873,00 |
| 02.19 | Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal | 14.415.647.565 | 11.009.888.669,00 | 10.836.425.374,00 |
| 02.20 | Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga | 49.279.734.292 | 9.499.436.600,00 | 7.184.410.940,00 |
| 02.21 | Urusan Pemerintahan Bidang Statistik | 465.600.000 | 63.520.600,00 | 59.680.600,00 |
| 02.22 | Urusan Pemerintahan Bidang Persandian | 130.000.000 | 85.683.000,00 | 80.193.000,00 |
| 02.23 | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | 5.576.625.582 | 3.731.157.668,00 | 3.746.723.086,00 |
| 02.24 | Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan | 11.579.826.865 | 6.425.093.332,00 | 6.793.993.582,00 |
| 03.25 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan | 1.798.684.150 | 742.049.640,00 | 641.158.140,00 |
| 03.26 | Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan | 2.052.000.000 | 1.470.161.250,00 | 1.511.126.652,00 |
| 03.27 | Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata | 150.535.039.859 | 27.449.779.650,00 | 28.324.122.822,00 |
| 03.30 | Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian | 17.707.213.400 | 2.793.151.764,00 | 2.779.502.913,00 |
| 03.31 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan | 40.718.264.500 | 16.375.751.307,00 | 15.011.205.389,00 |
| 04.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian | 3.454.432.466 | 987.232.520,00 | 1.242.591.520,00 |
| 04.02 | Sekretariat Daerah | 80.407.672.840 | 63.205.909.781,00 | 75.889.287.774,00 |
| 05.01 | Sekretariat DPRD | 42.362.764.025 | 35.826.590.617,00 | 40.222.313.571,00 |
| 05.03 | Perencanaan | 8.453.969.092 | 6.227.258.194,00 | 6.543.197.037,00 |
| 05.04 | Keuangan | 34.655.071.807 | 42.821.319.103,00 | 32.797.525.090 |
| 05.05 | Kepegawaian | 9.052.228.759 | 5.812.846.716,00 | 6.376.400.462,00 |
| 06.01 | Pendidikan dan Pelatihan | 2.236.412.840 | 1.368.957.000,00 | 992.864.536,00 |
| 07.01 | Penelitian dan Pengembangan | 2.270.000.000 | 344.081.000,00 | 377.871.000,00 |
| 01.01 | Inspektorat Daerah | 7.950.491.593 | 7.391.803.112,00 | 7.681.802.877,00 |
| 01.02 | Kecamatan | 81.318.779.569 | 44.028.497.729,00 | 46.006.237.738,00 |
| 01.03 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 7.109.334.900 | 6.695.027.099,00 | 6.000.596.145 |
| TOTAL | | 1.410.654.317.732 | 842.475.552.719,00 | 840.167.721.825,00 |

3. Pembiayaan Daerah

Pada sisi pembiayaan daerah juga terjadi perubahan, dari sisi penerimaan pembiayaan, yang merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Perubahan RKPD terhadap pembiayaan daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.4
Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

| NO | URAIAN | TARGET | |
|------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | | APBD 2022 | PERUBAHAN 2022 |
| 6 | PEMBIAYAAN | 124.828.019.732,00 | 122.987.559.855,00 |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Daerah | 134.828.019.732,00 | 132.987.559.855,00 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 134.828.019.732,00 | 132.987.559.855,00 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| 6.2.1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |

Pembiayaan daerah Kota Bukittinggi pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 mengalami pengurangan sebesar Rp1.840.459.877,00. Pengurangan terjadi pada penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.840.459.877,00 berupa perhitungan Silpa Tahun Anggaran sebelumnya yang awalnya ditargetkan sebesar Rp134.828.019.732,00, setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ditemui Silpa Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp132.987.559.855,00

Perubahan rencana kebijakan keuangan di atas sangat mempertimbangkan kondisi keuangan daerah Kota Bukittinggi yang banyak dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, maka Kebijakan Keuangan Daerah pada Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022, adalah:

1. Penyesuaian Pendapatan Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021;
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kondisi penanganan Pandemi Covid-19 dengan tetap memperhitungkan target secara optimis.
3. Penyesuaian Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada Perubahan APBD dengan tetap memprioritaskan belanja pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, penanganan pandemi Covid-19 serta upaya penanganan dampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19;
4. Penyesuaian penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara optimal, maka dukungan pendanaan daerah dan penetapan anggaran belanja daerah harus disusun secara terukur dalam bentuk input, output dan outcome yang mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Arah dan kebijakan umum daerah dijabarkan dalam rincian:

1. Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan,
2. Arah kebijakan pendapatan daerah,
3. Arah kebijakan belanja daerah, dan

4. Arah dan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Dimana kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada Perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2022, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah disusun didasarkan pada hasil evaluasi capaian Rencana Kerja Triwulan I dan II tahun 2022. Selain itu perubahan program dan kegiatan juga terjadi akibat dilakukannya pergeseran anggaran dan penyesuaian pendapatan dan pembiayaan daerah, baik yang bersumber dari dana transfer maupun pendapatan asli daerah. Evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, perubahan target kinerja, kelompok sasaran, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan dan adanya kegiatan baru yang harus ditampung dalam perubahan RKPD tahun 2022.

Pada perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2022 terdapat penambahan 1 (satu) program yang berada di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya juga terdapat penambahan kegiatan baru pada Perubahan RKPD ini sebanyak 13 kegiatan yang tersebar pada 9 (sembilan) SKPD, dan terdapat penambahan 64 subkegiatan baru yang tersebar pada sebagian SKPD.

Selain penambahan subkegiatan baru, pada Perubahan RKPD ini juga terjadi pengurangan baik kegiatan maupun subkegiatan. Pengurangan subkegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2022 terdapat pada Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) kegiatan dan Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) kegiatan. Sedangkan, pengurangan subkegiatan terdapat pada:

1. Dinas Pendidikan sebanyak 2 (dua) subkegiatan;
2. Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) subkegiatan;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 1 subkegiatan;
4. Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) subkegiatan; dan

5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 2 (dua) subkegiatan.

Secara lebih detail terkait rekapitulasi perhadap perubahan program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Kota Bukittinggi tahun 2022 disajikan pada tabel 5.1 pada Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Rencana program dan kegiatan dalam perubahan RKPD tahun 2022 yang disertai dengan pagu indikatif, tolok ukur kinerja dirinci menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan urusan pemerintahan daerah. Pada prinsipnya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan perubahannya masih berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (*money follow program*).

Oleh sebab itu arah dan guna menyusun perhitungan keuangan daerah dan kerangka pendanaan selain memperhatikan proyeksi kerangka ekonomi makro juga perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi APBD beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kebijakan penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 antara lain:

1. Kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD termasuk pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas yang tertuang dalam keputusan akhir dalam Nota Keuangan Presiden.
2. Kebijakan Belanja Pemerintah, yang lebih mengutamakan dana transfer ke daerah dan dana desa sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal dibandingkan belanja kementerian/lembaga. Hal ini diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas nasional.
3. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun 2022.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 14 (empat belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 4 (empat) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) unsur pendukung urusan pemerintahan, penunjang dan pengawas pemerintahan.

2.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalan dan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi daerah itu sendiri.

Fokus pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi dari berbagai sektor yang terkait dengan retribusi. Sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berlandaskan atas:
 - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Bukittinggi serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 serta memperhatikan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - c. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- d. Penganggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan memperhatikan potensi penerimaan tahun 2022 serta memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
 - e. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang bersumber dari penjualan terhadap aset pemerintah daerah yang tidak layak/ telah habis umur ekonomisnya. Dianggarkan pada kelompok lain-lain PAD yang sah, objek belanja Daerah Yang Tidak Dipisahkan.
 - f. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, Obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - g. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
 - h. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
 - i. Pendapatan dana BLUD untuk 7 Puskesmas (Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional) dan untuk dan 1 RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD adalah mempedomani Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
2. Dana Transfer yang merupakan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.
Penerimaan dari dana perimbangan selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun antara lain dari Dana Alokasi Umum serta diikuti dengan penerimaan dari dana DAK serta Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Dalam dana transfer ini juga terdapat pendapatan yang bersumber dari Dana BOS.
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Pendapatan Pengembalian Hibah dari SKPD Pengelola Hibah.

Berikut ini Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 yaitu:

Tabel 2.1.2.1

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 s.d Tahun 2023

| Rekening | Uraian | Jumlah | | | | |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Realisasi Th 2019 (Rp) | Realisasi Th 2020 (Rp) | Realisasi Th 2021 (Rp) | Realisasi Tahun 2022 (Rp) | Proyeksi Tahun 2023 (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 734,106,696,896.05 | 689.222.919.606.62 | 688,635,054,453.61 | 566.698.718.558 | 601.121.014.936 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 111,896,596,611.05 | 84,087,662,500.62 | 91,786,288,185.61 | 102.965.517.150 | 137.387.813.528 |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 45,204,119,636.50 | 35,857,033,610.00 | 40,765,025,893.00 | 33.822.110.062 | 40.887.300.000 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 33,125,468,779.75 | 21,833,603,342.00 | 27,401,880,331.00 | 19.582.339.000 | 29.241.339.000 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 6,071,910,132.00 | 6,331,956,191.00 | 5,482,031,608.00 | 5.795.000.000 | 6.084.750.000 |
| 1.1.4 | Lain-Lain PAD yang sah | 27,495,098,062.80 | 20,065,069,357.62 | 18,137,350,353.61 | 43.766.068.088 | 61.174.424.528 |
| 1.2. | Pendapatan Transfer | 607,228,300,285.00 | 585.094.336.619.00 | 593,762,137,738.00 | 463.733.201.408 | 463.733.201.408 |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 26,013,224,000.00 | 56,127,080,000.00 | 561,068,880,504.00 | 433.866.812.000 | 433.866.812.000 |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah | 29,151,151,773.00 | 25,459,097,709.00 | 32,675,257,234.00 | 29.866.389.408 | 29.866.389.408 |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 14,981,800,000.00 | 20,040,920,487.00 | 3,086,628,530.00 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Hibah | - | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Dana Darurat | - | - | - | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 14,981,800,000.00 | 20,040,920,487.00 | 3,086,628,530.00 | 0 | 0 |

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 2022

2.1.3. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2022, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.

3. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kota Bukittinggi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut secara bertahap.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Mendukung pencapaian visi dan misi kota melalui penganggaran yang lebih besar pada potensi utama kota, yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan serta pelayanan kesehatan.
6. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kota Bukittinggi.
7. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
8. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, perpakiran, terminal dan lainnya dengan tetap memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
9. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berimbang dan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari output yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2022 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Berikut Realisasi Belanja Tahun 2019 s.d. 2022 dan Proyeksi Belanja Tahun 2023.

Tabel 2.1.3.1
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d 2022 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023

| No | Uraian | Jumlah | | | | |
|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Realisasi Th 2019 (Rp) | Realisasi Th 2020 (Rp) | Realisasi Th 2021 (Rp) | Realisasi Th 2022 (Rp) | Proyeksi Th 2023 (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 5.1. | Belanja Operasi | 528.444.715.821,46 | 515.151.376.193,13 | 555.168.586.260,11 | 617.128.939.288,00 | 621.885.162.769,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 362.187.753.715,82 | 360.230.406.322,57 | 296.371.615.565,25 | 340.225.290.322,00 | 348.730.922.570,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 150.771.650.352,64 | 116.356.834.683,56 | 236.689.663.677,43 | 276.393.649.966,00 | 283.553.240.200,00 |
| 5.1.3 | Belanja Bunga | - | - | - | - | - |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | - | - | - | - | - |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 12.651.151.753,00 | 37.699.077.187,00 | 21.027.307.017,43 | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 2.834.160.000,00 | 865.058.000,00 | 1.080.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Modal | 187.986.455.096,79 | 249.317.613.815,34 | 93.038.635.113,35 | 55.780.729.795,00 | 57.012.748.040,00 |
| 5.2.1 | Belanja Modal | 187.986.455.096,79 | 249.317.613.815,34 | 93.038.635.113,35 | 55.780.729.795,00 | 57.012.748.040,00 |
| 5.3. | Belanja Tidak Terduga | 97.094.060,08 | 31.485.489.291,50 | 1.844.107.190,00 | 2.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 97.094.060,08 | 31.485.489.291,50 | 1.844.107.190,00 | 2.000.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| 5.4 | Belanja Transfer | 559.301.924,50 | 706.056.990,00 | - | - | - |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | - | - | - | - | - |
| 5.4.1 | Belanja Bantuan Keuangan | 559.301.924,50 | 706.056.990,00 | - | - | - |

2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan berbagai indikator ekonomi makro yang terjadi di daerah menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, perusahaan dan pasar. Secara umum indikator ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja. Indikator ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan ekonomi.

Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2022 merupakan penjabaran arah dan strategi yang ditempuh pemerintah untuk merespon dinamika perekonomian, dan menjawab tantangan serta isu strategis untuk mendukung pencapaian target sasaran pemerintah.

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi dan keuangan daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah. Sasaran kinerja tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2022.

Arah kebijakan ekonomi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang merupakan upaya yang diprioritaskan untuk pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan dirumuskan pada arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kunjungan wisata belanja
2. Mengembangkan variasi dan kualitas wisata kuliner
3. Memperluas akses kesempatan berusaha
4. Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro
5. Meningkatkan kinerja usaha koperasi
6. Mengembangkan sarana dan prasarana pasar
7. Mengembangkan SDM Pengelola Pasar
8. Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen
9. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD
10. Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD
11. Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro
12. Menciptakan kawasan *One Village One Product*
13. Meningkatkan kualitas layanan investasi

14. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau
15. Mengembangkan pasar dengan bangunan *vertical*
16. Meningkatkan penataan pasar dan pedagang
17. Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan
18. Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya
19. Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum
20. Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak
21. Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan
22. Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik
23. Meningkatkan cakupan sanitasi layak
24. Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial
25. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja
26. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin
27. Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas.

Banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka membuka peluang usaha dan menciptakan iklim berusaha yang hangat dalam rangka pencapaian Misi 1 yaitu Hebat dalam Sektor Peningkatan Ekonomi kerakyatan. Salah satu upaya telah diinisiasi langsung oleh Walikota Bukittinggi H. Erman Safar, SH, dengan sistem kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan BPRS Jam Gadang (Perseroda), telah diproses dan dipersiapkan sejak tahun 2021 berupa program “Tabungan Utsman” untuk tahun 2022.

Tabungan Utsman adalah program Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membantu masyarakat di Kota Bukittinggi pasca pandemi covid-19 untuk mendapatkan modal dari perbankan dengan margin/ bunga yang ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro.

Pada APBD 2022 pos Belanja Subsidi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi anggaran yang disediakan untuk pembayaran subsidi margin ini adalah Rp1.575.000.000,00. Oleh karena antusiasnya masyarakat dan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan program tersebut, maka Tabungan Utsman pada Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 dana anggarannya ditambah Rp1.000.000.000,00 sehingga anggaran tahun 2022 menjadi Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan sudah terealisasi seluruhnya. Masyarakat yang dibantu adalah pelaku usaha yang tidak memiliki agunan

untuk mendapatkan modal dari perbankan serta untuk mengatasi agar pelaku usaha mikro khususnya di Kota Bukittinggi tidak terjerat oleh rentenir.

Sejak kasus Virus Covid-19 merebak di awal tahun 2020 maka secara drastis mempengaruhi kondisi perekonomian Kota seperti terlihat pada tabel di bawah ini bahwa kondisi makro Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2019 - 2020 cenderung menurun. Untuk tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan berbagai program kegiatan terkait penanganan Virus Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah kota seperti program pemberian Vaksin ke berbagai lapisan masyarakat dan program terkait pemulihan ekonomi lainnya.

Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata yang sangat bergantung pada aktivitas kepariwisataan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Kelumpuhan satu sektor berefek domino pada sektor lain sehingga terjadi ketimpangan pendapatan, munculnya penduduk miskin baru, kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Berikut indikator makro ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2017-2020 dan proyeksi tahun 2020- 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bukittinggi

| No | Indikator Makro Ekonomi | Realisasi Tahun | | | | | Proyeksi Tahun | |
|----|----------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022* |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 6,05 | 6,08 | 6,02 | 5,88 | -174 | 2,67 | 3,00 |
| 2 | Gini Ratio | 0,34 | 0,31 | 0,34 | 0,27 | 0,265 | 0,262 | 0,264 |
| 3 | Tingkat Kemiskinan | 5,48 | 5,35 | 4,92 | 4,60 | 4,54 | 4,59 | 4,48 |
| 4 | Laju Inflasi | 6,04 | 3,93 | 1,37 | 2,99 | 1,31 | 2,02 | 3,93 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (5) | 79,11 | 6,94 | 6,59 | 6,14 | 5,51 | 7,35 | 7,18 |
| 6 | Indek Pembangunan Manusia (%) | 79,11 | 79,80 | 80,11 | 80,71 | 80,58 | 80,86 | 81,14 |

Sumber Data: 2016 s.d 2020 Data BPS Kota Bukittinggi

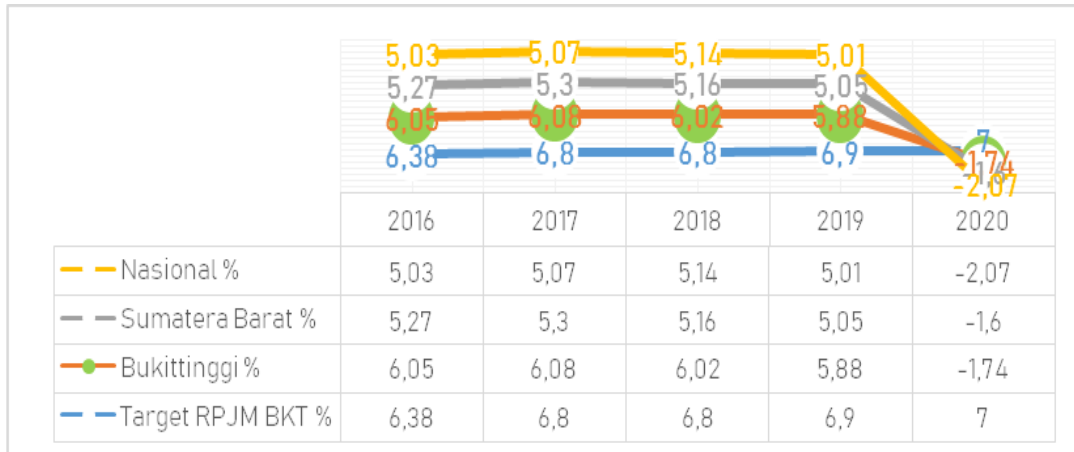
2021 s.d 2022: Angka Proyeksi

2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 namun masih di atas pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2.1.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar dan Nasional serta Target Kota Bukittinggi Tahun 2016 S/D 2020



Sumber : BPS Kota Bukittinggi Tahun 2021

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2019 yaitu diatas angka 5,88 % namun masih di atas pertumbuhan rata-rata kota-kota dan dibawah Kota Payakumbuh dan diatas pertumbuhan provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun pada tahun 2020 pada masa pandemic Covid-19 Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sangat rendah sekali dibawah Kota Padang, hal ini karena secara rata-rata, pertumbuhan tertinggi pada pembentukan PDRB Kota Bukittinggi berada pada kategori perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi dan sektor penggerak ini merupakan sektor yang sangat terdampak oleh Pandemi Covid-19.

Tahun 2022, berdasarkan Bukittinggi Dalam Angka 2023 yang data dasarnya adalah tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPS Wilayah Kota Bukittinggi, perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota lain di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi adalah 4,68% yang semula ditargetkan hanya 3% pada RKPD dan KUA Tahun 2022 yang berada pada urutan ketiga setelah Kabupaten Padang Pariaman 6,87%, Kabupaten Mentawai 4,94%.

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Dalam rangka pembangunan daerah, khususnya bidang ekonomi, salah satu yang menjadi indikator guna melihat perkembangan perekonomian adalah data PDRB (*Product Domestik Regional Bruto*). PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun. PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang

dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari sumbangan masing-masing sektor ekonomi atau subsektor ekonomi yang ikut berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah, juga sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi sektoralnya.

Sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi Tahun 2022 ditargetkan untuk sektor Pariwisata dengan target capaian adalah 3%. Semua kabupaten kota di Sumatera Barat mengalami percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kota Bukittinggi tahun 2021 mengalami percepatan sebesar 3,61 persen.

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ditinjau menurut kontribusi setiap lapangan usahanya, tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 33,17 persen; transportasi dan pergudangan sebesar 10,22 persen; dan informasi dan komunikasi sebesar 7,36 persen. Total ketiganya mencapai 50,75 persen dari Total PDRB Kota Bukittinggi tahun 2021.

Perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi sendiri dihitung dari nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi mencapai 3,61 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,32 persen, diikuti Kategori Jasa Lainnya sebesar 6,01 persen. Mulai dibukanya objek wisata berbayar, kondisi pandemi yang berangsur membaik dan faktor emosional masyarakat sehingga muncul revenge travel (balas dendam melakukan perjalanan) menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, Kota Bukittinggi berhasil mencapai 4,68%.

2.2.3. Gini Rasio

Gini rasio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Untuk melihat distribusi pendapatan dapat dilihat dari 3 ukuran yaitu distribusi ukuran (distribusi pendapatan perseorangan) atau distribusi ukuran pendapatan, Kurva Lorentz dan Indeks Gini/Koefisien Gini. Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan suatu ukuran pemerataan atau ketimpangan distribusi pengeluaran. Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1 dengan klasifikasi antara lain : Ketimpangan Rendah (g 0,3), Ketimpangan Sedang (0,3 g 0,5), Ketimpangan Tinggi (g0,5).

Koefisien Gini yang rendah menunjukkan lebih sama distribusi pendapatan atau kekayaan, sedangkan Koefisien Gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi. “0” berkaitan dengan kesetaraan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis), dan “1” berkaitan dengan ketidaksetaraan sempurna (dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol).

Gini Rasio Tahun 2021 ditarget 0,262 turun 0,003 dari tahun 2020 dan terealisasi sebesar 0,286. Dengan harapan upaya pemulihan ekonomi meningkatkan pendapatan penduduk dari semua sektor yang membangun PDRB Kota maka diprediksi Tahun 2022 kembali naik 0,002 karena melihat kondisi akhir 2021 angka sebaran Covid-19 kembali meningkat. Menurut Data BPS, untuk realisasi ratio gini pada tahun 2022 adalah 0,317.

Jika dilihat dari rasio pertumbuhan dari tahun 2021 dan tahun 2022 antara gini rasio dan pertumbuhan ekonomi, rasio gini Kota Bukittinggi turun sebesar 0,031 meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, sedangkan untuk nasional, rasio gini membaik dengan pertumbuhan cukup baik. Perbandingan Gini Rasio Kota Bukittinggi dengan provinsi dan nasional Tahun 2017 s/d 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.1
Indeks Gini Kota Bukittinggi Tahun 2017 s.d. 2022

| Indeks Gini | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Target Daerah | 0,330 | 0,320 | 0,310 | 0,300 | 0,300 | 0,284 |
| Kota Bukittinggi | 0,313 | 0,337 | 0,267 | 0,265 | 0,286 | 0,317 |
| Sumatera Barat | 0,318 | 0,321 | 0,306 | 0,305 | 0,306 | 0,306 |
| Indonesia | 0,391 | 0,384 | 0,380 | 0,385 | 0,381 | 0,381 |

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, Prov. Sumbar, Pusat 2022

2.2.4. Laju Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) /Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kemampuan daya beli yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi akan mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Dalam pengukuran IHK oleh BPS, data harga yang disajikan meliputi, harga eceran beras di beberapa kota, harga eceran nasional beberapa jenis barang, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju inflasi, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), Indeks harga yang diterima dan dibayar petani, Harga Produsen Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kering Panen (GKP), dan Gabah Kualitas Rendah di tingkat petani dan penggilingan, Indeks Harga Produsen (IHI).

Rata-rata harga eceran beras diolah dari survei mingguan Badan Pusat Statistik (BPS) di beberapa kota. Karena beragamnya kualitas beras di masing-masing kota, maka harga yang disajikan adalah rata-rata harga beras tertimbang.

IHK merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak Januari 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225–462 komoditas.

IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan yang diterima akan menurun dan sebaliknya untuk deflasi.

Menurut Data Statistik Daerah Tahun 2022 yang data dasarnya adalah tahun 2021, laju inflasi tercatat 1,69% lebih rendah dari tahun 2020 yang mengalami inflasi 2,02%.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2022 secara umum mengalami kenaikan yang mempengaruhi inflasi. Di Kota Bukittinggi pada bulan Desember 2022 terjadi inflasi yoy sebesar 7,76 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,59 pada bulan Desember 2021 menjadi 114,86 pada bulan Desember 2022. Tingkat inflasi

mtm Desember 2022 Kota Bukittinggi sebesar 0,66 persen dan tingkat inflasi ytd sebesar 7,76 persen.

Inflasi year on year (yoy) Kota Bukittinggi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 indeks kelompok pengeluaran yang mempengaruhi inflasi di Kota Bukittinggi yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 10,05 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,94 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,74 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,89 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,00 persen; kelompok transportasi sebesar 18,95 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,58 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 3,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,44 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 6,45 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,17 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Desember 2022 antara lain: bensin, beras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, telur ayam ras, sewa rumah, cabai merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, nasi dengan lauk, kue kering berminyak, tarif kendaraan roda 2 online, kontrak rumah, angkutan antar kota, rokok kretek, rokok putih, bahan bakar rumah tangga, tahu mentah, daging sapi dan beberapa komoditas lainnya.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm pada Desember 2022 antara lain: daging ayam ras, cabai merah, petai, emas perhiasan, pisang, tomat, beras, ikan nila dan beberapa komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga pada bulan Desember 2022 terhadap November 2022 antara lain: bawang merah, jeruk, ikan asin sepat, minyak goreng, bawang putih dan beberapa komoditas lainnya.

Tingkat inflasi bulanan *month to month (mtm)* (Desember 2022 terhadap November 2022) Kota Bukittinggi sebesar 0,66 persen dan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 7,76 persen jauh melebihi target tertinggi Pemerintah Kota yang diperkirakan mencapai 4%.

2.2.5. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah besaran rata-rata pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan

(GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. 18.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya

Garis kemiskinan, gambaran penduduk miskin, kedalaman serta keparahan kemiskinan Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi selama 7 tahun terakhir dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.2.5.1 Penduduk Miskin Kota Bukittinggi

| Indikator Kemiskinan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Garis Kemiskinan (Rupiah) | 420.478 | 475.755 | 459.371 | 475.755 | 519.470 | 540,457 | 570,032 |
| Persentase Penduduk Miskin (Persen) | 5,48 | 5,35 | 4,92 | 4,60 | 4,54 | 5,14 | 4,46 |
| Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | 6,81 | 6,75 | 6,32 | 6,00 | 6,01 | 6,98 | 6,160 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 1,05 | 0,57 | 0,39 | 0,56 | 0,56 | 0,80 | 0,83 |
| Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) | 0,30 | 0,10 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,19 | 0,24 |

Sumber: BPS Sumbar

Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, namun naik pada tahun 2021 dan kembali turun pada tahun 2022, hal ini diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan sampai angka 4,46 pada tahun 2022, namun demikian penurunan ini masih jauh dibawah target pemerintah daerah. Walaupun secara jumlah dan persentase berhasil diturunkan, namun dari segi kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa perlu melanjutkan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah yang lebih fokus untuk percepatan penurunan kedalaman dan keparahan penduduk miskin di Kota Bukittinggi pada masa mendatang.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) atau disebut juga *Poverty Gap Index* adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) atau *Poverty Severity Index* adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi sebesar 6,04 % dan tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,57 (per bulan September 2022).

2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Walaupun angka TPT di Kota Bukittinggi tidaklah besar akan tetapi meningkatnya angka TPT dari tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa ini perlu menjadi perhatian agar pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan lebih memberikan stimulan agar tingkat pengangguran bisa menjadi semakin berkurang.

Tabel 2.2.6.1.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2018 s/d 2022

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Kota Bukittinggi | 7,24 | 6,20 | 7,51 | 6,09 | 4,90 |

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2023 Data Dasar 2022

Merujuk kepada data BPS Provinsi Sumatera Barat, angka pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebanyak 4,90 persen mengalami penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2022 adalah angka yang paling rendah. Artinya pada tahun 2022 tersebut program-program pemerintah daerah berhasil menekan angka pengangguran dengan menciptakan iklim usaha yang mendukung serta memfasilitasi modal usaha antara lain dengan program Tabungan Utsman serta membuka ruang-ruang tempat usaha baik *offline* maupun *online*.

Capaian pembangunan ketenagakerjaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi menunjukkan capaian yang optimal. Penyandingan terhadap target daerah memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bukittinggi Tahun 2022 di bawah angka perkiraan yaitu 7,18% yang ditetapkan di RKPD Tahun 2022.

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan

tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (*adjusted*), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perkembangan IPM Kota Bukittinggi dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup di Kota Bukittinggi dinilai sangat memuaskan. Angka IPM Kota Bukittinggi yang selalu meningkat tersebut berada di atas Angka IPM Provinsi Sumatera Barat dan Nasioal yang setiap tahunnya juga selalu meningkat.

Pembangunan Manusia sebagai indikasi adanya pembangunan melalui proses yang cukup panjang dan diukur melalui besaran angka indeks, yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertambahan penduduk secara kuantitas diikuti oleh pembangunan dari sisi kualitas agar tercipta SDM yang sejahtera, kompeten dan setara dengan SDM dari wilayah lain.

Untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya digunakan angka IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu:

1. Umur panjang dan hidup sehat.
2. Pengetahuan.
3. Standar hidup layak.

Dimensi tersebut diturunkan dalam 4 (empat) indikator yang dapat diukur yaitu: Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Komoditas pengeluaran perkapita. Keempat dimensi serta angka IPM Kota Bukittinggi kurun waktu 2015-2022 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.7.1
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2015– 2022

| Tahun | Angka Harapan Hidup (Tahun) | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah) | IPM |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 2015 | Bkt: 73,52 | Bkt: 10,79 | Bkt: 14,95 | Bkt: 12.330 | Bkt: 78,72 |
| | Sbr: 68,66 | Sbr: 8,42 | Sbr: 13,60 | Sbr: 9.803 | Sbr: 69,98 |
| | Ind: 70,78 | Ind: 7,84 | Ind: 12,55 | Ind: 10.150 | Ind: 69,55 |
| 2016 | Bkt: 73,60 | Bkt: 10,98 | Bkt: 14,93 | Bkt: 12.475 | Bkt: 79,11 |
| | Sbr: 68,73 | Sbr: 8,59 | Sbr: 13,79 | Sbr: 10.126 | Sbr: 70,73 |
| | Ind: 70,90 | Ind: 7,95 | Ind: 12,72 | Ind: 10.420 | Ind: 70,18 |

| Tahun | Angka Harapan Hidup (Tahun) | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah) | IPM |
|-------|--|--------------------------------------|--|---|--|
| 2017 | Bkt: 73,69 Sbr: 68,78 Ind: 71,06 | Bkt: 11,30 Sbr: 8,72 Ind: 8,10 | Bkt: 14,94 Sbr: 13,94 Ind: 12,85 | Bkt: 12.816 Sbr: 10.306 Ind: 10.664 | Bkt: 79,91 Sbr: 71,24 Ind: 70,81 |
| 2018 | Bkt: 73,91 Sbr: 69,01 Ind: 71,20 | Bkt: 11,31 Sbr: 8,76 Ind: 8,17 | Bkt: 14,95 Sbr: 13,95 Ind: 12,91 | Bkt: 13.035 Sbr: 10.634 Ind: 11.059 | Bkt: 80,11 Sbr: 71,73 Ind: 71,39 |
| 2019 | Bkt: 74,22 Sbr: 69,31 Ind: 71,34 | Bkt: 11,32 Sbr: 8,92 Ind: 8,34 | Bkt: 14,96 Sbr: 14,01 Ind: 12,95 | Bkt: 13.586 Sbr: 10.925 Ind: 11.299 | Bkt: 80,71 Sbr: 72,39 Ind: 71,92 |
| 2020 | Bkt: 74,38 Sbr: 69,47 Ind: 71,47 | Bkt: 11,33 Sbr: 8,49 Ind: 8,48 | Bkt: 14,97 Sbr: 14,02 Ind: 12,98 | Bkt: 13.282 Sbr: 10.733 Ind: 11.010 | Bkt: 80,58 Sbr: 72,28 Ind: 71,94 |
| 2021 | Bkt: 74,50 Sbr: 69,59 Ind: 71,47 | Bkt: 11,34 Sbr: 7,07 Ind: 8,48 | Bkt: 14,98 Sbr: 14,09 Ind: 12,98 | Bkt: 13.331 Sbr: 10.790 Ind: 11.156 | Bkt: 80,70 Sbr: 72,65 Ind: 72,29 |
| 2022 | Bkt: 74,82 Sbr: 69,90 Ind: 71,47 | Bkt: 11,63 Sbr: 9,18 Ind: 8,48 | Bkt: 14,99 Sbr: 14,10 Ind: 12,98 | Bkt: 13.633 Sbr: 11.130 Ind: 11.479 | Bkt: 81,42 Sbr: 73,26 Ind: 72,91 |

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

Hasilnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022. Yaitu dari 80,58 tahun 2020, menjadi 80,70 pada tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,12 serta akhirnya meningkat cukup signifikan tahun 2022 menjadi 81,42 atau mengalami peningkatan sebesar 0,72.

2.3. Penetapan APBD, Pergeseran serta Perubahan APBD APBD Tahun 2022

Setelah ditetapkannya APBD Tahun 2022, maka terdapat 3 (tiga) kali pergeseran APBD, 1 (satu) kali perubahan APBD dan 1 (satu) kali pergeseran setelah perubahan APBD, sebagaimana kami cantumkan di bawah ini:

1. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022
2. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.
3. Perwako Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwako Bukittinggi No 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 31 Januari 2022. Pergeseran dilakukan untuk mengakomodir antara lain pergeseran rekening untuk gaji tenaga kontrak.
4. Perwako Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Perwako Bukittinggi No 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 31 Maret 2022 untuk antara lain mengakomodir Bantuan Keuangan Pariwisata dari Provinsi untuk Kota Bukittinggi.

5. Perwako Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Perwako Bukittinggi No 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 4 Agustus 2022 untuk mengakomodir antara lain BKK pendidikan dari Bukittinggi ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 yang dominan adalah untuk mengakomodir perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran.
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022/9 Desember 2022 untuk mengakomodir kekurangan gaji Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bukittinggi.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target kinerja keuangan dalam rangka merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektifitas kegiatan sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan secara umum beberapa hal terkait dengan realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan pelaksanaan anggaran Tahun 2022.

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 pada APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp714.157.721.650,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 pada APBD Perubahan ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00. Komposisi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp(122.987.559.855,00) yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah.

Dari target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 tersebut, dapat diuraikan realisasinya secara ringkas sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1.1
Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan Tahun 2021

| URAIAN | Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | Rp | Rp | Rp | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| PENDAPATAN DAERAH - LRA | 714.157.721.650,00 | 698.402.386.323,22 | 684.347.061.146,00 | 688.635.054.453,61 | 9.767.331.869,61 | 0,01 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 136.257.791.456,00 | 130.796.925.183,85 | 92.110.528.556,00 | 91.786.288.185,61 | 39.010.636.998,24 | 0,43 |
| Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 50.269.852.262,00 | 49.570.750.398,00 | 37.070.692.210,00 | 40.765.025.893,00 | 8.805.724.505,00 | 0,22 |
| Pendapatan Retribusi Daerah -LRA | 48.684.034.000,00 | 46.662.398.969,00 | 25.609.269.920,00 | 27.401.880.331,00 | 19.260.518.638,00 | 0,70 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.505.000.000,00 | 6.641.291.925,00 | 5.482.031.608,00 | 5.482.031.608,00 | 1.159.260.317,00 | 0,21 |
| Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 29.798.905.194,00 | 27.922.483.891,85 | 23.948.534.818,00 | 18.137.350.353,61 | 9.785.133.538,24 | 0,54 |
| PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 577.899.930.194,00 | 567.605.461.139,37 | 592.236.532.590,00 | 596.848.766.268,00 | (29.243.305.128,63) | (0,05) |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 543.423.791.657,00 | 532.574.902.562,00 | 562.370.143.182,00 | 561.086.880.504,00 | (28.511.977.942,00) | (0,05) |
| Dana Perimbangan | 543.423.791.657,00 | 532.574.902.562,00 | 516.838.587.182,00 | 515.555.324.504,00 | 17.019.578.058,00 | 0,03 |
| Dana Insentif Daerah (DID) | - | - | 45.531.556.000,00 | 45.531.556.000,00 | (45.531.556.000,00) | (1,00) |
| Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Transfer antar Daerah | 34.476.138.537,00 | 34.812.971.120,00 | 29.866.389.408,00 | 32.675.257.234,00 | 2.137.713.886,00 | 0,07 |
| Pendapatan Bagi Hasil | 34.076.138.537,00 | 34.412.971.120,00 | 29.866.389.408,00 | 32.675.257.234,00 | 1.737.713.886,00 | 0,05 |
| Bantuan Keuangan | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | - | - | 400.000.000,00 | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | 217.587.457,37 | - | 3.086.628.530,00 | (2.869.041.072,63) | (0,93) |
| Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan | - | 217.587.457,37 | - | 3.086.628.530,00 | (2.869.041.072,63) | (0,93) |
| BELANJA DAERAH | 837.145.281.505,00 | 744.059.199.525,66 | 783.759.843.834,00 | 650.051.328.563,46 | 94.007.870.962,20 | 0,14 |
| BELANJA OPERASI | 675.422.845.486,00 | 611.262.131.931,10 | 642.962.609.606,00 | 555.168.586.260,11 | 56.093.545.670,99 | 0,10 |

| URAIAN | Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | Rp | Rp | Rp | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| Belanja Pegawai | 325.444.707.669,00 | 301.384.096.541,66 | 322.664.639.155,00 | 296.371.615.565,25 | 5.012.480.976,41 | 0,02 |
| Belanja Barang dan Jasa | 301.912.139.291,00 | 264.544.058.412,28 | 295.562.732.925,00 | 236.689.663.677,43 | 27.854.394.734,85 | 0,12 |
| Belanja Subsidi | 3.385.520.000,00 | 2.910.989.266,00 | - | - | 2.910.989.266,00 | |
| Belanja Hibah | 42.425.478.526,00 | 40.192.987.711,16 | 23.655.237.526,00 | 21.027.307.017,43 | 19.165.680.693,73 | 0,91 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.255.000.000,00 | 2.230.000.000,00 | 1.080.000.000,00 | 1.080.000.000,00 | 1.150.000.000,00 | 1,06 |
| BELANJA MODAL | 147.955.769.352,00 | 124.005.630.244,56 | 123.125.748.792,00 | 93.038.635.113,35 | 30.966.995.131,21 | 0,33 |
| Belanja Modal Tanah | - | - | - | - | - | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 60.312.518.236,00 | 48.131.479.720,00 | 49.999.944.467,00 | 42.231.774.799,80 | 5.899.704.920,20 | 0,14 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 33.140.307.759,00 | 25.739.508.574,06 | 29.277.125.124,00 | 23.949.425.057,53 | 1.790.083.516,53 | 0,07 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 49.760.228.857,00 | 45.500.951.384,50 | 40.886.820.001,00 | 24.162.072.116,02 | 21.338.879.268,48 | 0,88 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.742.714.500,00 | 4.633.690.566,00 | 2.961.859.200,00 | 2.695.363.140,00 | 1.938.327.426,00 | 0,72 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | | | - | - | - | |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.000.000.000,00 | 271.437.350,00 | 17.671.485.436,00 | 1.844.107.190,00 | (1.572.669.840,00) | (0,85) |
| Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | 271.437.350,00 | 17.671.485.436,00 | 1.844.107.190,00 | (1.572.669.840,00) | (0,85) |
| BELANJA TRANSFER | 8.766.666.667,00 | 8.520.000.000,00 | - | - | 8.520.000.000,00 | |
| BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 8.766.666.667,00 | 8.520.000.000,00 | - | - | 8.520.000.000,00 | |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | - | - | | | - | |
| JUMLAH BELANJA | 837.145.281.505,00 | 744.059.199.525,66 | 783.759.843.834,00 | 650.051.328.563,46 | 94.007.870.962,20 | 0,14 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | (122.987.559.855,00) | 45.656.813.202,44 | (99.412.782.688,00) | 38.583.725.890,15 | (84.240.539.092,59) | (2,18) |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | - | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 132.987.559.855,00 | 132.979.000.890,90 | 99.412.782.688,00 | 94.403.833.965,75 | 38.575.166.925,15 | 0,41 |
| SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | 132.987.559.855,00 | 132.979.000.890,90 | 99.386.026.235,00 | 94.377.077.512,75 | 38.601.923.378,15 | 0,41 |

| URAIAN | Anggaran 2022 | Realisasi 2022 | Anggaran 2021 | Realisasi 2021 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | Rp | Rp | Rp | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| Pencairan dana Cadangan | - | - | 26.756.453,00 | 26.756.453,00 | (26.756.453,00) | (1,00) |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | 10.000.000.000,00 | |
| Penyetoran Modal Daerah | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | 10.000.000.000,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 122.987.559.855,00 | 122.979.000.890,90 | 99.412.782.688,00 | 94.403.833.965,75 | 28.575.166.925,15 | 0,30 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | - | 77.322.187.688,46 | - | 132.987.559.855,90 | (55.665.372.167,44) | (0,42) |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan daerah tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp698.402.386.323,22 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp714.157.721.650,00 atau 97,79%. Dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp684.347.061.146,00 direalisasikan sebesar Rp688.635.054.453,61 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp9.767.331.869,61 atau 0,01%. Pencapaian target pendapatan tersebut meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp130.796.925.183,85 dari target yang ditetapkan sebesar Rp136.257.791.456,00 atau 95,99% dari anggarannya dan mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar Rp39.016.304.498,24 atau 0,43% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.
- b. Pendapatan Transfer dengan realisasi mencapai 98,18% atau sebesar Rp567.387.873.682,00 dari anggaran sebesar Rp577.899.930.194,00 dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp593.762.137.738,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp592.236.532.990,00 terdapat penurunan sebesar Rp(26.374.264.056,00) atau (0,04)% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target pendapatan sebesar Rp0 direalisasikan sebesar Rp217.587.457,37, dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat penurunan realisasi (0,93)% atau sebesar Rp(2.869.041.072,63).

Pendapatan Daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah yang ada pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp837.145.281.505,00 dengan realisasi sebesar Rp744.059.199.525,66 atau menyerap anggaran sebesar 88,88%.

Tabel 3.1.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

| Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Anggaran 2021 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| BELANJA OPERASI | 675.422.845.486,00 | 611.262.131.931,10 | 642.962.609.606,00 | 555.168.586.260,11 | 56.093.545.670,99 | 0,10 |
| Belanja Pegawai | 325.444.707.669,00 | 301.384.096.541,66 | 322.664.639.155,00 | 296.371.615.565,25 | 5.012.480.976,41 | 0,02 |
| Belanja Barang dan Jasa | 301.912.139.291,00 | 264.544.058.412,28 | 295.562.732.925,00 | 236.689.663.677,43 | 27.854.394.734,85 | 0,12 |
| Belanja Subsidi | 3.385.520.000,00 | 2.910.989.266,00 | - | - | 2.910.989.266,00 | - |
| Belanja Hibah | 42.425.478.526,00 | 40.192.987.711,16 | 23.655.237.526,00 | 21.027.307.017,43 | 19.165.680.693,73 | 0,91 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.255.000.000,00 | 2.230.000.000,00 | 1.080.000.000,00 | 1.080.000.000,00 | 1.150.000.000,00 | 1,06 |
| BELANJA MODAL | 147.955.769.352,00 | 124.005.630.244,56 | 123.125.748.792,00 | 93.038.635.113,35 | 30.966.995.131,21 | 0,33 |
| Belanja Modal Tanah | - | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 60.312.518.236,00 | 48.131.479.720,00 | 49.999.944.467,00 | 42.231.774.799,80 | 5.899.704.920,20 | 0,14 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 33.140.307.759,00 | 25.739.508.574,06 | 29.277.125.124,00 | 23.949.425.057,53 | 1.790.083.516,53 | 0,07 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 49.760.228.857,00 | 45.500.951.384,50 | 40.886.820.001,00 | 24.162.072.116,02 | 21.338.879.268,48 | 0,88 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.742.714.500,00 | 4.633.690.566,00 | 2.961.859.200,00 | 2.695.363.140,00 | 1.938.327.426,00 | 0,72 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.000.000.000,00 | 271.437.350,00 | 17.671.485.436,00 | 1.844.107.190,00 | (1.572.669.840,00) | (85,00) |
| Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | 271.437.350,00 | 17.671.485.436,00 | 1.844.107.190,00 | (1.572.669.840,00) | (85,00) |
| BELANJA TRANSFER | 8.766.666.667,00 | 8.520.000.000,00 | - | - | 8.520.000.000,00 | - |
| BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 8.766.666.667,00 | 8.520.000.000,00 | - | - | 8.520.000.000,00 | - |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BELANJA | 837.145.281.505,00 | 744.059.199.525,66 | 783.759.843.834,00 | 650.051.328.563,46 | 94.007.870.962,20 | 14,46 |

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum Belanja Daerah tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp744.059.199.525,66 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00 atau 88,88% dari anggaran. Pencapaian target belanja tersebut meliputi :

- a. Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp611.262.131.191.525,66 dari target yang ditetapkan sebesar Rp675.422.845.486,00 atau 90,50% dari anggarannya dan mengalami kenaikan sebesar Rp56.093.545.670,99 atau 0,10% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.
- b. Belanja Modal dengan realisasi mencapai 83,81% atau sebesar Rp124.005.630.244,56 dari anggaran sebesar Rp147.955.769.352,00 terdapat kenaikan sebesar Rp30.966.995.131,21 atau 0,33 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021.
- c. Belanja Tidak Terduga dari Anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp271.437.350,0 atau mencapai 5,43%. Dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat penurunan realisasi (0,85)% atau sebesar Rp(1.572.669.840,00).

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan di atas terjadi *defisit* anggaran sebesar Rp(122.987.559.855,00) yang ditutup dengan Pembiayaan Daerah sebesar Rp122.987.559.855,00. Dari target Pembiayaan Daerah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp122.987.559.855,00. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp132.987.559.855,00 dengan realisasi sebesar Rp132.979.000.890,90 atau 99,99% dari anggarannya.

Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100% dari anggarannya. Realisasi penerimaan ini sepenuhnya berasal dari SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp132.979.000.890,90.

Dibandingkan dengan tahun 2021 dari anggaran Pembiayaan sebesar Rp99.412.782.688,00 direalisasikan sebesar Rp94.403.833.965,75 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 0,30% atau Rp28.583.725.890,15. Terdiri dari kenaikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp38.583.725.890,15 atau sebesar 0,41 %.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah maka defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp(122.987.559.855,00) namun dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp(45.663.834.026,44), dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp 122.979.000.890,90 maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp77.322.187.688,46.

Tabel 3.1.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2022 dan Tahun 2021

| URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Anggaran 2021 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| Surplus (Defisit) | (122.987.559.855,00) | (45.656.813.202,44) | (99.412.782.688,00) | 38.583.725.890,15 | (84.240.539.092,59) | (2,18) |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | - | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 132.987.559.855,00 | 132.979.000.890,90 | 99.412.782.688,00 | 94.403.833.965,75 | 38.575.166.925,15 | 0,41 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 132.987.559.855,00 | 132.979.000.890,90 | 99.386.026.235,00 | 94.377.077.512,75 | 38.601.923.378,15 | 0,41 |
| Pencairan Dana Cadangan | - | - | 26.756.453,00 | 26.756.453,00 | (26.756.453,00) | (1,00) |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | 10.000.000.000,00 | |
| Penyertaan Modal Daerah | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | - | - | 10.000.000.000,00 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 122.987.559.855,00 | 122.979.000.890,90 | 99.412.782.688,00 | 94.403.833.965,75 | 28.575.166.925,15 | 0,30 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | - | 77.322.187.688,46 | - | 132.987.559.855,90 | (55.665.372.167,44) | (0,42) |

3.2. HAMBATAN/KENDALA DAN FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun kendala dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun 2022 antara lain adalah :

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kota Bukittinggi, khususnya pada Penerimaan Retribusi Daerah.
2. Secara umum target Pendapatan Daerah telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, namun masih ada yang belum mencapai seratus persen, seperti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya 88,49%.
3. Pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih yang disebabkan oleh Pandemi *Covid-19* yang dialami semenjak tahun 2020 yang lalu.
4. Pelaksanaan belanja, secara khusus untuk Belanja Operasi terealisasi sebesar 90,50% dari target, dan Belanja Modal terealisasi sebesar 83,81% secara umum disebabkan kurang optimalnya belanja modal gedung dan bangunan, belanja barang dan jasa yang disebabkan adanya kegiatan yang gagal dilaksanakan pada tahun 2022.
5. Masih kurang maksimalnya pola perencanaan pada SKPD, sehingga dalam tahun berjalan diperlukan penyesuaian Anggaran Belanja pada kegiatan yang mengakibatkan tertundanya realisasi anggaran.

Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 ini antara lain adalah :

1. Perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
3. Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
4. Dengan meningkatnya penyebaran informasi terkait pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan kesadaran akan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin baik apalagi di masa pandemi.

BAB IV

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

4.1. STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan laporan gabungan/ konsolidasian seluruh entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang biasa disebut juga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas/ Badan/ Satuan/ Kantor/ Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD termasuk didalamnya fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang melekat pada OPD Badan Keuangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2021 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi menggabungkan Laporan Realisasi Anggaran 28 (dua puluh delapan) SKPD yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Surplus/Defisit
- d. Pembiayaan
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL memuat laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA atau SiKPA serta Saldo Anggaran Lebih Akhir secara komparatif posisi periode tahun 2022 dengan periode sebelumnya tahun 2021 yaitu pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal.
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
- c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

- e. Lain-lain.
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca Daerah

Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas sampai dengan tanggal tertentu, Neraca disajikan komparatif antara tahun 2022 dan tahun sebelumnya 2021. Neraca Daerah Kota Bukittinggi memuat informasi-informasi akun-akun Aset yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya, akun Kewajiban yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, dan Ekuitas. Pemerintah Kota Bukittinggi mengklasifikasikan Neraca dalam struktur akun sebagai berikut:

- a. Aset
 - 1) Aset Lancar.
 - 2) Investasi Jangka Panjang.
 - 3) Aset Tetap.
 - 4) Dana Cadangan.
 - 5) Aset Lainnya.
- b. Kewajiban
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang.
- c. Ekuitas

4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban yang surplus atau defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional adalah menggambarkan laporan operasional riil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Kegiatan Operasional.
 - Pendapatan
 - Beban
 - Surplus/Defisit Operasi
- b. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - Surplus Non Operasional
 - Defisit Non Operasional

- Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa .
- c. Pos Luar Biasa
 - Pendapatan Luar biasa
 - Beban Luar Biasa
- d. Surplus/ Defisit LO

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan/ pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran kas tanpa melalui rekening kas umum daerah namun dianggarkan pada APBD maupun yang bersumber dari transitoris (non anggaran).

Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yakni tahun 2022 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, laporan arus kas disajikan arus kas masuk dan arus kas keluar secara komparatif antara tahun berjalan dan tahun yang lalu yang terdiri dari:

- a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - Arus Masuk Kas
 - Arus Keluar Kas
 - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - Arus Masuk Kas
 - Arus Keluar Kas
 - c. Arus Kas Aktivitas Pendanaan
 - Arus Masuk Kas
 - Arus Keluar Kas
 - d. Arus Kas Aktivitas Transitoris
 - Arus Masuk Kas
 - Arus Keluar Kas
 - e. Kenaikan/ Penurunan Kas
 - f. Saldo Awal Kas
 - g. Saldo Akhir Kas
- #### 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal.
 - b. Surplus/Defisit LO
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
 - Koreksi Nilai Persediaan
 - Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - Lain-lain
 - d. Ekuitas Akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi umum entitas dan pelaporan keuangan, kondisi ekonomi makro Kota Bukittinggi, penjelasan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan berupa aturan-aturan serta kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai pos-pos akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, LPSAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan LPE dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam seluruh unsur LKPD, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagaimana sistematika penulisan yang telah dijabarkan pada BAB I tentang sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
2. Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro
3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
4. Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
5. Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
6. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
7. Penutup

4.2. KEBIJAKAN KONVERSI

Penyusunan APBD Kota Bukittinggi dan penyusunan Laporan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun dan disajikan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penganggaran.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 telah mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.

Pengaturan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur APBD dan akun/ rekening laporan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dicabut tanggal 27 Desember 2021 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2022.

Demikian juga saldo akhir LKPD tahun 2021, untuk menjadikannya saldo awal tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi telah memverifikasi akun yang dimapping sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut.

4.3. ASUMSI DASAR AKUNTANSI

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

4.3.1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

4.3.2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

4.3.3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.4. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Para pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan manajemen lainnya.

4.5. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

4.5.1. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.5.2. Prinsip Nilai Historis

Prinsip nilai historis pada aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, sementara itu untuk kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.5.3. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

4.5.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode bulanan, triwulanan, dan semesteran digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.5.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang

lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

4.6. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayar kembali. Ekuitas dana diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.7. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN LAPORAN KONSOLIDASIAN

4.7.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

A. Relevan

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
3. Tepat waktu.
4. Lengkap.

B. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur.
2. Dapat diverifikasi (*verifiability*).
3. Netralitas.

C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

D. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4.7.2. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan--alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Materialitas.
2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat.
3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif.

4.7.3. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati dalam penyusunan standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan. Berikut adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi
2. Prinsip nilai historis
3. Prinsip realisasi
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
5. Prinsip periodisitas
6. Prinsip konsistensi
7. Prinsip pengungkapan lengkap
8. Prinsip penyajian wajar.

4.7.4. Jenis dan Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK, CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Dengan demikian laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
3. Neraca.
4. Laporan Operasional (LO).
5. Laporan Arus Kas (LAK).
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4.7.5. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/ peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas antara lain:

1. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi
2. Keandalan Pengukuran

4.8. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.8.1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Akuntansi Anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu:

4.8.2. Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembagian Pendapatan terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

4.8.3. Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung Gaji, SP2D Langsung untuk Belanja Tidak Langsung, SP2D Langsung Barang dan Jasa termasuk belanja Modal dan Transfer.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh fungsi Perbendaharaan;
3. Untuk badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Bagi belanja atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui belanja jika telah ada pengesahan pertanggungjawaban belanja tersebut oleh BUD/Kuasa BUD.

4.8.4. Akuntansi Pembiayaan

4.8.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan dibayar Kembali pada masa yang akan datang antara lain berasal dari penerimaan SiLPA/SiKPA penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. .

Pengukuran dan pencatatan penerimaan pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan potongan dan sebagainya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

4.8.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dengan maksud akan diterima kembali di masa yang akan datang. Pengeluaran

Pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembentukan/penambahan Investasi/ penyertaan modal pemerintah, pembentukan dana cadangan

Pengukuran dan pencatatan pengeluaran pembiayaan adalah dengan menggunakan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/biaya) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan.

4.8.5. Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar adalah kelompok pendapatan yang bersumber dari APBD, yaitu penerimaan pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada APBD Tahun berjalan, baik yang angkanya dapat diestimasi maupun yang tidak. Pada APBD anggaran pendapatan dapat bernilai "0" (nol) karena tidak semua akun penerimaan pendapatan bisa diberikan target. Atas kelompok APBD tersebut, terdapat lima kelompok pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO.
2. Pendapatan Transfer-LO.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.
4. Surplus Non Operasional-LO.
5. Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pengakuan Pendapatan LO terdiri dari :

1. Dengan Penetapan.
2. Tanpa Penetapan.
3. Hasil Eksekusi Pengadilan/ Jaminan

Penetapan yang dimaksud adalah ketika secara jabatan ditetapkan hak pemerintah atas pendapatan. Penetapan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Kurang Bayar/Lebih Bayar atas dokumen yang ditetapkan serta dokumen yang disetarakan dengan penetapan. Tanpa penetapan yang dimaksud adalah penerimaan kas atas pendapatan tanpa didahului oleh penetapan.

Pendapatan dari hasil eksekusi pengadilan/ jaminan adalah pendapatan yang merupakan hak Kota Bukittinggi melalui penetapan oleh pengadilan atas sidang kasus tertentu, sementara hasil eksekusi jaminan merupakan pendapatan yang menjadi hak Kota Bukittinggi disebabkan eksekusi terhadap jaminan pelaksanaan maupun pemeliharaan akibat kondisi tertentu dari perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah diakui pada saat sebagai berikut:

1. Timbulnya hak (piutang) pemerintah daerah atas dana transfer tersebut sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan peraturan penetapan yang bersifat definitif, sedangkan peraturan/ketentuan yang bersifat alokasi belum bisa dijadikan dasar untuk pengakuan hak Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Namun adakalanya penetapan yang berjudul definitif belum dapat diakui sebagai pendapatan jika pemerintah membiasakan penerbitan penetapan kurang/lebih salur. Ketetapan kurang/lebih salur lebih kuat kedudukannya daripada penetapan definitif.

Pada awal penyaluran dari ketentuan tentang alokasi, pendapatan transfer tersebut akan dicatat sebesar realisasinya sebagai kas ke kas daerah atau kas ke bendahara yang telah ditetapkan. Sementara Piutang atau Utang atas Kurang Bayar dan Lebih Bayar akan diakui pada saat terbitnya ketentuan definitif atas Kurang Bayar maupun Lebih Bayar penyalurannya.

Selain pencatatan terhadap kurang/lebih salur, Pemerintah Kota Bukittinggi juga memberlakukan pencatatan dana treasury yang difasilitasi oleh pemerintah pusat ke akun kelompok aset lainnya berdasarkan arahan pihak Pemerintah Pusat. Arahan kebijakan dari pemerintah pusat mungkin berbeda dari lainnya, namun kelengkapan dokumen dan substansi suatu kejadian dan transaksi tetap dipertimbangkan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan PAD dan Pendapatan Transfer, yaitu antara lain: Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Pendapatan hibah diakui pada saat dokumen pengajuan pencairan dana hibah diterbitkan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

Hibah yang berupa barang juga dicatat sebagai pendapatan operasional sebesar nilai hibah pada Berita Acara Hibah atau yang setara. Barangnya diakui sebagai persediaan atau aset apabila nilai perolehan hibah tersebut memenuhi kriteria perolehan dan nilai rupiahnya telah melebihi batasan minimum biaya yang dapat dikapitalisasi bagi barang yang berkategori aset tetap..

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar), dan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan telah diterima.

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika telah diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

4.8.6. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu (contohnya: penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud).

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban persediaan dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode Pendekatan Beban

Dengan metode pendekatan beban setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/ dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin.

2. Metode Pendekatan Aset

Dengan metode pendekatan aset setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode pendekatan beban dalam pencatatan persediaannya demi memudahkan pengukuran, pencatatan maupun penyajian nilai persediaan.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun dilakukan penghitungan penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah oleh bidang/seksi pengelola pendapatan masing-masing SKPD. Berdasarkan kertas kerja penyisihan piutang tersebut PPK SKPD membuat bukti memorial atas penyisihan piutang tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi.

4.8.7. ASET

4.8.7.1 Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Daerah.

A. Kas dari Transaksi Pendapatan

Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau.
2. Diterima di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

B. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) yang selanjutnya dengan Ganti Uang (GU), pembayaran langsung (LS) baik terhadap belanja pegawai, barang dan jasa maupun belanja modal. Pengeluaran kas untuk belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan daerah yang berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan
2. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special*

account), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu kejadiannya diantara.

- 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali, atau
- 2) Telah terjadi pengeluaran (disbursed) oleh pemberi pinjaman (lender) atas beban pinjaman pemerintah.

D. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang.
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang.
3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/ pemerintah daerah, menyebabkan pertambahan investasi pada sisi aset.
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan pertambahan dana cadangan.

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.8.7.2 Piutang

Piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. Mengenai teknis penggolongan dan penyisihan piutang berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi yang berlaku.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan berdasarkan dokumen:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Beban Dibayar Dimuka diakui untuk jumlah nilai belanja sewa atau semacamnya yang belum menjadi beban pada akhir tahun anggaran.

Untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
2. Jumlah piutang dapat diukur.
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan dokumen belanjanya dengan memisahkan beban di tahun berjalan dengan beban di tahun-tahun berikutnya. Jumlah yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah jumlah yang menjadi beban di tahun-tahun berikutnya, karena jumlah tersebut masih berupa hak dan belum dapat dieksekusi oleh pihak lain menjadi kewajiban tahun berjalan Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.7.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.8.7.3.1 Pengakuan Persediaan

Pengakuan persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara periodik (*periodical system*) dengan pendekatan beban untuk semua SKPD dan untuk semua jenis persediaannya, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan harus dicatat dengan metode *perpetual* untuk akun persediaan tertentu.

Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan sistem periodik dengan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, artinya setiap adanya perolehan terhadap persediaan, baik yang berasal dari belanja maupun sebab lainnya, SKPD akan mencatatnya sebagai beban, bukan persediaan. Nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal pada akhir periode laporan neraca SKPD pada setiap unit kerja yang ada di SKPD. Untuk masa transisi,

perhitungan fisik dilakukan terbatas terhadap persediaan barang yang ada pada unit penyimpanan barang saja.

Hasil inventarisasi fisik pada penyimpanan barang harus menggambarkan nilai akhir persediaan dalam artian saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi jumlah pemakaian persediaan dan dikalikan nilai harga per unit dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

Stock opname dilakukan oleh masing-masing SKPD dan direkapitulasi oleh bendahara/ pengurus barang SKPD. Terhadap laporan tersebut PPK SKPD akan mencatat nilai persediaan yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap beban persediaan. Pada saat itulah Pemerintah Kota Bukittinggi telah mendapatkan potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal terhadap persediaan dan bebannya.

4.8.7.3.2 Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban dalam mencatat persediaan, setiap perolehan persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Dengan menggunakan sistem periodik dan pendekatan beban tersebut, nilai persediaan diakui pada saat telah selesainya dilakukan penghitungan fisik (*stock opname*) terhadap persediaan yang tinggal diunit penyimpanan barang pada akhir periode laporan neraca SKPD dan beban persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan sehingga nilai beban persediaan yang muncul di Laporan Operasional yang disampaikan adalah sebesar nilai persediaan yang terpakai/habis.

Hasil inventarisasi fisik hendaknya juga menggambarkan jumlah beban persediaan pada akhir periode pelaporan, yaitu sebesar persediaan yang telah terpakai/habis. Jumlah beban persediaan tersebut berasal dari jumlah saldo awal persediaan ditambah jumlah perolehan persediaan tahun berjalan dikurangi saldo akhir persediaan dan dikalikan nilai harga per unit.

4.8.7.3.3 Selisih Persediaan

Selisih persediaan sering kali terjadi antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.8.7.4 Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemko Bukittinggi sampai saat ini berupa saham pada kelompok Investasi permanen untuk peruntukan jangka panjang dan dana bergulir yang berada pada kelompok investasi non permanen.

4.8.7.4.1 Pengakuan investasi

Pengakuan Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas ditambah dengan penambahan dan pengurangan nilai baik akibat setoran Pemerintah Kota Bukittinggi maupun perkembangan dan penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dana oleh penerima investasi (*investee*) yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (*reliable*).

Pengeluaran kas tersebut untuk memperoleh investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir (*bruto*) yang secara periodik, Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan penyesuaian terhadap nilai Dana Bergulir yang berasal dari tambahan kucuran dana bergulir dari Pemerintah Kota Bukittinggi maupun penambahan yang berasal dari perkembangan dana bergulir oleh masyarakat. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) merupakan nilai dana bergulir yang dikurangi penyisihan nilai dana bergulir tersebut.

Teknis penyisihan dana bergulir adalah sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.7.4.2 Pengakuan Hasil Investasi

Pengakuan hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah, sedangkan dividen dalam bentuk saham tidak mengurangi nilai investasi.

4.8.7.5 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah daerah, seperti bahan/material dan perlengkapan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih dari 12 Bulan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

2. Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak

kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

3. Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

4. Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

5. Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang Telah Ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) dari aset tetap. Ketentuan tentang batas jumlah biaya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi. Batasan tersebut adalah Peralatan dan Mesin besar sama dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Gedung dan Bangunan besar sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Jalan, Irigasi dan Jaringan besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah), Aset Tetap Lainnya besar sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk kelompok lainnya adalah besar sama dengan Rp1,00 (satu rupiah). Terhadap nilai perolehan dan/atau pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak memenuhi batas jumlah biaya diakui sebagai *extracomtable*.

Tabel 4.8.7.1
Kapitalisasi Aset Tetap

| No. | Aset Tetap | Batas Kapitalisasi (Rp) | Keterangan |
|-----|------------------------------|-------------------------|------------|
| 1. | Tanah | 1,00 | |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 500.000,00 | |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 10.000.000,00 | |
| 4. | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 1,00 | |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 50.000,00 | |

4.8.7.5.1 Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual.
4. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
5. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

- c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e) Tanah yang digunakan/ dipakai oleh instansi pemerintah yang masih berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.8.7.5.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin, pengakuannya dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini, misalnya ditandai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.8.7.5.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi. Biaya perolehan yang telah diukur besarnya harus sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi yang dijelaskan pada bagian pengukuran kebijakan ini.

4.8.7.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) serta telah siap dipakai. Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

4.8.7.5.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

4.8.7.5.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal.
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat didistribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh SKPD maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*forcemajeur*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*forcemajeur* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
6. Apabila ada pemutusan kontrak pekerjaan, dimana Berita Acara Serah Terima (BAST) dan atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen) dan aset tetap tersebut belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya, maka akan diakui sebagai KDP. Sebaliknya apabila aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya, meskipun fisiknya belum selesai 100% (seratus persen), maka dapat diakui sebagai aset tetap.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.8.7.5.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan diakui pada saat penghitungan tambahan nilai penyusutan dari suatu aset tetap menurut teknis penyusutan yang dilakukan sesuai aturan dan kebijakan yang dipedomani.

Nilai penyusutan aset tetap setiap tahunnya dihitung dengan membandingkan antara nilai perolehan aset tetap dengan umur manfaat aset tetap yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dengan menggunakan formula sebagai berikut;

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan Aset}}{\text{Umur Manfaat Aset}}$$

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus dengan formula yang sama dengan formula penyusutan aset tetap.

4.8.7.5.8 Aset Tetap Renovasi

Aset tetap renovasi, pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis dari aset tetap, misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap sesuai kelompoknya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Adapun batas materialitas biaya renovasi yang memenuhi butir 1 dan 2 di atas adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Perolehan Aset Tetap, selain Aset Tetap Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/ donasi. Pengakuan aset tetap melalui pembelian didahului dengan pengakuan pada belanja modal.

4.8.7.6 Aset Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan.

4.8.7.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang telah diusulkan untuk dihapus karena telah rusak berat dan hilang (non operasional), serta aset yang nilai perolehannya di bawah nilai batas kapitalisasi untuk aset tetap.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut;

4.8.7.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

2. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian

tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

4.8.7.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga–Sewa.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah–BGS (*Build, Operate, Transfer–BOT*).

Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam Bangun Guna Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4. Bangun Serah Guna–BSG (*Build, Transfer, Operate–BTO*).

Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4.8.7.3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB dapat diakui sebagai suatu entitas harus dapat dibuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang disetarakan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan

pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran *setelah* perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat didistribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas.
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. *Pengakuan awal sebesar biaya perolehan* untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. *Nilai wajar* digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB. Aset Tak Berwujud (ATB) terdiri atas:

1. Goodwill.
2. Royalti.
3. Lisensi.
4. Hak Paten.
5. Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Pengakuan untuk Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut :

A. Perlakuan Khusus untuk *Software* Komputer

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan *software* tersebut.

b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, *koding*, *meng-instal ke hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.

c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai.

b. Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

2. Perolehan *software* secara eksternal

Ada beberapa kondisi untuk *software* yang diperoleh secara eksternal, yaitu:

- a. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.
- b. Untuk *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri, namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- c. Untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap *software* yang diperoleh secara *eksternal* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah;

- a. Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja.
- b. Apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*.
- c. Berapa lama izin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.

3. Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Meningkatkan fungsi *software*.
- b. Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

B. Perlakuan untuk Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai aset.

1. Pengakuan yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

- a. Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/ riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/ aktivitas internal, pemerintah tidak/ belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

b. Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika dan hanya jika*, pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* di bawah ini, yaitu adanya:

- 1) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan.
- 2) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- 3) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut.
- 4) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang.
- 5) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut.
- 6) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang didistribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/ kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/ pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/ pengembangan tersebut.
- b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut.
- c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain.
- d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

2. Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktik di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian

yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas, maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan, hal ini merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan.

Pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

C. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan

(*intangible aset – work in progress*) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

4.8.7.4. Aset Lain-Lain

Kelompok Aset Lain-lain adalah:

1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-Lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain; dan
2. Aset Tetap yang masih dalam proses serah terima kepada pihak ketiga.

4.8.8. KEWAJIBAN

4.8.8.1. Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Kewajiban terdiri dari 2 (dua) yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.8.8.2. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada setelah tanggal pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

A. Timbulnya Kewajiban

Secara umum kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*),

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK dan kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*),

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*),

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban jangka pendek biasanya terdiri atas:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- b. Utang Bunga
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d. Pendapatan Diterima di Muka.
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat:

1. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah.
2. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah.
3. Pada saat jatuh kewajiban pemerintah daerah untuk membayar kewajiban yang timbul dari belanja dan/ atau kelebihan pendapatan atau dari sebab yang lain.

4.8.8.3. Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan *kurs* tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

A. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain diakhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Contoh:

1. Utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Utang pajak, yaitu kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

C. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

D. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan yang diterima dengan manfaat yang telah ditentukan oleh Pihak Ketiga.

E. Utang Belanja

Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

F. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 (dua belas bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran kewajiban jangka pendek lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Contoh:

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.
2. Penerimaan pembayaran Dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Dari sifatnya, utang juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan.

Utang yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan.

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah dan dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo, sedangkan jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.8.9. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akan bertambah bila terdapat pendapatan-LO, yang merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan, yang dapat menurunkan nilai ekuitas adalah beban, yang merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Selisih antara pendapatan-LO dan beban merupakan Surplus Defisit – LO yang akan ditutupkan (menambah) nilai ekuitas pada 1 (satu) periode akuntansi. Ekuitas juga dipengaruhi oleh dampak kebijakan dan kejadian luar biasa yang dinilai menjadi:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap.
2. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap.
3. Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain.
4. Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang.
6. Koreksi Nilai Aset Lain-lain.
7. Koreksi Nilai Persediaan.
8. Selisih Revaluasi Aset Tetap.
9. Koreksi atas Pendapatan.
10. Koreksi Lain-lain.

Mengenai klasifikasi dan keterangan lebih lengkap Kebijakan Akuntansi terhadap akun-akun Laporan Keuangan dapat dilihat pada Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi.

4.8.10. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terdapat 8 (delapan) UPTD di Kota Bukittinggi yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu:

Tabel 4.8.10.1. UPTD yang Telah Menerapkan PPK BLUD

| No. | Nama UPTD | Sumber Dana BLUD | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad | Dana Jaminan Kesehatan Nasional | |
| 2 | Puskesmas Guguk Panjang | Dana Jaminan Kesehatan Nasional | |
| 3 | Puskesmas Nilam Sari | Dana Jaminan Kesehatan Nasional | |
| 4 | Puskesmas Mandiangin | Dana Jaminan Kesehatan Nasional | |
| 5 | Puskesmas Gulai Bancah | Dana Jaminan Kesehatan Nasional | |
| 6 | Puskesmas Tigo Baleh | Dana Jaminan Kesehatan Nasional | |
| 7 | Puskesmas Plus Mandiangin | Dana Jaminan Kesehatan Nasional | |
| 8 | Rumah Sakit Umum Daerah | Semua penerimaan UPTD | Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 t tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi |

Dengan diterbitkan dan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, aturan tentang BLUD menjadi lebih jelas dibanding Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 termasuk penyediaan Laporan Keuangan BLUD sebanyak 7 (tujuh) macam sama halnya dengan jenis laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Aturan perundang-undangan sesudahnya menghendaki pemberlakuan PPK BLUD bagi Rumah Sakit Daerah yang baru berdiri. Maka dari itu tanggal 14 Februari 2021 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai UPTD yang mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Sebelumnya, tahun 2016, 7 (tujuh) UPTD Puskesmas telah lebih dahulu melaksanakan PPK BLUD dengan status penuh, yakni dengan dana yang bersumber dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLUD adalah juga entitas pelaporan. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan informasi atau penjelasan mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, ditetapkan dalam Pernyataan SAP (PSAP) 01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan PSAP 02 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus disajikan, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Untuk penjelasan masing-masing LKPD Kota Bukittinggi akan diuraikan satu per satu sebagai berikut :

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang mencakup :

1. Gambaran Anggaran, Realisasi beserta Persentase Pencapaian

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp714.157.721.650,00 dengan realisasi sebesar Rp698.402.386.323,22. Target Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00 dengan realisasi sebesar Rp744.059.199.525,66. Anggaran Belanja Daerah tahun 2022 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Selisih antara Pendapatan dan Belanja adalah Defisit sebesar (Rp45.656.813.202,44). Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Bukittinggi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.1
Ringkasan Laporan Realisasi APBD Tahun 2022

| URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4 (3/2)</i> |
| PENDAPATAN DAERAH – LRA | 714,157,721,650.00 | 698,402,386,323.22 | 97.79 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA | 136,257,791,456.00 | 130,796,925,183.85 | 95.99 |
| Pendapatan Pajak Daerah – LRA | 50,269,852,262.00 | 49,570,750,398.00 | 98.61 |
| Pendapatan Retribusi Daerah – LRA | 48,684,034,000.00 | 46,662,398,969.00 | 95.85 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,505,000,000.00 | 6,641,291,925.00 | 88.49 |
| Lain-lain PAD Yang Sah – LRA | 29,798,905,194.00 | 27,922,483,891.85 | 93.70 |
| PENDAPATAN TRANSFER – LRA | 577,899,930,194.00 | 567,387,873,682.00 | 98.18 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 543,423,791,657.00 | 532,574,902,562.00 | 98.00 |
| Dana Perimbangan | 543,423,791,657.00 | 532,574,902,562.00 | 98.00 |
| Dana Insentif Daerah (DID) | - | - | |
| Pendapatan Transfer antar Daerah | 34,476,138,537.00 | 34,812,971,120.00 | 100.98 |
| Pendapatan Bagi Hasil | 34,076,138,537.00 | 34,412,971,120.00 | 100.99 |
| Bantuan Keuangan | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 100.00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | 217,587,457.37 | 0.00 |
| Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan prundang-undangan | - | 217,587,457.37 | 0.00 |
| BELANJA DAERAH | 837,145,281,505.00 | 744,059,199,525.66 | 88.88 |
| BELANJA OPERASI | 675,422,845,486.00 | 611,262,131,931.10 | 90.50 |
| Belanja Pegawai | 325,444,707,669.00 | 301,384,096,541.66 | 92.61 |
| Belanja Barang dan Jasa | 301,912,139,291.00 | 264,544,058,412.28 | 87.62 |
| Belanja Subsidi | 3,385,520,000.00 | 2,910,989,266.00 | 85.98 |
| Belanja Hibah | 42,425,478,526.00 | 40,192,987,711.16 | 94.74 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2,255,000,000.00 | 2,230,000,000.00 | 98.89 |
| BELANJA MODAL | 147,955,769,352.00 | 124,005,630,244.56 | 83.81 |
| Belanja Modal Tanah | - | - | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 60,312,518,236.00 | 48,131,479,720.00 | 79.80 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 33,140,307,759.00 | 25,739,508,574.06 | 77.67 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 49,760,228,857.00 | 45,500,951,384.50 | 91.44 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4,742,714,500.00 | 4,633,690,566.00 | 97.70 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 5,000,000,000.00 | 271,437,350.00 | 5.43 |
| Belanja Tidak Terduga | 5,000,000,000.00 | 271,437,350.00 | 5.43 |
| BELANJA TRANSFER | | | 97.19 |

| URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4 (3/2)</i> |
| | 8,766,666,667.00 | 8,520,000,000.00 | |
| BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 8,766,666,667.00 | 8,520,000,000.00 | 97.19 |
| Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kab/Kota ke Provinsi | 8,766,666,667.00 | 8,520,000,000.00 | 97.19 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | (122,987,559,855.00) | (45,656,813,202.44) | 37.12 |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 132,987,559,855.00 | 132,979,000,890.90 | 99.99 |
| SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | 132,987,559,855.00 | 132,979,000,890.90 | 99.99 |
| Pencairan dana Cadangan | - | - | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 100.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 100.00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 122,987,559,855.00 | 122,979,000,890.90 | 99.99 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | - | 77,322,187,688.46 | |

2. Penjelasan atas Perbedaan antara Anggaran dan Realisasi

Secara keseluruhan Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp698.402.386.323,22 atau 97,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp714.157.721.650,00. Pencapaian target Pendapatan tersebut terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp130.796.925.183,85 atau 95,99% dari anggaran sebesar Rp136.257.791.456,00
- Pendapatan Transfer dengan realisasi sebesar Rp567.387.873.682,00 atau 98,18 % dari anggaran sebesar Rp577.899.930.194,00 dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar Rp217.587.457,37 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2022 yang direalisasikan sebesar Rp744.059.199.525,66 atau sebesar 88,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp837.145.281.505,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

- Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp611.262.131.931,10 atau 90,50% dari anggaran sebesar Rp675.422.845.486,00.
- Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp124.005.630.244,56 atau 83,81% dari anggaran sebesar Rp147.955.769.352,00.
- Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp271.437.350,00 atau 5,43% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00, dan

d. Belanja Transfer dengan realisasi sebesar Rp8.520.000.000,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp8.766.666.667,00.

Dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2022 diperkirakan terjadi Defisit anggaran sebesar (Rp122.987.559.855,90), namun dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 terdapat defisit sebesar (Rp45.656.813.202,44) atau sebesar 37,12%. Defisit anggaran tahun 2022 dibiayai dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan, berupa SiLPA tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp132.979.000.890,90 atau 99,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp132.987.559.855,90; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan, berupa Penyertaan Modal Daerah terealisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp77.322.187.688,46.

3. Perbandingan dengan Periode yang Lalu

Salah satu kriteria laporan keuangan yang baik adalah laporan tersebut dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka Laporan Realisasi APBD Kota Bukittinggi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2021

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Anggaran 2021 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan / Penurunan Rp | % |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4-6) | 8=(7/6) |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 136.257.791.456,00 | 130.796.925.183,85 | 92.110.528.556,00 | 91.786.288.185,61 | 39.010.636.998,24 | 42,50 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 577.899.930.194,00 | 567.387.873.682,00 | 592.236.532.590,00 | 593.762.137.738,00 | (26.374.264.056,00) | (4,44) |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | - | 217.587.457,37 | - | 3.086.628.530,00 | (2.869.041.072,63) | (92,95) |
| Jumlah Pendapatan Daerah | | 714.157.721.650,00 | 698.402.386.323,22 | 684.347.061.146,00 | 688.635.054.453,61 | 9.767.331.869,61 | 1,42 |
| 1 | Belanja Operasi | 675.422.845.486,00 | 611.262.131.931,10 | 642.962.609.606,00 | 555.168.586.260,11 | 56.093.545.670,99 | 10,10 |
| 2 | Belanja Modal | 147.955.769.352,00 | 124.005.630.244,56 | 123.125.748.792,00 | 93.038.635.113,35 | 30.966.995.131,21 | 33,28 |
| 3 | Belanja Tak Terduga | 5.000.000.000,00 | 271.437.350,00 | 17.671.485.436,00 | 1.844.107.190,00 | (1.572.669.840,00) | (85,28) |
| 4 | Belanja Transfer | 8.766.666.667,00 | 8.520.000.000,00 | - | - | 8.520.000.000,00 | 0 |
| Jumlah Belanja | | 837.145.281.505,00 | 744.059.199.525,66 | 783.759.843.834,00 | 650.051.328.563,46 | 94.007.870.962,20 | 14,46 |

Tahun 2022, secara umum realisasi Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp9.767.331.869,61 atau 1,42 % dari tahun 2021, kenaikan tersebut berupa :

- a. Kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp39.010.636.998,24 atau 42,50%; dan
- b. Penurunan pada Pendapatan Transfer sebesar (Rp26.374.264.056,00) atau (4,44)%.
- c. Penurunan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar (Rp2.869.041.072,63) atau (92,95)%.

Dari sisi Belanja, terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp94.007.870.962,20 atau sebesar 14,46 % yang berasal dari :

- a. Kenaikan pada Belanja Operasi sebesar Rp56.093.545.670,99 atau 10,10%.
- b. Kenaikan pada Belanja Modal sebesar Rp30.966.995.131,21 atau 33,28 %.
- c. Penurunan Belanja Tidak Terduga sebesar (Rp1.572.669.840,00) atau (85,28)%.
- d. Kenaikan pada Belanja Transfer sebesar Rp8.520.000.000,00 atau 0% dibanding tahun 2021 yang tidak dianggarkan.

5.1.1 Pendapatan Daerah

| Anggaran Tahun 2022 Rp | Realisasi Tahun 2022 Rp |
|------------------------------|-------------------------------|
| 714.157.721.650,00 | 698.402.386.323,22 |

Target Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp714.157.721.650,00 dengan realisasi sebesar Rp698.402.386.323,22 atau 97,79. Realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp9.767.331.869,61 atau 1,42% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp688.635.054.453,61.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kota Bukittinggi tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.1.1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2021**

| URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=(3/2) | 5 |
| PENDAPATAN DAERAH – LRA | 714.157.721.650,00 | 698.402.386.323,22 | 97,79 | 688.635.054.453,61 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA | 136.257.791.456,00 | 130.796.925.183,85 | 95,99 | 91.786.288.185,61 |
| Pendapatan Pajak Daerah – LRA | 50.269.852.262,00 | 49.570.750.398,00 | 98,61 | 40.765.025.893,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah – LRA | 48.684.034.000,00 | 46.662.398.969,00 | 95,85 | 27.401.880.331,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.505.000.000,00 | 6.641.291.925,00 | 88,49 | 5.482.031.608,00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah – LRA | 29.798.905.194,00 | 27.922.483.891,85 | 93,70 | 18.137.350.353,61 |
| PENDAPATAN TRANSFER – LRA | 577.899.930.194,00 | 567.387.873.682,00 | 98,18 | 593.762.137.738,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 543.423.791.657,00 | 532.574.902.562,00 | 98,00 | 561.086.880.504,00 |
| Dana Perimbangan | 543.423.791.657,00 | 532.574.902.562,00 | 98,00 | 515.555.324.504,00 |
| Dana Insentif Daerah (DID) | - | - | - | 45.531.556.000,00 |
| Pendapatan Transfer antar Daerah | 34.476.138.537,00 | 34.812.971.120,00 | 100,98 | 32.675.257.234,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil | 34.076.138.537,00 | 34.412.971.120,00 | 100,99 | 32.675.257.234,00 |

| | | | | |
|---|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Bantuan Keuangan | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 100,00 | - |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | - | 217.587.457,37 | 0,00 | 3.086.628.530,00 |
| Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan | - | 217.587.457,37 | 0,00 | 3.086.628.530,00 |

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

| | |
|--|---|
| Anggaran Tahun 2022 Rp 136.257.791.456,00 | Realisasi Tahun 2022 Rp 130.796.925.183,85 |
|--|---|

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 sebesar Rp136.257.791.456,00 dengan realisasi sebesar Rp130.796.925.183,85 atau 95,99%. Realisasi PAD tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp39.010.636.998,24 atau 42,50% dari tahun 2021 sebesar Rp91.786.288.185,61. Kenaikan tersebut berupa :

1. Kenaikan pada Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp8.805.724.505,00 atau 21,60%.
2. Kenaikan pada Retribusi Daerah sebesar Rp19.260.518.638,00 atau 70,29%
3. Kenaikan pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.159.260.317,00 atau 21,15% dan
4. Kenaikan pada Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp9.785.133.538,24 atau 53,95 %.

Realisasi pendapatan asli daerah tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.1.1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021**

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan/ Penurunan Rp |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-5) |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 50.269.852.262,00 | 49.570.750.398,00 | 40.765.025.893,00 | 8.805.724.505,00 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 48.684.034.000,00 | 46.662.398.969,00 | 27.401.880.331,00 | 19.260.518.638,00 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.505.000.000,00 | 6.641.291.925,00 | 5.482.031.608,00 | 1.159.260.317,00 |
| 4 | Lain-lain PAD yang Sah | 29.798.905.194,00 | 27.922.483.891,85 | 18.137.350.353,61 | 9.785.133.538,24 |
| Total | | 136.257.791.456,00 | 130.796.925.183,85 | 91.786.288.185,61 | 39.010.636.998,24 |

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

| | |
|---|--|
| Anggaran Tahun 2022 Rp 50.269.852.262,00 | Realisasi Tahun 2022 Rp 49.570.750.398,00 |
|---|--|

Pendapatan Pajak Daerah pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp50.269.852.262,00 dengan realisasi sebesar Rp49.570.750.398,00 atau 98,61%. Realisasi Pendapatan Pajak

Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.805.724.505,00 atau 21,60% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp40.765.025.893,00. Rincian dari realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.1.3
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | 6 |
| 1 | Pajak Hotel | 16.132.300.000,00 | 16.203.159.513,00 | 100,44 | 12.296.289.161,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 8.532.186.156,00 | 6.907.203.972,00 | 80,95 | 6.052.919.004,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 1.088.022.310,00 | 1.004.246.805,00 | 92,30 | 712.031.108,00 |
| 4 | Pajak Reklame | 860.800.000,00 | 967.282.188,00 | 112,37 | 648.480.050,00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 6.074.338.220,00 | 6.268.267.602,00 | 103,19 | 5.902.665.599,00 |
| 6 | Pajak Parkir | 400.000.000,00 | 322.475.568,00 | 80,62 | 298.836.265,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 70.000.000,00 | 76.075.811,00 | 108,68 | 69.419.188,00 |
| 8 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 4.090.100.000,00 | 3.925.523.043,00 | 95,98 | 3.768.254.822,00 |
| 9 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 13.022.105.576,00 | 13.896.515.896,00 | 106,71 | 11.016.130.696,00 |
| | Total | 50.269.852.262,00 | 49.570.750.398,00 | 98,61 | 40.765.025.893,00 |

Realisasi penerimaan pajak tahun 2022 untuk 9 (sembilan) jenis pajak ada beberapa yang melebihi dari target yang dianggarkan dan ada pula yang belum mencapai target anggaran, namun dibandingkan dengan realisasi 2021 secara keseluruhan, hasil realisasi 9 jenis pajak mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena tahun 2022 tidak ada lagi pembatasan berskala besar (PSBB) dikarenakan angka kasus /penularan Covid -19 di tahun 2022 semakin menurun.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

| Anggaran Tahun 2022 Rp | Realisasi Tahun 2022 Rp |
|------------------------------|-------------------------------|
| 48.684.034.000,00 | 46.662.398.969,00 |

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp48.684.034.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp46.662.398.969,00 atau 95,85%. Realisasi retribusi tahun 2022 mengalami kenaikan sangat signifikan sebesar Rp19.260.518.638,00 atau 70,29% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp27.401.880.331,00. Rincian realisasi Retribusi Daerah tahun 2022 dan 2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5.1.1.4
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

| No | SKPD | Uraian Rekening | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|----|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=5/4*100$ | 7 |
| 1 | Dinas Kesehatan | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 400.000.000,00 | 535.212.000,00 | 133,80 | 343.593.000,00 |
| 2 | Dinas Perhubungan | Retribusi Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum | 1.500.000.000,00 | 1.305.794.000,00 | 87,05 | 1.193.391.000,00 |
| | | Retribusi Terminal | 182.500.000,00 | 190.204.000,00 | 104,22 | 179.782.000,00 |
| | | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 1.200.000.000,00 | 807.420.000,00 | 67,29 | 741.782.000,00 |
| | | Retribusi Izin Trayek | 34.170.000,00 | 29.220.000,00 | 85,51 | 24.070.000,00 |
| 3 | Dinas Lingkungan Hidup | Retribusi Pelayanan dan Persampahan | 1.200.864.000,00 | 1.170.449.500,00 | 97,47 | 1.070.567.500,00 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 5.000.000,00 | 2.275.000,00 | 45,50 | 4.675.000,00 |
| 5 | Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 50.000.000,00 | 35.984.000,00 | 71,97 | 3.000.000,00 |
| | | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 28.800.000.000,00 | 27.746.558.055,00 | 96,34 | 16.810.153.684,00 |
| 6 | Badan Keuangan | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 102.000.000,00 | 55.926.900,00 | 54,83 | 56.453.800,00 |
| 7 | Dinas Penanaman Modal PTSPK | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 70.000.000,00 | 75.351.900,00 | 107,65 | 79.122.500,00 |
| | | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 180.000.000,00 | 174.393.645,00 | 96,89 | 437.483.837,00 |
| 8 | Dinas Pertanian dan Pangan | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 150.000.000,00 | 174.060.000,00 | 116,04 | 149.745.000,00 |
| | | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 10.000.000,00 | 10.030.000,00 | 100,30 | 0,00 |
| | | Retribusi Rumah Potong Hewan | 240.000.000,00 | 241.040.000,00 | 100,43 | 236.398.000,00 |
| | | Retribusi penjualan produksi Usaha Daerah | 80.000.000,00 | 73.850.585,00 | 92,31 | 81.561.810,00 |
| 9 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan | Retribusi Pelayan Persampahan dan Kebersihan (<i>Keterangan: khusus di tiga wilayah pasar</i>) | 350.000.000,00 | 361.348.190,00 | 103,24 | 181.389.540,00 |
| | | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.272.500.000,00 | 1.316.078.600,00 | 103,42 | 1.194.622.812,00 |
| | | Retribusi Penyedotan Kaku | 2.000.000.000,00 | 2.212.882.000,00 | 110,64 | 1.720.804.000,00 |
| | | Retribusi Tera Ulang | 7.000.000,00 | 8.169.500,00 | 116,71 | 10.107.500,00 |
| | | Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan | 9.800.000.000,00 | 8.941.077.094,00 | 91,24 | 2.055.531.348,00 |
| | | Retribusi Tempat Parkir | 800.000.000,00 | 735.394.000,00 | 91,92 | 753.286.000,00 |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 250.000.000,00 | 459.680.000,00 | 183,87 | 74.360.000,00 |
| | Total Retribusi | | 48.684.034.000,00 | 46.662.398.969,00 | 95,85 | 27.401.880.331,00 |

| | | |
|---|--|---|
| 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Anggaran Tahun 2022 Rp 7.505.000.000,00 | Realisasi Tahun 2022 Rp 6.641.291.925,00 |
|---|--|---|

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp7.505.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.641.291.925,00 atau 88,49%. Realisasi tahun 2022 naik sebesar Rp1.159.260.317,00 atau 21,15% dari tahun 2021 sebesar Rp5.482.031.608,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2022 berasal dari piutang deviden tahun 2021 yang dibagikan kepada Pemko Bukittinggi atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Sumatera Barat sebesar Rp6.252.795.492,00 dan piutang deviden tahun 2021 atas penyertaan modal Pemko Bukittinggi pada Perseroda PT. BPRS Jam Gadang sebesar Rp388.496.433,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.1.5
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2022 dan 2021**

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bagian Laba (deviden) sebesar Rp6.641.291.925,00 yang terdiri dari: a. Bank Nagari sebesar Rp6.252.795.492,00 ;dan b. BUMD PT. Perseroda BPRS Jam Gadang sebesar Rp388.496.433,00. | 7.505.000.000,00 | 6.641.291.925,00 | 88,49 | 5.482.031.608,00 |
| Total | | 7.505.000.000,00 | 6.641.291.925,00 | 88,49 | 5.482.031.608,00 |

| | | |
|--|---|--|
| 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Anggaran Tahun 2022 Rp 29.798.905.194,00 | Realisasi Tahun 2022 Rp 27.922.483.891,85 |
|--|---|--|

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD 2022 dianggarkan sebesar Rp29.798.905.194,00 dan telah terealisasi sebesar Rp27.922.483.891,85 atau 93,70%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp9.785.133.538,24 atau 53,95% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp18.137.350.353,61.

Rincian realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1.1.6
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | 6 |
| 1 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 214.186.000,00 | 35.900.000,00 | 16,76 | 143.235.768,00 |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.067.000.000,00 | 632.792.049,00 | 59,31 | 453.968.151,00 |
| 3 | Penerimaan Jasa Giro | 4.650.000.000,00 | 2.639.172.489,00 | 56,76 | 3.562.919.442,00 |
| 4 | Pendapatan Bunga | 5.750.000.000,00 | 4.244.628.513,40 | 73,82 | 4.820.064.660,75 |
| 5 | Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah | - | 6.000.000,00 | - | - |
| 6 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | - | 142.636.531,00 | - | 63.734.680,22 |
| 7 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | - | 191.880.143,75 | - | 48.335.970,96 |
| 8 | Pendapatan Denda Pajak | 125.000.000,00 | 334.802.457,00 | 267,84 | 346.170.657,00 |
| 9 | Pendapatan Denda Retribusi | - | 180.043.745,00 | - | 41.939.623,00 |
| 10 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | - | 671.001.216,00 | - | 166.712.567,39 |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian | 2.554.417.426,00 | 2.663.715.363,70 | 104,28 | 2.109.268.996,29 |
| 12 | Pendapatan BLUD | 15.438.301.768,00 | 16.155.511.384,00 | 104,65 | 6.217.252.737,00 |
| 13 | Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP | - | - | - | 397.100,00 |
| 14 | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda | - | 24.400.000,00 | - | 163.350.000,00 |
| TOTAL | | 29.798.905.194,00 | 27.922.483.891,85 | 93,70 | 18.137.350.353,61 |

Dari tabel di atas, nomor 1 adalah sub rincian akun Lain-lain PAD yang Sah berupa Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan, yang persentase realisasinya rendah. Hal tersebut dikarenakan Tahun Anggaran 2022 diusulkan target yang akan dicapai untuk penjualan BMD untuk seluruh SKPD/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, namun dalam pelaksanaannya tidak seluruh SKPD/Unit kerja yang mengusulkan penjualan, sehingga capaian realisasi hanya 19 SKPD/Unit kerja saja.

Pada nomor 10 juga terdapat Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dengan rincian sebagai berikut :

1. Jaminan Pelaksanaan atas Wan Prestasinya Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN 1 s.d Rumah Potong) Tahun 2021 oleh PT. Inanta Bhakti Utama, dengan nilai kontrak Rp12.970.588.752,71. Jaminan pelaksanaan pekerjaan dicairkan pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp648.529.438,00
2. Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan Rehab Drainase Lingkungan Belakang Balok Tahun 2021 oleh CV. Giasta Company dengan nilai kontrak sebesar Rp449.435.553,28 pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jaminan pemeliharannya adalah sebesar Rp22.471.778,00 yang dicairkan pada tanggal 27 Juli 2022.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anggaran Tahun 2022 Rp | Realisasi Tahun 2022 Rp |
| 577.899.930.194,00 | 567.387.873.682,00 |

Pendapatan Transfer yang dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp577.899.930.194,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp567.387.873.682,00 atau 98,18%. Realisasi pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp26.374.264.056,00 atau 4,44% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp593.762.137.738,00. Berikut beberapa informasi penjelasan yaitu:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp17.019.578.058,00 atau 3,30% dari realisasi tahun 2021;
- Pendapatan Transfer antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.137.713.886,00 atau 6,54%.

Pada tahun 2022, terdapat penurunan pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat yang disebabkan oleh :

- Pada Tahun Anggaran 2022 Kota Bukittinggi tidak mendapatkan Alokasi dan penyaluran Dana Insentif Daerah,
- Sebagian Dana Bagi Hasil Reguler tahun 2022 senilai Rp1.849.462.625,00 disalurkan oleh pemerintah pusat secara non tunai melalui mekanisme *Treasury Deposit Facility (TDF)* tanggal 30 Desember 2022 yang berdasarkan:
 - PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 Desember 2022.
 - PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi yang disalurkan secara non tunai melalui *Fasilitas Treasury Deposit Facility* tanggal 3 Maret 2023.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1.1.7
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021**

| | URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan/ Penurunan Rp | % |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 543.423.791.657,00 | 532.574.902.562,00 | 561.086.880.504,00 | (28.511.977.942,00) | (5,08) |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 34.476.138.537,00 | 34.812.971.120,00 | 32.675.257.234,00 | 2.137.713.886,00 | 6,54 |
| | JUMLAH | 577.899.930.194,00 | 567.387.873.682,00 | 593.762.137.738,00 | (26.374.264.056,00) | (4,44) |

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

**Anggaran
Tahun 2022
Rp
543.423.791.657,00**

**Realisasi
Tahun 2022
Rp
532.574.902.562,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan Tahun 2022 sebesar Rp543.423.791.657,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp532.574.902.562,00 atau 98,00%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp28.511.977.942,00 atau 5,08% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp561.086.880.504,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.1.8
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan 2021**

| No | URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan/ Penurunan Rp | % |
|----|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3-4) | 7 |
| 1 | Dana Perimbangan | 543.423.791.657,00 | 532.574.902.562,00 | 515.555.324.504,00 | 17.019.578.058,00 | 3,30 |
| 2 | Dana Insentif Daerah (DID) | - | - | 45.531.556.000,00 | (45.531.556.000,00) | (100,00) |
| | JUMLAH | 543.423.791.657,00 | 532.574.902.562,00 | 561.086.880.504,00 | (28.511.977.942,00) | (5,08) |

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

**Anggaran
Tahun 2022
Rp
543.423.791.657,00**

**Realisasi
Tahun 2022
Rp
532.574.902.562,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 seluruhnya berasal dari Dana Perimbangan, yang dianggarkan sebesar 543.423.791.657,00 dengan realisasi sebesar Rp532.574.902.562,00 atau 98,00%. Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp17.019.578.058,00 atau 3,30% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp Rp515.555.324.504,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1.1.9
Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021

| No | URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan/ Penurunan Rp | % |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 |
| 1 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 15.894.532.000,00 | 18.945.474.525,00 | 19.297.898.290,00 | (352.423.765,00) | (1,83) |
| 2 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 415.488.236.540,00 | 419.027.434.440,00 | 421.334.282.000,00 | (2.306.847.560,00) | (0,55) |
| 3 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 49.076.996.961,00 | 38.100.592.208,00 | 17.828.812.263,00 | 20.271.779.945,00 | 113,70 |
| 4 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 62.964.026.156,00 | 56.501.401.389,00 | 57.094.331.951,00 | (592.930.562,00) | (1,04) |
| | JUMLAH | 543.423.791.657,00 | 532.574.902.562,00 | 515.555.324.504,00 | 17.019.578.058,00 | 3,30 |

DAK Fisik untuk Kota Bukittinggi Tahun 2022 meliputi DAK Fisik Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Kesehatan, DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman, DAK Fisik Bidang Pariwisata, DAK Fisik Bidang Jalan, DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Peningkatan Persiapan.

Untuk pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2022 terdiri dari : Dana BOS (reguler sekolah negeri dan swasta serta Kinerja), TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, BOKKB-BOK, BOKKB-Pengawasan Obat dan makanan, BOKKB Akreditasi Puskesmas, BOKKB-Jaminan Persalinan, BOKKB-BOKB, PK2UKM, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 5.1.1.2.1.2 | Dana Insentif Daerah (DID) | Anggaran Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 |
| | | Rp | Rp |
| | | 0,00 | 0,00 |

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID). DID mengalami penurunan sebesar (Rp45.531.556.000,00) atau (100%) dari anggaran dan realisasi tahun 2021 sebesar Rp45.531.556.000,00, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.1.10
Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan 2021

| No | URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan/ Penurunan Rp | % |
|----|---------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | DID | 0,00 | 0,00 | 45.531.556.000,00 | (45.531.556.000,00) | (100,00) |
| | JUMLAH | 0,00 | 0,00 | 45.531.556.000,00 | (45.531.556.000,00) | (100,00) |

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

**Anggaran
Tahun 2022
Rp
34.476.138.537,00**

**Realisasi
Tahun 2022
Rp
34.812.971.120,00**

Pendapatan Kota Bukittinggi yang bersumber dari Transfer Antar Daerah yang dianggarkan Tahun 2022 sebesar Rp34.476.138.537,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp34.812.971.120,00 atau 100,98%. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.137.713.886,00 atau 6,54% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp32.675.257.234,00. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.1.11
Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan 2021**

| URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan/ Penurunan Rp | % |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Pendapatan Bagi Hasil pajak | 34.076.138.537,00 | 34.412.971.120,00 | 32.675.257.234,00 | 1.737.713.886,00 | 5,32 |
| Bantuan Keuangan | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0 | 400.000.000,00 | 0 |
| JUMLAH | 34.476.138.537,00 | 34.812.971.120,00 | 32.675.257.234,00 | 2.137.713.886,00 | 5,32 |

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

**Anggaran
Tahun 2022
Rp
0,00**

**Realisasi
Tahun 2022
Rp
217,587,457.37**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdapat dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2022 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah dan pihak lainnya serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp217,587,457.37. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar (Rp2,869,041,072.63) atau (92,95)% dari realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp3.086.628.530,00. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1.1.14
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021**

| URAIAN | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan/ Penurunan Rp | % |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5=3-4</i> | <i>6</i> |
| Pendapatan atas pengembalian akibat temuan regular Inspektorat di tahun 2022 atas tahun sebelumnya | - | 5.667.500,00 | - | 5.667.500,00 | - |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| Pendapatan atas pengembalian dana belanja hibah tahun sebelumnya ke organisasi/lembaga masyarakat | - | 211.919.957,37 | 3.086.628.530,00 | (2.874.708.572,63) | (0,93) |
| JUMLAH | - | 217.587.457,37 | 3.086.628.530,00 | (2.869.041.072,63) | |

5.1.2 BELANJA

| | |
|--|---|
| Anggaran Tahun 2022 Rp 837.145.281.505,00 | Realisasi Tahun 2022 Rp 744.059.199.525,66 |
|--|---|

Anggaran Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar Rp837.145.281.505,00 dengan realisasi sebesar Rp744.059.199.525,66 atau 88,88%. Berdasarkan jenisnya Belanja dapat dibagi atas :

1. Belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi, Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Urusan wajib pelayanan dasar;
 - b. Urusan wajib bukan pelayanan dasar;
 - c. Urusan pilihan; dan
 - d. Urusan pemerintah fungsi penunjang.

Realisasi Belanja berdasarkan urusan pemerintah dan organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1.15
Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Dan Organisasi Tahun 2022 dan 2021

| No. | Urusan | Unit Organisasi | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|-----|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 184.531.786.333,00 | 176.640.871.175,63 | 95,72 | 168.449.155.297,91 |
| | | Dinas Kesehatan | 110.919.308.871,00 | 89.915.816.408,34 | 81,06 | 88.196.355.853,80 |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 67.466.693.480,00 | 54.886.841.356,17 | 81,35 | 32.561.710.417,04 |
| | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 17.389.940.613,00 | 16.405.111.863,00 | 94,34 | 13.447.821.257,78 |
| | | Dinas Kebakaran | 7.792.205.950,00 | 7.147.474.055,67 | 91,73 | 6.505.868.310,00 |
| | | Satuan Polisi Pamong Praja | 21.379.804.911,00 | 19.727.921.874,00 | 92,27 | 17.907.852.130,00 |
| | | Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah | 4.512.083.952,00 | 4.291.534.890,76 | 95,11 | 4.577.578.785,00 |
| | | Dinas Sosial | 7.879.143.508,00 | 6.687.905.903,00 | 84,88 | 6.182.161.289,00 |
| 2 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 687.444.384,00 | 548.627.061,00 | 79,81 | 620.123.872,00 |

| No. | Urusan | Unit Organisasi | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 7.949.779.587,00 | 7.621.818.986,00 | 95,87 | 6.745.221.191,00 |
| | | Dinas Pertanian dan Pangan | 10.960.150.740,00 | 9.669.366.056,00 | 88,22 | 698.823.995,00 |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 559.638.165,00 | 433.368.274,04 | 77,44 | 475.673.199,00 |
| | | Dinas Lingkungan Hidup | 42.321.589.123,00 | 38.228.064.116,34 | 90,33 | 33.284.163.015,00 |
| | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6.266.328.404,00 | 5.863.934.087,23 | 93,58 | 5.252.015.865,00 |
| | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 3.621.188.736,00 | 3.086.867.483,00 | 85,24 | 2.045.437.564,88 |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4.245.315.716,00 | 3.868.973.892,46 | 91,14 | 4.592.430.412,95 |
| | | Dinas Perhubungan | 15.154.462.444,00 | 13.466.614.877,26 | 88,86 | 12.129.716.501,00 |
| | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9.958.690.937,00 | 9.215.894.634,66 | 92,54 | 6.854.828.171,00 |
| | | Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan | 11.340.944.060,00 | 10.735.473.946,00 | 94,66 | 6.784.297.596,90 |
| | | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 10.950.783.289,00 | 10.099.545.607,00 | 92,23 | 16.803.191.100,76 |
| | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 7.900.462.077,00 | 7.177.070.881,70 | 90,84 | 3.836.090.633,34 |
| | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 53.080.600,00 | 51.580.850,00 | 97,17 | 14.376.750,00 |
| | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 80.193.000,00 | 65.395.700,00 | 81,55 | 39.094.815,00 |
| | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.431.348.086,00 | 3.093.140.076,00 | 90,14 | 2.885.760.339,00 |
| | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5.866.559.387,00 | 5.568.555.966,00 | 94,92 | 4.865.213.246,00 |
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 619.798.140,00 | 472.373.687,00 | 76,21 | 641.606.290,00 | | |
| 3 | Urusan Pilihan | Dinas Pertanian dan Pangan | 1.575.996.652,00 | 1.494.721.624,80 | 94,84 | 914.861.404,44 |
| | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 28.924.472.414,00 | 25.985.299.047,04 | 89,86 | 19.203.269.405,43 |
| | | Dinas Pertanian dan Pangan | 3.049.672.213,00 | 2.737.973.236,10 | 89,78 | 14.319.629.467,50 |
| | | Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan | 15.082.964.242,00 | 12.878.647.908,96 | 85,39 | 8.174.856.067,62 |
| | | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 1.489.729.920,00 | 1.297.034.543,00 | 87,07 | 613.592.789,00 |
| 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | Sekretariat Daerah | 74.964.123.762,00 | 67.871.387.882,43 | 90,54 | 47.018.222.249,84 |
| | | Inspektorat | 8.473.210.882,00 | 7.328.446.153,00 | 86,49 | 6.843.454.363,00 |
| | | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 6.634.823.893,00 | 5.937.496.031,00 | 89,49 | 5.954.990.382,00 |
| | | Badan Keuangan | 32.362.837.910,00 | 25.085.525.503,00 | 77,51 | 16.805.352.751,00 |
| | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6.980.801.349,00 | 6.358.429.724,00 | 91,08 | 5.450.808.435,00 |

| No. | Urusan | Unit Organisasi | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|-----|--------|--|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 960.864.536,00 | 930.157.781,00 | 96,80 | 676.755.517,00 |
| | | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 377.871.000,00 | 309.666.173,00 | 81,95 | 497.437.825,00 |
| | | Sekretariat DPRD | 40.491.537.552,00 | 32.585.823.296,00 | 80,48 | 32.598.071.658,00 |
| | | Kecamatan Mandiangi Koto Selayan | 17.091.427.558,00 | 16.038.641.622,07 | 93,84 | 16.269.210.000,57 |
| | | Kecamatan Guguk Panjang | 14.817.737.145,00 | 13.696.503.045,00 | 92,43 | 12.040.362.757,70 |
| | | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | 14.194.387.758,00 | 13.678.126.189,00 | 96,36 | 11.292.205.165,00 |
| | | Kesatuan Bangsa dan Politik | 5.834.098.226,00 | 4.875.176.058,00 | 83,56 | 4.981.680.427,00 |
| | | | 837.145.281.505,00 | 744.059.199.525,66 | 88,88 | 650.051.328.563,46 |

2. Belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Fungsi pelayanan umum;
- b. Fungsi ketertiban dan keamanan;
- c. Fungsi ekonomi;
- d. Fungsi lingkungan hidup;
- e. Fungsi perumahan dan fasilitas umum;
- f. Fungsi kesehatan;
- g. Fungsi pariwisata dan budaya;
- h. Fungsi pendidikan; dan
- i. Fungsi perlindungan sosial.

Realisasi Belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1.16
Realisasi Belanja Berdasarkan Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Dan Fungsi Tahun 2022 dan 2021

| No. | Urusan | Unit Organisasi | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|-----|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 |
| 1 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 184.531.786.333,00 | 176.640.871.175,63 | 95,72 | 168.449.155.297,91 |
| | | Dinas Kesehatan | 110.919.308.871,00 | 89.915.816.408,34 | 81,06 | 88.196.355.853,80 |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 67.466.693.480,00 | 54.886.841.356,17 | 81,35 | 32.561.710.417,04 |
| | | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 17.389.940.613,00 | 16.405.111.863,00 | 94,34 | 13.447.821.257,78 |
| | | Dinas Kebakaran | 7.792.205.950,00 | 7.147.474.055,67 | 91,73 | 6.505.868.310,00 |
| | | Satuan Polisi Pamong Praja | 21.379.804.911,00 | 19.727.921.874,00 | 92,27 | 17.907.852.130,00 |

| No. | Urusan | Unit Organisasi | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|-----|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 |
| | | Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah | 4.512.083.952,00 | 4.291.534.890,76 | 95,11 | 4.577.578.785,00 |
| | | Dinas Sosial | 7.879.143.508,00 | 6.687.905.903,00 | 84,88 | 6.182.161.289,00 |
| 2 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 687.444.384,00 | 548.627.061,00 | 79,81 | 620.123.872,00 |
| | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 7.949.779.587,00 | 7.621.818.986,00 | 95,87 | 6.745.221.191,00 |
| | | Dinas Pertanian dan Pangan | 10.960.150.740,00 | 9.669.366.056,00 | 88,22 | 698.823.995,00 |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 559.638.165,00 | 433.368.274,04 | 77,44 | - |
| | | Dinas Lingkungan Hidup | 42.321.589.123,00 | 38.228.064.116,34 | 90,33 | 33.759.836.214,00 |
| | | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 6.266.328.404,00 | 5.863.934.087,23 | 93,58 | 5.252.015.865,00 |
| | | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 3.621.188.736,00 | 3.086.867.483,00 | 85,24 | 2.045.437.564,88 |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4.245.315.716,00 | 3.868.973.892,46 | 91,14 | 4.592.430.412,95 |
| | | Dinas Perhubungan | 15.154.462.444,00 | 13.466.614.877,26 | 88,86 | 12.129.716.501,00 |
| | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 9.958.690.937,00 | 9.215.894.634,66 | 92,54 | 6.854.828.171,00 |
| | | Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan | 11.340.944.060,00 | 10.735.473.946,00 | 94,66 | 6.784.297.596,90 |
| | | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 10.950.783.289,00 | 10.099.545.607,00 | 92,23 | 16.803.191.100,76 |
| | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 7.900.462.077,00 | 7.170.050.057,70 | 90,75 | 3.836.090.633,34 |
| | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 53.080.600,00 | 51.580.850,00 | 97,17 | 14.376.750,00 |
| | | Dinas Komunikasi dan Informatika | 80.193.000,00 | 65.395.700,00 | 81,55 | 39.094.815,00 |
| | | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3.431.348.086,00 | 3.093.140.076,00 | 90,14 | 2.885.760.339,00 |
| | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 5.866.559.387,00 | 5.568.555.966,00 | 94,92 | 4.865.213.246,00 |
| | | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 619.798.140,00 | 472.373.687,00 | 76,21 | 641.606.290,00 |
| 3 | Urusan Pilihan | Dinas Pertanian dan Pangan | 1.575.996.652,00 | 1.494.721.624,80 | 94,84 | 914.861.404,44 |
| | | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 28.924.472.414,00 | 25.992.319.871,04 | 89,86 | 19.203.269.405,43 |
| | | Dinas Pertanian dan Pangan | 3.049.672.213,00 | 2.737.973.236,10 | 89,78 | 14.319.629.467,50 |
| | | Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan | 15.082.964.242,00 | 12.878.647.908,96 | 85,39 | 8.174.856.067,62 |

| No. | Urusan | Unit Organisasi | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|-----|---|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 |
| | | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 1.489.729.920,00 | 1.297.034.543,00 | 87,07 | 613.592.789,00 |
| 4 | Urusan Pemerintahan n Fungsi Penunjang | Sekretariat Daerah | 74.964.123.762,00 | 67.871.387.882,43 | 90,54 | 47.018.222.249,84 |
| | | Inspektorat | 8.473.210.882,00 | 7.328.446.153,00 | 86,49 | 6.843.454.363,00 |
| | | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 6.634.823.893,00 | 5.937.496.031,00 | 89,49 | 5.954.990.382,00 |
| | | Badan Keuangan | 32.362.837.910,00 | 25.085.525.503,00 | 77,51 | 16.805.352.751,00 |
| | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6.980.801.349,00 | 6.358.429.724,00 | 91,08 | 5.450.808.435,00 |
| | | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 960.864.536,00 | 930.157.781,00 | 96,80 | 676.755.517,00 |
| | | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 377.871.000,00 | 309.666.173,00 | 81,95 | 497.437.825,00 |
| | | Sekretariat DPRD | 40.491.537.552,00 | 32.585.823.296,00 | 80,48 | 32.598.071.658,00 |
| | | Kecamatan Mandiangi Koto Selayan | 17.091.427.558,00 | 16.038.641.622,07 | 93,84 | 16.269.210.000,57 |
| | | Kecamatan Guguk Panjang | 14.817.737.145,00 | 13.696.503.045,00 | 92,43 | 12.040.362.757,70 |
| | | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | 14.194.387.758,00 | 13.678.126.189,00 | 96,36 | 11.292.205.165,00 |
| | | Kesatuan Bangsa dan Politik | 5.834.098.226,00 | 4.875.176.058,00 | 83,56 | 4.981.680.427,00 |
| | | | | 837.145.281.505,00 | 744.059.199.525,66 | 88,88 |

3. Belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja Daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Operasi:
- b. Belanja Modal:
- c. Belanja Tidak Terduga: dan
- d. Belanja Transfer.

Realisasi Belanja berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1.17
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2021

| Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=(3/2) | 5 |
| BELANJA DAERAH | 837.145.281.505,00 | 744.059.199.525,66 | 88,88 | 650.051.328.563,45 |
| BELANJA OPERASI | 675.422.845.486,00 | 611.262.131.931,10 | 90,50 | 555.168.586.260,11 |
| Belanja Pegawai | 325.444.707.669,00 | 301.384.096.541,66 | 92,61 | 296.371.615.565,25 |
| Belanja Barang | 301.912.139.291,00 | 264.544.058.412,28 | 87,62 | 236.689.663.677,43 |
| Belanja Subsidi | 3.385.520.000,00 | 2.910.989.266,00 | 85,98 | - |
| Belanja Hibah | 42.425.478.526,00 | 40.192.987.711,16 | 94,74 | 21.027.307.017,43 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.255.000.000,00 | 2.230.000.000,00 | 98,89 | 1.080.000.000,00 |
| BELANJA MODAL | 147.955.769.352,00 | 124.005.630.244,56 | 83,81 | 93.038.635.113,34 |
| Belanja Modal Tanah | - | - | - | - |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 60.312.518.236,00 | 48.131.479.720,00 | 79,80 | 42.231.774.799,80 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 33.140.307.759,00 | 25.739.508.574,06 | 77,67 | 23.949.425.057,52 |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 49.760.228.857,00 | 45.500.951.384,50 | 91,44 | 24.162.072.116,02 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.742.714.500,00 | 4.633.690.566,00 | 97,70 | 2.695.363.140,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 5.000.000.000,00 | 271.437.350,00 | 5,43 | 1.844.107.190,00 |
| Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000,00 | 271.437.350,00 | 5,43 | 1.844.107.190,00 |
| BELANJA TRANSFER | 8.766.666.667,00 | 8.520.000.000,00 | 97,19 | - |
| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 8.766.666.667,00 | 8.520.000.000,00 | 97,19 | - |
| Belanja Bantuan Keuangan | 8.766.666.667,00 | 8.520.000.000,00 | 97,19 | - |

5.1.2.1 Belanja Operasi

| | |
|--|---|
| Anggaran Tahun 2022 Rp 675.422.845.486,00 | Realisasi Tahun 2022 Rp 611.262.131.931,10 |
|--|---|

Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar Rp675.422.845.486,00 realisasi sebesar Rp611.262.131.931,10 atau 90,50%. Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp56.093.545.670,99 atau 10,11 % dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp555.168.586.260,11. Realisasi Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.1
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | Realisasi 2021 Rp | Kenaikan / Penurunan Rp |
|----|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-5) |
| 1 | Belanja Pegawai | 325.444.707.669,00 | 301.384.096.541,66 | 296.371.615.565,25 | 5.012.480.976,41 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 301.912.139.291,00 | 264.544.058.412,28 | 236.689.663.677,43 | 27.854.394.734,85 |
| 3 | Belanja Subsidi | 3.385.520.000,00 | 2.910.989.266,00 | - | 2.910.989.266,00 |
| 4 | Belanja Hibah | 42.425.478.526,00 | 40.192.987.711,16 | 21.027.307.017,43 | 19.165.680.693,73 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 2.255.000.000,00 | 2.230.000.000,00 | 1.080.000.000,00 | 1.150.000.000,00 |
| | Total | 675.422.845.486,00 | 611.262.131.931,10 | 555.168.586.260,11 | 56.093.545.670,99 |

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

**Anggaran
Tahun 2022
Rp
325.444.707.669,00**

**Realisasi
Tahun 2022
Rp
301.384.096.541,66**

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2022 adalah sebesar Rp325.444.707.669,00 dengan realisasi sebesar Rp301.384.096.541,66 atau 92,61%. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp5.012.480.976,41 atau 1,69 % dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp296.371.615.565,25. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2.2
Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021**

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | 6 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 171.487.316.916,00 | 165.379.234.960,00 | 96,44 | 168.930.182.615,00 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 88.722.711.128,00 | 82.495.178.895,66 | 92,98 | 74.227.960.376,00 |
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN | 45.648.577.534,00 | 39.573.406.240,00 | 86,69 | 37.962.195.720,25 |
| 4 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 10.496.015.094,00 | 9.849.462.007,00 | 93,84 | 11.424.125.555,00 |
| 5 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1.621.474.179,00 | 1.216.458.905,00 | 75,02 | 1.138.296.713,00 |
| 6 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 714.030.000,00 | 527.451.234,00 | 73,87 | 601.599.996,00 |
| 7 | Belanja Pegawai BOS | - | - | - | 600.000,00 |
| 8 | Belanja Pegawai BLUD | 6.754.582.818,00 | 2.342.904.300,00 | 34,69 | 2.086.654.590,00 |
| Jumlah | | 325.444.707.669,00 | 301.384.096.541,66 | 92,61 | 296.371.615.565,25 |

Pada Belanja Pegawai BLUD persentase realisasinya rendah disebabkan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.754.582.818,00 mengakomodir rencana pembayaran jasa medis tahun 2021 dan 2022, honorarium PPTK, honorarium Bendahara Pembantu dan Honorarium Pejabat Pengadaan. Namun dari target tersebut hanya terealisasi untuk pembayaran honorarium PPTK, Honorarium Bendahara Pembantu dan Honorarium Pejabat Pengadaan sebesar Rp2.342.904.300,00. Untuk Jasa Medis tahun 2021 dan 2022 sampai periode ini belum dapat dibayarkan karena Peraturan Walikota tentang Remunerasi pada RSUD sampai dengan 31 Desember 2022 masih dalam proses penetapan, sehingga sama halnya dengan utang 2021 yang diakomodir sebagai kewajiban di Neraca RSUD dan Neraca Dinas Kesehatan sampai kepada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

| | |
|--|---|
| Anggaran Tahun 2022 Rp 301.912.139.291,00 | Realisasi Tahun 2022 Rp 264.544.058.412,28 |
|--|---|

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 adalah sebesar Rp301.912.139.291,00 dengan realisasi sebesar Rp264.544.058.412,28 atau 87,62%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp27.854.394.734,85 atau 11,76% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp236.689.663.677,43. Realisasi Belanja Barang tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2.3
Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021**

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | 6 |
| 1 | Belanja Barang | 52.636.885.429,00 | 45.252.903.639,74 | 85,97 | 41.459.336.963,41 |
| 2 | Belanja Jasa | 157.512.299.151,00 | 141.940.212.404,68 | 90,11 | 118.678.611.392,38 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 28.712.176.742,00 | 22.663.628.650,86 | 78,93 | 15.947.872.079,00 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 44.438.835.988,00 | 38.444.404.647,00 | 86,51 | 31.333.058.245,50 |
| 5 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat | 3.080.650.000,00 | 2.751.096.770,00 | 89,30 | 1.995.074.339,34 |
| 6 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 11.423.434.704,00 | 11.098.294.672,00 | 97,15 | 11.688.460.588,00 |
| 7 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 4.107.857.277,00 | 2.393.517.628,00 | 58,27 | 15.587.250.069,80 |
| Jumlah | | 301.912.139.291,00 | 264.544.058.412,28 | 87,62 | 236.689.663.677,43 |

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

| | |
|--|---|
| Anggaran Tahun 2022 Rp 3.385.520.000,00 | Realisasi Tahun 2022 Rp 2.910.989.266,00 |
|--|---|

Anggaran Belanja Subsidi tahun 2022 adalah sebesar Rp3.385.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.910.989.266,00 atau 85,98 %. Tahun 2021 tidak dianggarkan Belanja Subsidi untuk Tabungan Utsman yang dialamatkan kepada BUMD PT. BPRS Jam Gadang serta untuk Koperasi Angkutan IKABE, Koperasi Merapi Singgalang, Koperasi Angkutan Jam Gadang yang bertujuan untuk Pengendalian Inflasi akibat kenaikan BBM Tahun 2022.

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.3.1
Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 dan 2021**

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | 6 |
| 1 | Belanja Subsidi Kepada BUMN | 470.520.000,00 | - | - | - |
| 2 | Belanja Subsidi Kepada BUMD | 2.575.000.000,00 | 2.574.989.266,00 | 100,00 | - |
| 3 | Belanja Subsidi Kepada Koperasi | 340.000.000,00 | 336.000.000,00 | 98,82 | - |
| Jumlah | | 3.385.520.000,00 | 2.910.989.266,00 | 85,98 | - |

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

**Anggaran
Tahun 2022
Rp**

42.425.478.526,00

**Realisasi
Tahun 2022
Rp**

40.192.987.711,16

Anggaran Belanja Hibah tahun 2022 adalah sebesar Rp42.425.478.526,00 dengan realisasi sebesar Rp40.192.987.711,16 atau 94,74 %. Realisasi belanja hibah mengalami kenaikan sebesar Rp19.165.680.693,73 atau 91.14% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp21.027.307.017,43. Realisasi belanja hibah tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.2.4
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021**

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5=(4/3)</i> | <i>6</i> |
| 1 | Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat | - | - | - | 239.258.707,66 |
| 2 | Belanja Hibah Kepada Badan atau Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 34.987.231.000,00 | 32.862.652.041,16 | 93,93 | 20.081.991.319,77 |
| 3 | Belanja Hibah Dana BOS untuk sekolah SMP, SD dan PAUD swasta | 6.702.600.000,00 | 6.624.278.680,00 | 98,83 | - |
| 4 | Belanja Hibah kepada Partai Politik | 735.647.526,00 | 706.056.990,00 | 95,98 | 706.056.990,00 |
| Jumlah | | 42.425.478.526,00 | 40.192.987.711,16 | 94,74 | 21.027.307.017,43 |

Akun Belanja Hibah Dana BOS, digunakan untuk merealisasikan belanja yang bersumber uangnya dari DAK Non Fisik yang disalurkan pemerintah pusat ke Kota Bukittinggi, yang pada tahun 2022 mengalami perubahan mekanisme dari tahun 2021. Tahun 2022 pendapatan dan belanjanya dianggarkan di APBD Kota Bukittinggi, sementara fisik dananya tetap disalurkan langsung kepada pihak sekolah, sehingga Pemko Bukittinggi mengesahkan Belanja Hibah tersebut per kali salurnya SMP, SD dan PAUD swasta.

Pada pos Belanja Hibah tersebut juga diakomodir bantuan iuran komite bagi pelajar SMA/SMK swasta yang mempunyai Kartu Keluarga Bukittinggi, yang tidak dapat diakomodir pada pos Belanja Transfer-Bantuan Keuangan ke Provinsi.

Rincian penerima Belanja Hibah tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial**Anggaran
Tahun 2022****Rp
2.255.000.000,00****Realisasi
Tahun 2022****Rp
2.230.000.000,00**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 adalah sebesar Rp2.255.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.230.000.000,00 atau 98,89% yang objek penerimanya adalah keluarga. Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp214.942.000,00. atau 24,85% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.080.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1.2.5
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021**

| No | Uraian | Anggaran 2022 Rp | Realisasi 2022 Rp | % | Realisasi 2021 Rp |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4/3) | 6 |
| 1 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga | 2.255.000.000,00 | 2.230.000.000,00 | 98,89 | 1.080.000.000,00 |
| | Jumlah | 2.255.000.000,00 | 2.230.000.000,00 | 98,89 | 1.080.000.000,00 |

Rincian penerima Belanja Hibah tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran Catatan atas Laporan Keuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan ini.

5.1.2.2 Belanja Modal**Anggaran
Tahun 2022****Rp
147.955.769.352,00****Realisasi
Tahun 2022****Rp
124.005.630.244,56**

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp147.955.769.352,00 dengan realisasi sebesar Rp124.005.630.244,56. Tahun 2021 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp93.038.635.113,35, artinya pada tahun 2022 realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp30.966.995.131,21 atau 33,28%.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bukittinggi menurut jenis belanja adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.2.6
Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021 (Menurut Jenis Belanja)

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2022 Rp | REALISASI 2022 Rp | % | ANGGARAN 2021 Rp | REALISASI 2021 Rp | KENAIKAN/ PENURUNAN Rp | % |
|-----------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5=(4/3)</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8=(4-6)</i> | <i>9=(8/7)</i> |
| 1 | Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 60.312.518.236,00 | 48.131.479.720,00 | 79,80 | 49.999.944.467,00 | 42.231.774.799,80 | 5.899.704.920,20 | 13,97 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 33.140.307.759,00 | 25.739.508.574,06 | 77,67 | 29.277.125.124,00 | 23.949.425.057,53 | 1.790.083.516,53 | 7,47 |
| 4 | Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan | 49.760.228.857,00 | 45.500.951.384,50 | 91,44 | 40.886.820.001,00 | 24.162.072.116,02 | 21.338.879.268,48 | 88,32 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4.742.714.500,00 | 4.633.690.566,00 | 97,70 | 2.961.859.200,00 | 2.695.363.140,00 | 1.938.327.426,00 | 71,91 |
| | Jumlah | 147.955.769.352,00 | 124.005.630.244,56 | 83,81 | 123.125.748.792,00 | 93.038.635.113,35 | 30.966.995.131,21 | 33,28 |

Berikut keterangan masing-masing jenis Belanja Modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah tidak dianggarkan pada tahun 2022;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp60.312.518.236,00 dan direalisasikan sebesar Rp48.131.479.720,00 atau sebesar 79,80%. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan antara lain berupa pengadaan alat-alat besar darat, alat bantu, alat-alat angkutan, alat angkutan darat tak bermotor, alat kantor dan rumah tangga, komputer dan sebagainya;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp33.140.307.759,00 dan direalisasikan sebesar Rp25.739.508.574,06 atau sebesar 77,67%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk pengadaan/konstruksi/pembelian bangunan/gedung pemerintah termasuk rehabilitasi bangunan/gedung kantor maupun bangunan lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah;
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp49.760.228.857,00 dan direalisasikan sebesar Rp45.500.951.384,50 atau sebesar 91,44 %. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan digunakan untuk pengadaan ataupun rehab jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi serta jaringan yang dibutuhkan untuk masyarakat Kota Bukittinggi; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp4.742.714.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.633.690.566,00 atau sebesar 97,70%. Untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2022 realisasinya mencakup Belanja Modal Bahan Perpustakaan (tercetak maupun terekam), Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan lainnya, Belanja Modal Hewan, Belanja Modal Tanaman, serta Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

| Anggaran Tahun 2022 Rp | Realisasi Tahun 2022 Rp |
|---------------------------------------|--|
| 5.000.000.000,00 | 271.437.350,00 |

Selama Tahun Anggaran 2022 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp271.437.350,00. Tahun 2021 belanja tersebut direalisasikan sebesar Rp1.844.107.190,00 dari anggaran sebesar Rp17.671.485.436,00.

Dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 mengalami penurunan yang disebabkan pandemic Covid-19 telah reda. Realisasi anggaran pada tahun 2022 digunakan untuk tanggap darurat untuk 3 (tiga) kali bencana kebakaran, penanganan pasca Covid-19 di awal tahun serta pengembalian dana akibat kelebihan pendapatan tahun sebelumnya ke wajib pajak.

Belanja Tidak Terduga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 digunakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.1.2.7
Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 (Menurut Jenis Belanja)

| NO | TANGGAL | NOMOR | URAIAN | REALISASI Rp |
|---------------|------------------|--------------|---|-----------------------|
| 1 | 14 April 2022 | 0357/LS/2022 | Pembayaran Belanja Tidak Terduga T.A.2022 untuk pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah berupa Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n.Azmel Muzarfi | 12.157.350,00 |
| 2 | 23 Agustus 2022 | 1625/LS/2022 | Pembayaran Belanja Tidak Terduga T.A.2022 untuk pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah berupa Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n.Idris Syafri | 59.500.000,00 |
| 3 | 30 Desember 2022 | 4533/LS/2022 | Pembayaran 95% Pekerjaan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital di Masa Tanggap Darurat Kebakaran Pasar Bawah Kelurahan ATTS Kec Guguk Panjang Tanggal 4 Desember 2022 | 189.791.000,00 |
| 4 | 30 Desember 2022 | 4534/LS/2022 | Pembayaran 5% Pekerjaan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital di Masa Tanggap Darurat Kebakaran Pasar Bawah Kelurahan ATTS Kec Guguk Panjang Tanggal 4 Desember 2022 | 9.989.000,00 |
| Jumlah | | | | 271.437.350,00 |

Sesuai dengan Laporan Kejadian Bencana Kebakaran oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi bahwa telah terjadi Bencana Kebakaran di Pasar Bawah pada hari minggu tanggal 4 Desember 2022 jam 04.30. Kebakaran menghancurkan 11 petak kios dan 7 petak lapak mengalami rusak ringan, Terhadap musibah ini Pemerintah Kota Bukittinggi segera mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat Bencana dan segera melakukan pemulihan sarana dan prasarana vital untuk meminimalisir dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Dengan tidak tersedianya anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana diatas pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Pemerintah Kota Bukittinggi memutuskan untuk menggunakan dana Belanja Tidak Terduga agar pemulihan sarana prasarana Pasar Bawah tersebut dapat segera dilakukan.

Untuk pelaksanaan Pemulihan Sarana dan Prasarana dikoordinir oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dan atas pelaksanaan pekerjaan proyek pemulihan sarana dan prasarana vital dimasa tanggap darurat tersebut telah dibayarkan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga dengan rincian:

1. SP2D nomor 4533/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp189.791.000,00
2. SP2D nomor 4534/LS/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp9.989.000,00.

Selain untuk pemulihan pasca bencana Kebakaran Pasar Bawah, BTT juga digunakan untuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah berupa Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan a.n. Azmel Muzarfi dan a.n. Idris Syafri sebagaimana terangkum dalam tabel diatas.

Selengkapnya rincian penggunaan dana oleh SKPD dapat dilihat pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

5.1.2.4 Belanja Transfer

| Anggaran Tahun 2022 Rp | Realisasi Tahun 2022 Rp |
|---------------------------------------|--|
| 8.766.666.667,00 | 8.520.000.000,00 |

Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp8.766.666.667,00. Anggaran ini merupakan bantuan ke Pemerintah Provinsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Bukittinggi yakni Hebat dalam sektor Pendidikan. Pemerintah memandang perlu adanya jaminan terlaksananya Wajib Belajar 12 Tahun berupa subsidi iuran komite bagi pelajar SMA/SMK Negeri yang mempunyai Kartu Keluarga Bukittinggi.

Untuk menjaga keberlangsungan serta untuk penguatan Program Pendidikan pada SMA, SLB dan SMK Negeri/Swasta, maka Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya melalui salah satu kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022.

Dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud di atas dana yang ditetapkan adalah sebesar Rp9.266.666.667,00 yang kemudian terjadi beberapa kali perubahan terakhir dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-217-2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022 dimana anggaran yang ditetapkan menjadi sebesar Rp8.766.666.667,00 yang terrealisasi sebesar 97,19 %. Keterangan lebih jelas atas aktifitas belanja ini dapat dilihat pada Bab VI Catatan atas Laporan Keuangan.

5.1.3 Surplus / Defisit

| Tahun 2022 Rp | Tahun 2021 Rp |
|-----------------------------|----------------------------|
| (122.987.559.855,00) | (45.656.813.202,44) |

Dari Pendapatan dan Belanja yang telah direalisasikan selama Tahun Anggaran 2022 menghasilkan defisit sebesar (Rp45.656.813.202,44) dari anggaran Defisit yang ditetapkan sebesar (Rp122.987.559.855,00) dan defisit sebesar angka tersebut akan ditutup dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

| 5.1.4 Pembiayaan Daerah | Anggaran Tahun 2022 Rp | Realisasi Tahun 2022 Rp |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 122.987.559.855,90 | 122.987.559.855,90 |

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi dari setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pegangan pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan *surplus* anggaran.

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam Belanja Badan Keuangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp122.987.559.855,00 yaitu sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara realisasi Pembiayaan tahun 2022 adalah 100% yang melebihi anggarannya Rp0,90 sebesar Rp122.987.559.855,90. Realisasi Pembiayaan Daerah secara terinci dapat disajikan dibawah ini.

| 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan | Anggaran Tahun 2022 Rp | Realisasi Tahun 2022 Rp |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 132.987.559.855,00 | 132.979.000.890,90 |

Anggaran penerimaan pembiayaan Tahun 2022 adalah sebesar Rp132.987.559.855,00 direalisasikan sebesar Rp132.987.559.855,90 atau lebih 100%, melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,90. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari pelampauan pendapatan/penghematan belanja yang menjadi SiLPA tahun 2021 sebesar Rp132.979.000.890,90.

| 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Anggaran Tahun 2022 Rp | Realisasi Tahun 2022 Rp |
|--|---------------------------------------|--|
| | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi pengeluaran Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di masa yang akan datang. Pada tahun 2022 Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri dari :

1. Penyertaan Modal pada PT BPRS JAM GADANG sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.
2. Penyertaan Modal Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) Kantor Cabang Bukittinggi sebesar Rp7.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021.

| 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | Anggaran Tahun 2022 Rp 0,00 | Realisasi Tahun 2022 Rp 77.322.187.688,46 |
|---|--------------------------------------|--|
|---|--------------------------------------|--|

Berdasarkan uraian Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada bagian sebelumnya maka APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya mengalami Defisit sebesar Rp45.656.813.202,44 yang ditutupi dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp122.987.559.855,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp77.332.187.688,46

Disamping formula penghitungan SiLPA di atas, dapat juga kami informasikan struktur pembentuk SiLPA Tahun 2022 yang berasal dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja serta pembiayaan yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel. 5.1.2.8 Rincian SiLPA Tahun 2022

| No. | Uraian | Jumlah |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| I | Pelampauan PAD | 15.755.335.326,78 |
| | Pendapatan Asli Daerah | 5.460.866.272,15 |
| | Pendapatan Transfer | 10.512.056.512,00 |
| | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | (217.587.457,37) |
| II | Penghematan Belanja | 93.086.081.979,34 |
| | Belanja Operasi | 64.160.713.554,90 |
| | Belanja Modal | 23.950.139.107,44 |
| | Belanja Tidak Terduga | 4.728.562.650,00 |
| | Belanja Transfer | 246.666.667,00 |
| III | Pelampauan Pembiayaan | 8.558.964,10 |
| | Penerimaan Pembiayaan | - |
| | Pengeluaran Pembiayaan | 8.558.964,10 |
| | SILPA (I - II + III) | (77.322.187.688,46) |

SiLPA sebesar Rp77.332.187.688,46 tersebut adalah dalam bentuk kas dan kewajiban sebagaimana penjelasan kas dibagian Aset Lancar dan kewajiban pada Neraca dengan struktur dan nilai sebagai berikut:

1. Kas pada kasda sebesar Rp63.691.297.145,77
2. Kas pada Bendahara Pengeluaran Rp7.020.824,00
3. Kas pada Bendahara BLUD Rp12.610.034.870,69
4. Kas dana BOS sebesar Rp1.014.071.646,00
5. Kas BOP sebesar Rp202,00
6. Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp237.000 yang merupakan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 oleh RSUD Kota Bukittinggi sebesar Rp243.000,00 dan keterlambatan pembayaran potongan gaji untuk Taspen sebesar Rp6.000,00.

| | | |
|---|--|---|
| 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH | Tahun 2022 Rp 77.322.187.688,46 | Tahun 2021 Rp 132.987.559.855,90 |
|---|--|---|

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos secara komparatif antara periode berjalan dan periode yang lalu. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan 2021 yang terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kota Bukittinggi
Tahun 2022 dan 2021**

| No | Uraian | 2022 | 2021 |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Saldo anggaran Lebih Awal | 132,987,559,855.90 | 99,386,026,235.08 |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 132,979,000,890.90 | 94,377,077,512.75 |
| 3 | Sub Total | 8,558,965.00 | 5,008,948,722.33 |
| 4 | Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 77,322,187,688.46 | 132,987,559,855.90 |
| 5 | Sub Total | 77,330,746,653.46 | 137,996,508,578.23 |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | (8,558,965.00) | (5,008,948,722.33) |
| 7 | Lain-lain | - | - |
| | Saldo Anggaran Lebih Akhir | 77,322,187,688.46 | 132,987,559,855.90 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp132.987.559.855,90 yang merupakan nilai dari SiLPA Tahun Anggaran 2021. Saldo Anggaran Lebih ini yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2022.
2. Penggunaan SAL Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 99,99% dari total SiLPA tahun 2021 yakni sebesar Rp132.979.000.890,00 sementara penggunaan SAL tahun 2021 adalah Rp94.377.077.512,75
3. Selisih antara SiLPA yang awal dengan penggunaan SiLPA tahun berjalan berupa koreksi penggunaan SiLPA tahun lalu sebesar Rp8.558.965,00. Dan di tahun 2021 terdapat selisih serupa sebesar Rp5.008.948.722,33.

4. Selama tahun 2022, estimasi Perubahan SAL menghasilkan nilai Rp77.322.187.688,46 nilai ini sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 yang menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp77.322.187.688,46, nilai tersebut merupakan selisih dari nilai Pendapatan dikurangi nilai Belanja dan ditambah dengan Pembiayaan Netto selama tahun 2022, dan Tahun 2021 nilai SiLPA adalah sebesar Rp132.987.559.855,90.
5. Pada tahun 2022 terdapat koreksi terhadap pembukuan dari kas BOS ke Tagihan Jangka Panjang-TGR akibat meninggalnya Bendahara BOS SDN 12 Puhun Pintu Kabun tahun 2021 yang selanjutnya terbit di 29 Desember 2021 tahun sebelumnya sebesar Rp8.558.965,00 yang merupakan reklas pencatatan kesalahan dan pada tahun 2021 terdapat koreksi sebesar Rp5.008.948.722,33 yang merupakan nilai pendapatan jasa giro Dana Cadangan yang tercatat ganda (double accounting) pada tahun 2020.
6. Total nilai SAL Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2022 berjumlah Rp77.322.187.688,46.

5.3 NERACA

Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp2.045.355.031.596,55, nilai Kewajiban sebesar Rp12.332.999.300,92 dan nilai Ekuitas sebesar Rp2.033.022.032.295,63. Penjelasan masing-masing pos Neraca adalah sebagai berikut.

| | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.3.1 ASET | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 2.045.355.031.596,55 | 2.052.252.906.872,87 |

Nilai Aset Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.045.355.031.596,55, nilai Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp105.597.334.644,95, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp62.195.784.727,47 Aset Tetap sebesar Rp1.855.803.078.417,13 dan Aset Lainnya sebesar Rp21.779.052.447,00 Penjelasan Aset dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.3.1.1 ASET LANCAR | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 105.597.334.644,95 | 169.194.733.756,46 |

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.597.334.644,95. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Bukittinggi terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Investasi Jangka Pendek dan Persediaan. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Kas dan Setara Kas | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | Rp77.322.424.688,46 | Rp132.987.559.855,90 |

PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp77.322.424.688,46, sementara SiLPA di LRA sebesar Rp77.322.187.688,46. artinya terdapat selisih antara Kas dan Setara Kas dengan SiLPA di LRA sebesar Rp237.000,00 yang merupakan Utang PFK.

Kas tersebut adalah merupakan Kas di Bank dan Kas Tunai yang terdiri dari:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| A. Kas di Kas Daerah | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 63.691.297.145,77 | 126.122.416.542,07 |

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sisa Kas di Kas Daerah Kota Bukittinggi menurut pencatatan Badan Keuangan sebagai SKPKD yang kepala organisasinya juga selaku BUD adalah sebesar Rp63.691.297.145,77 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1
Daftar Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

| No. | Rekening | No. Rekening | Per 31 Desember 2022 (Rp.) | Per 31 Desember 2021 (Rp.) |
|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | BPD PENGELUARAN | 0200.0101.00278-4 | - | - |
| 2 | BPD PENERIMAAN | 0200.0101.00201-9 | - | - |
| 3 | BPD KAS UMUM DAERAH | 0200.0101.00276-1 | 63.691.297.145,77 | 120.761.419.322,85 |
| 4 | BPD PENGELUARAN GAJI | 0200.0101.00202-1 | - | - |
| 5 | BPD PENERIMAAN PBB | 0200.0101.00343.1 | - | - |
| 6 | BPD DAK | 0200.0101.00242-5 | - | - |
| 7 | BNI | | - | - |
| 8 | BRI KASDA | | - | 5.299.831.319,22 |
| 9 | BRI PARPORA | | - | 61.165.900,00 |
| 10 | BRI PARKIR RODA EMPAT | | - | - |
| 11 | BRI PARKIR RODA DUA | | - | - |
| 12 | BRI PARKIR BASEMENT PASAR ATAS | | - | - |
| 13 | BPD PAJAK HOTEL | 0200.0201.00373.9 | - | - |
| 14 | BPD PAJAK RESTORAN | 0200.0101.00374.1 | - | - |
| 15 | BPD PAJAK HIBURAN | 0200.0101.00375.2 | - | - |
| 16 | BPD PAJAK REKLAME | 0200.010100376.4 | - | - |
| 17 | BPD PAJAK PARKIR | 0200.0101.00378.8 | - | - |
| 18 | BPD PAJAK AIR BAWAH TANAH | 0200.0101.00379.1 | - | - |
| 19 | BPD PAJAK BPHTB | 0200.0101.00380.6 | - | - |
| | | | 63.691.297.145,77 | 126.122.416.542,07 |

Dalam saldo Kas Daerah tahun 2022 tersebut juga masih mengandung sisa dana peruntukan tertentu sebesar Rp6.559.075.462,55 dengan uraian sebagai berikut:

1. Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2021 sebesar Rp24.304.865,00 dan tahun 2022 adalah Rp6.029.040,73.
2. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan tahun 2022 selain BOP dan BOS adalah Rp3.299.885.905,00.
3. Sisa Dana Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar Rp91.884.329,82
4. Sisa Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp13.083.422,00
5. Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) yang peruntukannya untuk gaji PPPK tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp3.123.887.900,00

Dalam hal manajemen kas, sejak tahun 2012 yang lalu Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan *single treasury account* dengan menetapkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah dan Nomor Rekening 0200.0101.00276-1 sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang berfungsi sebagai rekening penerima transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun dari rekening kas lainnya.

Untuk menunjang tertibnya pengelolaan Kas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-337-2021 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi sebagai Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, Keputusan Walikota Nomor 188.45-338-2021 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45-238-2022 tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Bukittinggi. Berikut rekening-rekening pembantu Kas Umum Daerah yang masih berlaku sampai 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

- a. Rekening 0200.0101.00201-9 untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Rekening 0200.0101.00202-1 untuk pembayaran pengeluaran Gaji yang dananya bersumber dari pemindahan dari rekening Kas Umum Daerah;
- c. Rekening 0200.0101.00278-4 untuk pengeluaran rutin Pemerintah Kota Bukittinggi yang dananya bersumber dari pemindahan dari rekening Kas Umum Daerah;
- d. Rekening 0200.0101.00343-1 untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dananya bersumber dari setoran wajib pajak PBB-P2
- e. Rekening 0200.0101.00373.9 untuk penerimaan Pajak Hotel
- f. Rekening 0200.0101.00374.1 untuk penerimaan Pajak Restoran
- g. Rekening 0200.0101.00375.2 untuk penerimaan Pajak Hiburan
- h. Rekening 0200.0101.00376.4 untuk penerimaan Pajak Reklame
- i. Rekening 0200.0101.00377.6 untuk penerimaan Penerangan Jalan
- j. Rekening 0200.0101.00378.8 untuk penerimaan Pajak Parkir
- k. Rekening 0200.0101.00379.1 untuk penerimaan Pajak Air Tanah
- l. Rekening 0200.0101.00380.6 untuk penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- m. Rekening 0200.0101.00436-6 untuk penerimaan Layanan E-Retribusi dan E-Sewa pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
- n. Rekening 0200.0101.00440.3 untuk penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Sampai pada akhir tahun 2021 rekening Kas Daerah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bukittinggi belum mampu memenuhi kriteria tersebut diatas, maka terhitung tanggal 8 Februari 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi menutup rekening Kas Daerah Rekening Nomor 0015-01-001847-30-7 pada BRI.

Pada tanggal 21 Desember 2022 juga dilakukan penutupan beberapa rekening Pembantu yang ada pada BRI, sehingga per 31 Desember 2022 tidak terdapat lagi rekening Kasda dan Rekening Pembantu Kasda pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tahun 2022 juga dilakukan penutupan Rekening Pembantu Kas Daerah yang digunakan untuk membantu pencairan Dana DAK, dikarenakan kurang efektifnya penggunaan rekening bank tersebut yang mana realisasi dana DAK dapat digabungkan ke rekening belanja umum, maka Rekening 0200.0101.00242-5 dilakukan penutupan.

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| B. Kas di Bendahara Penerimaan | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 0,00 | 17.754.000,00 |

Pada tahun 2021 terdapat Sisa Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp17.754.000,00 yaitu Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup yang telah disetor ke rekening Kas Daerah Pembantu Penerimaan pada tanggal 3 Januari 2022 dengan STS Nomor 014008, dan pada tahun 2022 tidak lagi terdapat saldo kas pada Bendahara Penerimaan.

| | | |
|--|---------------------|-------------------------|
| C. Kas di Bendahara Pengeluaran | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 7.020.824,00 | 1.625.443.351,00 |

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai dan saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp7.020.824,00 merupakan saldo Bank pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi, nilai tersebut merupakan utang ke BPJS tahun 2020 yang seharusnya sudah dibayar.

Pembayaran utang BPJS tersebut telah diproses melalui SP2D dengan Nomor 4618/LS/2022 tanggal 31 Desember 2022, namun telah terjadi kesalahan teknis pada permintaan pencairan sehingga pembayaran Utang BPJS tidak jadi terbayarkan namun uang tersebut berada di rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Surat Perintah Membayar dari dinas terkait. Akhirnya, untuk pelunasan Utang kepada BPJS tersebut direalisasikan pada tanggal 16 Februari 2023 dengan setoran Bendahara terkait langsung ke BPJS.

| D. Kas di BLUD | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Rp | Rp |
| | 12.610.034.870,69 | 3.081.986.359,83 |

Kas di BLUD yang disajikan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.081.986.359,83 dan per tanggal 31 Desember 2022 naik menjadi Rp12.610.034.870,69

Sampai dengan 31 Desember 2022, 7 (tujuh) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota nomor 188.45.351-2016 tanggal 23 Desember 2016 dan diiringi kemudian dengan terbitnya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2017 tanggal 5 April 2017 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Bukittinggi.

Setelah melalui proses pada triwulan III dan IV tahun 2020 UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bukittinggi yang baru berdiri pun menyusul untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-32-2021 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi tanggal 3 Februari 2021.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan BLUD untuk 8 (delapan) UPTD di atas, maka setiap tahun ditetapkan Bendahara dan Nomor Rekening pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada tahun 2022, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-253-2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45-353-2021 tentang Penetapan Bendahara Pembantu dan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

Dengan telah ditunjuknya Bendahara dan ditetapkannya Rekening Bendahara pada masing-masing Puskesmas dan RSUD Kota Bukittinggi, Bendahara bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi penatausahaan dan pertanggungjawaban terkait tugas-tugas perbendaharaan pada Badan Layanan Umum Daerah serta menyusun laporan data dan informasi yang dibutuhkan secara periodik yang berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bendahara membuat surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari Pengguna Anggaran kepada BUD, kemudian BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) setiap bulannya. Berdasarkan SP2B bulan Januari sampai dengan Desember 2022, maka didapat sisa kas pada masing-masing Puskesmas dan RSUD sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2
Mutasi Kas Bendahara BLUD Tahun 2022

| No | Uraian | Per 31 Des 2021 | Pendapatan (Rp) | Belanja (Rp) | Pajak yg belum disetor (Rp) | Per 31 Des 2022 (Rp) |
|----|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+6-5 |
| 1 | Puskesmas Rasimah Ahmad | 96.290.897,00 | 768.328.950,00 | 862.835.882,00 | - | 1.783.965,00 |
| 2 | Puskesmas Guguak Panjang | 63.458.791,00 | 878.059.500,00 | 937.855.832,00 | - | 3.662.459,00 |
| 3 | Puskesmas Nilam Sari | 16.071.713,15 | 346.342.600,00 | 358.777.610,00 | - | 3.636.703,15 |
| 4 | Puskesmas Mandiangin | 3.446.149,00 | 690.237.300,00 | 674.495.765,00 | - | 19.187.684,00 |
| 5 | Puskesmas Gulai Bancah | 13.671.590,68 | 314.300.700,00 | 304.993.155,00 | - | 22.979.135,68 |
| 6 | Puskesmas Tigo Baleh | 161.186.903,00 | 613.009.200,00 | 698.549.710,00 | - | 75.646.393,00 |
| 7 | Puskesmas Plus Mandiangin | 21.771.154,00 | 273.268.200,00 | 293.023.513,00 | - | 2.015.841,00 |
| 8 | Rumah Sakit Umum Daerah | 2.706.089.162,00 | 12.271.964.934,00 | 2.497.174.406,14 | 243.000,00 | 12.481.122.689,86 |
| | Total | 3.081.986.359,83 | 16.155.511.384,00 | 6.627.705.873,14 | 243.000,00 | 12.610.034.870,69 |

Pada RSUD Kota Bukittinggi terjadi kesalahan penghitungan pajak sehingga terdapat kekurangan setor pajak per 31 Desember 2022 senilai Rp243.000,00 yang dicatat sebagai kas BLUD RSUD. Pajak tersebut telah disetorkan pada tanggal 5 Januari 2023 oleh bendahara BLUD RSUD.

Selain kurang setor pajak pada BLUD RSUD sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat kas tunai di tangan bendahara BLUD RSUD sebesar Rp12.914,00 sehingga pada 31 Desember 2022 kas tunai di tangan Bendahara BLUD RSUD adalah sebesar Rp255.914,00, sedangkan pada 7 (tujuh) Puskesmas lainnya tidak terdapat saldo Kas Tunai.

Rincian saldo Kas Tunai dan Bank sebagaimana mutasi kas di atas, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.1.3
Saldo Kas Tunai dan Bank Pada Bendahara BLUD

| No | Uraian | Saldo Kas di Bank (Rp) | Saldo Kas Tunai (Rp) | Saldo kas Per 31 Des 2022 |
|----|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Puskesmas Rasimah Ahmad | 1.783.965,00 | - | 1.783.965,00 |
| 2 | Puskesmas Guguak Panjang | 3.662.459,00 | - | 3.662.459,00 |
| 3 | Puskesmas Nilam Sari | 3.636.703,15 | - | 3.636.703,15 |
| 4 | Puskesmas Mandiangin | 19.187.684,00 | - | 19.187.684,00 |
| 5 | Puskesmas Gulai Bancah | 22.979.135,68 | - | 22.979.135,68 |
| 6 | Puskesmas Tigo Baleh | 75.646.393,00 | - | 75.646.393,00 |
| 7 | Puskesmas Plus Mandiangin | 2.015.841,00 | - | 2.015.841,00 |

E. Kas Dana BOS

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| Rp | Rp |
| 1.014.071.646,00 | 2.139.959.603,00 |

Kas di Bendahara BOS merupakan bagian Kas yang ada pada Bendahara yang memegang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing Sekolah Dasar Negeri dan SMP Negeri. Saldo kas di Bendahara BOS Sekolah Negeri pada Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.014.071.646,00 sedangkan saldo kas pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.139.959.603,00.

Rincian saldo kas pada masing-masing Bendahara BOS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.4
Mutasi Kas Pada Bendahara BOS Sekolah Negeri Tahun 2022

| No. | Uraian | Per 31 Des 2021 | Pendapatan (Rp) | Pengembalian Atas Temuan Inspektorat (Rp) | Belanja (Rp) | Reklasifikasi dari Kas ke Aset Lainnya | Per 31 Des 2022 (Rp) |
|-----|------------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+4+5-6-7 |
| 1 | SD N 01 Campago Ipuh | 6.264.177,00 | 147.418.941,00 | 930.000,00 | 146.989.510,00 | | 7.623.608,00 |
| 2 | SD N 02 Campago Guguak Bulek | 7.467.205,00 | 145.408.699,00 | 500.000,00 | 144.963.016,00 | | 8.412.888,00 |
| 3 | SD N 03 Pulai Anak Air | 2.343.907,00 | 99.000.000,00 | - | 98.840.588,00 | | 2.503.319,00 |
| 4 | SD N 04 Garegeh | 1.778.543,00 | 271.335.085,00 | - | 272.100.739,00 | | 1.012.889,00 |
| 5 | SD N 05 PPK | 6.306.215,00 | 180.257.713,00 | - | 180.177.990,00 | | 6.385.938,00 |
| 6 | SD N 06 Pulai Anak Air | 165.690,00 | 145.428.516,00 | - | 145.550.000,00 | | 44.206,00 |
| 7 | SD N 07 Kubu Gulai Banch | 6.689.673,00 | 194.400.000,00 | - | 194.275.711,00 | | 6.813.962,00 |
| 8 | BOS SD N 08 Campago Ipuh | 49.589,00 | 122.400.000,00 | - | 122.179.779,00 | | 269.810,00 |
| 9 | SD N 09 Manggis Ganting | 11.060.932,00 | 150.300.000,00 | - | 148.505.790,00 | | 12.855.142,00 |
| 10 | SD N 10 Puhun | 4.920.770,00 | 114.300.000,00 | - | 110.874.832,00 | | 8.345.938,00 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | Pintu Kabun | | | | | | |
| 11 | SD N 11 Campago Guguk Bulek | 11.234.310,00 | 142.200.000,00 | - | 135.364.970,00 | | 18.069.340,00 |
| 12 | SD N 12 Puhun Pintu Kabun | 24.601.162,00 | 78.032.575,00 | - | 93.803.996,00 | 8.558.965,00 | 270.776,00 |
| 13 | SD N 13 Kubu Gulai Bancah | 99.087,00 | 92.377.505,00 | - | 92.349.097,00 | | 127.495,00 |
| 14 | SD N 14 Tanjung Alam | 21.395.721,00 | 84.600.000,00 | 250.000,00 | 82.213.921,00 | | 24.031.800,00 |
| 15 | SD N 15 Pulai Anak Air | 83.212,00 | 129.600.000,00 | - | 126.917.616,00 | | 2.765.596,00 |
| 16 | SD N 16 Campago Ipuh | 24.396.852,00 | 119.757.025,00 | - | 130.457.950,00 | | 13.695.927,00 |
| 17 | SD N 17 Manggis Ganting | 7.364.797,00 | 124.321.016,00 | - | 123.632.423,00 | | 8.053.390,00 |
| 18 | SD N 18 Campago Guguak Bulek | 8.553.703,00 | 121.231.562,00 | - | 125.068.398,00 | | 4.716.867,00 |
| 19 | SD N 01 Benteng Pasar Atas | 41.259.810,00 | 420.975.464,00 | - | 437.275.662,00 | | 24.959.612,00 |
| 20 | SD N 02 Percontohan | 83.240.829,00 | 435.453.861,00 | 235.000,00 | 484.142.662,00 | | 34.787.028,00 |
| 21 | SD N 03 Pakan Kurai | 47.927.261,00 | 442.612.710,00 | - | 485.445.917,00 | | 5.094.054,00 |
| 22 | SD N 04 Bukit Apit Puhun | 211.314,00 | 116.100.000,00 | - | 115.086.750,00 | | 1.224.564,00 |
| 23 | SD N 05 Tarok Dipo | 712.994,00 | 150.300.000,00 | - | 149.965.721,00 | | 1.047.273,00 |
| 24 | SD N 06 Aur Tajung Tangah Sawah | 602.608,00 | 148.500.000,00 | - | 144.464.954,00 | | 4.637.654,00 |
| 25 | SD N 07 Bukit Cangan | 19.392.300,00 | 260.820.040,00 | 240.000,00 | 249.544.212,00 | | 30.908.128,00 |
| 26 | SD N 08 Tarok Dipo | 92.437.603,00 | 240.116.170,00 | - | 306.667.728,00 | | 25.886.045,00 |
| 27 | SD N 10 Aur Tajung | 204.262,00 | 136.800.000,00 | - | 135.558.914,00 | | 1.445.348,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--------------------|------------|----------------|--|---------------|
| | ang Tengah Sawah | | | | | | |
| 28 | SD N 11 Bukit Apit Puhun | 10.156.138,00 | 140.400.000,0 0 | - | 135.000.000,00 | | 15.556.138,00 |
| 29 | SD N 12 Bukit Cangan g | 659.758,00 | 126.000.000,0 0 | - | 125.999.937,00 | | 659.821,00 |
| 30 | SD N 13 Bukit Apit Puhun | 231.568,00 | 149.400.000,0 0 | 320.000,00 | 149.400.000,00 | | 551.568,00 |
| 31 | SD N 14 Aur Tajungk ang Tengah Sawah | 35.960.577,00 | 325.800.000,0 0 | - | 316.498.325,00 | | 45.262.252,00 |
| 32 | SD N 16 Tarok Dipo | 1.696.942,00 | 288.900.000,0 0 | - | 287.985.320,00 | | 2.611.622,00 |
| 33 | SD N 17 Pakan Kurai | 4.940.760,00 | 261.900.000,0 0 | - | 258.768.231,00 | | 8.072.529,00 |
| 34 | SD N 18 Tarok Dipo | 556.364,00 | 129.600.000,0 0 | - | 129.032.401,00 | | 1.123.963,00 |
| 35 | SD N 19 Aur Tajungk ang Tengah Sawah | 7.591.252,00 | 122.400.000,0 0 | - | 121.979.313,00 | | 8.011.939,00 |
| 36 | SD N 01 Ladang Cakiah | 8.098.010,00 | 140.400.000,0 0 | - | 138.984.950,00 | | 9.513.060,00 |
| 37 | SD N 02 Aur Kuning | 52.686.811,00 | 270.371.286,0 0 | - | 282.961.505,00 | | 40.096.592,00 |
| 38 | SD N 03 Pakan Labuah | 35.016.827,00 | 247.297.780,0 0 | - | 274.981.524,00 | | 7.333.083,00 |
| 39 | SD N 04 Birugo | 20.663.011,00 | 389.390.650,0 0 | - | 410.011.284,00 | | 42.377,00 |
| 40 | SD N 05 Birugo | 5.130.679,00 | 107.080.600,0 0 | - | 105.051.612,00 | | 7.159.667,00 |
| 41 | SD N 06 Parit Antang | 11.809.502,00 | 116.100.000,0 0 | - | 115.902.217,00 | | 12.007.285,00 |
| 42 | SD N 07 Belakan g Balok | 12.285.174,00 | 144.691.805,0 0 | - | 155.527.890,00 | | 1.449.089,00 |
| 43 | SD N 08 Kubu Tanjung | 13.085.480,00 | 137.972.394,0 0 | - | 144.900.000,00 | | 6.157.874,00 |
| 44 | SD N 09 Belakan g Balok | 5.012.154,00 | 211.121.572,0 0 | - | 213.163.911,00 | | 2.969.815,00 |
| 45 | SD N 10 Sapiran | 549.852,00 | 248.400.000,0 0 | - | 247.825.449,00 | | 1.124.403,00 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| 46 | SD N 11 Aur Kuning | 37.876.253,00 | 130.794.509,0 0 | - | 141.817.510,00 | | 26.853.252,00 |
| 47 | SMP N 1 Bukittin ggi | 260.029.308,00 | 534.300.134,0 0 | 200.000,00 | 677.664.282,00 | | 116.865.160,0 0 |
| 48 | SMP N 2 Bukittin ggi | 332.781.308,00 | 767.547.131,0 0 | 50.000,00 | 1.025.255.112,00 | | 75.123.327,00 |
| 49 | SMP N 3 Bukittin ggi | 91.275.167,00 | 504.006.275,0 0 | 492.500,00 | 562.603.366,00 | | 33.170.576,00 |
| 50 | SMP N 4 Bukittin ggi | 150.173.907,00 | 835.187.087,0 0 | 1.675.000,0 0 | 951.395.146,00 | | 35.640.848,00 |
| 51 | SMP N 5 Bukittin ggi | 27.426.517,00 | 672.699.261,0 0 | - | 622.790.842,00 | | 77.334.936,00 |
| 52 | SMP N 6 Bukittin ggi | 326.985.512,00 | 451.566.524,0 0 | - | 639.188.058,00 | | 139.363.978,0 0 |
| 53 | SMP N 7 Bukittin ggi | 172.708.779,00 | 413.269.932,0 0 | - | 557.479.789,00 | | 28.498.922,00 |
| 54 | SMP N 8 Bukittin ggi | 83.807.467,00 | 458.417.114,0 0 | 775.000,00 | 487.470.608,00 | | 55.528.973,00 |
| | Total | 2.139.959.603,00 | 13.139.060.936,00 | 5.667.500,00 | 14.262.057.428,00 | 8.558.965,00 | 1.014.071.646,00 |

Pada SDN 12 Puhun Pintu Kabun, Saldo kas senilai Rp8.558.965,00 merupakan saldo kas ditangan Bendahara BOS 2021 yang meninggal pada tahun 2021. Sehubungan dengan telah diterbitkannya SKTJM atas nama Bendahara tersebut, maka kas senilai Rp8.558.965,00 tersebut di reklas ke akun Aset Lainnya, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Aset Lainnya.

Per tanggal 31 Desember 2022 terdapat saldo kas di bank sebesar Rp950.930.765,00 dan saldo kas tunai sebesar Rp71.699.846,00 pada Bendahara BOS Sekolah Negeri.F Sisa kas tunai tersebut di atas disetorkan ke rekening Kas Bos pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.3.1.5
Saldo Kas Tunai dan Bank Pada Bendahara BOS Sekolah Negeri

| No. | Uraian | Saldo Kas di Bank (Rp) | Saldo Kas Tunai (Rp) | Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp) |
|-----|---------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | SD N 01 Campago Ipuh | 7.623.608,00 | - | 7.623.608,00 |
| 2 | SD N 02 Campago Guguak Bulek | 8.412.888,00 | - | 8.412.888,00 |
| 3 | SD N 03 Pulai Anak Air | 2.503.319,00 | - | 2.503.319,00 |
| 4 | SD N 04 Garegeh | 1.012.889,00 | - | 1.012.889,00 |
| 5 | SD N 05 PPK | 6.385.938,00 | - | 6.385.938,00 |
| 6 | SD N 06 Pulai Anak Air | 44.206,00 | - | 44.206,00 |
| 7 | SD N 07 Kubu Gulai Bancah | 6.813.962,00 | - | 6.813.962,00 |
| 8 | BOS SD N 08 Campago Ipuh | 269.810,00 | - | 269.810,00 |
| 9 | SD N 09 Manggis Ganting | 264.142,00 | 12.591.000,00 | 12.855.142,00 |
| 10 | SD N 10 Puhun Pintu Kabun | 8.345.938,00 | - | 8.345.938,00 |
| 11 | SD N 11 Campago Guguk Bulek | 18.069.340,00 | - | 18.069.340,00 |
| 12 | SD N 12 Puhun Pintu Kabun | 270.772,00 | 4,00 | 270.776,00 |
| 13 | SD N 13 Kubu Gulai Bancah | 127.495,00 | - | 127.495,00 |
| 14 | SD N 14 Tanjung Alam | 7.784.800,00 | 16.247.000,00 | 24.031.800,00 |
| 15 | SD N 15 Pulai Anak Air | 2.765.596,00 | - | 2.765.596,00 |
| 16 | SD N 16 Campago Ipuh | 13.695.927,00 | - | 13.695.927,00 |
| 17 | SD N 17 Manggis Ganting | 8.053.390,00 | - | 8.053.390,00 |
| 18 | SD N 18 Campago Guguak Bulek | 4.716.867,00 | - | 4.716.867,00 |
| 19 | SD N 01 Benteng Pasar Atas | 18.560.175,00 | 6.399.437,00 | 24.959.612,00 |
| 20 | SD N 02 Percontohan | 8.649.588,00 | 26.137.440,00 | 34.787.028,00 |
| 21 | SD N 03 Pakan Kurai | 5.094.054,00 | - | 5.094.054,00 |
| 22 | SD N 04 Bukit Apit Puhun | 1.224.564,00 | - | 1.224.564,00 |
| 23 | SD N 05 Tarok Dipo | 1.047.273,00 | - | 1.047.273,00 |
| 24 | SD N 06 Aur Tajung Tangah Sawah | 4.637.654,00 | - | 4.637.654,00 |
| 25 | SD N 07 Bukit Cangang | 30.908.128,00 | - | 30.908.128,00 |
| 26 | SD N 08 Tarok Dipo | 25.886.045,00 | - | 25.886.045,00 |
| 27 | SD N 10 Aur Tajung Tangah Sawah | 1.445.348,00 | - | 1.445.348,00 |
| 28 | SD N 11 Bukit Apit Puhun | 15.556.138,00 | - | 15.556.138,00 |
| 29 | SD N 12 Bukit Cangang | 659.821,00 | - | 659.821,00 |
| 30 | SD N 13 Bukit Apit Puhun | 551.568,00 | - | 551.568,00 |
| 31 | SD N 14 Aur Tajung Tangah Sawah | 45.262.252,00 | - | 45.262.252,00 |
| 32 | SD N 16 Tarok Dipo | 2.611.622,00 | - | 2.611.622,00 |
| 33 | SD N 17 Pakan Kurai | 8.072.529,00 | - | 8.072.529,00 |
| 34 | SD N 18 Tarok Dipo | 1.123.963,00 | - | 1.123.963,00 |
| 35 | SD N 19 Aur Tajung Tangah Sawah | 8.011.939,00 | - | 8.011.939,00 |
| 36 | SD N 01 Ladang Cakiah | 9.513.060,00 | - | 9.513.060,00 |
| 37 | SD N 02 Aur Kuning | 40.096.592,00 | - | 40.096.592,00 |
| 38 | SD N 03 Pakan Labuah | 7.333.083,00 | - | 7.333.083,00 |
| 39 | SD N 04 Birugo | 42.377,00 | - | 42.377,00 |
| 40 | SD N 05 Birugo | 7.159.667,00 | - | 7.159.667,00 |
| 41 | SD N 06 Parit Antang | 12.007.285,00 | - | 12.007.285,00 |
| 42 | SD N 07 Belakang Balok | 1.449.089,00 | - | 1.449.089,00 |
| 43 | SD N 08 Kubu Tanjung | 6.157.874,00 | - | 6.157.874,00 |
| 44 | SD N 09 Belakang Balok | 2.969.815,00 | - | 2.969.815,00 |
| 45 | SD N 10 Sapiran | 1.124.403,00 | - | 1.124.403,00 |
| 46 | SD N 11 Aur Kuning | 26.853.252,00 | - | 26.853.252,00 |
| 47 | SMP N 1 Bukittinggi | 116.865.160,00 | - | 116.865.160,00 |
| 48 | SMP N 2 Bukittinggi | 75.123.327,00 | - | 75.123.327,00 |
| 49 | SMP N 3 Bukittinggi | 33.170.576,00 | - | 33.170.576,00 |
| 50 | SMP N 4 Bukittinggi | 33.874.848,00 | 1.766.000,00 | 35.640.848,00 |
| 51 | SMP N 5 Bukittinggi | 77.334.936,00 | - | 77.334.936,00 |

| No. | Uraian | Saldo Kas di Bank (Rp) | Saldo Kas Tunai (Rp) | Saldo Kas Per 31 Des 2022 (Rp) |
|-----|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 52 | SMP N 6 Bukittinggi | 139.363.978,00 | - | 139.363.978,00 |
| 53 | SMP N 7 Bukittinggi | 28.498.922,00 | - | 28.498.922,00 |
| 54 | SMP N 8 Bukittinggi | 55.528.973,00 | - | 55.528.973,00 |
| | Total | 950.930.765,00 | 63.140.881,00 | 1.014.071.646,00 |

Pada Tahun 2022 Dana BOS dan BOP disalurkan dalam bagian Pendapatan DAK Non Fisik, dimana jika terdapat sisa dana di akhir tahun akan diperhitungkan pada penyaluran tahun selanjutnya. Dana BOS disalurkan langsung oleh Pemerintah Pusat ke rekening Bendahara BOS dan BOP sekolah yang anggarannya ditetapkan pada rekening Belanja Operasional BOS dan BOP untuk SD dan SMP Negeri. namun untuk SD, SMP dan PAUD swasta dianggarkan di APBD melalui rekening Belanja Hibah. Kedua macam penganggaran Belanja yang berasal dari Dana BOS dan BOP tersebut dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Pada LRA, pendapatan dana BOS dan BOP dicatat pada akun Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada pos Pendapatan Dana Perimbangan dan belanjanya dicatat berdasarkan pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berupa SP2B setiap bulannya berdasarkan usulan SP3B dari SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada akun yang dianggarkan sesuai DPA masing-masing.

Selain sisa pada sekolah negeri, terdapat sisa Dana DAK Non Fisik-BOS dan BOP pada SD, SMP dan PAUD swasta, penyaluran dilakukan dengan cara pemindahbukukan dari RKUN langsung ke rekening satuan Pendidikan, sisa belanja dari dana hibah yang diterima oleh sekolah tersebut tidak diakui sebagai bagian sisa Kas pada Pemerintah Kota Bukittinggi, karena sisa tersebut berada pada sekolah swasta yang bukan bagian penguasaan BUD Pemerintah Kota Bukittinggi.

Berikut sisa Dana BOS yang bersumber dari DAK Non Fisik pada SD dan SMP swasta, yang tidak dihitung sebagai Aset Lancar pada Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu:

Tabel 5.3.1.6
Sisa Kas Dana BOS Sekolah Swasta

| No | Sekolah | SILPA sampai dengan 2021 | Penyaluran 2022 | Total Anggaran 2022 | Realisasi Anggaran 2022 | SILPA BOS s.d 31 Des 2022 |
|----|----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7=5-6 |
| 1 | SD ISLAM TERPADU MASYITHAH | 14.897.079,00 | 279.900.000,00 | 294.797.079,00 | 279.723.552,00 | 15.073.527,00 |
| 2 | SDIT CAHAYA HATI | 1.827.090,00 | 490.500.000,00 | 492.327.090,00 | 485.003.232,00 | 7.323.858,00 |
| 3 | SDIT INSAN KAMIL | 9.134.700,00 | 586.665.300,00 | 595.800.000,00 | 595.444.779,00 | 355.221,00 |
| 4 | SD FRANSISKUS | 33.716.015,00 | 317.700.000,00 | 351.416.015,00 | 344.490.015,00 | 6.926.000,00 |
| 5 | SD JAMIYYATUL HUJJAJ BUKITTINGGI | 121.868,00 | 577.657.430,00 | 577.779.298,00 | 575.369.313,00 | 2.409.985,00 |
| 6 | SD TRISULA PERWARI | - | 48.600.000,00 | 48.600.000,00 | 48.559.040,00 | 40.960,00 |
| 7 | SD ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI | 16.998.687,00 | 673.200.000,00 | 690.198.687,00 | 677.680.312,00 | 12.518.375,00 |

| No | Sekolah | SILPA sampai dengan 2021 | Penyaluran 2022 | Total Anggaran 2022 | Realisasi Anggaran 2022 | SILPA BOS s.d 31 Des 2022 |
|----|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7=5-6 |
| 8 | SD ISLAM EXCELLENT PLUS | 243.677,00 | 432.000.000,00 | 432.243.677,00 | 431.360.168,00 | 883.509,00 |
| 9 | SDIT AL AZHAR DARUL JANNAH | 988.511,00 | 214.718.489,00 | 215.707.000,00 | 214.550.000,00 | 1.157.000,00 |
| 10 | SD ISLAM AL FALAH | 27.327.171,00 | 384.300.000,00 | 411.627.171,00 | 403.730.622,00 | 7.896.549,00 |
| 11 | SDIT SYAHIRAL ILMI | 36.995,00 | 449.100.000,00 | 449.136.995,00 | 434.336.200,00 | 14.800.795,00 |
| 12 | SDS IT ULUL ALBAB BUKITTINGGI | - | 34.080.000,00 | 34.080.000,00 | 34.040.000,00 | 40.000,00 |
| 13 | SDI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK | 57.795,00 | 146.668.275,00 | 146.726.070,00 | 146.572.871,00 | 153.199,00 |
| 14 | SD ISLAM AL AZHAR 67 BUKITTINGGI | 25.355.633,00 | 399.404.367,00 | 424.760.000,00 | 420.802.106,00 | 3.957.894,00 |
| 15 | SD SURYA KIDS | - | 110.700.000,00 | 110.700.000,00 | 110.700.000,00 | - |
| 16 | SD ISLAM CENDEKIA | 4.882.557,00 | 89.080.343,00 | 93.962.900,00 | 92.590.438,00 | 1.372.462,00 |
| 17 | SDIT ADZKIA BUKITTINGGI | 90.000,00 | 85.500.000,00 | 85.590.000,00 | 85.500.000,00 | 90.000,00 |
| 18 | SD SEKOLAH ALAM BUKITTINGGI | 81.104,00 | 59.379.753,00 | 59.460.857,00 | 59.460.857,00 | - |
| 19 | SD LEBAH PEMBELAJAR | - | 81.000.000,00 | 81.000.000,00 | 79.365.000,00 | 1.635.000,00 |
| | Total SD Swasta | 135.758.882,00 | 5.460.153.957,00 | 5.595.912.839,00 | 5.519.278.505,00 | 76.634.334,00 |
| 20 | SMP PSM BUKITTINGGI | 4.594.731,00 | 60.763.658,00 | 65.358.389,00 | 62.700.000,00 | 2.658.389,00 |
| 21 | SMP ISLAM AL ISHLAH | 132.668.278,00 | 537.901.449,00 | 670.569.727,00 | 638.343.075,00 | 32.226.652,00 |
| 22 | SMPS XAVERIUS | 25.656.016,00 | 198.000.000,00 | 223.656.016,00 | 209.981.301,00 | 13.674.715,00 |
| 23 | SMPIT CAHAYA HATI BUKITTINGGI | - | 135.300.000,00 | 135.300.000,00 | 134.614.850,00 | 685.150,00 |
| 24 | SMP IT SJECH M. DJAMIL DJAMBEK | - | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | - |
| 25 | SMP JAMIYYATUL HUJJAJ | 707.584,00 | 53.285.616,00 | 53.993.200,00 | 53.245.450,00 | 747.750,00 |
| 26 | SMP ISLAM AL AZHAR 39 | 12.648.200,00 | 107.374.000,00 | 120.022.200,00 | 101.096.422,00 | 18.925.778,00 |
| | Total SMP Swasta | 176.274.809,00 | 1.164.124.723,00 | 1.340.399.532,00 | 1.271.481.098,00 | 68.918.434,00 |
| | Total | 312.033.691,00 | 6.624.278.680,00 | 6.936.312.371,00 | 6.790.759.603,00 | 145.552.768,00 |

F. Kas BOP

Tahun 2022
(Rp)
202,00

Tahun 2021
(Rp)
0,00

Kas BOP Tahun 2021 bersaldo Rp0,00, pada tahun 2022 terdapat kas BOP sebesar Rp202,00 yang merupakan sisa kas pada Bendahara BOP Kesetaraan Negeri yaitu SPNF SKB tahun 2022. Uraian mutasi kas BOP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BOP Negeri

Tabel 5.3.1.9 Mutasi Kas pada Bendahara Dana BOP Negeri Tahun 2022

| No | Nama Sekolah | Penyaluran Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Pengembalian Ke Rkun | Sisa Per 31 Des 2022 |
|----|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-4-5 |
| 1 | Tk Negeri Pembina | 130.200.000,00 | 130.200.000,00 | - | - |

| No | Nama Sekolah | Penyaluran Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Pengembalian Ke Rkun | Sisa Per 31 Des 2022 |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-4-5 |
| 2 | Tk Negeri 1 Bukittinggi | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | - | - |
| | Total Sekolah Negeri | 150.600.000,00 | 150.600.000,00 | - | - |
| | Total BOP PAUD | 2.177.535.000,00 | 2.167.074.000,00 | - | - |

2. BOP Kesetaraan Negeri

Tabel 5.3.1.10 Mutasi Kas pada Bendahara Dana BOP Kesetaraan Negeri Tahun 2022

| No. | Uraian | Per 31 Des 2021 | Pendapatan (Rp) | Pengembalian Atas Temuan Inspektorat (Rp) | Belanja (Rp) | Per 31 Des 2022 (Rp) |
|-----|--------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3+4+5-6 |
| 1 | SPNF SKB | - | 250.500.000,00 | - | 250.499.798,00 | 202,00 |
| | Total | - | 250.500.000,00 | - | 250.499.798,00 | 202,00 |

Selain informasi BOP Negeri dan Kesetaraan Negeri, juga kami informasikan sisa BOP untuk swasta yang dianggarkan pada APBD pada rekening Belanja Hibah, yang sisa kas tidak dihitung menjadi bagian Kas Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Sisa Dana BOP PAUD Swasta

Tabel 5.3.1.7
Sisa Kas Dana BOP PAUD Swasta

| No | Nama Sekolah | Penyaluran Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Pengembalian Ke Rkun | Sisa Per 31 Des 2022 |
|----|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-4-5 |
| | KB | | | | |
| 1 | KB Daarul Uluum | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | - |
| 2 | KB Ibnu Sina | 2.535.000,00 | - | 2.535.000,00 | - |
| 3 | KB Islam Excellent | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | | - |
| 4 | KB Tunas Bangsa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | - |
| 5 | KB Adzkia | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | - |
| 6 | KB Aisyiyah I | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | - |
| 7 | KB Al-Azhar | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | | - |
| 8 | KB Berbasis Masjid Al Abrar | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | | - |
| 9 | KB Daud Hkbp | 1.800.000,00 | 951.000,00 | | 849.000,00 |
| 10 | KB Duta Wahana | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | - |
| 11 | Kb Genius Kids Iii | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | | - |
| 12 | KB Mutiara | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | | - |

| No | Nama Sekolah | Penyaluran Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Pengembalian Ke Rkun | Sisa Per 31 Des 2022 |
|----|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-4-5 |
| 13 | KB Al Falah | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | | - |
| 14 | KB An Naufa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | - |
| 15 | KB Assalaam | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | | - |
| 16 | KB Az Zahrah | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | | - |
| 17 | KB Bougenvill | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | | - |
| 18 | Kb Genius Kids | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | | - |
| 19 | KB Inklusi Inspirasi Semut-Semut | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | | - |
| 20 | KB Kasih Ibu Al Wustha | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | - |
| 21 | KB Khalifah 35 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | | - |
| 22 | KB Seruni | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | | - |
| 23 | KB Surya Kids | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | | - |
| 24 | KB Tunas Harapan | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | - |
| 25 | Kelompok Bermain Al Ikhwan | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | | - |
| | SPS | | - | | - |
| 1 | SPS Buah Hati | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | | - |
| 2 | SPS Dahlia | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | | - |
| 3 | SPS Flamboyan | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | | - |
| 4 | SPS Nurul Ilmi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | | - |
| 5 | SPS Palapa Saiyo | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | | - |
| 6 | SPS Lentera | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | | - |
| 7 | SPS Maisharah | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | | - |
| 8 | SPS Mata Hati | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | | - |
| 9 | SPS Nurul Huda | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | | - |
| 10 | SPS Sbb Batu Hampa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | - |
| 11 | SPS Anggur Al-Wustha | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | | - |
| 12 | SPS Ar Rahim | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | | - |
| | TK | | - | | - |
| 1 | TK Aisyiyah Iii | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | | - |
| 2 | TK Aisyiyah V | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | | - |
| 3 | TK Cerdas Ceria | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | - |
| 4 | TK Ibnu Sina | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | | - |
| 5 | TK Islam Al-Wirdah | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | | - |
| 6 | TK Islam Excellent | 61.800.000,00 | 61.800.000,00 | | - |
| 7 | TK Islam Masyithah | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | | - |
| 8 | TK Islam Nurul Hidayah | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | - |
| 9 | TK Kartika 1 – 57 | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | | - |
| 10 | TK Kartika 1-58 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | | - |
| 11 | TK Kemala Bhayangkari 11 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | | - |
| 12 | TK Melur Putih | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | | - |
| 13 | TK Surya Kids Duo Platinum | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | | - |
| 14 | TK Surya Kids Tigo | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | | - |

| No | Nama Sekolah | Penyaluran Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Pengembalian Ke Rkun | Sisa Per 31 Des 2022 |
|----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-4-5 |
| 15 | TK Tunas Bangsa | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | | - |
| 16 | TK Aisyiyah I | 103.800.000,00 | 103.800.000,00 | | - |
| 17 | TK Aisyiyah Ii | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | | - |
| 18 | TK Aisyiyah Iv | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | | - |
| 19 | TK Flora Pertanian | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | | - |
| 20 | TK Gajah Tongga | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | | - |
| 21 | TK Islam Adzki | 73.200.000,00 | 73.200.000,00 | | - |
| 22 | TK Islam Al Mubarak | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | - |
| 23 | TK Islam Al-Azhar | 73.800.000,00 | 73.800.000,00 | | - |
| 24 | TK Islam Jamiyatul Hujjaj | 76.200.000,00 | 76.200.000,00 | | - |
| 25 | TK Islam Riyadul Ilmi | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | - |
| 26 | TK Mutiara | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | | - |
| 27 | TK Paud Berbasis Masjid Al Abrar | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | | - |
| 28 | TK S Harapan Mama | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | | - |
| 29 | TK S Kuntum Mekar | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | | - |
| 30 | TK S Trisula Perwari | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | | - |
| 31 | TK Teladan Pertiwi Tunas Harapan | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | | - |
| 32 | Taman Kanak-Kanak Asas | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | | - |
| 33 | TK Assalaam | 30.600.000,00 | 30.600.000,00 | | - |
| 34 | TK Genius Kids Ii | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | | - |
| 35 | TK Inklusi Inspirasi Semut-Semut | 61.800.000,00 | 61.800.000,00 | | - |
| 36 | Tk Irsyaddunnaas | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | | - |
| 37 | TK Islam Al Azhar 48 | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | | - |
| 38 | TK Islam Al-Falah | 55.800.000,00 | 55.800.000,00 | | - |
| 39 | TK Islam Al-Furqan | 17.400.000,00 | 17.400.000,00 | | - |
| 40 | Tk Islam Al-Ishlah | 63.600.000,00 | 63.600.000,00 | | - |
| 41 | TK Islam Semai Benih Bangsa Al Akkabah | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | | - |
| 42 | TK Kenari | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | - |
| 43 | TK Khalifah 35 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | | - |
| 44 | Tk Mutiara Insani | 8.400.000,00 | 4.437.000,00 | 3.963.000,00 | - |
| 45 | TK Pertiwi Al-Wustha | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | | - |
| 46 | TK Qurratu Aini | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | | - |
| 47 | TK Surya Kids | 103.800.000,00 | 103.800.000,00 | | - |
| 48 | TK Tali Kasih Bunda | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | | - |
| | TPA | | - | | - |
| 1 | TPA Cerdas Ceria | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | | - |
| 2 | TPA Ibnu Sina Yarsi | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | | - |
| 3 | TPA Ibunda | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | | - |
| 4 | TPA Islam Excellent | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | | - |
| 5 | TPA Mitra Bunda | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | | - |

| No | Nama Sekolah | Penyaluran Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Pengembalian Ke Rkun | Sisa Per 31 Des 2022 |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3-4-5 |
| 6 | TPA Tunas Bangsa | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | | - |
| 7 | TPA Aisyiyah I | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 | | - |
| 8 | TPA Mardi Widayat | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | | - |
| 9 | TPA Mutiara | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | | - |
| 10 | TPA Mutiara Bunda | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | - |
| 11 | TPA Nafha | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | | - |
| 12 | TPA Prima Asuh | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | | - |
| 13 | TPA Al Misbah | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | | - |
| 14 | TPA Amanah | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | - |
| 15 | TPA Avicena Bukittinggi | 6.600.000,00 | 3.486.000,00 | | 3.114.000,00 |
| 16 | TPA Cemara | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | - |
| 17 | TPA Qurratu Aini | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | | - |
| 18 | TPA Surya Kids | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | | - |
| | Total Sekolah Swasta | 2.026.935.000,00 | 2.016.474.000,00 | 6.498.000,00 | 3.963.000,00 |

Beberapa catatan pelaksanaan BOP PAUD tahun 2022 pada BOP PAUD swasta di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kas pada Yayasan KB DAUD HKBP senilai Rp849.000,00 merupakan dana BOP PAUD yang telah masuk ke rekening yayasan KB PAUD HKBP pada tahun 2022, namun karna lembaga telah tutup pada tahap II Tahun 2022, maka dana hibah tersebut hanya dipegang oleh pengurus dan telah dikembalikan ke Kas Daerah tanggal 6 Maret 2023 dan saat ini tanggal 16 Mei 2023 masih berada di RKUD menunggu proses dikembalikan ke RKUN.
 - b. Kas sebesar Rp3.114.000,00 merupakan dana BOP PAUD Tahap II pada TPA Avicena Bukittinggi, dana BOP PAUD Tahap I senilai Rp3.486.000,00 telah masuk ke Rekening TPA Avicena Bukittinggi dan telah dibelanjakan serta SPJ nya telah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi. namun untuk dana BOP PAUD Tahap II senilai Rp3.114.000,00 tidak masuk ke rekening TPA Avicena Bukittinggi, dikarenakan ada permasalahan internal, sehingga yayasan mengganti Rekening tanpa ada pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dan Kemendikbudristek RI, sehingga dana tahap II yang telah ditransfer pemerintah pusat melalui KPPN Bukittinggi tertahan pada Kas Penampung Bank Nagari/ BPD Sumatera Barat. Penyaluran dana tersebut melalui SP2D Nomor 220111304005700000096 tanggal 06 September 2022, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2023 KPPN mengembalikan dana BOP tersebut ke Kas BUN melalui SP2D-R nomor 23011140700000100001.
2. Sisa Dana BOP Kesetaraan Swasta

Sisa Dana BOP Kesetaraan Swasta Tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.3.1.8
Sisa Kas Dana BOP Kesetaraan

| NO | Nama Sekolah | Penyaluran Tahun 2022 | Realisasi Tahun 2022 | Silpa per 31 Desember 2022 |
|----|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| | PKBM | | | |
| 1 | PKBM SERBA GUNA | 58.800.000 | 58.800.000 | - |
| 2 | PKBM AI MA'ARIF | 89.700.000 | 89.700.000 | - |
| 3 | PKBM KASIH BUNDO | 320.000.000 | 320.000.000 | - |
| | Total | 468.500.000 | 468.500.000 | - |

1. Piutang

Tahun 2022
Rp
43.377.889.031,00

Tahun 2021
Rp
47,377,310,959.00

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Sedangkan Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang.

Total Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi secara bruto sebagaimana yang tertera pada Neraca tahun 2022 adalah Rp43.377.889.031,00 Penyajian piutang pada Neraca tahun 2022 adalah berdasarkan IPSAP 04 PP. 71 tahun 2010, piutang secara golongan beserta nilai nettonya adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.4 Penyajian Piutang pada Neraca Tahun 2022 dan 2021

| URAIAN | 2022 | 2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Piutang Pajak | 14.306.957.898,00 | 13.321.325.831,00 |
| Penyisihan Piutang Pajak | 9.088.313.560,00 | 7.664.584.149,00 |
| Piutang Pajak Netto | 5.218.644.338,00 | 5.656.741.682,00 |
| Piutang Retribusi | 12.046.237.364,00 | 14.565.925.763,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi | 10.151.975.230,00 | 8.593.829.761,00 |
| Piutang Retribusi Netto | 1.894.262.134,00 | 5.972.096.002,00 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 8.363.843.874,00 | 6.641.291.925,00 |
| Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | - | 33.785.979,10 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan netto | 8.363.843.874,00 | 6.607.505.945,90 |
| Piutang Lain -Lain PAD Yang Sah | 4.632.545.459,00 | 8.361.251.441,00 |
| Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg sah | 1.844.230.624,00 | 2.711.651.262,00 |
| Piutang lain-lain PAD yg sah netto | 2.958.338.601,00 | 5.649.600.179,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | - | 3.849.825,00 |
| Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat | - | 962.456,25 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto | - | 2.887.368,75 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 3.781.987.835,00 | 4.209.749.129,00 |
| Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah | - | 1.052.437.282,25 |
| Piutang Transfer Antar Daerah netto | 3.781.987.835,00 | 3.157.311.846,75 |
| Piutang Lainnya | 246.316.601,00 | 273.917.045,00 |

| URAIAN | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Penyisihan Piutang Lainnya | 246.316.601,00 | 246.316.601,00 |
| Piutang Lainnya Netto | - | 27.600.444,00 |
| Beban Dibayar Dimuka | | |
| Total Piutang Bruto | 43.377.889.031,00 | 47.377.310.959,00 |
| Total Penyisihan Piutang | 21.330.836.015,00 | 20.303.567.490,60 |
| Total Piutang Netto | 22.047.053.016,00 | 27.073.743.468,40 |

A. Piutang Pajak Daerah**Tahun 2022****Tahun 2021****Rp****Rp****14.306.957.898,00****13.321.325.831,00**

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dikelola oleh Badan Keuangan.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 yang lalu sebesar Rp13.321.325.831,00. Selama Tahun 2022 terdapat mutasi bersih sebesar Rp985.632.067,00, sehingga saldo Tahun 2022 menjadi sebesar Rp14.306.957.898,00. Rincian Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.5 Mutasi Piutang Pajak Tahun 2022

| Nama Akun | Saldo Akhir 2021 (Rp) (Audited) | Koreksi (Rp) | Saldo Awal 2022 (Rp) Setelah Koreksi | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir (Rp) |
|--|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Bertambah | Berkurang | |
| Piutang Pajak Daerah | 13.321.325.831,00 | | 13.321.325.831,00 | 6.275.479.333,00 | 5.289.847.266,00 | 14.306.957.898,00 |
| Piutang Pajak Hotel | 690.926.705,00 | | 690.926.705,00 | 30.874.500,00 | 77.119.138,00 | 644.682.067,00 |
| Piutang Pajak Hotel | 689.986.705,00 | | 689.986.705,00 | 30.874.500,00 | 77.119.138,00 | 643.742.067,00 |
| Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya | - | | - | - | - | - |
| Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 940.000,00 | | 940.000,00 | - | - | 940.000,00 |
| Piutang Pajak Restoran | 349.055.200,00 | | 349.055.200,00 | 134.306.340,00 | 129.913.386,00 | 353.448.154,00 |
| Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya | 329.994.600,00 | - | 329.994.600,00 | 105.613.175,00 | 86.472.221,00 | 349.135.554,00 |
| Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 15.565.500,00 | | 15.565.500,00 | 15.422.700,00 | 30.170.700,00 | 817.500,00 |
| Piutang Pajak Jasa Boga / Katering dan sejenisnya | 3.495.100,00 | | 3.495.100,00 | 13.270.465,00 | 13.270.465,00 | 3.495.100,00 |
| Piutang Pajak Hiburan | 11.248.704,00 | | 11.248.704,00 | 3.000.000,00 | 4.188.750,00 | 10.059.954,00 |
| Piutang Pajak Tontonan Film | 4.188.750,00 | | 4.188.750,00 | - | 4.188.750,00 | - |
| Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan bermotor, dan Permainan ketangkasan | 7.059.954,00 | | 7.059.954,00 | 3.000.000,00 | - | 10.059.954,00 |

| Nama Akun | Saldo Akhir 2021 (Rp) (Audited) | Koreksi (Rp) | Saldo Awal 2022 (Rp) Setelah Koreksi | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir (Rp) |
|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | Bertambah | Berkurang | |
| Piutang Pajak Reklame | 883.683.614,00 | | 883.683.614,00 | 998.201.437,00 | 954.982.188,00 | 926.902.863,00 |
| Piutang Pajak Reklame/Papan, Billboard/Videotron/Megatron | 864.133.114,00 | | 864.133.114,00 | 889.705.937,00 | 842.561.688,00 | 911.277.363,00 |
| Piutang Pajak Reklame Kain | 19.550.500,00 | | 19.550.500,00 | 108.495.500,00 | 112.420.500,00 | 15.625.500,00 |
| Piutang Pajak Penerangan Jalan | 400.000,00 | | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 |
| Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain | 400.000,00 | | 400.000,00 | - | - | 400.000,00 |
| Piutang Pajak Parkir | 1.096.520,00 | | 1.096.520,00 | - | - | 1.096.520,00 |
| Piutang Pajak Parkir | 1.096.520,00 | | 1.096.520,00 | - | - | 1.096.520,00 |
| Piutang Pajak Air Tanah | 13.676.103,00 | | 13.676.103,00 | 77.239.048,00 | 76.075.811,00 | 14.839.340,00 |
| Piutang Pajak Air Tanah | 13.676.103,00 | | 13.676.103,00 | 77.239.048,00 | 76.075.811,00 | 14.839.340,00 |
| Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 11.315.583.714,00 | | 11.315.583.714,00 | 4.853.142.158,00 | 3.925.523.043,00 | 12.243.202.829,00 |
| Piutang PBBP2 | 11.315.583.714,00 | | 11.315.583.714,00 | 4.853.142.158,00 | 3.925.523.043,00 | 12.243.202.829,00 |
| Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 55.655.271,00 | - | 55.655.271,00 | 178.715.850,00 | 122.044.950,00 | 112.326.171,00 |
| Piutang BPHTB Pemindahan Hak | 17.370.471,00 | | 17.370.471,00 | 78.715.850,00 | 13.044.950,00 | 83.041.371,00 |
| Piutang BPHTB Pemindahan Hak Baru | 38.284.800,00 | | 38.284.800,00 | 100.000.000,00 | 109.000.000,00 | 29.284.800,00 |

B. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tahun 2022
Rp
(9.088.313.560,00)

Tahun 2021
Rp
(7.664.584.149,00)

Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2021 yang lalu sebesar (Rp7.664.584.149,00). Untuk nilai penyisihan piutang pajak tahun 2022 adalah sebesar (9.088.313.560,00). Rincian perhitungan penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.6 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022

| Nama Piutang | Nilai | Kurang 1 Tahun (0,5%) | 1-3 Tahun (25%) | 3-5 Tahun (50%) | Lebih 5 Tahun (100%) | Jumlah Penyisihan |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Pajak Hotel | 644.682.067,00 | 10.045,00 | 26.612.650,00 | 106.528.219,00 | 323.165.937,00 | 456.316.851,00 |
| Pajak Restoran | 353.448.154,00 | 115.472,00 | 16.439.929,00 | 45.099.680,00 | 174.394.773,00 | 236.049.854,00 |
| Pajak Hiburan | 10.059.954,00 | 15.000,00 | - | - | 7.059.954,00 | 7.074.954,00 |
| Pajak Reklame | 926.902.863,00 | 478.759,00 | 57.285.375,00 | 61.856.000,00 | 478.297.614,00 | 597.917.748,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 400.000,00 | - | - | - | 400.000,00 | 400.000,00 |

| Nama Piutang | Nilai | Kurang 1 Tahun (0,5%) | 1-3 Tahun (25%) | 3-5 Tahun (50%) | Lebih 5 Tahun (100%) | Jumlah Penyisihan |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pajak Parkir | 1.096.520,00 | - | 59.930,00 | - | 856.800,00 | 916.730,00 |
| Pajak Air tanah | 14.839.340,00 | 7.995,00 | 1.249.720,00 | 550.990,00 | 7.139.462,00 | 8.948.167,00 |
| PBB-P2 | 12.243.202.829,00 | 4.638.096,00 | 805.637.222,00 | 1.134.613.062,00 | 5.823.808.703,00 | 7.768.697.083,00 |
| BPHTB | 112.326.171,00 | 328.355,00 | 11.663.818,00 | - | - | 11.992.173,00 |
| Jumlah | 14.306.957.898,00 | 5.593.722,00 | 918.948.644,00 | 1.348.647.951,00 | 6.815.123.243,00 | 9.088.313.560,00 |

C. Piutang Retribusi Daerah

Tahun 2022 **Tahun 2021**
Rp **Rp**
12.046.237.364,00 **14.565.925.763,00**

Piutang Retribusi Daerah timbul apabila sampai akhir periode laporan terdapat tagihan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi.

Saldo piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 yang lalu adalah Rp14.565.925.763,00. Selama tahun 2022 terdapat mutasi bersih dengan pengurangan sebesar Rp2.519.688.399,00, sehingga saldo tahun 2022 menjadi sebesar Rp12.046.237.364,00. Rincian Piutang Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 5.3.7 Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2021

| No | Nama Akun | SALDO AWAL | KOREKSI | SALDO AWAL SETELAH KOREKSI | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|----|--|-------------------|---------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| I | Piutang Retribusi Daerah | 14.565.925.763,00 | - | 14.565.925.763,00 | 9.278.609.645,00 | 11.798.298.044,00 | 12.046.237.364,00 |
| A | Piutang Retribusi Jasa Umum | 2.877.761.477,00 | - | 2.877.761.477,00 | 1.914.055.077,00 | 1.926.117.790,00 | 2.865.698.764,00 |
| 1 | Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 849.193.030,00 | | 849.193.030,00 | 808.500.000,00 | 743.947.690,00 | 913.745.340,00 |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | - |
| a | Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 38.560.000,00 | - | 38.560.000,00 | 382.582.500,00 | 382.582.500,00 | 38.560.000,00 |
| | DINAS , KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | | | | | | - |
| b | Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 810.633.030,00 | - | 810.633.030,00 | 425.917.500,00 | 361.365.190,00 | 875.185.340,00 |
| 2 | Piutang Retribusi Pelayanan Parkir | 60.393.850,00 | | 60.393.850,00 | - | - | 60.393.850,00 |

| No | Nama Akun | SALDO AWAL | KOREKSI | SALDO AWAL SETELAH KOREKSI | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|----|--|--------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| | di Tepi Jalan Umum | | | | | | |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | - |
| a | Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 60.393.850,00 | | 60.393.850,00 | - | - | 60.393.850,00 |
| 3 | Piutang Retribusi Pelayanan Pasar | 1.763.244.597,00 | | 1.763.244.597,00 | 835.155.077,00 | 713.600.100,00 | 1.884.799.574,00 |
| | DINAS , KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | | | | | | - |
| a | Piutang Retribusi Los | 1.609.216.602,00 | | 1.609.216.602,00 | 34.290.281,00 | 569.185.762 | 1.074.321.121,00 |
| b | Piutang Retribusi Kios | 154.027.995,00 | | 154.027.995,00 | 800.864.796,00 | 144.414.338 | 810.478.453,00 |
| 4 | Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 8.890.000,00 | | 8.890.000,00 | - | 8.890.000,00 | - |
| | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | - |
| a | Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 8.890.000,00 | | 8.890.000,00 | | 8.890.000,00 | - |
| 5 | Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 196.040.000,00 | | 196.040.000,00 | 270.400.000,00 | 459.680.000,00 | 6.760.000,00 |
| | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | - |
| a | Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 196.040.000,00 | | 196.040.000,00 | 270.400.000,00 | 459.680.000,00 | 6.760.000,00 |
| B | Piutang Retribusi Jasa Usaha | 11.203.083.686,00 | - | 11.203.083.686,00 | 7.364.554.568,00 | 9.872.180.254,00 | 8.695.458.000,00 |
| 1 | Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 907.806.732,00 | | 907.806.732,00 | 89.682.200,00 | 750.206.900,00 | 247.282.032,00 |
| | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | - |
| a | Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 694.280.000,00 | | 694.280.000,00 | | 694.280.000,00 | - |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | - |
| b | Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | 213.526.732,00 | | 213.526.732,00 | 89.682.200,00 | 55.926.900,00 | 247.282.032,00 |
| c | Piutang Retribusi Pemakaian alat | - | | - | | | - |

| No | Nama Akun | SALDO AWAL | KOREKSI | SALDO AWAL SETELAH KOREKSI | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|----|--|--------------------------|---------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| 2 | Piutang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan | 10.091.613.524,00 | - | 10.091.613.524,00 | 7.274.872.368,00 | 8.941.974.094,00 | 8.424.511.798,00 |
| | DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | | | | | | - |
| a | Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan | 7.467.974.730,00 | | 10.091.613.524,00 | 7.274.872.368,00 | 8.941.974.094,00 | 5.800.873.004,00 |
| b | Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Pertokoan Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan | 2.623.638.794,00 | | - | | | 2.623.638.794,00 |
| 3 | Piutang Retribusi Terminal | 23.364.170,00 | - | 23.364.170,00 | - | - | 23.364.170,00 |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | - |
| a | Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas lainnya dilingkungan Terminal | 23.364.170,00 | | 23.364.170,00 | | | 23.364.170,00 |
| 4 | Piutang Retribusi Tempat Olahraga | 180.299.260,00 | - | 180.299.260,00 | - | 179.999.260,00 | 300.000,00 |
| | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | - |
| a | Piutang Retribusi Tempat Olah Raga | 180.299.260,00 | | 180.299.260,00 | - | 179.999.260,00 | 300.000,00 |
| C | Piutang Retribusi Perizinan Tertentu | 485.080.600,00 | - | 485.080.600,00 | - | - | 485.080.600,00 |
| 1 | Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 485.080.600,00 | - | 485.080.600,00 | - | - | 485.080.600,00 |
| | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | | | | | | |
| a | Piutang Retribusi Izin Bangunan | 485.080.600,00 | | 485.080.600,00 | - | - | 485.080.600,00 |

D. Penyisihan Piutang Retribusi**Tahun 2022****Tahun 2021**

Rp
(9.278.565.970,00)

Rp
(8.593.829.761,00)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 yang lalu sebesar (8.593.829.761,00). Untuk nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022 adalah sebesar (Rp10.158.735.230,00), sehingga kenaikan sebesar (Rp1.564.905.469,00). Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.8 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2022

| Nama Piutang | Nilai | Kurang 1 Bulan (0,5%) | 1-3 Bulan (25%) | 3-12 Bulan (50%) | Lebih 12 Bulan (100%) | Jumlah Penyisihan |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 38.560.000,00 | - | - | - | 38.560.000,00 | 38.560.000,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 38.560.000,00 | - | - | - | 38.560.000,00 | 38.560.000,00 |
| Dinas Perhubungan | 83.758.020,00 | - | - | - | 83.758.020,00 | 83.758.020,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 83.758.020,00 | - | - | - | 83.758.020,00 | 83.758.020,00 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah & perdagangan | 11.184.496.712,00 | - | - | - | 8.445.888.054,00 | 8.445.888.054,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 11.184.496.712,00 | - | - | - | 8.445.888.054,00 | 8.445.888.054,00 |
| PMPTSP | 485.080.600,00 | - | - | - | 485.080.600,00 | 485.080.600,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 485.080.600,00 | - | - | - | 485.080.600,00 | 485.080.600,00 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | 6.760.000,00 | - | - | - | - | 3.380.000,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 6.760.000,00 | - | - | - | - | 3.380.000,00 |
| Badan Keuangan | 247.282.032,00 | 49.264,00 | 448.000,00 | 14.395.200,00 | 206.706.832,00 | 221.599.296,00 |
| Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 247.282.032,00 | 49.264,00 | 448.000,00 | 14.395.200,00 | 206.706.832,00 | 221.599.296,00 |
| Jumlah | 12.046.237.364,00 | 49.264,00 | 448.000,00 | 14.395.200,00 | 9.260.293.506,00 | 9.278.565.970,00 |

E. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun 2022
Rp
8.363.843.874,00

Tahun 2021
Rp
6.641.291.925,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2021 mempunyai saldo sebesar Rp8.641.291.925,00 selama tahun 2022 terdapat mutasi dengan penambahan bersih sebesar Rp1.722.551.949,00, sehingga saldo piutang tersebut tahun 2022 menjadi sebesar Rp8.363.843.874,00. Rincian piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 5.3.9 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022

| Nama Akun | | | | MUTASI (Rp) | |
|-----------|--|--|--|-------------|--|
|-----------|--|--|--|-------------|--|

| | SALDO AWAL (Rp) | KOREKSI (Rp) | SALDO AWAL SETELAH KOREKSI (Rp) | BERTAMBAH | BERKURANG | SALDO AKHIR (Rp) |
|--|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.641.291.925,00 | - | 6.641.291.925,00 | 7.771.282.394,00 | 6.252.795.492,00 | 8.636.436.414,00 |
| Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Bank Nagari | 6.641.291.925,00 | - | 6.641.291.925,00 | 7.771.282.394,00 | 6.252.795.492,00 | 8.159.778.827,00 |
| Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) PT.BPR Jam Gadang | 272.592.540,00 | | 272.592.540,00 | 592.561.480,00 | 388.496.433,00 | 476.657.587,00 |

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 digunakan untuk mencatat Piutang Dividen/Piutang Bagi Hasil atas kegiatan Penyertaan Modal terhadap Pemerintah Kota Bukittinggi pada Bank Nagari, BPRS Jam Gadang Perseroda serta Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang.

Sesuai dengan aturan baru yakni Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervarisasi Pemutakhiran Kalasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pencatatan piutang dividen dimapping ke akun Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain mapping akun, sama halnya dengan Piutang Dana Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, piutang dividen tidak dilakukan penyisihan karena potensi penerimaan yang sangat besar di tahun berikutnya.

Pencatatan piutang dividen dari Bank Nagari dan BPRS tersebut di atas berdasarkan surat sebagai berikut :

1. Dikarenakan belum adanya RUPS, maka Badan Keuangan menyurati Bank Nagari dengan surat nomor 900.1.15.1/4/BK-05/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Kebutuhan Data dan Informasi untuk penyusunan LKPD Tahun 2022 dan dibalas dengan Surat dari Pimpinan PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor SR/027/BT/UM/01-2023 tanggal 6 Januari 2023 perihal kebutuhan data dan Informasi terkait Penyusunan LKPD Tahun 2022.

| No | Nama Akun | SALDO AKHIR 2021 (Audited) | KOREKSI | SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|----------|---|-------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| | Denda Pajak Hotel | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 122.200,00 | | 122.200,00 | - | - | 122.200,00 |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran | 10.843.034,00 | - | 10.843.034,00 | 14.287.639,00 | 11.849.168,00 | 13.281.505,00 |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya | 10.373.076,00 | | 10.373.076,00 | 11.384.478,00 | 8.651.047,00 | 13.106.507,00 |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 18.844,00 | | 18.844,00 | 1.769.087,00 | 1.752.737,00 | 35.194,00 |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya | 311.310,00 | | 311.310,00 | - | 311.310,00 | - |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 139.804,00 | | 139.804,00 | 458.250,00 | 458.250,00 | 139.804,00 |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 637.500,00 | - | 637.500,00 | 563.700,00 | 1.021.950,00 | 179.250,00 |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 637.500,00 | | 637.500,00 | 563.700,00 | 1.021.950,00 | 179.250,00 |
| D | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame | 5.782.328,00 | - | 5.782.328,00 | 1.382.400,00 | 1.382.400,00 | 5.782.328,00 |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron | 5.782.328,00 | | 5.782.328,00 | 1.382.400,00 | 1.382.400,00 | 5.782.328,00 |
| E | Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | 78.633,00 | - | 78.633,00 | 29.096,00 | 29.096,00 | 78.633,00 |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir | 78.633,00 | | 78.633,00 | 29.096,00 | 29.096,00 | 78.633,00 |
| F | Piutang Pendapatan | 46.542,00 | - | 46.542,00 | 5.981,00 | 5.981,00 | 46.542,00 |

| No | Nama Akun | SALDO AKHIR 2021 (Audited) | KOREKSI | SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|----------|---|-------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| | Denda Pajak Air Tanah | | | | | | |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 46.542,00 | | 46.542,00 | 5.981,00 | 5.981,00 | 46.542,00 |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)- Pajak Bumi dan Bangunan,Pe desaan dan Perkotaan | - | | - | 296.779.281,00 | 296.779.281,00 | - |
| G | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 232.988.344,00 | - | 232.988.344,00 | - | - | 232.698.699,00 |
| | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 232.988.344,00 | - | 232.988.344,00 | - | - | 232.698.699,00 |
| | PMPTSP | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 226.177.248,00 | - | 226.177.248,00 | - | - | 226.177.248,00 |
| | DINAS , KOPERASI, UKM DAN PERDAGANG AN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan | 6.811.096,00 | | 6.811.096,00 | 17.777.627,00 | 18.067.272,00 | 6.521.451,00 |
| H | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | 3.030.998,00 | - | 3.030.998,00 | 158.560.453,00 | 158.724.973,00 | 2.866.478,00 |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.101.243,00 | | 1.101.243,00 | - | - | 1.101.243,00 |
| | DINAS , KOPERASI, UKM DAN PERDAGANG AN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 1.929.755,00 | | 1.929.755,00 | 158.560.453,00 | 158.724.973,00 | 1.765.235,00 |
| I | Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 816.613.850,00 | - | 816.613.850,00 | - | - | 816.613.850,00 |

| No | Nama Akun | SALDO AKHIR 2021 (Audited) | KOREKSI | SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|----------|--|-------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| | Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa | 816.613.850,00 | - | 816.613.850,00 | - | - | 816.613.850,00 |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG | | | | | | |
| | Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa | 782.629.500,00 | | 782.629.500,00 | - | - | 782.629.500,00 |
| | DUINAS PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa | 33.984.350,00 | | 33.984.350,00 | - | - | 33.984.350,00 |
| J | Piutang Pendapatan dari Pengembalian | - | - | - | 20.346.188,00 | - | 20.346.188,00 |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | | | | 1.846.188,00 | - | 1.846.188,00 |
| | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | - | | - | 18.500.000,00 | - | 18.500.000,00 |
| K | Piutang Pendapatan BLUD | 5.311.170.100,00 | - | 5.311.170.100,00 | 2.669.493.308,00 | 7.152.014.508,00 | 828.648.900,00 |
| | Piutang Pendapatan BLUD | 5.311.170.100,00 | - | 5.311.170.100,00 | 2.669.493.308,00 | 7.152.014.508,00 | 828.648.900,00 |
| | DINAS KESEHATAN | | | | | | |
| | Piutang Pendapatan BLUD | 5.311.170.100,00 | - | 5.311.170.100,00 | 2.669.493.308,00 | 7.152.014.508,00 | 828.648.900,00 |
| L | Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 448.551,00 | 1.000.000,00 | 448.551,00 |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | |
| | Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - |
| | BADAN KEUANGAN | | | | | | |
| | Piutang Lain-lain | - | | - | 448.551,00 | - | 448.551,00 |

| No | Nama Akun | SALDO AKHIR 2021 (Audited) | KOREKSI | SALDO AWAL 2022 SETELAH KOREKSI | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|----|------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| | lain PAD Yang Sah Lainnya | | | | | | |

Beberapa hal penting dari daftar di atas dapat dijelaskan terkait Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp816.613.850,00 terdiri dari :

1. Piutang Jaminan dari Dinas PUPR sebesar Rp782.629.500,00 yang terdiri dari dari :
 - Jaminan pekerjaan PT. ARSHALIA sebesar Rp22.455.000,00 atas pembangunan Mushala Sekretariat Daerah pada Tahun 2010;
 - Jaminan kepada PT. Adhiwira ikaputra sebesar Rp760.174.500,00 atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Representatif Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013;

Pemerintah Kota Bukittinggi mengakui Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut berdasarkan hasil audit yang disepakati bahwa hasil pekerjaan hanya mencapai 93,82% sehingga rekanan tersebut wanprestasi dan Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan klaim terhadap jaminan pelaksanaan pekerjaan rekanan tersebut. Atas kekurangan prestasi rekanan, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah menyurati Kepala LKPP-RI dengan Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor: 600.484/DPU-BKT/VI-2014 tanggal 5 juni 2014 perihal usulan Masuk Daftar Hitam Penyedia Jasa Konstruksi a.n. PT.ADHIWIRA IKAPUTRA. Pengakuan piutang juga berdasarkan Pasal 5 Akta Perdamaian antara Pemerintah Kota Bukittinggi yang diwakili Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Parkir Representatif Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dengan Ir. H. Soetrisno Direktur PT. Adhiwira Ikaputra yang menyatakan bahwa kedua pihak menyepakati akan merealisasikan klaim Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp5% dari nilai addendum kontrak. Akta perdamaian tersebut adalah dalam rangka menindaklanjuti Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 9/Pdt.G/ /2014/PN BT tanggal 20 November 2014. Pada tahun 2015 juga terdapat jaminan yang belum dieksekusi oleh Pemko Bukittinggi akibat terdapat perselisihan atas final quantity pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah Rehabilitasi Taman DPRD. Selain adanya jaminan yang belum dieksekusi, pekerjaan tersebut juga menimbulkan hutang kekurangan pembayaran pekerjaan dan piutang denda keterlambatan pekerjaan yang telah dicatat pada pos masing-masing.
2. Piutang Jaminan dari Dinas Perhubungan sebesar Rp33.984.350,00.
Piutang Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Terminal Aur Kuning tahun 2007 oleh CV.Khandra Utama.
3. Piutang Pendapatan BLUD sebesar R828.648.900,00 yang terdiri dari :
 - Klaim BPJS bulan Juli s.d Desember 2022 sebesar Rp785.029.900,00.
 - Klaim Covid-19 tahun 2022 sebesar Rp43.619.000,00.

4. Piutang Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp20.346.188,00 yang terdiri dari :
- Dinas Lingkungan Hidup merupakan kelebihan pembayaran tunjangan dari gaji an Suryadi pada tahun 2021 sebesar Rp1.045.744,00.
 - Dinas Lingkungan Hidup merupakan kelebihan pembayaran tunjangan dari gaji an. Erwin St Bagindo berjumlah Rp800.444,00 sejak tahun 2009 tidak bisa ditagih karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp18.500.000,00 yang merupakan keterlanjuran pembayaran tunjangan istri an.Neli Efendi sejak tahun 2017 yang dicicil melalui Taspen.

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| G. Penyisihan Piutang Lain-Lain | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| PAD yang Sah | Rp | Rp |
| | (4.632.545.459,00) | (2.711.651.262,00) |

Saldo Penyisihan Piutang PAD yang Sah per 31 Desember 2021 yang lalu sebesar (Rp2.711.1651.262,00). Untuk nilai Penyisihan Piutang Penyisihan Lain-lain PAD yang sah tahun 2022 adalah sebesar (Rp4.632.545.459,00), terdapat kenaikan sebesar Rp1.920.894.197,00 Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 5.3.12 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022

| Uraian | Nilai | Kurang 1 Bulan | 1-3 Bulan | 3-12 Bulan | Lebih 12 Bulan | Jumlah |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| | | (0,5%) | (25%) | (50%) | (100%) | Penyisihan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah | 4.632.545.459,00 | 817.068.015,00 | - | - | 3.815.477.444,00 | 4.632.545.459,00 |
| Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 2.680.280.684,00 | - | - | - | 2.680.280.684,00 | 2.680.280.684,00 |
| Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 823.226.551,00 | | | | 823.226.551,00 | 823.226.551,00 |
| Badan Keuangan | 1.857.054.133,00 | | | | 1.857.054.133,00 | 1.857.054.133,00 |
| Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah | 50.642.109,00 | - | - | - | 50.642.109,00 | 50.642.109,00 |
| Badan Keuangan | 50.642.109,00 | | | | 50.642.109,00 | 50.642.109,00 |
| Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 235.565.177,00 | 454.165,00 | - | - | 235.111.012,00 | 235.565.177,00 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah & perdagangan | 8.286.686,00 | 454.165,00 | | | 7.832.521,00 | 8.286.686,00 |
| PMPTSP | 226.177.248,00 | - | | | 226.177.248,00 | 226.177.248,00 |
| Badan Keuangan | 1.101.243,00 | - | - | - | 1.101.243,00 | 1.101.243,00 |

| Uraian | Nilai | Kurang 1 Bulan | 1-3 Bulan | 3-12 Bulan | Lebih 12 Bulan | Jumlah |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | (0,5%) | (25%) | (50%) | (100%) | Penyisihan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 816.613.850,00 | 816.613.850,00 | - | - | - | 816.613.850,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang | 782.629.500,00 | 782.629.500,00 | | | | 782.629.500,00 |
| Dinas Perhubungan | 33.984.350,00 | 33.984.350,00 | | | | 33.984.350,00 |
| Piutang Pendapatan dari Pengembalian | 20.346.188,00 | - | - | - | 20.346.188,00 | 20.346.188,00 |
| Dinas Lingkungan Hidup | 1.846.188,00 | | | | 1.846.188,00 | 1.846.188,00 |
| Dinas Perhubungan | 18.500.000,00 | | | | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 |
| Piutang Pendapatan BLUD | 828.648.900,00 | - | - | - | 828.648.900,00 | 828.648.900,00 |
| Dinas Kesehatan | 828.648.900,00 | - | - | - | 828.648.900,00 | 828.648.900,00 |
| Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya | 448.551,00 | - | - | - | 448.551,00 | 448.551,00 |
| Dinas Kesehatan | 448.551,00 | | | | 448.551,00 | 448.551,00 |

H. Piutang Transfer Pemerintah Pusat**Tahun 2022****Tahun 2021****Rp
0,00****Rp
3.849.825,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 yang lalu adalah sebesar Rp3.849.825,00, tahun 2022 terdapat koreksi saldo awal senilai Rp3.046.191.842,00 sehingga saldo awal tahun 2022 menjadi Rp3.050.041.667,00. Koreksi saldo awal dikarenakan terbitnya PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 Tanggal 25 Agustus 2022. Dan pada tahun 2022 jumlah piutang tersebut telah direalisasikan oleh Pemerintah Pusat ke Kas Umum Daerah.

Piutang Transfer Pemerintah Kota Bukittinggi pada Pemerintah Pusat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 5.3.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022

| No. | Rincian | Saldo Awal (Rp) 31 Des 2021 | Koreksi Saldo Awal (Rp) | Saldo awal setelah koreksi (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo akhir Piutang (Rp) 31 Desember 2022 | Keterangan |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|---|--|
| | | | | | Tambah | Kurang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=5+6-7 | 11 |
| | Pajak | | | | | | | Dasar Hukum : PMK No. 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 Tanggal 25 Agustus 2022, KMK No.29/KM.7/2022 ttg Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian DBH Periode pertama, KMK No.37/KM.7/2022 ttg Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian DBH Periode Kedua dan KMK No.46/KM.7/2022 ttg Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian DBH Periode ketiga, |
| | PPh | | | | | | | |
| | PPh Pasal 21 | - | 1.191.416.764,00 | 1.191.416.764,00 | | 1.191.416.764,00 | - | |
| | PPh Pasal 25/29 | - | 466.533.566,00 | 466.533.566,00 | | 466.533.566,00 | - | |
| | PBB | | - | | | | - | |
| | Bagi rata | - | 803.667.166,00 | 803.667.166,00 | | 803.667.166,00 | - | |
| | Bagian Daerah Sektor Perkebunan | - | - | | | | - | |
| | Bagian Daerah Sektor Perhutanan | - | - | | | | - | |
| | Bagian Daerah Sektor Pertambangan Migas | - | - | | | | - | |
| | Bagian Daerah Sektor Pertambangan Minerba/ Non Migas | - | - | | | | - | |
| | Bagian Daerah Sektor Pertambangan Panas Bumi | - | - | | | | - | |
| | Bagian Daerah Sektor lainnya | - | 60.807.157,00 | 60.807.157,00 | | 60.807.157,00 | - | |
| | Biaya Pemungutan Sektor Perhutanan | - | - | | | | - | |
| | Biaya Pemungutan Sektor Perkebunan | - | - | | | | - | |
| | Biaya Pemungutan Sektor Pertambangan Migas | - | - | | | | - | |
| | Biaya Pemungutan sektor Pertambangan Non Migas | - | - | | | | - | |
| | Biaya Pemungutan sektor pertambangan Panas Bumi | - | - | | | | - | |
| | Biaya Pemungutan Sektor lainnya | - | 1.688.560,00 | 1.688.560,00 | | 1.688.560,00 | - | |
| | CHT | 3.849.825,00 | 1.031.518,00 | 4.881.343,00 | | 4.881.343,00 | - | |

| No. | Rincian | Saldo Awal (Rp) 31 Des 2021 | Koreksi Saldo Awal (Rp) | Saldo awal setelah koreksi (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo akhir Piutang (Rp) 31 Desember 2022 | Keterangan |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------|
| | | | | | Tambah | Kurang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=5+6-7 | 11 |
| | SDA | | - | | | | - | |
| | Migas | | - | | | | - | |
| | Minyak Bumi 15% | - | - | | | | - | |
| | Minyak Bumi 0,5% | - | - | | | | - | |
| | Minyak Bumi dalam rangka Otsus | | - | | | | - | |
| | Gas Bumi 30% | - | - | | | | - | |
| | Gas Bumi 0,5% | - | - | | | | - | |
| | Gas Bumi dalam rangka Otsus | - | - | | | | - | |
| | Minerba | | - | | | | - | |
| | Landrent | - | - | | | | - | |
| | Royalti | - | 295.785.359,00 | 295.785.359,00 | | 295.785.359,00 | - | |
| | Panas Bumi | | - | | | | - | |
| | Iuran Produksi | - | 202.739.192,00 | 202.739.192,00 | | 202.739.192,00 | - | |
| | Iuran Tetap | - | 22.522.560,00 | 22.522.560,00 | | 22.522.560,00 | - | |
| | Setoran Bagian Pemerintah | - | - | | | | - | |
| | Kehutanan | | - | | | | - | |
| | DR | - | - | | | | - | |
| | IIUPH | - | - | | | | - | |
| | PSDH | - | - | | | | - | |
| | Perikanan | | - | | | | - | |
| | Jumlah | 3.849.825,00 | 3.046.191.842,00 | 3.050.041.667,00 | 1.849.462.625,00 | 3.050.041.667,00 | - | - |

J. Piutang Lainnya

Tahun 2022
Rp
246.316.601,00

Tahun 2021
Rp
273.917.045,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp273.917.045,00 terdapat mutasi berkurang sebesar Rp27.300.441. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp246.316.601,00. Rincian data Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagaimana daftar di bawah ini :

Tabel : 5.3.17 Piutang Lainnya Tahun 2022

| Nama Akun | SALDO AWAL | KOREKSI | SALDO AWAL SETELAH KOREKSI | MUTASI | | SALDO AKHIR |
|--|----------------|---------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | BERTAMBAH | BERKURANG | |
| Piutang Lainnya | 246.316.601,00 | - | 246.316.601,00 | 7.747.867.761,25 | 7.747.867.761,25 | 246.316.601,00 |
| Uang Muka | 246.316.601,00 | - | 246.316.601,00 | 7.747.867.761,25 | 7.747.867.761,25 | 246.316.601,00 |
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 246.316.601,00 | - | 246.316.601,00 | 7.747.867.761,25 | 7.747.867.761,25 | 246.316.601,00 |
| <i>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</i> | | | | | | |
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 113.622.000,00 | | 113.622.000,00 | 1.889.172.423,78 | 1.889.172.423,78 | 113.622.000,00 |
| <i>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG</i> | | | | | | |
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 132.694.601,00 | - | 132.694.601,00 | 5.858.695.337,47 | 5.858.695.337,47 | 132.694.601,00 |

Untuk Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp246.316.601,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa yang terdapat pada :

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah Piutang uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp113.622.000,00 yang terdiri dari :

- Uang Muka Pengadaan Komputer pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2007 sebesar Rp93.060.000,00 merupakan Uang Muka yang belum dikembalikan oleh rekanan.
- Sisa Uang Muka CV.Billi Sarius oleh PT.Asuransi Paralamas atas pekerjaan pengadaan meja kursi siswa SMP tahun 2012 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp20.562.000,00. Piutang ini adalah pajak yang dipungut oleh BUD, sehingga rekanan berpendapat bukan merupakan kewajiban rekanan untuk mengembalikan.

b) Dinas Pekerjaan Umum

Jumlah Piutang Uang Muka yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan umum sampai dengan posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp132.694.601,00 yang terdiri dari :

- Sisa Piutang Uang Muka kepada PT.Arhalia atas pembangunan Mushala Sekretariat Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp10.158.539,00.
- Piutang dari pembayaran uang Muka pada Kegiatan Leger Jalan (Sistem Informasi Jaringan Jalan) tahun 2015 yang belum dikembalikan oleh rekanan oleh PT. MATURO NUANSATAMA sesuai dengan temuan pemeriksaan sebesar Rp122.536.062,00.

K. Penyisihan Piutang Lainnya

Tahun 2022
Rp
246.316.601,00

Tahun 2021
Rp
246.316.601,00

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp246.316.601,00 tidak terdapat mutasi sehingga saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp246.316.601,00. Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi seperti terlihat pada table berikut:

Tabel : 5.3.18 Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2022

| Nama Piutang | Nilai | Kurang 1 Tahun (0,5%) | 1-3 Tahun (25%) | 3-5 Tahun (50%) | Lebih 5 Tahun (100%) | Jumlah Penyisihan |
|--|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Piutang Lainnya | 246.316.601,00 | - | - | - | 246.316.601,00 | 246.316.601,00 |
| Uang Muka | 246.316.601,00 | - | - | - | 246.316.601,00 | 246.316.601,00 |
| <i>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</i> | | - | - | - | - | - |
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 113.622.000,00 | - | - | - | 113.622.000,00 | 113.622.000,00 |
| <i>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG</i> | | - | - | - | - | - |
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 132.694.601,00 | | | | 132.694.601,00 | 132.694.601,00 |

2. PERSEDIAAN

Tahun 2022
(Rp)
7.525.720.925,49

Tahun 2021
(Rp)
9.133.430.432,16

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam pencatatan Persediaan adalah periodik, metode periodik dilaksanakan dengan menggunakan

stock opname. Berdasarkan *stock opname* posisi tanggal 31 Desember 2022 terdapat nilai Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp7.525.720.925,49.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, *stock opname* Tahun 2022 telah dilakukan sendiri oleh SKPD pada akhir Tahun 2022. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemandirian entitas, namun Bidang Pengelolaan BMD tetap melakukan asistensi dan pengawasan. Persediaan diatas dirinci berdasarkan SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.19 Persediaan Per SKPD Tahun 2022 dan 2021

| No | SKPD | 2021 | 2022 |
|----|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 972.421.067,00 | 740.120.131,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 5.243.111.115,16 | 4.325.777.665,49 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 489.543.440,00 | 243.810.707,00 |
| 4 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman | 48.113.631,00 | 44.924.591,00 |
| 5 | Dinas Kebakaran | 88.685.740,00 | 46.289.830,00 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 5.349.000,00 | 2.390.000,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | 62.040.000,00 |
| 8 | Dinas Sosial | 7.725.450,00 | 1.200.985,00 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 220.185.616,00 | 148.373.207,00 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | 207.589.895,00 | 235.709.001,00 |
| 11 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 723.128.017,00 | 485.805.095,00 |
| 12 | Dinas Perhubungan | 2.672.500,00 | 8.108.000,00 |
| 13 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 43.219.785,00 | 12.683.115,00 |
| 14 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan | 7.700.000,00 | - |
| 15 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Perindustrian Dan Tenaga Kerja | 50.447.330,00 | 31.631.280,00 |
| 16 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 40.334.445,00 | 30.013.416,00 |
| 17 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga | 23.041.500,00 | 112.520.000,00 |
| 18 | Dinas Pertanian Dan Pangan | 56.518.900,00 | 111.458.288,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | 156.247.946,00 | 201.198.515,00 |
| 20 | Sekretariat DPRD | 51.979.930,00 | 36.809.578,00 |
| 21 | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan | 53.065.501,00 | 56.274.390,00 |
| 22 | Badan Keuangan | 540.552.594,00 | 487.083.831,00 |
| 23 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 5.586.500,00 | 3.824.600,00 |
| 24 | Inspektorat | 41.654.800,00 | 45.915.500,00 |
| 25 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | 9.703.060,00 | 24.310.200,00 |
| 26 | Kecamatan Guguk Panjang | 1.331.200,00 | 12.090.600,00 |
| 27 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | 39.334.450,00 | 14.521.400,00 |
| 28 | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik | 4.187.020,00 | 837.000,00 |
| | Jumlah | 9.133.430.432,16 | 7.525.720.925,49 |

Persediaan per Jenis Barang Tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.20 Persediaan Per Jenis Barang Tahun 2022

| No | SKPD | BAHAN/ MATERIAL | ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR | OBAT-OBATAN | PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN | NATURA DAN PAKAN | TOTAL |
|----|--|--------------------|---|------------------|--|---------------------|------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 1.248.400,00 | 727.450.641,00 | 10.821.090,00 | 600.000,00 | - | 740.120.131,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 233.501.045,00 | 411.965.638,00 | 3.680.265.982,49 | | 45.000,00 | 4.325.777.665,49 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | | 4.552.000,00 | | 239.258.707,00 | | 243.810.707,00 |
| 4 | Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman | | 6.765.500,00 | | 38.159.091,00 | | 44.924.591,00 |
| 5 | Dinas Kebakaran | | 46.289.830,00 | < | | | 46.289.830,00 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | 2.390.000,00 | - | - | - | 2.390.000,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | 62.040.000,00 | | | | 62.040.000,00 |
| 8 | Dinas Sosial | | 1.200.985,00 | | | | 1.200.985,00 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | | 8.014.300,00 | 140.358.907,00 | | | 148.373.207,00 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | | 185.904.001,00 | | 49.805.000,00 | | 235.709.001,00 |
| 11 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | | 485.805.095,00 | | | | 485.805.095,00 |
| 12 | Dinas Perhubungan | | 8.108.000,00 | | | | 8.108.000,00 |
| 13 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | - | 12.683.115,00 | - | - | - | 12.683.115,00 |
| 14 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja | | 31.631.280,00 | | | | 31.631.280,00 |
| 16 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | - | 30.013.416,00 | - | - | - | 30.013.416,00 |
| 17 | Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga | | 28.520.000,00 | | 84.000.000,00 | | 112.520.000,00 |
| 18 | Dinas Pertanian Dan Pangan | 36.857.030,00 | 11.195.158,00 | 48.731.100,00 | | 14.675.000,00 | 111.458.288,00 |
| 19 | Sekretariat Daerah | | 201.198.515,00 | | | | 201.198.515,00 |
| 20 | Sekretariat DPRD | | 36.809.578,00 | | | | 36.809.578,00 |
| 21 | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan | | 56.274.390,00 | | | | 56.274.390,00 |
| 22 | Badan Keuangan | - | 487.083.831,00 | - | - | - | 487.083.831,00 |
| 23 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | - | 3.824.600,00 | - | - | - | 3.824.600,00 |
| 24 | Inspektorat | | 45.915.500,00 | | | | 45.915.500,00 |

| No | SKPD | BAHAN/ MATERIAL | ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR | OBAT-OBATAN | PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/ DISERAHKAN | NATURA DAN PAKAN | TOTAL |
|----|---|-----------------------|---|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 25 | Kecamatan Mandiingin Koto Selayan | - | 24.310.200,00 | - | - | - | 24.310.200,00 |
| 26 | Kecamatan Guguk Panjang | - | 12.090.600,00 | - | - | - | 12.090.600,00 |
| 27 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | - | 14.521.400,00 | - | - | - | 14.521.400,00 |
| 28 | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik | - | 837.000,00 | - | - | - | 837.000,00 |
| | Jumlah | 271.606.475,00 | 2.947.394.573,00 | 3.880.177.079,49 | 411.822.798,00 | 14.720.000,00 | 7.525.720.925,49 |

5.3.1.2 INVESTASI

Tahun 2022
(Rp)
62.195.784.727,47

Tahun 2021
(Rp)
51.833.451.094,17

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, secara pengelompokan akun, Investasi pemerintah daerah terdiri dari dua yaitu:

1. **Investasi Jangka Pendek**

Sampai saat ini Pemko Bukittinggi tidak mempunyai investasi jangka pendek. Adapun deposito yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 hanya berumur kurang dari 3 (tiga) bulan yang tidak dapat dikategorikan investasi jangka pendek dan hanya bertujuan untuk manajemen kas dengan sistem *on call* yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

2. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang Kota Bukittinggi terdiri dari Investasi Jangka Panjang Permanen dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

**A. Investasi Jangka Panjang Non
Permanen**

Tahun 2022
(Rp)
635.298.884,95

Tahun 2021
(Rp)
661.844.211,48

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk digulirkan secara berkelanjutan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat di Kota Bukittinggi. Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Neraca menggambarkan nilai Investasi sampai dengan 31 Desember 2022 serta penyisihannya. Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp635.298.884,95.

Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2021 yang lalu sebesar Rp661.844.211,48 selama tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.545.326,53 sehingga Nilai Investasi Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo sebesar Rp635.298.884,95

Dana Bergulir diberikan kepada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang penyalurannya direalisasikan dari pos Belanja Bantuan Sosial Kota Bukittinggi pada tahun 2001 s.d. 2005. Penyaluran dana ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 412/2440/SJ tanggal 26 Oktober 1998 tentang Pedoman Pembentukan dan Pemantapan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), yang kemudian berubah nama menjadi UEM-SP. Dalam suratnya, pada poin 12 Mendagri menyatakan bahwa: *“Modal kerja UED-SP adalah modal usaha untuk kegiatan bagi anggota dalam rangka menumbuh kembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di pedesaan yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah (APBN, APBD I, APBD II), masyarakat, lembaga perbankan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat”*.

Pada tingkat Provinsi pun telah beberapa kali mengeluarkan pedoman pengelolaan, terakhir adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 412.25/283/2002 tanggal 25 Oktober 2002 perihal Pedoman Administrasi dan Keuangan UEM-SP di Sumatera Barat, yang sampai saat ini diacu oleh pengelola di tingkat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dana Bergulir tersebut disajikan sebagai Investasi Non Permanen dalam Neraca Pemko Bukittinggi adalah berpedoman kepada Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir sebagai petunjuk teknis lebih lanjut PP. Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel-tabel berikut adalah gugusan data Dana Bergulir yang merupakan hasil inventarisasi tim monitoring dan evaluasi UEM-SP per 31 Desember 2022 yakni sebagai berikut :

Tabel 5.3.4.15

Daftar Posisi Pinjaman Dana Bergulir per Kecamatan Tahun 2022

| Kecamatan | No | Kelurahan | Kelompok | Pinjaman (Rp) |
|----------------------------------|----|---------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A Mandiangan Koto Selayan | 1 | Koto Selayan | Maju Jaya | 67.715.000,00 |
| | 2 | Campago Ipuh | Campago Sepakat | 17.440.000,00 |
| | 3 | Kubu Gulai Bancah | Sepakat Jaya | 82.226.388,00 |
| | 4 | Puhun Pintu kabun | Mekar | 36.565.000,00 |
| | 5 | Manggis Ganting | Amanah | 46.607.000,00 |
| | 6 | Campago Guguk Bulek | Campago Saiyo | 53.895.000,00 |
| | 7 | Garegeh | Tunas Harapan | 64.267.000,00 |
| | 8 | Pulai Anak Aia | Anggrek | 52.705.000,00 |

| Kecamatan | No | Kelurahan | Kelompok | Pinjaman (Rp) |
|--------------------------------|----|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 9 | Puhun Tembok | Puhun Tembok | 57.040.000,00 |
| | | Sub Total | | 478.460.388,00 |
| B Guguk Panjang | 1 | Tarok Dipo | Mekar jaya | 59.170.000,00 |
| | 2 | Benteng Pasar Atas | Benteng Indah | 123.400.000,00 |
| | 3 | Pakan Kurai | Pakan Kurai | 58.300.000,00 |
| | 4 | Kayu Kubu | Mayang Sari | 75.650.000,00 |
| | 5 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | Mutiara Indah | 84.965.000,00 |
| | 6 | Bukit Apit Puhun | Randang Kopi | 43.597.000,00 |
| | 7 | Bukit Cangang Kayu Ramang | Bunga Karang | - |
| | | | Sub Total | |
| C Aur Birugo Tigo Baleh | 1 | Ladang Cakiah | Lansura | 57.224.000,00 |
| | 2 | Aur Kuning | Flamboyan | 117.750.000,00 |
| | 3 | Belakang balok | Dian | 69.617.500,00 |
| | 4 | Birugo | Biru Indah | 46.559.000,00 |
| | 5 | Parit Antang | Serba Usaha | 142.420.000,00 |
| | 6 | Sapiran | Kelapa Gading | 49.757.000,00 |
| | 7 | Pakan Labuah | Palapa | 34.450.000,00 |
| | 8 | Kubu Tanjung | Bunga Tanjung | 23.925.000,00 |
| | | | Sub Total | |
| | | Total | | 1.465.244.888,00 |

Nilai dari posisi pinjaman yang dilaporkan oleh pengelola dana bergulir kemudian dikelompokkan berdasarkan umur piutang. Daftar umur piutang terhadap data pinjaman dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3.4.16
Pinjaman Berdasarkan Umur Pinjaman Tahun 2022

| No | Kecamatan / Kelurahan | Saldo Pinjaman (Rp) | Kelompok | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 0-1 Tahun (Rp) | 2-3 Tahun (Rp) | 4-5 Tahun (Rp) | > 5 Tahun (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | | | | |
| 1 | Koto Selayan | 67.715.000,00 | - | 2.900.000,00 | 18.200.000,00 | 46.615.000,00 |
| 2 | Campago Ipuh | 17.440.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | 12.440.000,00 |
| 3 | Kubu Gulai Bancah | 82.226.388,00 | 38.500.000,00 | - | - | 43.726.388,00 |
| 4 | Puhun Pintu kabun | 36.565.000,00 | - | - | - | 36.565.000,00 |
| 5 | Manggis Ganting | 46.607.000,00 | - | - | - | 46.607.000,00 |

| No | Kecamatan / Kelurahan | Saldo Pinjaman (Rp) | Kelompok | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 0-1 Tahun (Rp) | 2-3 Tahun (Rp) | 4-5 Tahun (Rp) | > 5 Tahun (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 6 | Campago Guguk Bulek | 53.895.000,00 | | | | 53.895.000,00 |
| 7 | Garegeh | 64.267.000,00 | - | - | - | 64.267.000,00 |
| 8 | Pulai Anak Aia | 52.705.000,00 | - | - | - | 52.705.000,00 |
| 9 | Puhun Tembok | 57.040.000,00 | | | | 57.040.000,00 |
| | Sub Total | 478.460.388,00 | 43.500.000,00 | 2.900.000,00 | 18.200.000,00 | 413.860.388,00 |
| B. GUGUK PANJANG | | | | | | |
| 1 | Tarok Dipo | 59.170.000,00 | 59.170.000,00 | - | - | - |
| 2 | Benteng Pasar Atas | 123.400.000,00 | 58.100.000,00 | 65.300.000,00 | - | - |
| 3 | Pakan Kurai | 58.300.000,00 | - | 9.500.000,00 | 21.700.000,00 | 27.100.000,00 |
| 4 | Kayu Kubu | 75.650.000,00 | - | - | - | 75.650.000,00 |
| 5 | Aur Tajung Tangah Sawah | 84.965.000,00 | 18.300.000,00 | 5.150.000,00 | 17.510.000,00 | 44.005.000,00 |
| 6 | Bukit Apit Puhun | 43.597.000,00 | | | | 43.597.000,00 |
| 7 | Bukit Cangang Kayu Ramang | - | - | - | - | - |
| | Sub Total | 445.082.000,00 | 135.570.000,00 | 79.950.000,00 | 39.210.000,00 | 190.352.000,00 |
| C. AUR BIRUGO TIGO BALEH | | | | | | |
| 1 | Ladang Cakiah | 57.224.000,00 | - | - | - | 57.224.000,00 |
| 2 | Aur Kuning | 117.750.000,00 | 117.750.000,00 | - | - | - |
| 3 | Belakang balok | 69.617.500,00 | - | - | 1.400.000,00 | 68.217.500,00 |
| 4 | Birugo | 46.559.000,00 | 4.500.000,00 | - | - | 42.059.000,00 |
| 5 | Parit Antang | 142.420.000,00 | 59.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 78.620.000,00 |
| 6 | Sapiran | 49.757.000,00 | - | - | - | 49.757.000,00 |
| 7 | Pakan Labuah | 34.450.000,00 | - | - | - | 34.450.000,00 |
| 8 | Kubu Tanjung | 23.925.000,00 | - | - | - | 23.925.000,00 |
| | Sub Total | 541.702.500,00 | 182.050.000,00 | 2.000.000,00 | 3.400.000,00 | 354.252.500,00 |
| | Total | 1.465.244.888,00 | 361.120.000,00 | 84.850.000,00 | 60.810.000,00 | 958.464.888,00 |

Terhadap penyisihan nilai tak tertagih dari piutang kelompok UEM-SP, diberlakukan aging schedule sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan umur 0 s/d 1 tahun disisihkan sebesar 0,50%
2. Pinjaman dengan umur 2 s/d 3 tahun disisihkan sebesar 10%
3. Pinjaman dengan umur 4 s/d 5 tahun disisihkan sebesar 50%
4. Pinjaman dengan umur >5 tahun sebesar 100%

Setelah mendapatkan saldo berdasarkan umur pinjaman, untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen di dalam Neraca, dilakukan Penyisihan Piutang untuk mendapatkan perhitungan NRV (*Net Realizable Value*) per kelompok sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.3.4.17
Penyisihan Pinjaman Tahun 2022

| No | Kecamatan / Kelurahan | Saldo Piutang (Rp) | Penyisihan Piutang (Rp) | | | | Jumlah Penyisihan | NRV |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 0-1 Tahun 0,50% | 2-3 Tahun 10% | 4-5 Tahun 50% | > 5 Tahun 100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (4+5+6+7+8) | 9= (3-9) |
| A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | | | | | | |
| 1 | Koto Selayan | 67.715.000,00 | - | 290.000,00 | 9.100.000,00 | 46.615.000,00 | 56.005.000,00 | 11.710.000,00 |
| 2 | Campago Ipuh | 17.440.000,00 | 25.000,00 | - | - | 12.440.000,00 | 12.465.000,00 | 4.975.000,00 |
| 3 | Kubu Gulai Bancah | 82.226.388,00 | 192.500,00 | - | - | 43.726.388,00 | 43.918.888,00 | 38.307.500,00 |
| 4 | Puhun Pintu kabun | 36.565.000,00 | - | - | - | 36.565.000,00 | 36.565.000,00 | - |
| 5 | Manggis Ganting | 46.607.000,00 | - | - | - | 46.607.000,00 | 46.607.000,00 | - |
| 6 | Campago Guguk Bulek | 53.895.000,00 | - | - | - | 53.895.000,00 | 53.895.000,00 | - |
| 7 | Garegeh | 64.267.000,00 | - | - | - | 64.267.000,00 | 64.267.000,00 | - |
| 8 | Pulai Anak Aia | 52.705.000,00 | - | - | - | 52.705.000,00 | 52.705.000,00 | - |
| 9 | Puhun Tembok | 57.040.000,00 | - | - | - | 57.040.000,00 | 57.040.000,00 | - |
| Sub Total | | 478.460.388,00 | 217.500,00 | 290.000,00 | 9.100.000,00 | 413.860.388,00 | 423.467.888,00 | 54.992.500,00 |
| B. GUGUK PANJANG | | | | | | | | |
| 1 | Tarok Dipo | 59.170.000,00 | 295.850,00 | - | - | - | 295.850,00 | 58.874.150,00 |
| 2 | Benteng Pasar Atas | 123.400.000,00 | 290.500,00 | 6.530.000,00 | - | - | 6.820.500,00 | 116.579.500,00 |
| 3 | Pakan Kurai | 58.300.000,00 | - | 950.000,00 | 10.850.000,00 | 27.100.000,00 | 38.900.000,00 | 19.400.000,00 |
| 4 | Kayu Kubu | 75.650.000,00 | - | - | - | 75.650.000,00 | 75.650.000,00 | - |
| 5 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 84.965.000,00 | 91.500,00 | 515.000,00 | 8.755.000,00 | 44.005.000,00 | 53.366.500,00 | 31.598.500,00 |
| 6 | Bukit Apit Puhun | 43.597.000,00 | - | - | - | 43.597.000,00 | 43.597.000,00 | - |
| 7 | Bukit Cangang Kayu Ramang | - | - | - | - | - | - | - |
| Sub Total | | 445.082.000,00 | 677.850,00 | 7.995.000,00 | 19.605.000,00 | 190.352.000,00 | 218.629.850,00 | 226.452.150,00 |
| C. AUR BIRUGO TIGO BALEH | | | | | | | | |
| 1 | Ladang Cakiah | 57.224.000,00 | - | - | - | 57.224.000,00 | 57.224.000,00 | - |

| No | Kecamatan / Kelurahan | Saldo | Penyisihan Piutang (Rp) | | | | Jumlah Penyisihan | NRV |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Piutang (Rp) | 0-1 Tahun 0,50% | 2-3 Tahun 10% | 4-5 Tahun 50% | > 5 Tahun 100% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (4+5+6+7+8) | 9= (3-9) |
| 2 | Aur Kuning | 117.750.000,00 | 588.750,00 | - | - | - | 588.750,00 | 117.161.250,00 |
| 3 | Belakang balok | 69.617.500,00 | - | - | 700.000,00 | 68.217.500,00 | 68.917.500,00 | 700.000,00 |
| 4 | Birugo | 46.559.000,00 | 22.500,00 | - | - | 42.059.000,00 | 42.081.500,00 | 4.477.500,00 |
| 5 | Parit Antang | 142.420.000,00 | 299.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 78.620.000,00 | 80.119.000,00 | 62.301.000,00 |
| 6 | Sapiran | 49.757.000,00 | - | - | - | 49.757.000,00 | 49.757.000,00 | - |
| 7 | Pakan Labuah | 34.450.000,00 | - | - | - | 34.450.000,00 | 34.450.000,00 | - |
| 8 | Kubu Tanjung | 23.925.000,00 | - | - | - | 23.925.000,00 | 23.925.000,00 | - |
| Sub Total | | 541.702.500,00 | 910.250,00 | 200.000,00 | 1.700.000,00 | 354.252.500,00 | 357.062.750,00 | 184.639.750,00 |
| TOTAL | | 1.465.244.888,00 | 1.805.600,00 | 8.485.000,00 | 30.405.000,00 | 958.464.888,00 | 999.160.488,00 | 466.084.400,00 |

Selanjutnya, nilai NRV yang didapat dari penghitungan *aging schedule* didapat total nilai NRV dari seluruh kelompok sebesar Rp466.084.400,00 Nilai tersebut masih belum menggambarkan nilai total Investasi yang akan disajikan dalam Neraca, karena masih terdapat saldo kas di tangan pengelola, saldo kas yang terdapat pada bank serta simpanan anggota kelompok Dana Bergulir. Rincian kas dan simpanan yang ada pada pengelola Dana Bergulir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.4.18
Kas Bendahara dan Bank Tahun 2022

| No | Kecamatan/ Kelurahan | Kas (Rp) | Bank (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3+4) |
| A. MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | | |
| 1 | Koto Selayan | 42.000.000,00 | - | 42.000.000,00 |
| 2 | Campago Ipuh | 6.700.000,00 | 26.174.209,00 | 32.874.209,00 |
| 3 | Kubu Gulai Bancah | 1.024.499,00 | 25.162.634,00 | 26.187.133,00 |
| 4 | Puhun Pintu kabun | - | 22.820.251,00 | 22.820.251,00 |
| 5 | Manggis Ganting | 500.000,00 | 10.930.566,00 | 11.430.566,00 |
| 6 | Campago Guguk Bulek | - | - | - |
| 7 | Garegeh | 1.827.000,00 | - | 1.827.000,00 |
| 8 | Pulai Anak aia | 6.570.500,00 | - | 6.570.500,00 |
| 9 | Puhun Tembok | 2.320.000,00 | - | 2.320.000,00 |
| Sub Total | | 60.941.999,00 | 85.087.660,00 | 146.029.659,00 |
| B. GUGUK PANJANG | | | | |
| 1 | Tarok Dipo | 48.121.500,00 | - | 48.121.500,00 |
| 2 | Benteng Pasar Atas | 1.306.300,00 | - | 1.306.300,00 |
| 3 | Pakan Kurai | - | - | - |
| 4 | Kayu Kubu | 6.197.000,00 | - | 6.197.000,00 |
| 5 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 27.852.000,00 | - | 27.852.000,00 |
| 6 | Bukit Apit Puhun | - | - | - |
| 7 | Bukit Cangang Kayu Ramang | - | 45.082.584,95 | 45.082.584,95 |
| Sub Total | | 83.476.800,00 | 45.082.584,95 | 128.559.384,95 |
| C. AUR BIRUGO TIGO BALEH | | | | |
| 1 | Ladang Cakiah | - | 10.187.000,00 | 10.187.000,00 |
| 2 | Aur Kuning | 56.700.400,00 | 108.512,00 | 56.808.912,00 |
| 3 | Belakang Balok | - | 9.579.534,00 | 9.579.534,00 |
| 4 | Birugo | 23.169.957,00 | 6.250.043,00 | 29.420.000,00 |
| 5 | Parit Antang | 352.500,00 | 487.500,00 | 840.000,00 |
| 6 | Sapiran | - | 17.421.321,00 | 17.421.321,00 |
| 7 | Pakan Labuah | 9.912.000,00 | - | 9.912.000,00 |

| No | Kecamatan/ Kelurahan | Kas (Rp) | Bank (Rp) | Jumlah (Rp) |
|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3+4) |
| 8 | Kubu Tanjung | - | 25.324.560,00 | 25.324.560,00 |
| Sub Total | | 90.134.857,00 | 69.358.470,00 | 159.493.327,00 |
| Total | | 234.553.656,00 | 199.528.714,95 | 434.082.370,95 |

Besaran nilai Investasi sebesar Rp1.465.244.888,00 ditambahkan dengan jumlah kas yang ada pada pengurus dan kas yang ada pada bank sebesar Rp434.082.370,95 sehingga nilai Investasi menjadi sebesar Rp1.899.327.258,95 Pada angka tersebut masih terdapat simpanan dari anggota yang bukan merupakan pendapatan dari Dana Bergulir sebesar Rp264.867.886,00 yang rinciannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.3.4.19
Simpanan Anggota Kelompok Dana Bergulir Tahun 2022

| No | Kecamatan/ Kelurahan | Simpanan | | | Jumlah (Rp) |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Pokok (Rp) | Wajib (Rp) | Sukarela (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) |
| A.MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | | | |
| 1 | Koto Selayan | 225.000,00 | 680.000,00 | 75.000,00 | 980.000,00 |
| 2 | Campago Ipuh | 290.000,00 | 1.799.500,00 | - | 2.089.500,00 |
| 3 | Kubu Gulai Bancah | 430.000,00 | 10.952.837,00 | 281.200,00 | 11.664.037,00 |
| 4 | Puhun Pintu kabun | 285.000,00 | 6.225.000,00 | - | 6.510.000,00 |
| 5 | Manggis Ganting | 1.575.000,00 | 1.420.000,00 | - | 2.995.000,00 |
| 6 | Campago Guguk Bulek | 265.000,00 | 2.384.000,00 | - | 2.649.000,00 |
| 7 | Garegeh | 505.000,00 | 4.045.000,00 | 542.500,00 | 5.092.500,00 |
| 8 | Pulai Anak aia | 860.000,00 | 6.477.500,00 | 10.000,00 | 7.347.500,00 |
| 9 | Puhun Tembok | 290.000,00 | 8.745.000,00 | - | 9.035.000,00 |
| Sub Total | | 4.725.000,00 | 42.728.837,00 | 908.700,00 | 48.362.537,00 |
| B.GUGUK PANJANG | | | | | |
| 1 | Tarok Dipo | - | - | - | - |
| 2 | Benteng Pasar Atas | 585.000,00 | 42.740.000,00 | - | 43.325.000,00 |
| 3 | Pakan Kurai | - | - | - | - |
| 4 | Kayu Kubu | 380.000,00 | 13.327.000,00 | 1.840.000,00 | 15.547.000,00 |
| 5 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 2.634.000,00 | 9.223.000,00 | 15.789.569,00 | 27.646.569,00 |
| 6 | Bukit Apit Puhun | - | - | - | - |
| 7 | Bukit Cangang Kayu Ramang | - | - | - | - |
| Sub Total | | 3.599.000,00 | 65.290.000,00 | 17.629.569,00 | 86.518.569,00 |
| C.AUR BIRUGO TIGO BALEH | | | | | |
| 1 | Ladang Cakiah | 175.000,00 | 9.046.000,00 | 669.000,00 | 9.890.000,00 |
| 2 | Aur Kuning | 285.000,00 | 10.797.500,00 | 552.000,00 | 11.634.500,00 |

| No | Kecamatan/ Kelurahan | Simpanan | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Pokok (Rp) | Wajib (Rp) | Sukarela (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 3 | Belakang Balok | 102.000,00 | 14.295.000,00 | - | 14.397.000,00 |
| 4 | Birugo | 180.000,00 | 7.092.250,00 | 1.310.750,00 | 8.583.000,00 |
| 5 | Parit Antang | 310.000,00 | 54.469.700,00 | 3.024.080,00 | 57.803.780,00 |
| 6 | Sapiran | 1.806.000,00 | 9.610.500,00 | 75.000,00 | 11.491.500,00 |
| 7 | Pakan Labuah | 575.000,00 | 982.000,00 | - | 1.557.000,00 |
| 8 | Kubu Tanjung | 425.000,00 | 14.005.000,00 | 200.000,00 | 14.630.000,00 |
| Sub Total | | 3.858.000,00 | 120.297.950,00 | 5.830.830,00 | 129.986.780,00 |
| Total | | 12.182.000,00 | 228.316.787,00 | 24.369.099,00 | 264.867.886,00 |

Untuk mendapatkan nilai Investasi Non Permanen (dana bergulir UEM-SP) yang akan disajikan dalam Neraca, maka nilai sebesar Rp1.899.327.258,95 dikurangi dengan jumlah simpanan anggota kelompok masyarakat yang ada pada pengelola sebesar 264.867.886,00 sehingga dana Investasi Non Permanen Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp1.634.459.372,95.

Dari data yang telah tersusun tersebut didapatkan nilai bruto Dana Bergulir yang ada di tangan pengurus/ kelurahan maupun yang masih beredar di masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.634.459.372,95. Dari data tersebut juga didapatkan nilai Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp999.160.488,00 Sehingga diperoleh netto dana bergulir sebesar Rp635.298.884,95

Hingga tahun 2022 masih banyak ditemui kendala dalam tertib administratif Dana Bergulir, antara lain kepengurusan yang ada di beberapa kelurahan tidak lagi aktif (*vakum*) maupun telah meninggal, sehingga pengelola dana tidak ada lagi. Dari 24 kelompok, terdapat 18 (Delapan belas) unit UEM-SP yang tidak lagi beroperasi, yaitu seperti tabel berikut:

Tabel 5.3.4.20
Kondisi Kelompok UEM-SP Di Bukittinggi 2022

| KECAMATAN | NO | KELURAHAN | KELOMPOK | KETERANGAN |
|---------------------------------|----|---------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A Mandiingin Koto Selayan | 1 | Koto Selayan | Maju Jaya | Tidak Aktif |
| | 2 | Campago Ipuh | Campago Sepakat | Tidak Aktif |
| | 3 | Kubu Gulai Bancah | Sepakat Jaya | Tidak Aktif |
| | 4 | Puhun Pintu kabun | Mekar | Tidak Aktif |
| | 5 | Manggis Ganting | Amanah | Tidak Aktif |
| | 6 | Campago Guguk Bulek | Campago Saiyo | Tidak Aktif |
| | 7 | Garegeh | Tunas Harapan | Tidak Aktif |
| | 8 | Pulai Anak aia | Anggrek | Tidak Aktif |
| | 9 | Puhun Tembok | Puhun Tembok | Tidak Aktif |
| | 1 | Tarok Dipo | Mekar jaya | Aktif |
| | 2 | Benteng Pasar Atas | Benteng Indah | Aktif |

| KECAMATAN | NO | KELURAHAN | KELOMPOK | KETERANGAN |
|-------------------------------|----|---------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B Guguk Panjang | 3 | Pakan Kurai | Pakan Kurai | Tidak Aktif |
| | 4 | Kayu Kubu | Mayang Sari | Tidak Aktif |
| | 5 | Aur Tajung Tangah Sawah | Mutiara Indah | Tidak Aktif |
| | 6 | Bukit Apit Puhun | Randang Kopi | Tidak Aktif |
| | 7 | Bukit Cangang Kayu Ramang | Bunga Karang | Tidak Aktif |
| C Aur Birugo Tigo Baleh | 1 | Ladang Cakiah | Lansura | Aktif |
| | 2 | Aur Kuning | Flamboyan | Aktif |
| | 3 | Belakang balok | Dian | Tidak Aktif |
| | 4 | Birugo | Biru Indah | Aktif |
| | 5 | Parit Antang | Serba Usaha | Aktif |
| | 6 | Sapiran | Kelapa Gading | Tidak Aktif |
| | 7 | Pakan Labuah | Palapa | Tidak Aktif |
| | 8 | Kubu Tanjung | Bunga Tanjung | Tidak Aktif |

Satu hal yang menyebabkan kendala-kendala dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban dari Dana Bergulir tersebut adalah sulitnya mengubah persepsi masyarakat akan Dana Bergulir yang terlanjur menganggap bahwa Dana Bergulir tersebut tidak perlu di pertanggungjawabkan maupun dikembalikan, karena Dana Bergulir tersebut pada awal pengguliran berasal dari kelompok belanja Bantuan Sosial.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi selalu berupaya mensosialisasikan penatausahaan Dana Bergulir kepada kelompok pengelola maupun masyarakat, sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat diterapkan penatausahaan dan pertanggungjawaban dana bergulir yang lebih baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| B. Investasi Jangka Panjang | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| Permanen | Rp | Rp |
| | 61.560.485.842,52 | 51.171.606.882,69 |

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi jangka panjang permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp61.560.485.842,52 yang merupakan akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa saham sampai dengan 31 Desember 2021 yang lalu adalah Rp51.171.606.882,69.

Selama tahun 2022 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp13.028.582.263,11 yang terdiri dari :

1. Penambahan Penyertaan Modal pada Bank Nagari sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar Rupiah)

2. Penambahan Penyertaan Modal pada BPRS Jam Gadang Perseroda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)
3. Pengakuan investasi dengan telah diumumkannya deviden tahun 2022 oleh BPRS Jam Gadang sebesar Rp592.561.480,00;
4. Penyesuaian nilai Penyertaan Modal Pemda pada PDAM Tirta Jam Gadang, karena pada Laporan Keuangan PDAM mencatat nilai Penyertaan Modal Pemda senilai Rp16.496.904.508, sedangkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi Penyertaan Modal Pemda adalah senilai Rp18.932.925.291,47.

Sementara itu untuk pengurangan sebesar Rp2.639.703.303,28 adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengurangan nilai investasi karena deviden tahun 2022 sebesar Rp592.561.480,00 telah diumumkan kembali dan akan disetorkan berupa uang pada tahun 2023.
2. Pengurangan nilai investasi karena terdapat penurunan laba tahun 2022 dan penambahan nilai laba ditahan pada laporan keuangan PDAM tahun 2022 (audited) dibanding tahun 2021 .

Dengan mutasi penambahan dan pengurangan di atas selama tahun 2022, sehingga nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi saldo per 31 Desember 2022 menjadi Rp61.560.485.842,52 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.3.4.21
Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi

| No. | Uraian | Saldo akhir 31 Desember 2021 (Rp) | Koreksi | Saldo awal setelah koreksi | Mutasi | | Saldo akhir 31 Desember 2021 (Rp) |
|-----|---|---|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | | | saldo awal 2022 | | Tambah (Rp) | Kurang (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| 1 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Nagari | 37.524.000.000,83 | - | 37.524.000.000,83 | 7.000.000.000,00 | - | 44.524.000.000,83 |
| 2 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda | 5.250.000.000,00 | - | 5.250.000.000,00 | 3.592.561.480,00 | 592.561.480,00 | 8.250.000.000,00 |
| 3 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Jam Gadang | 8.397.606.881,86 | - | 8.397.606.881,86 | 2.436.020.783,11 | 2.047.141.823,28 | 8.786.485.841,69 |
| | Jumlah Penyertaan Modal | 51.171.606.882,69 | - | 51.171.606.882,69 | 13.028.582.263,11 | 2.639.703.303,28 | 61.560.485.842,52 |

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Nagari

Investasi Saham pada Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan 31 Desember 2021 yang lalu bersaldo Rp37.524.000.000,83 dan pada tahun 2022 terdapat mutasi tambah senilai Rp7.000.000.000,00 sehingga sampai tanggal 31 Desember 2022 nilai Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp44.524.000.000,83. Sedangkan porsi kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi di Bank Nagari Tahun 2021 adalah 2.15%, di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,31 % sehingga menjadi 2,46% per 31 Desember 2022.

Pencatatan nilai investasi Pemko Bukittinggi pada Bank Nagari adalah dengan menggunakan Metode Biaya (Cost Method).

Dari nilai tersebut, sampai saat ini telah diterbitkan sertifikat sahamnya sebanyak 37.524 lembar yaitu Saham Seri A senilai Rp1.000.000,00 perlembar dengan total nominal Rp37.524.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000015, Nomor Seri 280.611 s.d. 284.690 sebanyak 4.080 lembar dengan nominal Rp4.080.000.000,00,
- 2) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000035, Nomor Seri 363.149 s.d. 363.549 sebanyak 401 lembar dengan nominal Rp401.000.000,00,
- 3) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000054, Nomor Seri 418.791 s.d. 420.252 sebanyak 1.462 lembar dengan nominal Rp1.462.000.000,00,
- 4) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000077, Nomor Seri 482.324 s.d. 484.436 sebanyak 2.113 lembar dengan nominal Rp2.113.000.000,00 yang berasal dari tambahan investasi saham Tahun 2011,
- 5) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000104, Nomor Seri 607.550 s.d. 609.919 sebanyak 2.370 lembar seri A dengan nominal Rp2.370.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012,
- 6) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000133, Nomor Seri 761.620s.d.765.551 sebanyak 3.932 lembar dengan nominal Rp3.932.000.000,00 yang disetor tanggal 14 November 2013,
- 7) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000145, Nomor Seri 895.366 s.d. 899.365 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal sebesar Rp4.000.000.000,00 yang berasal dari tambahan setoran modal tanggal 23 April 2014,
- 8) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A Nomor A.000158, Nomor Seri 984.016 s.d 984.598 sebanyak 583 lembar dengan nilai nominal Rp583.000.000,00 yang merupakan setoran investasi saham Tahun 2015 tanggal 22 Januari 2015,
- 9) Surat Kolekti Sertifikat Saham Seri A.000166, Nomor Seri 1.021.190 s.d 1.025.589 sebanyak 4.400 lembar dengan nominal Rp4.400.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015,

- 10) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000181, Nomor Seri 1.161.281 s.d 1.163.263 sebanyak 1.983 lembar dengan nominal Rp1.983.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016,
- 11) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000202, Nomor Seri 1.365.722 s.d 1.373.921 sebanyak 8.200 lembar dengan nominal Rp8.200.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017,
- 12) Surat Kolektif Sertifikat Saham Seri A.000219, Nomor Seri 1.516.803 s.d 1.520.802 sebanyak 4.000 lembar dengan nominal Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tambahan modal tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018.

Dari hasil koordinasi ke Bank Nagari didapat keterangan bahwa sertifikat saham seri A masih sedang diproses untuk disampaikan ke Pemko Bukittinggi. Nilai tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi yang disetorkan ke Bank Nagari tahun 2022 sebesar Rp7.000.000.000,00

Sesuai surat dari Wakil Pimpinan Cabang Bank Nagari Bukittinggi Nomor SR/0017/BT/UM/01-2022 tanggal 10 Januari 2022, proyeksi bagian deviden Pemko Bukittinggi Tahun 2021 yang dibagikan tahun 2022 adalah sebesar Rp6.641.291.925,00. yang sudah dicatat di pos akun Piutang pada neraca 2021.

Berdasarkan surat Pimpinan Cabang Bank Nagari Bukittinggi Nomor SR/027/BT/UM/01-2023 tanggal 06 Januari 2023 juga dinyatakan terdapat proyeksi bagian deviden Pemko Bukittinggi Tahun 2022 sebesar Rp7.934.638.854,00 yang akan diterima pada tahun 2023. Nilai sebesar Rp7.934.638.854,00 tersebut masih bersifat proyeksi karena penghitungan menggunakan laba bersih sebelum dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Nilai deviden tersebut telah dicatat Pemko Bukittinggi pada Neraca Tahun 2022 pos akun Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sementara itu RUPS Bank Nagari baru direncanakan akan diadakan bulan Maret 2023.

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

PT. BPRS Jam Gadang Perseroda sebelumnya bernama BPR Jam Gadang, penggantian nama menjadi PT.BPRS Jam Gadang Perseroda pada tanggal 27 Mei 2021 sesuai dengan Keputusan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.03/2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang Perseroda yang telah berstatus BUMD.

Nilai Investasi Saham Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda kondisi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.250.000.000,00 dengan persentase kepemilikan saham sebesar 85,15%. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi menambah

penyertaan modal pada PT BPRS Jam Gadang Perseroda sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga nilai riil uang yang disetorkan Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp8.250.000.000,00 dengan porsi kepemilikan 90,01% yang disetor tahun 2007, 2017, 2018 dan tahun 2022. Nilai uang tersebut jika dikonversikan ke nilai saham adalah sebanyak 825.000 lembar saham @Rp10.000,00.

Dari nilai tersebut, sampai saat ini sudah diterbitkan sertifikat sahamnya semua yaitu sebanyak 825.000 lembar. Saham tersebut senilai Rp10.000,00 per lembar saham, total nominal Rp8.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00001 sebanyak 25.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)
2. Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00166 sebanyak 200.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah)
3. Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00189 sebanyak 300.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)
4. Sertifikat Saham Nomor Seri JG.00001 sebanyak 300.000 lembar senilai Rp10.000,00 per lembar saham dengan nominal Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)

Terdapat penambahan pencatatan nilai investasi Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp3.592.561.480,00 dan pengurangan sebesar Rp592.561.480,00. Penambahan dan pengurangan nilai tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai kepemilikan lebih dari 50% yang menurut SAP dalam pencatatan nilai saham adalah dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yakni memperhitungkan porsi laba PT.BPR Jam Gadang Tahun 2022 untuk Pemerintah Kota Bukittinggi dikurangi dengan dividen yang dibagikan.

Berikut penghitungan nilai investasi Pemko Bukittinggi pada BPRS Jam Gadang tahun 2022:

Tabel 5.3.4.22
Perhitungan *Equity Method* untuk Investasi Pemko Bukittinggi
pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda Tahun 2022

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2021 (<i>Neraca Audited</i>) | 5.250.000.000,00 |
| 2 | Penambahan Penyertaan Modal tahun 2022 | 3.000.000.000,00 |
| 3 | Jumlah Modal Disetor s.d 31 Desember Tahun 2022 | 8.250.000.000,00 |
| 4 | Jumlah Total Saham BPR s.d Tahun 2022 | 9.165.900.000,00 |
| 5 | Persentase Kepemilikan Saham Pemko Bukittinggi dari Rp8.250.000.000,00 | 90,01 |
| 6 | Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2022 setelah pajak | 1.204.710.506,00 |
| 7 | Bagian Laba untuk Pembagian Dividen (55%) | 662.590.777,85 |
| 8 | Jumlah Laba BPR Jam Gadang Tahun 2022 Sesuai porsi kepemilikan | 592.561.480,00 |
| 9 | Dividen 2022 yang akan dibagikan di 2023 | 592.561.480,00 |

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 10 | Jumlah Investasi Pemko Bukittinggi Tahun 2022 dengan metode ekuitas | 8.250.000.000,00 |

Untuk penghitungan dividen dari PT BPRS Jam Gadang Perseroda Tahun 2022 yang akan diterima Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 dihitung terpisah antara modal sebesar Rp5.250.000.000,00 dengan Penambahan Modal sebesar Rp3.000.000.000,00, karena penambahan penyertaan modal disetorkan pada bulan Maret 2022.

Berdasarkan surat Direktur PT.BPRS Jam Gadang Perseroda Nomor 08/BPRS.JG/UM/0123 tanggal 10 Januari 2023 dinyatakan terdapat proyeksi bagian deviden Pemko Bukittinggi Tahun 2022 sebesar Rp592.561.480,00 yang akan diterima pada tahun 2023, dan didukung dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BPRS Jam Gadang Perseroda Nomor 02 Tanggal 06 Februari 2023, rincian dividen yang akan diterima Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah :

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| | Laba setelah pajak | 1.204.710.506,00 |
| | Dividen untuk pemegang saham (55%) | 662.590.778,00 |
| I. | Dividen atas Penyertaan Modal Rp5.250.000.000,00 (12 Bulan): | |
| | a. Modal Pemko | 5.250.000.000,00 |
| | b. Total Modal BPRS | 8.665.900.000,00 |
| | c. Dividen pemegang saham | 662.590.778,00 |
| | Jumlah Dividen dari modal Rp5.250.000.000,00 (a/b*c) | 401.412.615,48 |
| II. | Dividen atas Penambahan Penyertaan Modal Rp3.000.000.000,00 (10 Bulan): | |
| | a. Modal Pemko (10/12 x 3.000.000.000,00) | 2.500.000.000,00 |
| | b. Total Modal BPRS | 8.665.900.000,00 |
| | c. Dividen untuk pemegang saham (55%) | 662.590.778,00 |
| | Jumlah Dividen dari modal Rp3.000.000.000,00 (a/b*c) | 191.148.864,51 |
| | Total Dividen tahun 2022 yang akan diterima tahun 2023 (I+II) | 592.561.480,00 |

Nilai dividen tersebut telah dicatat Pemko Bukittinggi pada Neraca tahun 2022 pos akun Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang

Investasi Pemerintah Kota Bukittinggi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi pada Neraca per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp8.397.606.881,86. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.436.020.783,11 dan mutasi kurang sebesar Rp2.047.141.823,28 sehingga saldo akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp8.786.485.841,69.

Untuk penentuan nilai investasi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan metode ekuitas, karena kepemilikan saham Pemerintah Kota Bukittinggi atas saham Perumda adalah seratus persen (100%) dengan konsekuensi seluruh laba atau rugi juga menjadi milik Pemko dan dicatat sebagai penambah atau pengurang investasi pemko.

Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang mengalami kerugian dari tahun ke tahun yang menyebabkan berkurangnya nilai investasi Pemko Bukittinggi. Penyesuaian tersebut dilakukan karena konsekuensi dari metode kepemilikan modal ekuitas 100% Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang mengakui laba sebagai penambah nilai investasi dan mengakui rugi sebagai pengurang nilai investasi.

Berikut struktur modal Pemko Bukittinggi atas PDAM Tirta Jam gadang adalah:

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Kekayaan Pemda yang dipisahkan | Rp 1.177.102.241,00 |
| 2. Penyertaan Modal Pemda | Rp 18.932.925.291,47 |
| 3. Modal Hibah | Rp 972.316.207,50 |
| 4. Laba (rugi) ditahan s.d. tahun lalu | (Rp 12.355.398.290,28) |
| 5. Laba (rugi) tahun ini | <u>Rp 59.540.392,00</u> |
| <i>Jumlah nilai bersih Penyertaan Modal</i> | <i>Rp 8.786.485.841,69</i> |

Diakuinya nilai penyertaan modal pemko sebesar Rp18.932.925.291,47 merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. Terdapat perbedaan nilai penyertaan modal pemko antara nilai yang tercantum pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang tahun 2022 dengan yang tercantum pada Perda tersebut, perbedaan nilai penyertaan modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai penyertaan modal Pemko Bukittinggi pada Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang:

| No | Perda Nomor | Tahun | Nilai Penyertaan Modal (Rp) |
|--|---|-------|-----------------------------|
| 1. | Perda No 4 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang | 2014 | 6.432.925.291,47 |
| 2. | Perda No 15 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi. | 2014 | 2.500.000.000,00 |
| 3. | Perda No 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi | 2017 | 10.000.000.000,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal Pemko Bukittinggi | | | 18.932.925.291,47 |

Namun Pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang, tercatat penyertaan modal Pemko Bukittinggi sebesar Rp16.496.904.508,00. Rincian nilai penyertaan modal pemda pada Laporan Keuangan PDAM tersebut adalah sebagai berikut :

| No | Rincian | Nilai (Rp) |
|----|--|-----------------|
| 1 | Penyertaan Modal dari Laba ditahan | 1.319.550.10,00 |
| 2 | Penambahan penyertaan modal pada tahun buku 2020 | 421.384.000,00 |

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 3 | Penyertaan modal dari APBD | 12.500.000.000,00 |
| 4 | Penyertaan Modal dari Bagian Laba | 2.255.970.498,00 |
| | Total | 16.496.904.508,00 |

Perbedaan nilai penyertaan modal tersebut disebabkan karena :

1. PDAM tidak mencatat nilai penyertaan modal Pemda awal sebesar Rp6.432.925.291,47 yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Pada tahun 2012 dan seterusnya struktur akun Dana cadangan Umum dan Dana Cadangan Tujuan tidak termasuk lagi dalam struktur modal yang pada Laporan Keuangan Perumda sebelumnya merupakan bagian dalam komposisi nilai penyertaan modal Pemda.
3. Belum ditetapkannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi dari Laba Ditahan dan tambahan Penyertaan Modal dari Bagian Laba dengan Perda.
4. Belum ditetapkannya penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Distribusi Air Minum Kelurahan Bukit Apit senilai Rp421.384.000,00 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan Perda.

Penambahan penyertaan modal pemda tahun 2020 pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum merupakan Proyek Sarana dan Prasarana Pengembangan Distribusi Air Minum Kelurahan Bukit Apit senilai Rp421.384.000,00 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 600.143/DPUPR-BKT/II/2019 Tanggal 4 Februari 2019.

5. Dengan demikian, untuk kondisi awal komposisi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi yang seharusnya adalah:

| | |
|--|----------------------------|
| - Penyertaan Modal awal Pemda | Rp 6.432.925.291,47 |
| - Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2014 | Rp 2.500.000.000,00 |
| - Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2017 | Rp10.000.000.000,00 |
| - Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2020 | Rp 421.384.000,00 |
| - Penambahan nilai penyertaan modal dari Laba ditahan (s.d tahun 2021) | Rp 1.319.550.011,00 |
| - Penambahan Penyertaan modal Pemda dari bagian Laba (s.d tahun 2021) | <u>Rp 2.255.970.498,00</u> |
| Total | Rp22.929.829.800,47 |

Pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang juga terdapat Aset Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya senilai Rp14.544.620.510,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset ex Departemen PU berupa pekerjaan Jaringan Distribusi Kapasitas Sedang dan Pemasangan sambungan rumah senilai Rp 838.812.810,38
2. Pengadaan dan Pemasangan pipa DN 250mm dengan nilai sebesar Rp1.077.074.700,00
3. IPA Kapasitas 20L/det Pengadaan dan Pemasangan pipa DN200 mm senilai Rp9.727.186.000,00
4. Pembuatan dinding penahan dan tumpuan jembatan pipa distribusi utama dengan nilai sebesar Rp2.901.547.000,00.

Penyerahan aset senilai Rp14.544.620.510,00 ke PDAM tersebut di atas masih berupa Berita Acara Serah Terima Sementara dan aset tersebut masih tercatat sebagai aset pada Kementerian PUPR.

Pada audit atas LKPD Tahun 2021 auditor merekomendasikan agar Pemko Bukittinggi mengupayakan penyerahan sepenuhnya atas aset dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang.

Pemerintah Kota Bukittinggi dan Perumda Air Minum telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengalihan aset tersebut, Direktur PDAM pernah beberapa kali bersurat kepada Dirjen Cipta Karya tahun 2007, tahun 2012, tahun 2015 serta 2021 perihal Aset Eks Departemen PU.

Tahun 2021, untuk mendorong percepatan penyelesaian serah terima aset tersebut, Pemko Bukittinggi juga telah menindaklanjuti upaya-upaya yang telah dilakukan dengan menyurati pihak kementerian sebagai berikut:

1. Surat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR-RI c.q. Kepala Balai Prasarana Permukiman Nomor 905.647/BK.05/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Permohonan Serah Terima Aset.
2. Surat Kepala Badan Keuangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi nomor 905.889/BK.05/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal serah terima aset.

Selain melalui surat, telah dilakukan beberapa kali pertemuan baik di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun pihak Kementerian/ balai yang berkunjung ke Badan Keuangan dan Perumda.

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut telah dilakukan verifikasi data oleh Perumda sesuai dengan kontrak dan asbuilt drawing dari beberapa pekerjaan dan ditindaklanjuti dengan Surat pernyataan dari Direktur Perumda Nomor : 173/ IX/Perumda.AMTJ-Bkt/11-2022 tanggal 4 November 2022 atas Hasil Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa:

1. Pekerjaan pemasangan dan pengadaan Pipa Dn 250mm Banpro Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi (paket 05) tahun 2010 dengan nilai Perolehan Rp.1.077.074.700.-

2. Pekerjaan IPA Kapasitas 20 L/detik Pengadaan dan Pemasangan Pipa Dn 200 mm dan Dn 225 mm Banpro Penyehatan PDAM Kota Bukittinggi (paket 09) Tahun 2011 dengan Nilai Perolehan Rp. 9.727.186.000.
3. Pembuatan Dinding Penahan dan Tumpuan Jembatan Pipa Pengadaan dan Pemasangan Pipa Dn 250mm Banpro PDAM Kota Bukittinggi (PAMS-9) Tahun 2015 dengan nilai Perolehan Rp.2.901.547.000.-

Selanjutnya Surat pernyataan dari Direktur Perumda dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) oleh Walikota Bukittinggi dengan nomor 030/2455/BK.06/2022 tanggal 29 November 2022. Surat Pernyataan ini sebagai persyaratan atas usulan alih status/ Hibah Barang Milik Negara. Saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi menunggu tahapan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia dan nantinya dicatat sebagai Aset Pemerintah Kota Bukittinggi dan selanjutnya akan diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Perumda.

Selain aset pemerintah pusat (APBN) di atas, juga terdapat aset Pemerintah Kota Bukittinggi (APBD) yang belum dicatat sebagai bagian penyertaan modal Pemko Bukittinggi pada PDAM, karena penyerahan aset tersebut masih berupa Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) dan masih tercatat sebagai aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, dengan jumlah nilai aset sebesar Rp1.416.078.946,93 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Saluran Pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang) dengan nilai Rp177.476.000,00 dengan BAST Sementara Nomor 030/571.B/BK.06/2019 dan Nomor 671.A/IX-PDAM/08-2019 tanggal 15 Agustus 2019.
2. Saluran pembawa air baku tertutup dengan BAST Sementara Nomor 030/26.a/BK.06/2020 dan Nomor 03.a/IX-PDAM/01-2020 tanggal 6 Januari 2020 dengan total nilai sebesar Rp1.238.602.946,93 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Parit Antang senilai Rp335.615.469,98;
 - b. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang) di Kelurahan Tarok Dipo senilai Rp411.943.479,93;
 - c. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Kubu Tanjung) senilai Rp166.475.376,00;
 - d. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Pulau Anak Air) senilai Rp172.139.811,34;
 - e. Saluran pembawa air baku tertutup (Jaringan SPAM Zona Tabek Gadang di Kelurahan Puhun Pintu Kabun) senilai Rp152.428.809,68.

Verifikasi data telah dilakukan dengan Perumda, dan Saluran Pembawa Air Baku Tertutup (Jaringan SPAM) inipun telah beroperasi. Saat ini Badan Keuangan telah memasukkan nilai Aset ini ke dalam Draft Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Selain upaya-upaya dalam rangka percepatan serah terima asset dan penetapan sebagai penyertaan modal, auditor juga merekomendasikan agar dilakukan penghitungan nilai yang akan dicatat dalam penyertaan modal. Untuk saat ini penghitungan yang dapat dilakukan adalah penghitungan awal /sementara, namun belum dapat dicatat sebagai penyertaan modal disebabkan sebagai berikut:

1. Aset-aset tersebut belum diserahterimakan secara penuh dan masih dicatat di neraca Kementerian PUPR maupun Dinas PUPR Kota Bukittinggi (menghindari double pencatatan);
2. Belum dilakukan verifikasi fisik, penafsiran maupun penilaian ulang terhadap kondisi fisik barang yang diserahterimakan karena terdapat aset-aset dari pemerintah pusat tersebut yang sudah lama sehingga fisiknya tidak ditemukan lagi/diganti seperti pipa jaringan dan sebagainya;
3. Belum ditetapkan pada Peraturan daerah terkait penyertaan modal Pemko Bukittinggi.

Adapun penghitungan sementara yang dapat kami sajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah:

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2014 | Rp 2.500.000.000,00 |
| 2. Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2017 | Rp10.000.000.000,00 |
| 3. Penyertaan Modal awal Pemda | Rp 6.432.925.291,47 |
| 4. Penambahan penyertaan modal Pemda tahun 2020 | Rp 421.384.000,00 |
| 5. Penambahan nilai penyertaan modal dari Laba ditahan (s.d tahun 2021) | Rp 1.319.550.011,00 |
| 6. Penambahan Penyertaan modal Pemda dari bagian Laba (s.d tahun 2021) | Rp 2.255.970.498,00 |
| 7. Aset Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya dan masih dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) | Rp14.544.620.510,00 |
| 8. Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi masih dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Sementara (BASTS) | Rp1.416.078.946,93 |
| <i>Jumlah</i> | <i>Rp38.890.529.257,40</i> |

Saat ini draft peraturan daerah untuk penyertaan modal ke Perumda Air Minum sedang diajukan. Jika serah terima dari Kementerian PUPR selesai menjelang ditetapkannya peraturan daerah tersebut, angka sebesar Rp38.890.529.257,40 tersebut di atas akan menjadi angka dasar untuk dipertimbangkan ke depan untuk diappraisal kemudian ditetapkan menjadi penyertaan modal sesuai peraturan yang berlaku.

5.3.1.2 Aset Tetap

Tahun 2022
(Rp)
1.855.803.078.417,13

Tahun 2021
(Rp)
1.808.865.746.671,24

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Harga Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.718.826.511.137,30 dan Rp2.592.895.250.678,61 atau mengalami peningkatan sebesar 4,86%. Sedangkan nilai buku Aset Tetap Tahun 2021 sebesar Rp1.808.865.746.671,24 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.855.803.078.417,30. Berdasarkan kelompoknya, Aset Tetap Pemerintah Kota Bukittinggi yang disajikan pada Neraca Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.21 Kelompok Aset Tetap

| No | Rekening | Uraian | Saldo Akhir 2021 (Rp) | Mutasi Bertambah (Rp) | Mutasi Berkurang (Rp) | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 1.3 | ASET TETAP | | | | |
| 1 | 1.3.01 | Tanah | 566.209.588.505,20 | 622.700.000,00 | 542.500.000,00 | 566.289.788.505,20 |
| 2 | 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | 346.346.890.953,31 | 65.789.239.008,47 | 5.471.108.849,12 | 406.665.021.112,66 |
| 3 | 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | 960.588.776.351,51 | 53.318.466.659,75 | 9.568.482.275,13 | 1.004.338.760.736,13 |
| 4 | 1.3.04 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 623.922.585.555,15 | 55.307.802.355,83 | 6.486.205.340,64 | 672.744.182.570,34 |
| 5 | 1.3.05 | Aset Tetap Lainnya | 30.677.779.197,80 | 4.716.903.366 | 4.224.807.472,00 | 31.169.875.091,80 |
| 6 | 1.3.06 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 65.149.630.115,64 | 6.362.829.128,41 | 33.893.576.122,88 | 37.618.883.121,17 |
| 7 | 1.3.07 | Akumulasi Penyusutan | (784.029.504.007,37) | (84.468.710.604) | (5.474.781.892,00) | (863.023.432.720) |
| Jumlah Aset Tetap | | | 1.808.865.746.671,24 | 101.649.229.914,46 | 54.711.898.167,77 | 1.855.803.078.417,30 |

5.3.1.2.1 Tanah

Tahun 2022
(Rp)
566.289.788.505,20

Tahun 2021
(Rp)
566.209.588.505,20

Nilai Tanah pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp566.209.588.505,20. Pada Tahun 2022 Tanah tersebut mengalami mutasi penambahan sebesar Rp622.700.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp542.500.000,00 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp566.289.788.505,20 untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Saldo Awal

Rp 566.209.588.505,20

Mutasi Tambah

| | |
|--|----------------|
| Belanja Modal Tanah | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa | 0,00 |
| Hibah Masuk dari pihak ke-3 | 80.200.000,00 |
| Penilaian Tanah yang sebelumnya bernilai Nol | 0,00 |
| Mutasi Masuk Antar SKPD | 542.500.000,00 |
| Koreksi Pencatatan | 0,00 |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Total Mutasi Tambah | Rp 622.700.000,00 |
| Mutasi Kurang | |
| Mutasi Keluar antar SKPD | 542.500.000,00 |
| Koreksi Pencatatan | |
| Total Mutasi Kurang | Rp 542.500.000,00 |
| Saldo Akhir | Rp 566.289.788.505,20 |

Tanah terdiri dari: Tanah Persil senilai Rp400.989.547.476,00. Tanah Non Persil senilai Rp20.017.663.908,20. dan Lapangan senilai Rp145.282.577.121,00.

Penambahan nilai tanah sebesar Rp80.200.000,00 berasal dari hibah Pihak ke-3. Tanah Hibah dari pihak ke-3 tersebut sudah tercatat sebagai inventaris Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Aset Berupa Tanah Dari Hj. Asma Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 15 September 2022 seluas 100 m².

Tabel 5.3.22 Rekap Data Aset Tetap Tanah Per SKPD

| NO | SKPD | Tanah (Rp) |
|----|---|--------------------|
| 1 | Sekretariat DPRD | 5.683.900.000,00 |
| 2 | Sekretariat Daerah | 19.256.977.652,00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 146.017.527.875,00 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2.885.142.908,20 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 7.906.450.000,00 |
| 6 | Dinas Kesehatan | 17.587.408.500,00 |
| 7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 68.491.265.001,00 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 278.250.000,00 |
| 9 | Dinas Sosial | 1.001.400.000,00 |
| 10 | Dinas Kebakaran | 0,00 |
| 11 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | 810.000.000,00 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 960.000.000,00 |
| 13 | Dinas Pertanian dan Pangan | 13.718.684.469,00 |
| 14 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan | 78.173.490.000,00 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian, dan Tenaga Kerja | 2.624.000.000,00 |
| 16 | Pengelola Barang Milik Daerah | 27.365.906.000,00 |
| 17 | Badan Keuangan | 6.139.500.000,00 |
| 18 | Inspektorat | 437.500.000,00 |
| 19 | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan | 0,00 |
| 20 | Dinas Lingkungan Hidup | 7.813.703.000,00 |

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 21 | Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga | 132.858.634.000,00 |
| 22 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 |
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja | 909.000.000,00 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia | 0,00 |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 282.000.000,00 |
| 26 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 0,00 |
| 27 | Kecamatan Guguk Panjang | 12.683.300.000,00 |
| 28 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | 9.203.607.100,00 |
| 29 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | 3.202.142.000,00 |
| | TOTAL | 566.289.788.505,20 |

Disamping itu, terdapat Aset Tetap Tanah yang digunakan oleh pihak lain dengan status pinjam pakai sebagai berikut:

1. Status pinjam pakai dengan Komisi Pemilihan Umum berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 453,75 m² melalui perjanjian pinjam pakai nomor: 180/09/Hukum.B/151/KB/KPU-Kota/003.435.130 /2015 tanggal 25 Maret 2015.
2. Status pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 2.250 m² yang digunakan untuk pembangunan gedung UPTD SAMSAT Bukittinggi melalui perjanjian pinjam pakai Nomor 180/26/Huk-B/2015 dan 030/121/Perj/BPAD-IX/2015 tanggal 28 September 2015.

5.3.1.2.2 Peralatan Dan Mesin

Tahun 2022
Rp
406.665.021.112,66

Tahun 2021
Rp
346.346.890.953,31

Peralatan dan Mesin meliputi Alat-alat Bermesin dan Tidak Bermesin, Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, Alat Elektronik, Inventaris Kantor, dan Peralatan Lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 lalu adalah Rp346.346.890.953,31. Pada Tahun 2022 Peralatan dan Mesin tersebut mengalami mutasi bertambah sebesar Rp65.789.239.008,47 dan mutasi berkurang sebesar Rp5.471.108.849,12 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp406.665.021.112,66 dimana rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.24 Rincian Aset Tetap
Peralatan dan Mesin

| No. | Akun/ Rekening | Uraian | Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp) | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|-----|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | 346.346.890.953,31 | 406.665.021.112,66 |
| A | 1.3.02.01 | Alat Besar | 19.146.627.447,90 | 20.743.096.138,90 |
| 1 | 1.3.02.01.01 | Alat Besar Darat | 8.295.192.773,00 | 9.547.597.384,00 |
| 2 | 1.3.02.01.02 | Alat Besar Apung | 325.710.000,00 | 374.709.840,00 |
| 3 | 1.3.02.01.03 | Alat Bantu | 10.525.724.674,90 | 10.820.788.914,90 |
| B | 1.3.02.02 | Alat Angkutan | 80.181.653.155,00 | 87.761.004.547,00 |
| 1 | 1.3.02.02.01 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 79.475.089.722,00 | 86.486.874.114,00 |
| 2 | 1.3.02.02.02 | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 585.013.433,00 | 844.789.433,00 |
| 3 | 1.3.02.02.03 | Alat Angkutan Apung Bermotor | 121.550.000,00 | 429.341.000,00 |
| C | 1.3.02.03 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 1.858.540.868,00 | 2.213.040.560,00 |
| 1 | 1.3.02.03.01 | Alat Bengkel Bermesin | 597.994.650,00 | 509.453.730,00 |
| 2 | 1.3.02.03.02 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 257.631.755,00 | 279.162.525,00 |
| 3 | 1.3.02.03.03 | Alat Ukur | 1.002.914.463,00 | 1.424.424.305,00 |
| D | 1.3.02.04 | Alat Pertanian | 858.684.444,00 | 864.384.444,00 |
| 1 | 1.3.02.04.01 | Alat Pengolahan | 858.684.444,00 | 864.384.444,00 |
| E | 1.3.02.05 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 95.795.479.751,27 | 106.536.501.882,41 |
| 1 | 1.3.02.05.01 | Alat Kantor | 31.882.427.266,52 | 36.913.868.742,48 |
| 2 | 1.3.02.05.02 | Alat Rumah Tangga | 57.501.962.879,75 | 62.993.641.025,93 |
| 3 | 1.3.02.05.03 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 6.411.089.605,00 | 6.628.992.114,00 |
| F | 1.3.02.06 | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 7.964.453.524,87 | 11.864.751.759,54 |
| 1 | 1.3.02.06.01 | Alat Studio | 3.557.894.621,00 | 7.499.083.263,00 |
| 2 | 1.3.02.06.02 | Alat Komunikasi | 3.943.330.515,04 | 3.978.499.654,71 |
| 3 | 1.3.02.06.03 | Peralatan Pemancar | 447.641.388,83 | 387.168.841,83 |
| 4 | 1.3.02.06.04 | Peralatan Komunikasi Navigasi | 15.587.000,00 | 0,00 |
| G | 1.3.02.07 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | 46.064.291.088,05 | 55.087.241.147,71 |
| 1 | 1.3.02.07.01 | Alat Kedokteran | 45.612.998.385,71 | 54.626.087.445,71 |
| 2 | 1.3.02.07.02 | Alat Kesehatan Umum | 451.292.702,34 | 461.153.702,00 |
| H | 1.3.02.08 | Alat Laboratorium | 24.227.620.895,60 | 28.152.206.514,48 |
| 1 | 1.3.02.08.01 | Unit Alat Laboratorium | 11.756.589.126,00 | 15.258.673.151,00 |
| 2 | 1.3.02.08.02 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 30.518.500,00 | 30.518.500,00 |
| 3 | 1.3.02.08.03 | Alat Peraga Praktik Sekolah | 11.340.997.865,60 | 11.755.838.651,48 |
| 4 | 1.3.02.08.04 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 71.570.024,00 | 71.570.024,00 |
| 5 | 1.3.02.08.05 | Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan | 184.678.000,00 | 184.678.000,00 |
| 6 | 1.3.02.08.07 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 806.257.380,00 | 806.257.380,00 |
| 7 | 1.3.02.08.08 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamica | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 8 | 1.3.02.08.09 | Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi | 34.510.000,00 | 42.170.808,00 |
| I | 1.3.2.09 | Alat Persenjataan | | 202.273.400,00 |
| | 1.3.2.09.02 | Persenjataan Non senjata api | | 175.670.000,00 |
| | 1.3.2.09.04 | Alat khusus Kepolisian | | 26.603.400,00 |
| J | 1.3.02.10 | Komputer | 61.743.723.329,47 | 75.964.971.234,47 |
| 1 | 1.3.02.10.01 | Komputer Unit | 48.187.779.442,30 | 59.895.354.034,30 |
| 2 | 1.3.02.10.02 | Peralatan Komputer | 13.555.943.887,17 | 16.069.617.200,17 |
| K | 1.3.02.11 | Alat Eksplorasi | 1.580.000,00 | |
| 1 | 1.3.02.11.02 | Alat Eksplorasi Geofisika | 1.580.000,00 | |
| L | 1.3.02.12 | Alat Pengeboran | 599.734.590,00 | |
| 1 | 1.3.02.12.01 | Alat Pengeboran Mesin | 599.734.590,00 | |
| M | 1.3.02.13 | Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 280.721.684,62 | 280.721.684,62 |
| 1 | 1.3.02.13.01 | Sumur | 280.721.684,62 | 280.721.684,62 |
| N | 1.3.02.14 | Alat Bantu Eksplorasi | - | |

| | | | | |
|----------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 1.3.02.14.02 | Alat Bantu Produksi | - | |
| O | 1.3.02.15 | Alat Keselamatan Kerja | 2.235.898.041,30 | 1.668.450.388,30 |
| 1 | 1.3.02.15.01 | Alat Deteksi | 737.877.240,00 | |
| 2 | 1.3.02.15.02 | Alat Pelindung | 356.683.601,30 | 319.762.601,30 |
| 3 | 1.3.02.15.03 | Alat SAR | 1.121.477.400,00 | 1.330.904.387,00 |
| 4 | 1.3.02.15.04 | Alat Kerja Penerbangan | 19.859.800,00 | 17.783.400,00 |
| P | 1.3.02.16 | Alat Peraga | - | |
| 1 | 1.3.02.16.01 | Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | - | |
| Q | 1.3.02.17 | Peralatan Proses/ Produksi | | 45.340.750,00 |
| | 1.3.02.17.01 | Unit Peralatan/ Proses Produksi | | 45.340.750,00 |
| R | 1.3.02.18 | Rambu-rambu | 4.698.065.383,23 | 14.163.134.761,23 |
| 1 | 1.3.02.18.01 | Rambu-rambu Lalu Lintas Darat | 4.698.065.383,23 | 14.163.134.761,23 |
| S | 1.3.02.19 | Peralatan Olahraga | 689.816.750,00 | 1.117.901.900,00 |
| 1 | 1.3.02.19.01 | Peralatan Olahraga | 689.816.750,00 | 1.117.901.900,00 |

Sedangkan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 adalah sebagaimana uraian di bawah ini:

| | |
|--|------------------------------|
| Saldo Awal 1 Januari 2022 | Rp 346.346.890.953,31 |
| Penambahan | |
| Belanja Modal (LRA) | Rp 48.131.479.720,00 |
| Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa | Rp 144.765.510,00 |
| Mutasi dari SKPD Lain (BAST) | Rp 1.976.799.775,34 |
| Hibah dari Pihak ke 3 | Rp 10.957.420.258,00 |
| Koreksi Pencatatan | Rp 717.824.139,13 |
| Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk) | Rp 3.818.411.546,00 |
| Hasil Penilaian Kurang Catat | Rp 42.538.060,00 |
| Jumlah Penambahan | Rp 65.789.239.008,47 |
| Pengurangan | |
| Penghapusan berdasarkan SK Wako | Rp 391.395.278,00 |
| Mutasi ke SKPD Lain (BAST) | Rp 1.976.799.775,34 |
| Koreksi Pencatatan | Rp 26.858.900,00 |
| Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar) | Rp 2.299.045.931,14 |
| Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi (Ekstrakomptabel) | Rp 387.235.545,50 |
| Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Persediaan) | Rp 223.500.724,00 |
| Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Pemeliharaan) | Rp 165.522.695,14 |
| Jumlah Pengurangan | Rp 5.471.108.849,12 |
| Saldo akhir per 31 Desember 2022 | Rp 406.665.021.112,66 |

Rincian penambahan dari Peralatan dan Mesin dapat di jelaskan sebagai berikut :

I. Penambahan berasal dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa.

Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa merupakan Belanja pada SKPD yang berasal dari belanja Barang dan Jasa akan tetapi menambah nilai Aset SKPD yang bersangkutan. Ada beberapa SKPD yang terdapat Belanja Barang dan Jasa yang sifatnya menambah Nilai Aset, diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Nilai Aset dengan total sebesar Rp96.261.770,00. Nilai tersebut terdapat pada:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp3.000.000,00 berupa Belanja Handy Talky.
- SDN 01 Benteng Pasar Atas sebesar Rp30.195.000,00 berupa Belanja Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya.
- SDN 04 Bukit Apit Puhun sebesar Rp1.700.000,00 berupa Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya.
- SDN 07 Bukit Cangang sebesar Rp8.250.000,00 berupa Belanja Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SDN 11 Bukit Apit Puhun sebesar Rp4.700.000,00 berupa Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya.
- SDN 12 Puhun Pintu Kabun sebesar Rp3.000.000,00 berupa Belanja Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SDN 16 Tarok Dipo sebesar Rp13.328.270,00 berupa Belanja Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SMPN 1 sebesar Rp2.070.000,00 berupa Belanja Alat Bantu dan Alat Pembersih Lantai.
- SMPN 3 sebesar Rp24.018.500,00 berupa Belanja Alat Kantor Lainnya, Alat Studio Audio dan Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SMPN 4 sebesar Rp4.000.000,00 berupa Alat Peraga Praktek Sekolah.
- SMPN 8 sebesar Rp2.000.000,00 berupa Alat Peraga Praktek Sekolah.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Aset berupa Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp800.000,00 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp1.400.000,00 dan Belanja Modal Unit Peralatan Proses/ Produksi (Transport and Storage Equipment For Liquid) sebesar Rp12.765.000,00.

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Aset berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp2.377.200,00 serta Upah Pemasangan Pompa Air yang menambah ke Nilai Pompa yang bersangkutan sebesar Rp3.219.000,00.

4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Aset berupa Belanja Pompa sebesar Rp1.656.040,00 serta Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp23.000.000,00.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat Belanja Barang dan Jasa yang menambah Aset berupa Belanja Peralatan Jaringan sebesar Rp3.286.500,00.

II. Penambahan berasal dari Hibah Pihak Ke Tiga

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah Pihak ke 3 dengan total sebesar Rp10.957.420.258,00 merupakan pemberian seseorang, kelompok masyarakat atau organisasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang diberikan secara sukarela. Rincian Hibah dari Pihak ke 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika menerima Hibah dari Bank Nagari berupa Hibah Videotron/Display sebesar Rp849.365.600,00.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BPBD menerima Hibah Trailer Dapur dan Peralatan Kebencanaan dari BNPB sebesar Rp721.158.500,00.
3. Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan menerima Hibah dari Kementerian Perhubungan berupa Peralatan ATCS (*Area Traffic Control System*) sebesar Rp9.386.896.158,00.

III. Penambahan dari Koreksi Pencatatan.

Penambahan dari Koreksi Pencatatan pada SKPD dengan total sebesar Rp717.824.139,13 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan
Koreksi pencatatan pada Dinas Perhubungan berupa Perencanaan Pengadaan ATCS dari Kementerian Perhubungan sebesar Rp65.009.700,00 yang awalnya terletak di KDP kemudian dikoreksi menjadi Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koreksi pencatatan ke Peralatan dan Mesin dari Belanja Pengadaan Gedung dan Bangunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - SMPN 3 realisasi belanja berupa Kanopi sebesar Rp224.761.035,42.
 - SMPN 5 realisasi belanja berupa Pemasangan Auning sebesar Rp117.034.279,65.

-TK Negeri 1 realisasi belanja berupa pembangunan APE luar sebesar Rp88.225.135,88 serta pengadaan Tangki Air dan Sanitasinya sebesar Rp111.781.088,18.

Sedangkan koreksi pencatatan ke Peralatan dan Mesin dari rekening belanja Aset Tetap Lainnya dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

- SMPN 6 realisasi belanja Alat Kantor sebesar Rp15.184.800,00, belanja Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebesar Rp18.000.000,00, belanja Personal Komputer Rp11.499.600,00 serta belanja Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar Rp4.884.000,00.
- SDN 18 Campago Guguk Bulek realisasi belanja berupa Gorden sebesar Rp6.000.000,00.
- SDN 02 Aur Kuning realisasi belanja berupa Teralis Kelas sebesar Rp15.000.000,00.
- SDN 04 bukit Apit Puhun realisasi belanja berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Kesenian sebesar Rp2.834.500,00.
- SDN 05 Puhun Pintu Kabun realisasi belanja berupa Tangki Air sebesar Rp1.600.000,00 belanja Teralis sebesar Rp7.000.000,00.
- SDN 10 ATTS realisasi belanja Alat Kantor sebesar Rp6.400.000,00.
- SDN 11 Aur Kuning realisasi belanja Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Kesenian sebesar Rp2.560.000,00.
- SDN 17 Manggis Ganting realisasi belanja Alat Kantor sebesar Rp2.400.000,00 dan belanja Alat Rumah Tangga sebesar Rp750.000,00.
- SMPN 2 realisasi belanja berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Kesenian sebesar Rp4.400.000,00.
- SMPN 5 relaisasi belanja berupa Alat Rumah Tangga sebesar Rp8.350.000,00.

3. Dinas Kebakaran

Dinas Kebakaran terdapat koreksi belanja Jalan Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.150.000,00 berupa Belanja Tangki air dan Portable Water Pump.

IV. Penambahan berasal dari Reklas Antar kelompok Barang (Masuk)

Reklas Antar kelompok Barang (Masuk) sebesar Rp3.818.411.546,00 dapat dirinci dan dijelaskan pada SKPD sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah terdapat reklas antar kelompok barang dari Aset Tetap Lainnya (realisasi belanja pada DPA SKPD) ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.014.849.546,00 berupa:

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Belanja Modal Audio Visual/ Vidio Wall sebesar Rp999.950.604,00.

- Pengadaan Belanja Modal Audio Visual berupa voice recorder sebesar Rp2.997.000,00.
 - Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Belanja Modal Audio Visual/ Videotron sebesar Rp1.996.916.942,00.
 - Pengadaan Alat Rumah Tangga berupa Televisi sebesar Rp14.985.000,00.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Belanja Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.994.000,00 berupa Teralis.
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat reklas antar kelompok barang dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp173.745.000,00 berupa Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Kesenian.
 4. Dinas Pertanian dan Pangan
Dinas Pertanian dan Pangan terdapat reklas antar kelompok barang dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.500.000,00 berupa Alat Kantor Lainnya.
 5. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat reklas antar kelompok barang dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.745.000,00 berupa Belanja Modal Audio Visual.
 - Reklas dari Belanja Mesin Pompa Air sebesar Rp7.215.000,00 dan belanja Alat Kantor Lainnya sebesar Rp800.000,00.
 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKPSDM terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.000.000,00 berupa Peralatan Studio Audio.
 7. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.128.000,00 berupa Belanja Alat Kantor Rp18.143.000,00 serta Belanja Alat Rumah Tangga sebesar Rp14.985.000,00.
 8. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Aset Lainnya (Rusak Berat) ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp101.935.000,00 berupa Kendaraan bermotor Penumpang/Mini Bus pembelian Tahun 1999. Kendaraan tersebut diperbaiki kembali karena tidak adanya anggaran untuk pengadaan kendaraan roda 4 disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran untuk kebutuhan dana Covid 19 pada Tahun 2020.

9. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup terdapat reklas antar kelompok barang (masuk) dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada DPA SKPD ke Pengelompokan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp452.500.000,00 berupa:

- Alat-alat Besar sebesar Rp370.000.000,00.
- Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp3.500.000.
- Alat Laboratorium sebesar Rp54.000.000,00.
- Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp25.000.000,00.

V. Penambahan dari Hasil Penilaian Kurang Catat

Hasil penilaian kurang catat merupakan penambahan nilai aset yang berasal dari kealpaan pencatatan tahun sebelumnya, sehingga perlu dicatat lagi ditahun berjalan dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat kurang catat terhadap asetnya dengan total sebesar Rp29.677.660,00 berupa Gordyn, Michrophone Table Stand, Audio Mixing Console, Peralatan Studio Audio Lainnya, Lighting Stand Tripod, Hard disk Eksternal, serta Peralatan Jaringan. Kurang catat tersebut merupakan hasil temuan Inspektorat tahun 2022.
2. Dinas Kesehatan terdapat kurang catat sebesar Rp12.860.400,00 berupa Alat Bengkel bermesin sebesar Rp2.530.000,00, Alat Ukur Universal sebesar Rp7.305.400,00 serta Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp3.025.000,00.

Rincian pengurangan dari Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Pengurangan Berdasarkan SK Penghapusan

Pengurangan Berdasarkan SK Penghapusan merupakan pengurangan Aset SKPD yang berasal dari penjualan, pemusnahan atau pun sebab kondisi lainnya. Rincian Penghapusan pada SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 11.734.400,00.
2. Dinas Kesehatan dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 12.330.000,00.
3. Bapelitbang dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 117.701.357,00.
4. Kantor Satpol PP dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 18.847.500,00.
5. Diskominfo dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 20.148.700,00.
6. Kecamatan Guguk Panjang dengan jumlah penghapusan sebesar Rp 210.633.321,00.

Rincian dari Penghapusan pada SKPD tersebut dapat dilihat pada lampiran SK penghapusan SKPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari CaLK Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

II. Pengurangan dari Koreksi Pencatatan

Koreksi pencatatan berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.858.000,00 dengan rincian serta penjelasannya sebagai berikut:

- Koreksi pencatatan aset dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada SDN 03 Pakan Kurai sebesar Rp8.436.000,00.
- Koreksi pencatatan aset dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada SMPN 7 sebesar Rp17.672.900,00.
- Koreksi pencatatan aset dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya pada SDN 06 Pulau Anak air sebesar Rp750.000,00.

III. Pengurangan berasal dari Reklas Antar kelompok Barang (keluar)

Pengurangan yang berasal dari reklas antar kelompok barang (keluar) berasal dari SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (ubah kondisi barang baik jadi Rusak Berat) sebesar Rp46.752.770,00.
2. Dinas Kesehatan
-Dinas Kesehatan terdapat Reklas Belanja dari Rekening Peralatan dan Mesin berupa partisi ruangan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.724.129,14.
-Dinas Kesehatan terdapat reklas belanja dari Rekening Peralatan dan Mesin berupa IPAL ke JIJ sebesar Rp733.606.000,00.
3. Dinas Kebakaran
Dinas Kebakaran terdapat Reklas Belanja dari rekening Peralatan dan Mesin ke JIJ sebesar Rp.15.000.000,00 berupa Pengadaan Instalasi air bersih.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
DP3APPKB terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp49.873.500,00.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
DKUKMDP terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp92.994.100,00.
6. Inpektorat
Inspektorat terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp40.432.000,00.
7. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp 754.268.833,00.

8. Kantor Satpol PP

Satpol PP terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp188.564.841,00

10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BKPSDM terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp73.557.000,00.

9. Diskominfo

Diskominfo terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp36.790.000,00.

10. Kecamatan ABTB

Kecamatan ABTB terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp92.882.563,00.

11. Kecamatan MKS

Kecamatan MKS terdapat Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Ubah Kondisi Barang Baik Jadi RB) sebesar Rp43.600.195,00.

IV. Pengurangan berasal dari Belanja Modal menjadi Aset Non Kapitalisasi

Pengurangan yang berasal dari Belanja Modal di tahun berjalan, menjadi Aset Non Kapitalisasi (Ekstrakomtabel) karena tidak memenuhi jumlah nilai kapitalisasi Asetnya. Penjelasan dan rincian Belanja Modal menjadi Aset Non Kapitalisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp25.041.600,00.
2. DPUPR sebesar Rp12.897.500,00.
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp4.376.040,00.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp217.264.820,50.
5. Dinas Kesehatan sebesar Rp36.421.395,00.
6. BPBD sebesar Rp9.852.250,00.
7. DKUKMDP sebesar Rp2.070.000,00.
8. Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp6.925.000,00.
9. Badan Keuangan sebesar Rp750.000,00.
10. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp300.000,00.
11. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp499.500,00.
12. Kantor Satpol PP sebesar Rp39.682.000,00.
13. BKPSDM sebesar Rp425.000,00.
14. Kec. Guguk Panjang sebesar Rp21.378.440,00.
15. Kec. ABTB sebesar Rp2.997.000,00.

16. Kec. MKS sebesar Rp7.105.000,00.

V. Pengurangan berasal dari Belanja Modal menjadi Persediaan.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan merupakan pengurangan Belanja Modal di LRA menjadi barang Persediaan. Penjelasan dan rincian Pengurangan aset dari Belanja Modal menjadi persediaan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD sebesar Rp19.425.000,00.
2. Sekretariat Daerah sebesar Rp72.632.420,00.
3. DPUPR sebesar Rp2.260.959,00.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp55,508.475,00.
5. Dinas Kesehatan sebesar Rp23.143.500,00.
6. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp15.318.000,00.
7. BKPSDM sebesar Rp2.935.000,00.
8. Diskominfo sebesar Rp1.900.000,00.
9. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp30.377.370,00.

VI. Pengurangan berasal dari Belanja Modal yang reklas ke Pemeliharaan.

Pengurangan berasal dari Belanja Modal yang reklas ke Pemeliharaan merupakan Belanja Modal pada SKPD yang tidak memenuhi untuk dijadikan Aset Tetap tapi perlu di reklas ke Pemeliharaan. Penjelasan dan rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah terdapat Belanja Modal yang menjadi Pemeliharaan sebesar Rp125.522.695,14 berupa rehab ringan Rumah Dinas Walikota sebesar Rp109.730.492,04 serta Rumah Dinas Wakil Walikota sebesar Rp15.792.203,10.

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup terdapat Belanja Modal yang menjadi Pemeliharaan sebesar Rp40.000.000,00 berupa kerangkeng kendaraan roda 4 pickop L300.

Adapun Aset Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan tahun akhir tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.25
Daftar Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain Tahun 2022

| N O | URAIAN | INSTANSI PEMIMJAM PAKAI | TANGGAL | NOMOR PERJANJIAN | JANGKA WAKTU | BERAKHIR |
|-----|---|------------------------------|-------------------|---|--------------|---|
| 1 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1537 L (Eks.12 L). Toyota Kijang Inova G Tahun 2005 | Sub Denpon 1/4-3 Bukittinggi | 15 September 2015 | 188.45/DPKAD.06/02/2015 5 B/92/IX/2015 | 5 Tahun | 15 September 2015 s/d 14 September 2020 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----------------------|---|--------------------|---|
| 2 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1560 L. Toyota Kijang Innova G (TGN 40R- GKMDKD) Tahun 2013 | Pengadilan Negeri Klas I.B Bukittinggi | 01 April 2016 | 024/02/DPKAD.06/2016 W3.012/392/UM/III/2016 | 5 Tahun | 16 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021 |
| 3 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 2743 LG. Toyota Kijang LX 1.8 Tahun 2004 | Kodim 0304 / Agam | 01 April 2016 | 024//01/DPKAD.06/2016 B/283/III/2016 | 5 Tahun | 20 Februari 2016 s/d 19 Februari 2021 |
| 4 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1513 L. Toyota Kijang Inova G Tahun 2010 | Kejaksaan Negeri Bukittinggi | 01 April 2016 | 024//03/DPKAD.06/2016 B.507/N.3.1.1/CV.1/03/20 16 | 5 Tahun | 04 Februari 2015 s/d 3 Februari 2020 |
| 5 | 1. Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1545 L. Toyota Rush 1.5 S Tahun 2013 2. Kendaraan Dinas Roda 2 BA 7536 LG. Honda GLP/III A (Kend. roda 2) | Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | 11 April 2016 | 024/05/DPKAD.06/2016 030/65/IV/Perj/BPAD.201 6 | 5 Tahun | 30 Januari 2016 s/d 29 Januari 2021 |
| 6 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1481 LO. Toyota Kijang Innova G Tahun 2005 | Kepolisian Resor Bukittinggi | 20 April 2016 | 024/08/DPKAD.06/2016 B/1011/IV/2016 | 5 Tahun | 30 Januari 2016 s/d 29 Januari 2021 |
| 7 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1320 L. Toyota Kijang Innova 2.4 Q M/T Tahun 2016 | Kepolisian Resor Bukittinggi | 9 Januari 2017 | 024/01/BK/I-2017 | 5 Tahun | 9 Januari 2017 s/d 8 Januari 2022 |
| 8 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1755 L (Eks.BA.58L). Toyota Avanza 1500 S Tahun 2008 | Kejaksaan Negeri Bukittinggi | 18 Februari 2019 | 030//02/PERJ.PP/BK.06/2 019 B.323/N.3.11/CP.1/02/201 9 | 5 Tahun | 18 Februari 2019 s/d 18 Februari 2024 |
| 9 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1048 L. Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Tahun 2019 | Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Bukittinggi | 27 March 2019 | 030/03/PERJ.PP/BK.06/20 19 W3.PAS.02.UM.01.01- 57 | 5 Tahun | 27 Maret 2019 s/d 26 Maret 2024 |
| 10 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1567 L. Toyota Fortuner Tahun 2013 | Kejaksaan Negeri Bukittinggi | 10 September 2020 | 020/240/Umperl/XII-2020 B-1254/L.3.11/Cpl/9/2020 | 5 Tahun | 10 Sept 2020 s/d 09 September 2025 |
| 11 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1121 L. Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T Tahun 2019 | Pengadilan Agama Bukittinggi Klas I.B | 10 September 2020 | 020/238/Umperl/XII-2020 W3.A4/2335/PL.01/XII- 2019 | 5 Tahun | 10 Sept 2020 s/d 09 September 2025 |
| 12 | Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1123 L. 2. Toyota Kijang Inova 2.0 G M/T VIN 2019 | Kodim 0304 / Agam | 10 September 2020 | 020/239/Umperl/XII-2020 B/983/XI/2020 | 3 Tahun 8 Bulan | 10 Sept 2020 s/d 09 September 2025 |

5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp

Rp

1.004.338.760.735,96

960.588.776.351,51

Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp960.588.776.351,51. Selama Tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp53.318.466.659,58 dan pengurangan sebesar Rp9.568.482.275,13 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp1.004.338.760.735,96 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Tabel 5.3.26 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

| No. | Akun/ Rekening | Uraian | Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp) | Saldo Akhir Tahun 20212 (Rp) |
|-----|-------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------|
|-----|-------------------|--------|--------------------------------|---------------------------------|

| | | | | |
|---|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | 960.588.776.351,51 | 1.004.338.760.735,96 |
| 1 | 1.3.03.01 | Bangunan Gedung | 923.139.876.774,58 | 964.346.610.510,87 |
| 2 | 1.3.03.02 | Monumen | 27.307.393.155,19 | 27.307.393.155,19 |
| 3 | 1.3.03.03 | Bangunan Menara | 115.989.000,00 | 115.989.000,00 |
| 4 | 1.3.03.04 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 10.025.517.421,74 | 12.568.768.069,90 |

Sementara mutasi dari saldo awal 2022 sampai saldo akhir 2022 dapat dilihat pada uraian berikut ini:

| | |
|--|-----------------------------|
| Saldo Awal 1 Januari 2022 | 960.588.776.351,51 |
| Penambahan karena : | |
| Belanja Modal (LRA) | 25.739.508.574,06 |
| Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa | 237.391.119,00 |
| Mutasi dari SKPD Lain (BAST) | 984.016.400,00 |
| Hibah dari pihak ke 3 | - |
| Koreksi Pencatatan | 122.472.000,00 |
| Reklas Antar Kelompok Barang (Masuk) | 26.235.078.566,52 |
| Hasil Penilaian Kurang Catat | 0,00 |
| Jumlah Penambahan | 53.318.466.659,58 |
| Pengurangan karena: | |
| Penghapusan berdasarkan SK Wako | 1.344.627.262,89 |
| Mutasi ke SKPD Lain (BAST) | 784.236.400,00 |
| Koreksi Pencatatan | 607.528.539,13 |
| Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar) | 6.375.678.982,41 |
| Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi (Ekstrakomptabel) | 8.436.000,00 |
| Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Pemeliharaan) | 447.975.090,70 |
| Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 |
| Jumlah Pengurangan | 9.568.482.275,13 |
| Saldo akhir per 31 Desember 2022 | 1.004.338.760.735,96 |

I. Penambahan pada Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan dari Belanja Modal (LRA) Gedung dan Bangunan sebesar Rp 25.739.508.574,06 dengan rincian sebagai berikut :
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp1.004.818.618,00.
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp442.019.036,24.
 - Dinas PUPR sebesar Rp462.653.076,96.
 - Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp389.359.795,20.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.386.623.678,99.

- Dinas Kesehatan sebesar Rp4.181.408.497,00.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp169.587.935,76.
 - Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp55.997.420,23.
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp2.711.216.547,96.
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Rp35.655.675,74.
 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.711.559.773,65.
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.949.430.498,69.
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp88.511.155,00.
 - Kecamatan ABTB sebesar Rp79.070.288,00.
 - Kecamatan MKS sebesar Rp71.596.576,64.
2. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp237.391.119,00 berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dimana pada Rekening APBD berupa belanja Barang dan Jasa (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Jasa Konsultasi (Perencanaan) tetapi dalam realisasi belanjanya berupa Gedung Pertokoan Koperasi/ Pasar Permanen.
3. Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Mutasi SKPD lain sebesar Rp984.016.400,00 yang terdiri dari:
- Dinas Kesehatan sebesar Rp670.200.400,00 yang berasal dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa Gedung Kantor.
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp199.780.000,00 berupa Kios Inpres Pasar Bawah.
 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp114,036,000.00 berupa mutasi dari Pengelola berupa Bangunan Rumah Makan Family Benteng.
4. Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari mutasi antar rekening dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Dinas PUPR sebesar Rp1.415.180.236,00 yang berasal dari belanja Jalan Irigasi dan Jaringan
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20.608.696.424,14 yang berasal dari Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp130.724.129,14 berasal dari Belanja Peralatan dan Mesin yang pindah ke Gedung dan Bangunan berupa Partisi Ruang Gedung.
 - Dinas Lingkungan Hidup Rp76.101.520,00 berasal dari rekening Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya di Tahun 2022.
 - Kecamatan MKS sebesar Rp4.004.376.257,41 berasal dari rekening Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya di Tahun 2022.

II. Pengurangan pada Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan berasal dari Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan pada SKPD yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp284.079.310,00 yang berasal dari penghapusan Gedung dan Bangunan pada SMPN 4 Kota Bukittinggi.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp608.023.942,00 yang berasal dari Penghapusan Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp118,288,431.00 berupa penghapusan berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen karena sebab kebakaran.
 - Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp334.235.579,89 berupa penghapusan Gedung Kerja Kantor karena bencana kebakaran yang terjadi pada April Tahun 2022.
2. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan karena Mutasi ke SKPD lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp670.200.400,00 berupa Gedung Kerja Kantor yang dimutasikan ke Dinas Kesehatan.
 - Pengelola sebesar Rp114.036.000,00 berupa aset Rumah Makan Family Benteng yang dimutasikan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
3. Pengurangan karena reklas antar kelompok barang (keluar) sebesar Rp6.375.678.982,41 merupakan mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Rekening lainnya berupa:
 - Dinas PUPR sebesar Rp391.792.300,75 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan yang menjadi KDP di tahun berjalan.
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp.5.994.000,00 berupa teralis.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp198,804,103.99 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan yang belum selesai pengerjaannya.
 - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp2,724,184,551.96 berupa Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Stasiun) ke KDP karena belum selesai pengerjaannya.
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp35,655,675.74 berupa Belanja Perencanaan Pembangunan Gedung Prasarana Pertanian yang reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 2,487,678,061.97 berupa Pengadaan
 - a. DED Sport Hall Rp76.372.656,00.
 - b. Revitalisasi benteng Fort de Kock Rp2.202.318.277,80.
 - c. Pembuatan Gerbang Geopark Sianok Maninjau Rp208.978.128,15.

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp452.500.000,00 berupa Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang reklas ke Peralatan dan Mesin berupa:
 - a. Alat-alat Besar sebesar Rp370.000.000,00.
 - b. Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp3.500.000,00.
 - c. Alat Laboratorium sebesar Rp54.000.000,00.
 - d. Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp25.000.000,00.
 - Kecamatan ABTB sebesar Rp79.070.288,00 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan yang reklas ke KDP (DED Kantor Lurah Ladang Cakiah).
4. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal menjadi Aset Ekstrakomtabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.436.000,00 berupa belanja pagar beton.
5. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal menjadi Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Sekretariat Daerah sebesar Rp216.758.025,00 berupa Belanja Modal menjadi pemeliharaan karena realisasi Belanja berupa pemeliharaan/rehab Gedung Kantor yang sifatnya tidak menambah nilai Gedung Kantor tersebut.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp169.587.935,76 berupa Belanja Modal menjadi pemeliharaan/rehab Gedung Kantor yang sifatnya tidak menambah nilai Gedung Kantor.
 - Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp61.629.129,94 berupa Belanja Modal pada APBD menjadi Pemeliharaan/rehab Gedung Kantor yang sifatnya tidak menambah nilai Gedung Kantor.

| 5.3.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | Rp | Rp |
| | 672.744.182.570,34 | 623.922.585.555,15 |

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp623.922.585.555,15. Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp55.307.802.355,83 dan pengurangan sebesar Rp6.486.205.340,64 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp672.744.182.570,34 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Awal 1 Januari 2022 | Rp |
| 623.922.585.555,15 | |
| Mutasi bertambah: | |
| - Belanja Modal (LRA) | Rp |
| 45.500.951.384,50 | |

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| - Mutasi dari SKPD lain | Rp. | - |
| - Hibah dari pihak ke 3 | Rp | - |
| - Reklas Antar Kelompok Barang | Rp | |
| 9.806.850.971,33 | | |
| - Hasil Penilaian Kurang Catat | Rp- | |
| Jumlah Mutasi Bertambah | Rp. | |
| 55.307.802.355,83 | | |
| Mutasi berkurang: | | |
| - Mutasi ke SKPD lain | Rp. | - |
| - Koreksi Pencatatan | Rp | |
| 4.617.365.958,64 | | |
| - Reklas Antar Kelompok Barang | Rp | |
| 1.868.839.382,00 | | |
| - Belanja Modal Reklas ke Gol. Lain (Persediaan/Pemeliharaan) | | |
| Jumlah Mutasi berkurang | Rp. | |
| 6.486.205.340,64 | | |
| Saldo per 31 Desember 2022 | Rp. | 672.744.182.570,34 |

Rincian Penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan Pemko Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Kelompok rekening Barang.

Penambahan Aset JIJ dari reklas antar kelompok barang merupakan pengelompokan kembali yang berasal dari Belanja Modal selain Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD, rincian penambahannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

-Dinas PUPR sebesar Rp9.019.263.931,33 yang berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya pada Tahun 2022.

-Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp38.981.040,00 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2021 yang telah selesai pengerjaannya pada Tahun 2022.

-Dinas Kesehatan sebesar Rp733.606.000,00 berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada DPA SKPD berupa Belanja IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang reklas ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan.

-Dinas Kebakaran Rp15.000.000,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan Sumur Bor.

2. Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari Reklas Antar Kelompok Barang

Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.868.839.382,00 berasal dari Reklas Antar Kelompok Barang yang merupakan pengurangan Aset JIJ disebabkan oleh pengelompokan kembali sesuai dengan klasifikasi jenis rekening Asetnya.

-Dinas PUPR sebesar Rp1.600.569.661,00 berupa belanja Jalan Irigasi dan Jaringan pada APBD yang reklas ke Aset Gedung dan Bangunan.

-Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp242.832.161,00 berupa Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang pindah ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

-Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp25.437.560,00 berupa Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang pindah ke KDP sebesar Rp17.422.560,00 serta Rp8.015.000,00 yang pindah ke aset Peralatan dan Mesin berupa belanja Papan Pengumuan dan Mesin Pompa Air.

3. Pengurangan aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Pencatatan

Pengurangan aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Pencatatan dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

-Dinas PUPR sebesar Rp 4.613.215.958,64 merupakan koreksi pencatatan dari belanja Jalan irigasi dan jaringan ke pembayaran hutang drainase Tahun 2021.

-Dinas Kebakaran sebesar Rp4.150.000,00 berupa koreksi pencatatan dari belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin berupa Tandon Air dan Mesin Pompa Air.

Sedangkan rincian Aset Tetap kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada daftar di bawah ini:

Tabel 5.3.27 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

| No. | Rekening | Uraian | Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp) | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|----------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | 1.3.04 | Jalan, Jaringan. dan Irigasi | 623.922.585.555,15 | 672.744.182.570,34 |
| A | 1.3.04.01 | Jalan dan Jembatan | 433.592.541.953,21 | 454.595.038.174,60 |
| 1 | 1.3.04.01.01 | Jalan | 418.340.541.659,76 | 438.715.818.322,56 |
| 2 | 1.3.04.01.02 | Jembatan | 15.252.000.293,45 | 15.879.219.852,04 |
| B | 1.3.04.02 | Bangunan Air | 163.755.568.900,84 | 189.690.811.439,18 |
| 1 | 1.3.04.02.01 | Bangunan Air Irigasi | 45.390.973.534,04 | 48.249.393.441,50 |
| 2 | 1.3.04.02.02 | Bangunan Pengairan Pasang Surut | 9.663.585.164,19 | 9.663.585.164,19 |
| 3 | 1.3.04.02.04 | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 69.457.878.494,62 | 90.702.148.062,95 |
| 4 | 1.3.04.02.05 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 1.839.049.000,00 | 1.839.049.000,00 |
| 5 | 1.3.04.02.06 | Bangunan Air Bersih/Air Baku | 14.723.178.612,67 | 14.723.178.612,67 |
| 6 | 1.3.04.02.07 | Bangunan Air Kotor | 22.680.904.095,32 | 24.513.457.157,87 |
| C | 1.3.04.03 | Instalasi | 5.078.071.716,71 | 6.660.709.516,71 |
| 1 | 1.3.04.03.01 | Instalasi Air Bersih/Air Baku | 2.183.591.606,03 | 2.274.001.606,03 |
| 2 | 1.3.04.03.02 | Instalasi Air Kotor | 2.841.135.110,68 | 3.574.741.110,68 |
| 3 | 1.3.04.03.03 | Instalasi Pengolahan Sampah | - | 758.621.800,00 |
| 4 | 1.3.04.03.09 | Instalasi Pengaman | 53.345.000,00 | 53.345.000,00 |
| D | 1.3.04.04 | Jaringan | 21.496.402.984,39 | 21.797.623.439,85 |
| 1 | 1.3.04.04.01 | Jaringan Air Minum | 6.293.363.054,00 | 6.293.363.054,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | 1.3.04.04.02 | Jaringan Listrik | 15.203.039.930,39 | 15.504.260.385,85 |
|---|--------------|------------------|-------------------|-------------------|

5.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya**Tahun 2022****Tahun 2021****Rp****Rp****31.169.875.091,80****30.677.779.197,80**

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp30.677.779.197,80. Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp4.716.903.366,00 dan pengurangan sebesar Rp4.224.807.472,00 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp31.169.875.091,80 dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Saldo Awal 1 Januari 2022 | Rp 30.677.779.197,80 |
| Mutasi bertambah: | |
| - Belanja Modal (LRA) | Rp 4.633.690.566,00 |
| - Kapitalisasi dari barang dan jasa | Rp 64.789.900,00 |
| - Koreksi pencatatan | Rp 18.422.900,00 |
| Jumlah Mutasi Bertambah | Rp 4.716.903.366,00 |
| Mutasi berkurang: | |
| - Penghapusan berdasarkan SK Wako | Rp 123.926.876,00 |
| - Koreksi Pencatatan | Rp 106.862.900,00 |
| - Reklas Keluar antar kelompok barang | Rp 3.347.752.546,00 |
| - Belanja Modal tidak kapitalisasi | Rp 295.104.970,00 |
| - Belanja Modal reklas ke Persediaan | Rp 306.695.800,00 |
| - Belanja Modal Aset tidak berwujud | Rp. 44.464.380,00 |
| Jumlah Mutasi berkurang | <u>Rp 4.224.807.472,00</u> |
| Saldo per 31 Desember 2022 | Rp 31.169.875.091,80 |

Untuk Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya Pemko Bukittinggi dapat dijelaskan sebagai berikut;

- I. Penambahan aset dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp64.789.900,00 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Praktek Sekolah Bidang Kesenian dan Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku-buku).
- II. Penambahan dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp18.422.900,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku-buku).

Untuk rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Penghapusan berdasarkan SK Walikota sebesar Rp123.926.876,00 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD SMPN 5 Bukittinggi berupa Bahan Perpustakaan Tercetak (Buku-buku).
- II. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Koreksi Pencatatan sebesar Rp106.862.900,00 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Alat Peraga Praktek Sekolah.
- III. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas Antar Kelompok Barang sebesar Rp3.347.752.546,00 merupakan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada DPA SKPD yang reklas menjadi Aset Peralatan dan Mesin pada Rekening BMD, yang terdiri dari;
 1. Sekretariat Daerah sebesar Rp3,014,849,546.00 berupa Belanja Aset Tetap Lainnya pada DPA SKPD yang Reklas ke Peralatan Mesin pada rekening BMD.
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor/ Belanja Modal Audio Visual/Video Wall sebesar Rp999.950.604,00
 - Pengadaan Belanja Modal Audio Visual berupa Voice Recorder sebesar Rp2.997.000,00
 - Pengadaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah/Belanja Modal Audio Visual/ Videotron sebesar Rp1.996.916.942,00
 - Pengadaan Alat Rumah Tangga berupa Televisi sebesar Rp14.985.000,00
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp173.745.000,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga dan serta Alat Peraga Praktek Sekolah.
 3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp12,500,000.00 berupa pengadaan Alat Kantor Lainnya/LCD Proyektor.
 4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp97,785,000.00 merupakan Belanja Aset Tetap Lainnya pada DPA SKPD yang reklas ke Aset Tidak Berwujud pada rekening BMD berupa pengadaan Software Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2022.
 5. Dinas Pariwisata dan Olahraga sebesar Rp12,745,000.00 berupa Pengadaan Layar dan Infocus yang reklas ke Peralatan dan Mesin.
 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp3.000.000,00 berupa pengadaan Voice Recorder.
 7. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar Rp33,128,000.00 berupa Pengadaan Infocus dan Televisi yang reklas ke Peralatan dan Mesin.
- IV. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal yang reklas ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp295.104.970,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang nilainya dibawah Rp50.000,00/pcs serta dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp282,798,800.00 berupa Bahan Perpustakaan tercetak.
 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp950.000,00 berupa Hewan Peliharaan
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 11,356,170.00 berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya (buku)
- V. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Modal reklas ke Persediaan sebesar Rp306.695.800,00 terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak/ Buku Fokus. Buku tersebut reklas ke Persediaan karena usia penggunaan/pemakaian untuk siswa tidak lebih dari 1 Tahun.
- VI. Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp44.464.380,00 berupa Belanja Aset Tetap Lainnya yang reklas ke Aset Tidak Berwujud terdapat pada SKPD:
- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp24,420,000.00 berupa Pengadaan Software Aplikasi SIMOTA.
 - Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8,944,380.00 berasal dari Belanja Aset Tetap lainnya yang reklas ke Aset Tidak Berwujud berupa Belanja Lisensi dan *Franchise*.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp11,100,000.00 berasal dari Belanja Aset Tetap Lainnya yang reklas ke Aset Tidak Berwujud berupa Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan – SDK.

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.28 Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

| No. | Akun/ Rekening | Uraian | Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp) | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|----------|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | 1.3.05 | Aset Tetap Lainnya | 30.677.779.197,80 | 31.169.875.091,80 |
| A | 1.3.05.01 | Bahan Perpustakaan | 18.231.523.815,80 | 18.850.089.709,80 |
| 1 | 1.3.05.01.01 | Bahan Perpustakaan tercetak | 17.621.750.380,80 | 18.206.528.984,80 |
| 2 | 1.3.05.01.02 | Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 214.856.000,00 | 248.643.290,00 |
| 3 | 1.3.05.01.03 | Kartografi, Naskah dan Lukisan | 389.460.435,00 | 389.460.435,00 |
| 4 | 1.3.05.01.05 | Karya Grafika (Graphic Material) | 5.457.000,00 | 5.457.000,00 |
| B | 1.3.05.02 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga | 2.172.089.735,00 | 2.003.344.735,00 |
| 1 | 1.3.05.02.01 | Barang Bercorak Kesenian | 1.414.659.985,00 | 1.240.914.985,00 |
| 2 | 1.3.05.02.02 | Alat Bercorak Kebudayaan | 756.347.750,00 | 761.347.750,00 |
| 3 | 1.3.05.02.03 | Tanda Penghargaan | 1.082.000,00 | 1.082.000,00 |
| C | 1.3.05.03 | Hewan | 1.321.638.000,00 | 1.363.913.000,00 |
| 1 | 1.3.05.03.01 | Hewan Piaraan | 1.321.638.000,00 | 1.363.913.000,00 |
| D | 1.3.05.04 | Biota Perairan | 14.778.667,00 | 14.778.667,00 |
| 1 | 1.3.05.04.01 | Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) | 14.778.667,00 | 14.778.667,00 |
| E | 1.3.05.05 | Tanaman | 23.484.500,00 | 23.484.500,00 |
| 1 | 1.3.05.05.01 | Tanaman | 23.484.500,00 | 23.484.500,00 |
| F | 1.3.05.07 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 8.914.264.480,00 | 8.914.264.480,00 |
| 1 | 1.3.05.07.01 | Aset Tetap Dalam Renovasi | 8.914.264.480,00 | 8.914.264.480,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|---|
| G | 1.3.05.88 | Aset Tetap Lainnya BOS | - | - |
| 1 | 1.3.05.88.01 | Aset Tetap Lainnya BOS | - | - |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.3.1.2.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | | Rp | Rp |
| | | 37.618.883.121,17 | 65.149.630.115,64 |

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp65.149.630.115,64. Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp6.362.829.128,41 dan pengurangan sebesar Rp33.893.576.122,88 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp37.618.883.121,17 yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

| | |
|--|------------------------------------|
| Saldo Awal 1 Januari 2022 | Rp 65.149.630.115,64 |
| Mutasi bertambah: | |
| - Reklas Antar Kelompok Barang (masuk) | Rp. 6.362.829.128,41 |
| Jumlah Mutasi Bertambah | <u>Rp. 6.362.829.128,41</u> |
| Mutasi berkurang: | |
| - Koreksi pencatatan | Rp 103.990.740,00 |
| - Reklas antar kelompok barang | Rp 33.703.721.332,88 |
| - Belanja Modal tidak kapitalisasi | Rp 85.864.050,00 |
| Jumlah Mutasi berkurang | <u>Rp 33.893.576.122,88</u> |
| Saldo per 31 Desember 2022 | Rp 37.618.883.121,17 |

Rincian terhadap Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat jelaskan sebagai berikut:

- I. Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklas Antar Kelompok Barang sebesar Rp6.362.829.128,41 merupakan penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang pengerjaannya belum selesai di tahun berjalan. Adapun rincian SKPD nya sebagai berikut:
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp2,724,184,551.96 merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang pengerjaannya belum selesai.
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp35,655,675.74 berupa Perencanaan Pembangunan Gedung Prasarana Pertanian.
 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2,505,100,621.97 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan serta Jalan Pedestrian (Perencanaan) yang belum selesai pengerjaannya.
 - Kecamatan ABTB sebesar Rp 79,070,288.00 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan (DED Kantor Lurah Ladang Cakiah).

- Dinas PUPR sebesar Rp 577,181,725.75 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan Jaringan yg belum selesai pengerjaannya.
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 242,832,161.00 berasal dari Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum selesai pengerjaannya di Tahun 2022 berupa peningkatan Jalan Komplek dan Pembuatan Saluran Pembuangan air.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 198,804,103.99 berupa Pengadaan Gedung dan Bangunan yang belum selesai pengerjaannya.
- II. Pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp33.893.576.122,88 merupakan penyelesaian pekerjaan fisik Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap KDP tahun sebelumnya, berikut rincian dan Penjelasannya:
1. Pengurangan Koreksi Pencatatan sebesar Rp103.990.740,00 terdiri dari SKPD:
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 38,981,040.00 berupa penyelesaian pekerjaan Jalan Irigasi dan Jaringan (pengawasan) yang menjadi KDP tahun lalu.
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp65,009,700.00 berupa pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tahun 2022 yang menjadi KDP tahun lalu.
 2. Pengurangan dari reklas antar kelompok barang sebesar Rp33.703.721.332,88 terdiri dari SKPD:
 - Dinas PUPR sebesar Rp9,019,263,931.33 berupa Penyelesaian Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan terhadap KDP tahun 2020 dan 2021.
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20,603,979,624.14 berupa Penyelesaian pekerjaan Gedung dan Bangunan SMPN 1, SDN 04 Garegeh serta SDN 02 Percontohan dan SDN 16 Campago Ipuh.
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp76,101,520.00 berupa Perencanaan Pembangunan Gedung PDU tahun 2021.
 - Kecamatan MKS sebesar Rp4,004,376,257.41 berupa penyelesaian pekerjaan Gedung dan Bangunan kelurahan Manggis Ganting.
 3. Pengurangan dari Belanja Modal Non Kapitalisasi sebesar Rp85.864.050,00 pada Dinas PUPR yang merupakan reklas ke belanja jasa Konsultasi Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2022.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.29 Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan

| No | Akun/ Rekening | Uraian | Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp) | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|----|-------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
|----|-------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|

| | 1.3.06 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 65.149.630.115,64 | 37.618.883.121,17 |
|---|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| A | 1.3.06.01 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 65.149.630.115,64 | 37.618.883.121,17 |
| 1 | 1.3.06.01.01 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah | 1.752.477.226,84 | - |
| 2 | 1.3.06.01.02 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin | - | 18.574.200,00 |
| 3 | 1.3.06.01.03 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan | 51.859.020.691,28 | 35.244.198.442,13 |
| 4 | 1.3.06.01.04 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 11.054.575.354,37 | 2.356.110.479,04 |
| 5 | 1.3.06.01.05 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya | 483.556.843,15 | - |

| 5.3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | Tahun 2022 Rp (863.023.432.720) | Tahun 2021 Rp (784.029.504.007,37) |
|--|--|---|
|--|--|---|

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 31 Desember 2021 adalah (Rp784.029.504.007,37) Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar (Rp84.468.710.604) dan pengurangan sebesar (Rp5.474.781.892,00) sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah (Rp863.023.432.720) yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Saldo Awal

Mutasi bertambah:

| | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| - Beban | Rp | (82.397.181.834) |
| - Mutasi Masuk | Rp | (2.032.193.929) |
| - Reklas masuk | | |
| - Koreksi susut | Rp | (193.334) |
| - Koreksi | Rp | (7) |
| Jumlah Mutasi Bertambah | Rp | (84.468.710.604) |

Mutasi berkurang:

| | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| - Penghapusan | Rp | 2.215.529.234 |
| - Ubah Kondisi | Rp | 1.187.723.809 |
| - Mutasi | Rp | 2.032.193.939 |
| - Reklas | Rp | 39.141.500 |
| - Koreksi | Rp | 193.333 |
| - koreksi susut | Rp | 77 |
| Jumlah Mutasi berkurang | Rp | 5.474.781.892 |
| Saldo Akhir | Rp | (863.023.432.720) |

Rincian akumulasi penyusutan per jenis dan objek akun dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.3.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Akun/ Rekening | Uraian | Saldo Akhir Tahun 2021 (Rp) | Saldo Akhir Tahun 2022 (Rp) |
|----------|-------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | 1.3.07 | Akumulasi Penyusutan | (784.029.504.007,37) | (863.023.432.720) |
| A | 1.3.07.01 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (228.962.018.808,00) | (265.475.486.595) |
| 1 | 1.3.07.01.01 | Akumulasi Penyusutan Alat Besar | (10.273.317.020,00) | (12.129.529.334) |
| 2 | 1.3.07.01.02 | Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan | (66.342.543.566,00) | (70.852.288.832) |
| 3 | 1.3.07.01.03 | Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur | (1.137.028.203,00) | (1.151.158.898) |
| 4 | 1.3.07.01.04 | Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian | (805.731.854,00) | (824.616.554) |
| 5 | 1.3.07.01.05 | Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga | (70.672.199.235,50) | (78.140.358.339) |
| 6 | 1.3.07.01.06 | Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | (3.792.437.209,00) | (5.090.909.116) |
| 7 | 1.3.07.01.07 | Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan | (15.216.432.346,00) | (22.579.429.200) |
| 8 | 1.3.07.01.08 | Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium | (12.297.342.079,00) | (14.551.085.510) |
| | 1.3.07.01.09 | Akumulasi penyusutan Alat persenjataan | | (175.670.000) |
| 9 | 1.3.07.01.10 | Akumulasi Penyusutan Komputer | (42.643.699.108,50) | (49.810.325.876) |
| 10 | 1.3.07.01.15 | Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja | (1.147.518.034,00) | (1.348.607.295) |
| 11 | 1.3.07.01.17 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi | | (260.417) |
| 12 | 1.3.07.01.18 | Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu | (4.078.403.716,00) | (8.198.315.727) |
| 13 | 1.3.07.01.19 | Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga | (555.366.437,00) | (622.931.497) |
| B | 1.3.07.02 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (133.560.697.132,01) | (151.492.871.584) |
| 1 | 1.3.07.02.01 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung | (125.843.645.388,01) | (143.015.579.226) |
| 2 | 1.3.07.02.02 | Akumulasi Penyusutan Monumen | (6.982.062.993,00) | (7.535.859.884) |
| 3 | 1.3.07.02.03 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara | (34.796.700,00) | (37.696.425) |
| 4 | 1.3.07.02.04 | Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas | (700.192.051,00) | (903.736.049) |
| C | 1.3.07.03 | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan. | (421.506.788.067,36) | (446.055.074.541) |
| 1 | 1.3.07.03.01 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan | (346.976.840.749,65) | (364.564.493.735) |
| 2 | 1.3.07.03.02 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Air | (68.893.096.132,71) | (75.092.717.243) |
| 3 | 1.3.07.03.03 | Akumulasi Penyusutan Instalasi | (1.162.810.039,00) | (1.333.340.104) |
| 4 | 1.3.07.03.04 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | (4.474.041.146,00) | (5.064.523.459) |

5.3.1.5. ASET LAINNYA

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
| 21.758.833.807,00 | 22.358.975.351,00 |

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp21.758.833.807,00 dan Rp22.358.975.351,00. Rincian aset lainnya dapat dilihat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang-

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
| 56.959.498,00 | 48.400.533,00 |

Pada Pemerintah Kota Bukittinggi, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan Jangka Panjang atas tuntutan ganti kerugian daerah oleh Bendahara SKPD, Bendahara BOS dan non bendahara, yang sampai saat ini belum selesai.

Nilai Tagihan Jangka Panjang dari kejadian tersebut per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp56.959.458,00 dan Rp48.400.533,00, artinya terdapat penambahan di tahun 2022 sebesar 8.558.965,00. Tagihan tersebut merupakan utang TGR atas 2 (dua) orang Bendahara SKPD dan 1 (satu) orang Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ketiganya meninggal dalam masa tugas jadi bendahara. Juga terdapat kelebihan pembayaran SPPD tahun 2017 pada Sekretariat Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan tahun 2022. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.47 Mutasi Tagihan Jangka Panjang Tahun 2022

| NO. | SKPD | Saldo Awal (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo Akhir (Rp) |
|-----|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Bertambah (Rp) | Berkurang (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3+4-5) |
| 1 | Dinas Kebakaran | 2.431.169,00 | - | - | 2.431.169,00 |
| 2 | Sekretariat Daerah | 25.000,00 | - | - | 225.000,00 |
| 3 | BAPPEDA | 45.744.364,00 | | | 45.744.364,00 |
| 4 | Dinas Pendidikan | 0,00 | 8.558.965,00 | - | 8.558.965,00 |
| | JUMLAH | 48.400.533,00 | - | - | 56.959.498,00 |

Pada tahun 2022 Bendahara BOS SD N 12 Puhun Pintu Kabun meninggal dunia sehingga terdapat sisa kas tunai yang belum diselesaikan sebesar Rp8.558.965,00. Jumlah ini merupakan sisa dari nilai uang yang tertera pada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak suami almarhumah sebagai ahli waris dengan SKTJM tertanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp20.962.140,00. Bersamaan dengan SKTJM tersebut ahli waris menyertakan jaminan berupa BPKB 1 (satu) uni sepeda motor dan BPKB 1 (satu) unit Mobil.

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga**Tahun 2022
(Rp)****16.246.002.000,00****Tahun 2021
(Rp)****16.360.038.000,00**

Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga berupa kerjasama operasi. Nilai kerja sama operasi Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.246.002.000,00 yang terdiri dari:

5.3.2.4.2.1 Bangun Guna Serah**Tahun 2022
(Rp)****16.246.002.000,00****Tahun 2021
(Rp)****16.246.002.000,00**

Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai beberapa Aset Tanah yang telah dilakukan kerjasama Pemanfaatan Aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) sebagaimana yang tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 dan tahun 2021 adalah senilai Rp16.246.002.000,00. Aset tanah tersebut tercatat pada Pengelola Barang Pemerintah Kota Bukittinggi dengan status tanah Hak Pengelolaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.48 Aset Tanah Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Aset Dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS)

| No | Nama Pemegang Hak | Pengembang | Aset Tanah Yang Dikerja samakan | Asal Usul | Letak/ Alamat | Luas (m2) | Nilai (Rp.) |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|---|--------------|---|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT. RANAH GARUDA MINANG | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1/TD | Tanah Negara | Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP | 1153 | 345.900.000 |
| 2 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT. RANAH GARUDA MINANG | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.2/TD | Tanah Negara | Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP | 1246 | 11.004.749.000 |
| 3 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT. RANAH GARUDA MINANG | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.3/TD | Tanah Negara | Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP | 1183 | 354.900.000 |
| 4 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT INKORBA | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.4/TD: No 5/TD | Tanah Negara | Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP | 774 | 232.200.000 |
| 5 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT.SUMAJAYA | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.5/TD : No 6/TD | Tanah Negara | Pertokoan Pasar Simpang Aur Kel.Tarok Dipo Kec. GGP | 558 | 111.600.000 |
| 6 | Pemerintah Kota Bukittinggi | Pertokoan Pasar Banto | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No2/ATTS | Tanah Negara | Kel.ATTS Kec. GP | 7484 | 4.196.653.000 |
| Jumlah... | | | | | | | 16.246.002.000 |

Berdasarkan tabel diatas, ada 5 (lima) buah Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang berlokasi pada Pertokoan Pasar

Simpang Aur Kelurahan Tarok Dipo yang dituangkan dalam 5 (lima) buah perjanjian kerjasama dengan PT. Ranah Garuda Minang (PT. RGM), PT. Inkorba dan PT. Suma Jaya. Kelima perjanjian kerjasama tersebut merupakan kerjasama pemanfaatan Aset tanah Pemerintah Kota Bukittinggi dengan nilai aset sebesar Rp12.049.349.000,00.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pihak Ketiga tersebut untuk membangun 5 (lima) Blok Bangunan Ruko pada Pertokoan Pasar Simpang Aur yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun. Untuk 5 (lima) Blok Bangunan Ruko telah diterbitkan 5 (lima) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Induk atas nama PT. RGM 3 (tiga) Buah Sertifikat HGB, PT. Inkorba 1 (satu) Buah Sertifikat HGB dan PT. Suma Jaya 1 (satu) Buah Sertifikat HGB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.49 Daftar Kerjasama Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pihak Ketiga di Pertokoan Pasar Simpang Aur

| No | Nama Pemegang Hak | Pengembang | Perjanjian | Aset Tanah Yang Dikerja samakan | Luas (m2) | Nilai (Rp.) | HGB Induk | Jumlah HGB Pecahan |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT. RANAH GARUDA MINANG | 1946/0-VI/ 1983 tgl. 15 Maret 1983 | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.1/TD | 1153 | 345.900.000 | HGB No.9 GS no.465/1983 | 15 |
| 2 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT. RANAH GARUDA MINANG | 1946/0-VI/ 1983 Tgl. 15 Maret 1983 | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.2/TD | 1246 | 11.004.749.000 | HGB No.8 GS No.466/1983 | 14 |
| 3 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT. RANAH GARUDA MINANG | 1946/0-VI/ 1983 Tgl.15 Maret 1983 | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.3/TD | 1183 | 354.900.000 | HGB No.7 GS NO.483/1983 | 23 |
| 4 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT INKORBA | Tgl. 12 Maret 1987 | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.4/TD: No 5/TD | 774 | 232.200.000 | HGB No.65 GS No.65/1987 | 16 |
| 5 | Pemerintah Daerah Tk.II Bukittinggi | PT.SUMAJAYA | 01/PRJ/1985 Tgl 30 Desember 1985 | Tanah Hak Pengelolaan (HPL) No.5/TD : No 6/TD | 558 | 111.600.000 | HGB No.82 GS No.187/1987 | 8 |
| Jumlah | | | | | | 12.049.349.000 | | 76 |

Terhadap Bangunan Ruko yang dibangun tersebut, Pihak Ketiga menjualnya kepada Pedagang dan terhadap masing-masing ruko dikeluarkan Sertifikat HGB sebagai pecahan dari HGB Induk. Sertifikat HGB yang dikeluarkan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buah Sertifikat HGB atas nama pedagang. Ketujuh puluh enam Sertifikat HGB diatas HPL pada Pertokoan Pasar Simpang Aur tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.3.50 Daftar Pemegang Sertifikat HGB diatas HPL di Pertokoan Pasar Simpang Aur

| No. | Nama Pemegang Hak | Alamat Objek HGB | No. Sertifikat HGB | No. Sertifikat HPL |
|-----|------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PT.Ranah Garuda Minang | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 156 | 1 |
| 2 | H Yoni Agusti,SH; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln.Diponegoro 1 Bukittinggi | 142 | 1 |
| 3 | Andri Sukma Jaya; | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 166 | 1 |

| No. | Nama Pemegang Hak | Alamat Objek HGB | No. Sertifikat HGB | No. Sertifikat HPL |
|-----|---|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Asweti; | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 139 | 1 |
| 5 | Desmawati | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 146 | 1 |
| 6 | Asweti | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 140 | 1 |
| 7 | H.Syofyan; | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 171 | 1 |
| 8 | PT.Ranah Garuda Minang | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro 04 Bukittinggi | 158 | 1 |
| 9 | Hendry; | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 138 | 1 |
| 10 | A.DT.Batuah; | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 181 | 1 |
| 11 | Hj.Suwarni;Ir.Herrizon Anton Zainal;Syaril Zainal,H.AfriS.E,Susi Sandra;Witra | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 145 | 1 |
| 12 | Enita Tjuatja; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 194 | 1 |
| 13 | H.Baiyar; | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 143 | 1 |
| 14 | H.Yemrizal; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln.Diponegoro 2 Bukittinggi | 167 | 1 |
| 15 | Zahara | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 141 | 1 |
| 16 | H.Zakaria; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 169 | 2 |
| 17 | Yasman; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 148 | 2 |
| 18 | H.Telvi Robbel,SH; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi | 190 | 2 |
| 19 | Delwinda Nofia; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 209 | 2 |
| 20 | 1.Yunaidi Amir,St Marajo; 2.Ainil Mardiah. | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi | 180 | 2 |
| 21 | PT.Ranah Garuda Minang; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 159 | 2 |
| 22 | Romi Ardiansyah; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 208 | 2 |
| 23 | 1.Yusneli; 2.Efendi | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 205 | 2 |
| 24 | Fadlan Aryndra Haviz; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 151 | 2 |
| 25 | Haviz Dt.Manindah; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 195 | 2 |
| 26 | Haviz Dt.Manindah; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 150 | 2 |
| 27 | Haviz Dt.Manindah; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 149 | 2 |
| 28 | PT.Ranah Garuda Minang, | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi | 157 | 2 |
| 29 | PT.Ranah Garuda Minang, | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jln Diponegoro Bukittinggi | 155 | 2 |
| 30 | H.Yoni Agusti,SH. | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 172 | 3 |
| 31 | H.Muhammad Ikhsan | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 197 | 3 |
| 32 | Marshall Mansyur | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 211 | 3 |
| 33 | Marshall Mansyur | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 212 | 3 |
| 34 | H.Muslim; | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 179 | 3 |
| 35 | Amiza; | Pertokoan Simpang Aur Blok O Bukittinggi | 207 | 3 |
| 36 | Yarlis; | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 206 | 3 |
| 37 | H.Ratinis St Mudo | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 5, Bukittinggi | 165 | 3 |
| 38 | H.Asrizal Ahmad; | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 4, Bukittinggi | 178 | 3 |
| 39 | Guswir; | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 3, Bukittinggi | 210 | 3 |
| 40 | H.Em Mirfal Effendi; | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 2, Bukittinggi | 168 | 3 |
| 41 | H.Em Mirfal Effendi; | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 1, Bukittinggi | 170 | 3 |
| 42 | Haji Dasril; | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 147 | 3 |
| 43 | PT.Ranah Garuda Minang | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 160 | 3 |

| No. | Nama Pemegang Hak | Alamat Objek HGB | No. Sertifikat HGB | No. Sertifikat HPL |
|-----|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | PT.Ranah Garuda Minang | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 161 | 3 |
| 45 | PT.Ranah Garuda Minang | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 162 | 3 |
| 46 | PT.Ranah Garuda Minang | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 163 | 3 |
| 47 | PT.Ranah Garuda Minang | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 164 | 3 |
| 48 | Chaiyar | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln.Auri 10 Bukittinggi | 130 | 3 |
| 49 | Rosmanidar | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 9 Bukittinggi | 131 | 3 |
| 50 | H. Yoni Syafri. SH | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 7 Bukittinggi | 132 | 3 |
| 51 | H. ASWIR | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri 8 Bukittinggi | 133; | 3 |
| 52 | Haji Ruslami Rasyid Datuak Sati; | Pertokoan Simpang Aur Blok O Bukittinggi | 144; | 3 |
| 53 | Muhammad Habdi; Ahmad Fadhil; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 16 Tarok Dipo Bukittinggi | 176 | 5 |
| 54 | Alibar Nain | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 14 Tarok Dipo Bukittinggi | 189 | 5 |
| 55 | Ermizal | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 173 | 5 |
| 56 | 1.Mawardi, 2.Dasriwati | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 177 | 5 |
| 57 | H.M.Ramsi Suman,SM | Pertokoan Simpang Aur Blok N Bukittinggi | 182 | 5 |
| 58 | Dra.Afnita | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 192 | 5 |
| 59 | Nailul Autar St.Kayo | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 191 | 5 |
| 60 | H.Evi Arons | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 183 | 5 |
| 61 | H.Evi Arons | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 184 | 5 |
| 62 | H.Evi Arons | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 186 | 5 |
| 63 | 1.Hj.Baenar, 2.Syafwan St.Btk Ameh | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Depan Terminal Bukittinggi | 202 | 5 |
| 64 | Asrul Nain | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 15 Tarok Dipo Bukittinggi | 196 | 5 |
| 65 | H.Syahrial;Erlin Sikumbang; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl.Diponegoro 13 Tarok Dipo Bukittinggi | 187 | 5 |
| 66 | Helmawati | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro 11 Bukittinggi | 201 | 5 |
| 67 | Asrul Nain | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro 12 Bukittinggi | 203 | 5 |
| 68 | 1.Yunizal, 2.Hasnon; | Pertokoan Simpang Aur Blok N, Jl. Diponegoro 10 Bukittinggi | 204 | 5 |
| 69 | Adril Syaribaluddin | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 174 | 6 |
| 70 | Marshall Mansyur | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 175 | 6 |
| 71 | Marshall Mansyur | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 185 | 6 |
| 72 | Rizal | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln Simpang Aur Dalam Bukittinggi | 188 | 6 |
| 73 | H.Amrizal | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri Bukittinggi | 193 | 6 |
| 74 | Haji Ruslami Rasyid Dt.Sati | Pertokoan Simpang Aur Blok O Bukittinggi | 198 | 6 |
| 75 | H.Sofiardi | Pertokoan Simpang Aur Blok O, Jln. Auri Bukittinggi | 199 | 6 |
| 76 | Sunerti | Pertokoan Simpang Aur Blok O Bukittinggi | 200 | 6 |

Saat ini Sertifikat HGB yang dipegang oleh pedagang tersebut dalam masa perpanjangan/pembaharuan hak untuk jangka waktu 20 Tahun. Namun pada waktu perpanjangan/pembaharuan Sertifikat HGB tersebut tidak ada perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi selaku Pemegang HPL dengan pedagang sebagai pemegang HGB. Pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 18 (delapan) buah Sertifikat HGB yang telah diperpanjang/diperbaharui tersebut telah habis masa berlakunya, sisanya akan habis pada Tahun 2025 dan Tahun 2027.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai Pemegang Hak Pengelolaan telah menerima pendapatan berupa uang kontribusi dari Pihak Ketiga yaitu dari PT. RGM, PT. Inkorba dan PT. Suma Jaya. Semenjak Tahun 2018 hingga Tahun 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penerimaan Daerah atas Uang Wajib Tahunan dan Uang Pemasukan atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan pada Pertokoan Pasar Simpang Aur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerimaan Daerah Atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Namun pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi mengeluarkan Surat Ketetapan Penerimaan Daerah atas Uang Wajib Tahunan atas Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan tersebut dikarenakan aturan yang mendasari Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah dan aturan lainnya telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dimana pada Pasal 9 Ayat (4) terkait uang wajib tahunan dinyatakan "*Rumusan Tarif dan/atau Uang wajib tahunan yang dikenakan oleh Pemegang Hak Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri*". Dalam hal ini yang dimaksud Menteri adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sampai saat ini, ketentuan terkait rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tersebut, belum keluar dan Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini juga telah menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga masih dalam masa perjanjian bagi tempat usaha dengan PT. Citicon Mitra Bukittinggi dengan HPL Nomor 02/Kelurahan Aur Tajung Tangah Sawah Kecamatan Guguk Panjang. Terkait perjanjian ini sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi belum mendapatkan manfaat dari PT. CMB. Berbagai upaya perundingan telah diupayakan tetapi belum mencapai titik temu.

Aset Tanah terletak pada Pengelola Barang Milik Daerah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor Surat Ukur Nomor 41/ATTS/2004 tanggal 25 Agustus 2004 dengan luas 7484 m².

Aset Pemerintah Kota Bukittinggi yang dikerjasamakan lainnya memiliki luas tanah sebesar 7.484 m² adalah Tanah asar Banto dalam bentuk Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 002 Aur Tajung Kang Tengah Sawah yang saat ini sedang dikerjasamakan dengan pihak PT. Citicon Mitra Bukittinggi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Citicon Mitra Bukittinggi yang berakhir tanggal 31 Juli 2020. Tanah Hak Pengelolaan tersebut dicatat di Aset Lain-Lain dengan nilai aset sebesar Rp4.196.653.000,00.

Berdasarkan LHP BPK Nomor : 05.C/LHP/XVIII.PDG/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bukittinggi direkomendasikan agar Pemerintah Kota Bukittinggi menginventarisir kembali dan menelaah hak-hak Pemerintah Kota Bukittinggi dan kewajiban-kewajiban PT. CMB sesuai perjanjian kerjasama.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak PT. CMB dengan beberapa kesepakatan. Namun tindak lanjut dari kesepakatan tersebut belum memberikan hasil maksimal, terutama terhadap kewajiban-kewajiban pihak PT. CMB.

1. Pertemuan tanggal 5 Juli 2014 di Jakarta menyepakati Seluruh kewajiban PT. CMB yang terjadi karena adanya kerjasama akan dibayarkan, termasuk seluruh dokumen-dokumen perusahaan sebagai mitra kerjasama akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi paling lambat tanggal 20 Agustus 2014.
2. Pertemuan tanggal 29 Januari 2015 di Bukittinggi, Pihak PT CMB (E.J dan A) tidak dapat memberikan laporan keuangan sebelum peralihan, karena Laporan keuangan Tahun 2006 s/d 2011 merupakan tanggung jawab J.P (Kuasa Direktur lama). Pihak PT. CMB (baru) tidak dapat menerima Nilai Aset BTC sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa penilai Publik Kampianus Roman.
3. Pertemuan tanggal 9 Mei 2016 di Bukittinggi, J.P menyatakan bahwa peralihan pemegang Saham telah dilakukan sejak tanggal 21 Mei 2012 kepada E.J dan A. Pemegang saham yang baru menyatakan bersedia membayar kewajiban paling lambat 15 hari setelah pertemuan.
4. Pertemuan tanggal 3 September 2016 di Jakarta, Pemko Bukittinggi meminta kepada PT. CMB untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 9 Mei 2016. Kedua pihak bersedia melakukan renegosiasi atau revisi perjanjian sesuai aturan yang berlaku, tetapi hal ini belum dapat dilakukan karena Laporan Keuangan yang diserahkan oleh PT. CMB kepada Pemko Bukittinggi, belum berupa laporan keuangan yang sudah di audit oleh Akuntan Publik, sehingga sulit menentukan kualitas Laporan Keuangan, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk

mengetahui posisi keuangan yang sebenarnya. Pemko Bukittinggi telah meminta kepada PT. CMB untuk menyerahkan laporan keuangan yang meliputi:

1. Neraca Perusahaan.
2. Laporan Laba/Rugi Perusahaan.
3. Laporan Arus Kas.
4. Utang Piutang termasuk Kredit Bank.
5. Daftar Penyertaan Modal.

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| 5.3.2.4.2.2 Kerjasama Sewa | Tahun 2022 (Rp) 0 | Tahun 2021 (Rp) 114.036.000,00 |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|

Aset yang disewakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2021 berupa bangunan yang terletak pada Taman Benteng Fort de Kock dengan nilai bangunan sebesar Rp114.036.000,00 yang Pengelolaannya dilakukan oleh Pengelola Barang, yang disewakan kepada saudara H. Yul Bray Pili dengan perjanjian yang diperbaharui setiap tahunnya.

Pada Tahun 2022, bangunan yang terletak pada taman Benteng Fort de Kock tersebut diserahkan Pengelolaannya yang semula di Pengelola Barang kemudian dipindahkan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Barang, sehingga bangunan tersebut dipindahkan pencatatannya dari Aset Tetap Bangunan kerjasama sewa di Pengelola Barang ke Aset Tetap Bangunan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga senilai Rp114.036.000,00 (sesuai appraisal oleh KPKNL) dengan perjanjian sewa nomor: 556/01/DISPARPORA/XI-2022.

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan besaran sewa sebesar Rp145.046.000,00. Atas pelaksanaan perjanjian tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mencatat pendapatan LRA di kelompok Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-Hasil Sewa BMD untuk 2 tahun pembayaran, kemudian untuk Pendapatan diterima di Muka dicatat di kelompok Kewajiban serta Pendapatan LO dicatat hanya yang terkait dengan pendapatan tahun berjalan tahun 2022 saja

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 5.3.1.4.3. Aset Tidak Berwujud | Tahun 2022 (Rp) 8.352.406.781,00 | Tahun 2021 (Rp) 8.170.557.401,00 |
|---------------------------------------|---|---|

Nilai Aset Tidak Berwujud pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.170.557.401,00. Selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp181,849,380.00 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp8,352,406,781.00 dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Saldo Awal | Rp 8.170.557.401,00 |
|-------------------|---------------------|

Mutasi bertambah:

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| - Belanja modal (LRA) | Rp. | 24,420,000.00 |
| - Reklas antar kelompok barang (masuk) | Rp. | 117,829,380.00 |
| - Hasil penilaian kurang catat | Rp. | 39,600,000.00 |
| Jumlah | Rp. | 181,849,380.00 |

Mutasi berkurang:

| | | |
|---|------------|-------------------------|
| - Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 0,00 |
| - Hasil Penilaian Kurang Catat | Rp. | 0,00 |
| Jumlah | Rp. | 0,00 |
| Saldo akhir | Rp. | 8,352,406,781.00 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.3.1.4.4. Aset Lain-lain | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | 2.672.835.677,00 | 4.746.799.227,00 |

Aset yang tercatat pada aset lain-lain merupakan aset tetap yang kondisinya sudah tidak dapat digunakan, baik itu rusak berat maupun aset yang sudah tidak ditemukan lagi dan diusulkan untuk dihapuskan serta aset sedang dalam penelusuran.

Nilai Aset Lain-Lain pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.176.272.532,16. Selama tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp2.025.562.614,50 sehingga saldo akhir Tahun 2022 adalah Rp41.150.709.917,66 dengan nilai akumulasi penyusutan Barang Rusak Berat sebesar (Rp38,477,874,240,66) yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

| | |
|---|--------------------------|
| Uraian | Aset Lainnya (Rp) |
| <u>Saldo Awal</u> | 43.176.272.532,16 |
| Penambahan | |
| -Reklas Mutasi masuk dari aset tetap/ubah kondisi | 1.419.715.802,00 |
| <u>Jumlah Penambahan</u> | 1.419.715.802,00 |
| Pengurangan | |
| Penghapusan berdasarkan SK Wako | 3,239,691,266.50 |
| Reklas Antar Kelompok Barang (Keluar) | 101,935,000.00 |
| <u>Jumlah Pengurangan</u> | 3,341,626,266.50 |
| <u>Saldo per 31 Desember 2022</u> | 41.150.709.917,66 |

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 5.3.1.4.5. Amortisasi Aset Tidak Berwujud | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | (Rp) | (Rp) |
| | (7.418.832.774,00) | (6,966.819.810,00) |

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan masa manfaat untuk Aset Tidak Berwujud selama 5 (lima) tahun dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp7.418.832.774,00 dan Rp6.966.819.810,00. Untuk perhitungan nilai buku Aset Tidak Berwujud dapat disajikan sebagai berikut:

| | | |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| Saldo Awal | Rp | (6.966.819.810,00) |
|-------------------|-----------|---------------------------|

| | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| Beban Amortisasi Tahun 2022 | Rp | (370.705.597,00) |
| Bertambah reklas dari aset tetap | Rp | (81.307.367,00) |
| Saldo Akhir | RP | (7,418.832.774,00) |

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 5.3.1.4.6. Dana Treasury Deposit Facility (TDF) | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
| | 1.489.832.774,00 | 0 |

Dana Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2020 yang lalu adalah sebesar Rp0,00, tahun 2022 terdapat TDF senilai Rp1.489.832.774,00 yang menjadi saldo tahun 2022.

TDF sebesar Rp1.849.462.625,00 dikarenakan terbitnya PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 yang merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang disalurkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran non tunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia (BI). Sesuai dengan surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-5/PK/2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Penyampaian Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pada Tahun 2022, karna ketentuan lebih lanjut mengenai TDF belum terbit, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mencatat nilai tersebut sebagai Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LO.

Pencatatan TDF ke kelompok Aset Lainnya Neraca adalah berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 yang dialamatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF yaitu poin 4 huruf a angka 1) yang berbunyi:

“Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai **Aset Lainnya** (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca)”

Sedangkan nilai remunerasi dari TDF tersebut sebesar Rp448.551,00 telah diakui dan dicatat pada kelompok Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022.

5.3.2. KEWAJIBAN

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| Rp | Rp |
| 12.332.999.300,92 | 11.436.747.898,31 |

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar dari sumber daya ekonomi pemerintah. Pada Neraca Kota Bukittinggi Kewajiban Tahun 2022 diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel. 5.3.2.1
Kewajiban Tahun 2022

| No. | Uraian | Saldo Awal (Rp) | Koreksi Saldo Awal | Saldo Awal 2022 setelah Koreksi | Bertambah (Rp) | Berkurang (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Kewajiban Jangka Pendek | 11.436.747.898,31 | 0,00 | 11.436.747.898,31 | 575.712.956.854,76 | 574.816.705.452,15 | 12.332.999.300,92 |
| 2 | Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.436.747.898,31 | 0,00 | 11.436.747.898,31 | 575.712.956.854,76 | 574.816.705.452,15 | 12.332.999.300,92 |

Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kota Bukittinggi hanya mempunyai kewajiban jangka pendek sebesar Rp12.332.999.300,92.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| Rp | Rp |
| 12.332.999.300,92 | 11.436.747.898,31 |

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp12.332.999.300,92 dan Rp11.436.747.898,31, artinya terdapat penurunan angka kewajiban sebesar Rp896.251.402,61 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 5.3.2.2
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022

| No. | Uraian | Saldo Awal (Rp) | Koreksi Saldo Awal | Saldo Awal 2022 setelah Koreksi | Bertambah (Rp) | Berkurang (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|-----|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.173.972.301,00 | 54.173.735.301,00 | 237.000,00 |
| 2 | Bagian Lancar Utang Jangka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Pendapatan Diterima Dimuka | 379.525.936,67 | 0,00 | 379.525.936,67 | 430.564.800,67 | 379.525.936,67 | 430.564.800,67 |

| No. | Uraian | Saldo Awal (Rp) | Koreksi Saldo Awal | Saldo Awal 2022 setelah Koreksi | Bertambah (Rp) | Berkurang (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|-----|-----------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Utang Belanja | 4.608.590.212,00 | 4.913.622.838,64 | 9.522.213.050,64 | 456.464.437.575,60 | 454.748.930.076,99 | 11.237.720.549,25 |
| 5 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 535.508.911,00 | - | 535.508.911,00 | 119.880.119.070,49 | 119.751.151.030,49 | 664.476.951,00 |
| | jumlah | 5.523.625.059,67 | 4.913.622.838,64 | 10.437.247.898,31 | 630.949.093.747,76 | 629.053.342.345,15 | 12.332.999.300,92 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 237.000,00 | 0,00 |

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah Rp0,00, pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp237.000,00, yang terdiri dari keterlanjuran bayar utang PFK Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2022 oleh Bendahara Umum Daerah ke PT.Taspen sebesar (Rp6.000,00) dan utang PPH pasal 21 RSUD sebesar Rp243.000 Kota Bukittinggi.

| | | |
|--|-------------------|-----------------------|
| B. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 0,00 | 999.500.000,00 |

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp999.500.000,00 sampai dengan tahun 2022 belum ada jawaban Kementerian Keuangan terkait status Utang Kewajiban Inpres Pasar yang sampai tahun 2021 terus dicatat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di Neraca.

Maka pada tahun 2022 ini Pemerintah Kota Bukittinggi mengambil langkah bertahap untuk tidak menyajikan nilai kewajiban pada Neraca namun mengoreksinya menjadi Kewajiban kontingensi yang sewaktu waktu ada perkembangan baru akan ditindaklanjuti penjelasan lebih lanjut berada pada BAB VI Catatan atas Laporan Keuangan.

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| C. Pendapatan Diterima di Muka | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 430.564.800,67 | 379.525.936,67 |

Saldo Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2021 pada neraca per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp379.525.936,67, selama tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp315.336.134,00 dan mutasi kurang sebesar Rp264.297.270,00 sehingga saldo akhir tahun 2022 menjadi Rp430.564.800,67.

Tabel. 5.3.2.4
Daftar Mutasi Pendapatan Diterima di Muka

| No. | Uraian | Saldo Akhir 31 Desember 2021 | Koreksi Saldo Awal | Mutasi | | Saldo akhir 31 Desember 2022 |
|---------------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron - LO | 170.262.270,00 | 0,00 | 211.555.134,00 | 170.262.270,00 | 211.555.134,00 |
| 2 | Pajak Reklame Berjalan | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 3 | Hasil dari pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 208.813.666,67 | 0,00 | 22.708.000,00 | 93.585.000,00 | 137.936.666,67 |
| 4 | Reklame Kain | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 |
| 5 | Retribusi Pertokoan | 0,00 | 0,00 | 72.523.000,00 | 0,00 | 72.523.000,00 |
| Jumlah | | 379.525.936,67 | 0,00 | 315.336.134,00 | 264.297.270,00 | 430.564.800,67 |

Pendapatan Diterima di Muka tahun 2022 berada pada SKPD Badan Keuangan dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

D. Utang Belanja

Tahun 2022
Rp
11.237.720.549,25

Tahun 2021
Rp
9.522.213.050,64

Utang Belanja pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp11.237.720.549,25 dan Rp9.522.213.050,64. Adapun rincian Utang Belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Utang Belanja Pegawai

Tahun 2022
Rp
6.240.714.248,00

Tahun 2021
Rp
4.608.590.212,00

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.608.590.212,00. Selama tahun 2022 terdapat penambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp2.980.320.355,00 dan pengurangan utang sebesar Rp1.314.190.979,00. Sehingga saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.240.714.248,00. Rincian mutasi utang belanja pegawai tersebut dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel. 5.3.2.5
Daftar Mutasi Utang Belanja Pegawai Tahun 2022

| N o. | SKPD | Tahun Pengaku an | Saldo awal 31 Desember 2021 | Koreksi Saldo Awal | Saldo Awal Setelah Koreksi | Mutasi | | Saldo akhir 31 Desember 2022 |
|---------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2021 | 577.319.398,00 | - | 577.319.398,00 | - | 577.319.398,00 | - |
| 2 | dinas Sosial | 2021 | 170.142.878,00 | - | 170.142.878,00 | - | 170.142.878,00 | - |
| 3 | Sekretariat DPRD | 2021 | 201.194.787,00 | - | 201.194.787,00 | - | 201.194.787,00 | - |
| 4 | Kecamatan Guguk Panjang | 2021 | 124.610.528,00 | - | 124.610.528,00 | - | 124.610.528,00 | - |
| 5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2021 | 240.923.388,00 | - | 240.923.388,00 | - | 240.923.388,00 | - |
| 6 | Dinas Pertanian | 2020 | 13.420.505,00 | - | 13.420.505,00 | - | - | 13.420.505,00 |
| 7 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 2019 | 7.020.824,00 | - | 7.020.824,00 | 3.065.431.497,00 | 3.065.431.497,00 | 7.020.824,00 |
| 8 | Dinas Kebakaran | 2021 | 3.717.660,00 | - | 3.717.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.717.660,00 |
| 9 | Dinas Kesehatan | 2021 | 3.270.240.244,00 | - | 3.270.240.244,00 | 2.644.596.663,00 | 0,00 | 5.914.836.907,00 |
| 10 | PUPR | 2022 | 0,00 | - | 0,00 | 123.953.065,00 | 0,00 | 123.953.065,00 |
| 11 | PERKIM | 2022 | 0,00 | - | 0,00 | 19.446.947,00 | 0,00 | 19.446.947,00 |
| 12 | DPMPTSPPTK | 2022 | 0,00 | - | 0,00 | 77.657.718,00 | 0,00 | 77.657.718,00 |
| 13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2022 | 0,00 | - | 0,00 | 66.792.915,00 | | 66.792.915,00 |
| 14 | Sekretariat Daerah | 2022 | 0,00 | - | 0,00 | 13.867.707,00 | | 13.867.707,00 |
| Jumlah | | | 4.608.590.212,00 | - | 4.608.590.212,00 | 6.011.746.512,00 | 4.379.622.476,00 | 6.240.714.248,00 |

Berikut uraian Utang Belanja Pegawai Tahun 2022 adalah :

a. Dinas Pertanian

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pertanian per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.420.505,00 yang merupakan kekurangan pembayaran tambahan penghasilan dan pembayaran honorarium PPK kegiatan penanganan Covid-19 dan selama tahun 2022 belum ada pembayaran atas utang tersebut, sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2022 masih tetap sebesar Rp13.420.505,00.

b. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.020.824,00 yang merupakan kekurangan pembayaran asuransi kesehatan TPP tahun 2020 ke BPJS. Pada tanggal 31 Desember 2022 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran utang ke BPJS, namun karena ada kesalahan dalam penulisan nomor rekening tujuan pada Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga SP2D yang telah terbit di Bank Nagari mengentri sesuai rekening tujuan pada dokumen tsb yaitu rekening Bendahara Pengeluaran dan bendahara baru menyadari pada bulan Januari 2023, saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 masih tetap sebesar Rp7.020.824,00.

c. Dinas Kebakaran

Saldo utang Belanja Pegawai Dinas Kebakaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.717.660,00 selama tahun 2022 tidak terdapat penambahan dan pengurangan utang sebesar Rp3.717.660,00 merupakan kekurangan pembayaran Iuran BPJS TPP Bulan Desember 2021. Sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Kebakaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.717.660,00.

d. Dinas Kesehatan

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp Rp3.270.240.244,00 ada koreksi saldo awal sebesar Rp2.310.946.497 dan koreksi saldo awal sebesar Rp28.823.500,00 sehingga saldo awal setelah koreksi Rp896.392.155,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp4.759.058.523,00 yang merupakan kekurangan pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS Dinas Kesehatan sebesar Rp230.562.729,00 dan ditambah utang Jasa Pelayanan Medis kesehatan RSUD sebesar Rp4.759.058.523,00. sehingga saldo akhir utang belanja pegawai pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.914.836.907,00

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp123.953.065,00 yang merupakan kekuarangan pembayaran utang Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga saldo akhir utang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.953.065,00.

f. Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Perumahan dan Pemukiman per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp19.374.195,00 yang merupakan kekuarangan pembayaran utang iuran BPJS gaji susulan dan gaji 13 serta TPP ketiga belas Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sehingga saldo akhir utang pegawai Dinas Perumahan dan Pemukiman per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.374.195,00.

g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Saldo Utang Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp77.657.718,00 yang merupakan kekuarangan pembayaran Iuran BPJS utang gaji susulan dan gaji ketiga belas serta TPP ketiga belas Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sehingga saldo akhir utang pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.657.718,00.

h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Saldo utang belanja pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp66.792.915,00 yang merupakan kekuarangan pembayaran utang gaji susulan dan gaji 13 serta TPP 13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sehingga saldo akhir utang pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan per 31 Desember 2022 sebesar Rp66.792.915,00.

i. Sekretariat Daerah

Saldo utang belanja pegawai Sekretariat Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan selama tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp13.867.707,00 yang merupakan kekurangan pembayaran utang gaji susulan dan gaji ketiga belas serta TPP ketiga belas Sekretariat Daerah. Sehingga saldo akhir utang pegawai Sekretariat Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.867.707,00.

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2022
Rp
65.334.191,00

Tahun 2021
Rp
170.081.100,00

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp65.334.191,00 dan Rp170.081.100,00. Terdapat mutasi bersih utang tersebut selama tahun 2022 berupa pengurangan sebesar (Rp104.746.909,00) yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.2.6
Daftar Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

| No | SKPD | Tahun Pengakuan | Saldo Akhir 31 Desember 2021 | Koreksi Saldo Awal | Saldo Awal Setelah Koreksi | Mutasi | | Saldo Akhir 31 Desember 2022 |
|----|--|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dinas Kesehatan | | 86.801.100,00 | - | 86.801.100,00 | 2.148.500,00 | 86.801.100,00 | 2.148.500,00 |
| a | Bantuan Iuran Peserta PBU dan BP Kelas 3 tagihan November dan Desember | 2021 | 67.566.600,00 | - | 67.566.600,00 | - | 67.566.600,00 | - |
| b | Utang Pembelian Pecah Belah untuk FoodCourt di RSUD | 2021 | 11.484.500,00 | - | 11.484.500,00 | - | 11.484.500,00 | - |
| c | Utang Jasa Anestesi | 2021 | 7.750.000,00 | - | 7.750.000,00 | - | 7.750.000,00 | - |
| d | Utang Belanja Jasa Kantor | 2022 | - | - | - | 2.148.500,00 | - | 2.148.500,00 |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup | 2021 | 83.280.000,00 | - | 83.280.000,00 | | 49.320.000,00 | 33.960.000,00 |
| 3 | DPMPTSPPTK | 2022 | - | - | - | 6.284.000,00 | - | 6.284.000,00 |
| 4 | BAPELITBANG | 2022 | - | - | - | 3.542.221,00 | - | 3.542.221,00 |
| 5 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 2022 | - | - | - | 19.399.470,00 | - | 19.399.470,00 |
| | Jumlah | | 170.081.100,00 | - | 170.081.100,00 | 31.374.191,00 | 136.121.100,00 | 65.334.191,00 |

Berdasarkan tabel di atas dapat kami jelaskan SKPD yang mencatat utang tersebut sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan

Saldo utang pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp86.801.100,00.

Pada tahun 2022 terdapat pengurangan utang sebesar Rp84.652.600,00 yang terdiri dari :

1. Utang Bantuan Iuran Peserta PBU dan BP Kelas 3 tagihan November dan Desember 2021 sebesar Rp67.566.600,00
2. Utang atas pembelian pecah belah untuk foodcourt di RSUD sebesar Rp11.484.500,00 dan
3. Utang jasa Anestesi sebesar Rp7.750.000,00.
4. Penambahan Utang Belanja Jasa Kantor penyelenggara acara sebesar Rp2.148.500,00

Sehingga nilai saldo utang pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp2.148.500,00.

b. Dinas Lingkungan Hidup

Saldo Utang Barang dan Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.280.000,00. Selama Tahun 2022 terdapat pengurangan sebesar Rp49.320.000,00 utang tersebut merupakan utang kompensasi jasa pelayanan persampahan Kota Bukittinggi yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2022. Pembayaran utang belanja ini akan dianggarkan pada Anggaran Perubahan APBD Tahun 2023, dengan demikian saldo utang tersebut Tahun 2022 adalah sebesar Rp33.960.000,00.

c. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Saldo Utang 2022 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat pada Utang Belanja Jasa Kantor Tagihan Air sebesar Rp6.284.000,00

d. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Saldo Utang 2022 pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan terdapat pada Utang belanja Kantor Tagihan Listrik periode November s.d Desember 2022 sebesar Rp3.542.221,00

e. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Penambahan utang pada tahun 2022 sebesar 20% adalah terhadap perencanaan penampungan pedagang pasar bawah/ ex pedagang kuliner stasiun/parkir tahun 2022 sebesar Rp19.399.470.

| | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 3. Utang Belanja Hibah | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 0,00 | 6.972.680,00 |

Pada tahun 2021 terdapat Utang Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp6.972.680,00 yang merupakan utang pembayaran termyn I sebesar 100% Pengawasan Pembangunan Atap Jenjang Mesjid Jami' Gunjo Koto Selayan. Pada tahun 2022 utang tersebut telah dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga saldo Utang Belanja Hibah tahun 2022 adalah Rp0,00.

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 4.871.672.110,25 | 123.353.100,00 |

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp123.353.100,00. Selama tahun 2022 terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.871.672.110,25 dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp21.885.500,00 merupakan Utang 20% Perencanaan Penampung Pedagang Pasar Bawah / ex Pedagang Kuliner Stasiun/Parkir tahun 2022 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
2. Utang Pembangunan RSUD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.418.980.100,93, merupakan utang kepada PT.Bangun Kharisma Prima sesuai hasil putusan pengadilan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN.Bkt tanggal 15 Februari 2022.
3. Utang sebesar Rp430.806.509,32 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang merupakan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Rp272.104.812,20 dan Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp57.234.097,12

Sehingga saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp4.871.672.110,25 sebagaimana dapat dijelaskan tabel berikut :

Tabel. 5.3.2.7

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022

| No. | SKPD | Tahun Pengakuan | Saldo Akhir 31 Desember 2021 | Koreksi Saldo Awal | Mutasi | | Saldo akhir 31 Desember 2022 |
|-----|--|-----------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|------------------------------|
| | | | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan | 2016 | 21.885.500,00 | - | - | - | 21.885.500,00 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 2022 | - | - | 4.418.980.100,93 | - | 4.418.980.100,93 |
| 3 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 2020 | 101.467.600,00 | - | 329.338.909,32 | - | 430.806.509,32 |
| | Jumlah | | 123.353.100,00 | - | 4.748.319.010,25 | - | 4.871.672.110,25 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------------|
| 5. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 0,00 | 4.613.215.958,64 |

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2021 adalah Rp4.613.215.958,64. Selama Tahun 2022 semua Utang yang timbul pada tahun 2021 telah dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 adalah Rp0,00. Mutasi Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 5.3.2.8

Daftar Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas PUPR Tahun 2022

| No. | SKPD | Tahun Pengakuan | Saldo Akhir 31 Desember 2021 | Koreksi Saldo Awal | Saldo Awal Setelah Koreksi | Mutasi | | Saldo akhir 31 Desember 2022 9=6+7-8 |
|-----|--|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---|
| | | | | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7-8 |
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |
| | Pembayaran Termyn I sebesar 90% Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Jl. Bermawi | 2021 | 430.270.646,38 | 0 | 430.270.646,38 | | 430.270.646,38 | 0,00 |
| | Pembayaran Termyn II sebesar 10% lunas (lunas) Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Drainase Paket II | 2021 | 24.581.634,00 | 0 | 24.581.634,00 | | 24.581.634,00 | 0,00 |
| | Pembayaran Final Quantity sebesar 60,71% Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer (SMPN1 s.d. Rumah Potong) | 2021 | 4.072.175.137,36 | 0 | 4.072.175.137,36 | | 4.072.175.137,36 | 0,00 |
| | Pembayaran Termyn II sebesar 5% Pekerjaan Pembuatan Crossing Saluran dan Pintu Air Jalan Melati | 2021 | 9.654.384,95 | 0 | 9.654.384,95 | | 9.654.384,95 | 0,00 |
| | Pembayaran Termyn I sebesar 12% Pekerjaan Pembangunan Transfer Depo | 2021 | 76.534.155,95 | 0 | 76.534.155,95 | | 76.534.155,95 | 0,00 |
| | Jumlah | | 4.613.215.958,64 | 0,00 | 4.613.215.958,64 | 0,00 | 4.613.215.958,64 | 0,00 |

6. Utang Belanja Tak Terduga **Tahun 2022**
Rp
0,00 **Tahun 2021**
Rp
0,00

Tidak terdapat saldo utang Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021, dan juga tidak adanya mutasi tambah maupun kurang pada tahun 2022, sehingga tidak terdapat saldo per tanggal 31 Desember 2022.

7. Utang Belanja Bantuan Sosial **Tahun 2022**
Rp
60.000.000,00 **Tahun 2021**
Rp
0,00

Saldo utang Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2022 adalah Rp60.000.000,00. Utang tersebut timbul karena pada APBD awal telah dianggarkan Belanja Bantuan Sosial tersebut dan telah dilaksanakan, namun pada Perubahan APBD tahun 2022 tersebut anggaran yang semula ada menjadi tidak tersedia, sehingga pembayaran dijadwalkan dibayarkan pada APBD Perubahan 2023 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.2.9

Daftar Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022

| No. | SKPD | Tahun Pengakuan | Saldo Akhir 31 Desember 2021 | Koreksi Saldo Awal | Mutasi | | Saldo akhir 31 Desember 2022 |
|-----|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------------------------------|
| | | | | | Tambah | Kurang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | | | | | | |
| | Utang Belanja Bantuan Sosial | 2022 | - | - | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 |
| | Jumlah | | | | 60.000.000,00 | - | 60.000.000,00 |

A. Utang Jangka Pendek Lainnya **Tahun 2022**
Rp
664.476.951,00 **Tahun 2021**
Rp
535.508.911,00

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 adalah Rp662.476.951,00, merupakan utang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya, dengan rincian :

1. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Saldo Utang Kelebihan Transfer Tahun 2021 adalah sebesar Rp535.508.911,00. Dengan terbitnya PMK 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 terdapat koreksi tambah utang sebesar Rp275.149.536,00 sehingga utang menjadi Rp810.658.447,00. Selama tahun 2022 terdapat mutasi kurang sebesar Rp148.350.496,00 yang diperhitungkan dalam penyaluran tahun 2022, sehingga saldo akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp662.307.951,00 rincian mutasi utang kelebihan transfer tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 5.3.3.0
Daftar Mutasi Utang Kelebihan Transfer Tahun 2022

| No. | Rincian | Tahun | Saldo Akhir (Rp) 31 Desember 2021 | Koreksi Saldo Awal (Rp) | Saldo awal setelah koreksi (Rp) | Mutasi (Rp) | | Saldo akhir (Rp) 31 Desember 2022 | Keterangan |
|----------|--|-------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | Tambah | Kurang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | DBH Pajak Pusat | | | | | | | | |
| 1 | DBH Pajak | | 115.188.057,00 | 131.307.768,00 | 246.495.825,00 | - | 115.188.057,00 | 131.307.768,00 | |
| | Lebih Salur Dana Bagi Hasil Pajak PPh | s.d 2019 | 103.331.466,00 | - | 103.331.466,00 | | 103.331.466,00 | - | |
| | Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah Migas | 2020 | 11.524.532,00 | 127.758.882,00 | 139.283.414,00 | | 11.524.532,00 | 127.758.882,00 | |
| | Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PBB Biaya Pemungutan Migas | 2020 | 332.059,00 | 3.548.886,00 | 3.880.945,00 | | 332.059,00 | 3.548.886,00 | |
| 2 | Sumber Daya Alam | | 420.320.854,00 | 143.841.768,00 | 564.162.622,00 | - | 33.162.439,00 | 531.000.183,00 | |
| | Lebih Salur Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau | 2013 | - | | | | | - | |
| | Lebih Bayar DBH SDA Migas Minyak Bumi 15% | 2020 | 13.582.800,00 | - | 13.582.800,00 | - | 13.582.800,00 | - | |
| | Lebih Bayar DBH SDA Migas Minyak Bumi 0,5% | 2020 | 427.200,00 | - | 427.200,00 | - | 427.200,00 | - | |
| | Lebih Bayar DBH SDA Mineral dan Batubara | s.d 2019 | 202.451.588,00 | - | 202.451.588,00 | - | 19.152.439,00 | 183.299.149,00 | |
| | Lebih Salur DBH SDA Mineral Bukan logam dan Lainnya | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
| | Lebih Bayar DBH SDA Dana Bagi Hasil Kehutanan | s.d 2020 | 46.165.246,00 | 128.062.864,00 | 174.228.110,00 | - | - | 174.228.110,00 | |
| | Lebih Bayar DBH SDA Perikanan | 2020 | 157.694.020,00 | 15.778.904,00 | 173.472.924,00 | - | - | 173.472.924,00 | |
| | Lebih Salur DBH SDA Perikanan | | - | - | - | - | - | - | |
| | Jumlah | | 535.508.911,00 | 275.149.536,00 | 810.658.447,00 | - | 148.350.496,00 | 662.307.951,00 | Dasar Hukum PMK No. 127/PMK.07/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022 Tanggal 25 Agustus 2022, KMK No. 29/KM.7/2022, KMK No. 37/KM.7/2022 dan KMK No.46/KM.7/2022 |

2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek tersebut merupakan lebih setor retribusi oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan ke Kas Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp2.169.000,00 sehingga saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut per 31 Desember 2022 menjadi Rp2.169.000,00.

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.3.3 EKUITAS | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 2.033.022.032.295,63 | 2.040.816.158.974,56 |

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pada Neraca Pemerintah Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 terdapat Ekuitas sebesar Rp2.040.816.158.974,56 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp2.033.022.032.295,63 dengan penurunan sebesar Rp7.794.126.678,93. *Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas ini dapat dilihat pada bagian Laporan Perubahan Ekuitas.*

| | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5.4 LAPORAN | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| OPERASIONAL | Rp | Rp |
| | (15.075.012.311,53) | 342.032.863.452,96 |

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO dan Beban dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya yang meliputi Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Defisit sebesar (Rp15.075.012.311,53) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasional

Selama tahun 2022 Kegiatan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan Defisit sebesar Rp(13.950.489.410,82) dengan Pendapatan Kegiatan Operasional sebesar Rp703.466.188.835,22 dan Beban Operasional sebesar Rp717.416.678.246,04.

2. Kegiatan Non Operasional

Selama tahun 2022 Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi menghasilkan defisit sebesar (Rp1.124.522.900,71)

3. Pos Luar Biasa

Selama Tahun 2022 tidak terdapat realisasi terhadap Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi.

Adapun realisasi Laporan Operasional Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1
Realisasi Laporan Operasional Tahun 2022

| NO URUT | URAIAN | SALDO 2022 | SALDO 2021 | KENAIKAN / (PENURUNAN) | (%) |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| 7 | PENDAPATAN - LO | 703.466.188.835,22 | 1.001.362.252.732,94 | (297.896.063.897,72) | (29,75) |
| 7.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 127.187.243.766,85 | 108.116.129.324,94 | 19.071.114.441,91 | 17,64 |
| 7.1.1.0 | Pajak Daerah-LO | 50.506.989.601,00 | 41.921.194.046,00 | 8.585.795.555,00 | 20,48 |
| 7.1.2.0 | Retribusi Daerah-LO | 44.985.091.121,00 | 35.295.201.072,00 | 9.689.890.049,00 | 27,45 |
| 7.1.3.0 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 8.363.843.874,00 | 6.983.284.173,00 | 1.380.559.701,00 | 19,77 |
| 7.1.4.0 | Lain-lain PAD yang Sah-LO | 23.331.319.170,85 | 23.916.450.033,94 | (585.130.863,09) | (2,45) |
| 7.2 | PENDAPATAN TRANSFER-LO | 565.023.737.353,00 | 590.328.142.941,00 | (25.304.405.588,00) | (4,29) |
| 7.2.1.0 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 534.420.515.362,00 | 558.483.516.783,00 | (24.063.001.421,00) | (4,31) |
| 7.2.2.0 | Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO | 30.603.221.991,00 | 31.844.626.158,00 | (1.241.404.167,00) | (3,90) |
| 7.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO | 11.255.207.715,37 | 302.917.980.467,00 | (291.662.772.751,63) | (96,28) |
| 7.3.1.0 | Pendapatan Hibah-LO | 11.037.620.258,00 | 299.831.351.937,00 | (288.793.731.679,00) | (96,32) |
| 7.3.3.0 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 217.587.457,37 | 3.086.628.530,00 | (2.869.041.072,63) | (92,95) |
| 8 | BEBAN | 717.416.678.246,04 | 658.490.138.784,82 | 58.926.539.461,22 | 8,95 |
| 8.1.1.1 | Beban Pegawai | 303.024.268.021,66 | 300.840.522.762,25 | 2.183.745.259,41 | 0,73 |
| 8.1.2.2 | Beban Persediaan | 49.001.217.634,41 | 59.314.130.550,38 | (10.312.912.915,97) | (17,39) |
| 8.1.2.3 | Beban Jasa | 155.783.489.539,68 | 132.918.782.054,72 | 22.864.707.484,96 | 17,20 |
| 8.1.2.4 | Beban Pemeliharaan | 23.213.656.847,56 | 19.297.583.710,13 | 3.916.073.137,43 | 20,29 |
| 8.1.2.5 | Beban Perjalanan Dinas | 38.754.670.369,00 | 32.034.823.347,50 | 6.719.847.021,50 | 20,98 |
| 8.1.4.0 | Beban Subsidi | 2.910.989.266,00 | 0,00 | 2.910.989.266,00 | 0,00 |
| 8.1.5.6 | Beban Hibah | 40.192.987.711,16 | 21.027.307.017,43 | 19.165.680.693,73 | 91,15 |
| 8.1.6.7 | Beban Bantuan Sosial | 2.290.000.000,00 | 1.080.000.000,00 | 1.210.000.000,00 | 112,04 |
| 8.1.7.9 | Beban Penyisihan Piutang | 3.469.490.061,00 | 5.663.113.272,30 | (2.193.623.211,30) | (38,74) |
| 8.1.8.10 | Beban Lain - lain | 8.514.568.496,57 | 8.025.321.297,10 | 489.247.199,47 | 6,10 |
| 8.2.1.8 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 81.741.340.299,00 | 78.288.554.773,01 | 3.452.785.525,99 | 4,41 |
| 8.3.2.11 | Beban Bantuan Keuangan | 8.520.000.000,00 | 0,00 | 8.520.000.000,00 | 0,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | (13.950.489.410,82) | 342.872.113.948,12 | (356.822.603.358,94) | (104,07) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| 7.4.1.0 | Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 8.5.1.0 | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | (208.740.226,00) | 335.345.363,16 | (544.085.589,16) | (162,25) |
| 8.5.2.0 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | (916.082.674,71) | 503.905.132,00 | (1.419.987.806,71) | (281,80) |
| | SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | (1.124.522.900,71) | 839.250.495,16 | (1.963.773.395,87) | (233,99) |
| | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (15.075.012.311,53) | 342.032.863.452,96 | (357.107.875.764,49) | (104,41) |
| POS LUAR BIASA | | | | | |
| 8.4.1 | Beban Tak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT-LO | (15.075.012.311,53) | 342.032.863.452,96 | (357.107.875.764,49) | (104,41) |

Kegiatan Operasional menyajikan informasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bukittinggi serta besarnya beban yang harus ditanggung untuk melakukan pelayanan dan

pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022. Rincian Kegiatan Operasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1.1
Kegiatan Operasional Tahun 2022

| Uraian | 2022 Rp | 2021 (Audited) Rp | Kenaikan/ Penurunan Rp |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=(2-3) |
| KEGIATAN OPERASIONAL | (13.950.489.410,82) | 342.872.113.948,12 | (356.822.603.358,94) |
| PENDAPATAN | 703.466.188.835,22 | 1.001.362.252.732,94 | (297.896.063.897,72) |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 127.187.243.766,85 | 108.116.129.324,94 | 19.071.114.441,91 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 565.023.737.353,00 | 590.328.142.941,00 | (25.304.405.588,00) |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH | 11.255.207.715,37 | 302.917.980.467,00 | (291.662.772.751,63) |
| BEBAN | 717.416.678.246,04 | 658.490.138.784,82 | 58.926.539.461,22 |

5.4.1.1 Pendapatan

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp

Rp

703.466.188.835,22

1,001,362,252,732.94

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi Pendapatan-LO selama Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp703.629.096.744,22 merupakan jumlah pendapatan yang diakui dikarenakan timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan yang telah direalisasikan (*realized*).

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp

Rp

127.187.243.766,85

108,116,129,324.94

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dengan mengikuti ketentuan bahwa setiap penetapan oleh pemerintah daerah (secara jabatan) menjadi Pendapatan Asli Daerah. Penetapan yang dimaksud ini adalah Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan ketentuan sesuai dengan SAP. Selain pendapatan dengan penetapan Pendapatan-LO juga memuat pendapatan yang diterima langsung

dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi (WP/WR) dan wajib bayar lainnya, baik melalui Kas Bendahara Penerimaan maupun langsung ke kas daerah tanpa didahului dengan penetapan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2022 adalah sebesar Rp127.187.243.766,85 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.1.2

Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA Daerah Tahun 2022

| Uraian Rekening | Realisasi LO Rp | Realisasi LRA Rp | Selisih Rp |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=(2-3) |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 127,187,243,766.85 | 130,796,925,183.85 | (3,609,681,417.00) |
| Pendapatan Pajak Daerah | 50,506,989,601.00 | 49,570,750,398.00 | 936,239,203.00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 44,985,091,121.00 | 46,662,398,969.00 | (1,677,307,848.00) |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8,363,843,874.00 | 6,641,291,925.00 | 1,722,551,949.00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah | 23,331,319,170.85 | 27,922,483,891.85 | (4,591,164,721.00) |

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2022

Tahun 2021

Rp

Rp

50.506.989.601,00

41.921.194.046,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah dikelola sepenuhnya oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai SKPKD. Pada Tahun 2022 Pajak Daerah pada Pendapatan-LO direalisasikan sebesar Rp50.506.989.601,00 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4.1.3

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022

| Kode | Uraian Rekening | Realisasi Rp |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1.1 | PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO | 50.506.989.601,00 |
| 7.1.1.06. | Pajak Hotel – LO | 16.156.914.875,00 |
| 7.1.1.07. | Pajak Restoran – LO | 6.911.596.926,00 |
| 7.1.1.08. | Pajak Hiburan – LO | 1.003.058.055,00 |
| 7.1.1.09. | Pajak Reklame – LO | 961.108.573,00 |
| 7.1.1.10. | Pajak Penerangan Jalan – LO | 6.268.267.602,00 |

| Kode | Uraian Rekening | Realisasi Rp |
|-----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1.1.11. | Pajak Parkir – LO | 322.475.568,00 |
| 7.1.1.12. | Pajak Air Tanah – LO | 77.239.048,00 |
| 7.1.1.15. | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO | 4.853.142.158,00 |
| 7.1.1.16. | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO | 13.953.186.796,00 |

Terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan Pajak-LRA dengan Pendapatan Pajak-LO sebesar Rp936.239.203,00. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.1.4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak-LO dengan LRA Tahun 2022

| No | Uraian | Realisasi Pendapatan Pajak- LO | Realisasi Pendapatan Pajak- LRA | Selisih |
|---------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) |
| 1 | Pajak Hotel | 16.156.914.875,00 | 16.203.159.513,00 | (46.244.638,00) |
| 2 | Pajak Restoran | 6.911.596.926,00 | 6.907.203.972,00 | 4.392.954,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 1.003.058.055,00 | 1.004.246.805,00 | (1.188.750,00) |
| 4 | Pajak Reklame | 961.108.573,00 | 967.282.188,00 | (6.173.615,00) |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 6.268.267.602,00 | 6.268.267.602,00 | - |
| 6 | Pajak Parkir | 322.475.568,00 | 322.475.568,00 | - |
| 7 | Pajak Air Tanah | 77.239.048,00 | 76.075.811,00 | 1.163.237,00 |
| 8 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 4.853.142.158,00 | 3.925.523.043,00 | 927.619.115,00 |
| 9 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 13.953.186.796,00 | 13.896.515.896,00 | 56.670.900,00 |
| Jumlah | | 50.506.989.601,00 | 49.570.750.398,00 | 936.239.203,00 |

Selisih antara Pendapatan LO dan pendapatan LRA sebesar Rp936.239.203,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan piutang tahun berjalan sebesar Rp1.118.744.178,00.
2. Penambahan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp220.105.134,00.
3. Pengurangan karena realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp133.112.111,00.
4. Pengurangan pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp170.712.270,00.

Selisih Pendapatan LO dan pendapatan LRA tersebut juga dapat dirinci sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.1.5
Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LRA dengan LO Tahun 2022

| No | Uraian | Realisasi Piutang 2021 Rp | Penambahan Piutang Rp | Pendapatan diterima dimuka Rp | | Selisih Rp |
|----|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | Berkurang | Bertambah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(3-4-5+6) |
| 1 | Pajak Hotel - LO | 48.253.730,00 | 2.009.092,00 | - | - | 46.244.638,00 |
| 2 | Pajak Restoran - LO | 18.701.350,00 | 23.094.304,00 | - | - | (4.392.954,00) |
| 3 | Pajak Hiburan - LO | 4.188.750,00 | 3.000.000,00 | - | - | 1.188.750,00 |
| 4 | Pajak Reklame - LO | 52.532.500,00 | 95.751.749,00 | 170.712.270,00 | 220.105.134,00 | 6.173.615,00 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | - | - | - | - | - |
| 6 | Pajak Parkir - LO | - | - | - | - | - |
| 7 | Pajak Air Tanah - LO | 435.781,00 | 1.599.018,00 | - | - | (1.163.237,00) |
| 8 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 0,00 | 927.619.115,00 | - | - | (927.619.115,00) |
| 9 | Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 9.000.000,00 | 65.670.900,00 | - | - | (56.670.900,00) |
| | Jumlah | 133.112.111,00 | 1.118.744.178,00 | - | - | (936.239.203,00) |

| 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Rp | Rp |
| | 44.985.091.121,00 | 35.295.201.072,00 |

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang diberikan secara langsung atas permohonan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh Pemerintah. Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD sesuai dengan tupoksi masing-masing SKPD. Realisasi Pendapatan Retribusi-LO selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp44.985.091.121,00 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.1.6
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LO Tahun 2022

| Rekening | Uraian Rekening | Realisasi Rp |
|---------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1.2. | PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH – LO | 44.985.091.121,00 |
| 7.1.2. 01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO | 709.272.000,00 |
| 7.1.2. 01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO | 1.596.367.000,00 |

| Rekening | Uraian Rekening | Realisasi Rp |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 7.1.2. 01.03 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO | 2.275.000,00 |
| 7.1.2. 01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO | 1.305.794.000,00 |
| 7.1.2. 01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar – LO | 1.437.633.577,00 |
| 7.1.2. 01.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO | 2.212.882.000,00 |
| 7.1.2. 01.11 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya—LO | 8.169.500,00 |
| 7.1.2 .01.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 270.400.000,00 |
| 7.1.2 .02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO | 178.832.100,00 |
| 7.1.2 .02.02 | Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO | 7.274.872.368,00 |
| 7.1.2 .02.04 | Retribusi Terminal – LO | 190.204.000,00 |
| 7.1.2 .02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO | 1.542.814.000,00 |
| 7.1.2 .02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan – LO | 241.040.000,00 |
| 7.1.2 .02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO | 27.737.071.346,00 |
| 7.1.2 .02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO | 73.850.585,00 |
| 7.1.2 .03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO | 174.393.645,00 |
| 7.1.2 .03.03 | Retribusi Izin Trayek – LO | 29.220.000,00 |

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi retribusi per rekening, rincian masing-masing rekening tersebut berasal dari SKPD penghasil yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.1.7
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO per SKPD Tahun 2022

| No. | Nama SKPD | Realisasi per SKPD Rp | Uraian Rekening APBD | Realisasi Rp |
|-----|---|--------------------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DINAS KESEHATAN | 535.212.000,00 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 535.212.000,00 |
| 2 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.170.449.500,00 | Retribusi Pelayanan dan Persampahan/Kebersihan | 1.170.449.500,00 |
| 3 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 2.275.000,00 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat – LO | 2.275.000,00 |
| 4 | DINAS PERHUBUNGAN | 2.332.638.000,00 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.305.794.000,00 |
| | | | Retribusi Terminal | 190.204.000,00 |
| | | | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 807.420.000,00 |
| | | | Retribusi Izin Trayek | 29.220.000,00 |
| 5 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | 12.094.868.945,00 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 425.917.500,00 |
| | | | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.437.633.577,00 |

| No. | Nama SKPD | Realisasi per SKPD Rp | Uraian Rekening APBD | Realisasi Rp |
|---------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 2.212.882.000,00 |
| | | | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | 7.274.872.368,00 |
| | | | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 735.394.000,00 |
| | | | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 8.169.500,00 |
| 6 | DINAS PENANAMAN MODAL. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU . PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 249.745.545,00 | Retribusi Mendirikan Bangunan | 174.393.645,00 |
| | | | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 75.351.900,00 |
| 7 | DINAS PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAH RAGA | 27.740.839.346,00 | Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 3.768.000,00 |
| | | | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 27.737.071.346,00 |
| 8 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 498.980.585,00 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 174.060.000,00 |
| | | | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO | 10.030.000,00 |
| | | | Retribusi rumah potong hewan | 241.040.000,00 |
| | | | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 73.850.585,00 |
| 9 | BADAN KEUANGAN | 89.682.200,00 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 89.682.200,00 |
| 10 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 270.400.000,00 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 270.400.000,00 |
| JUMLAH | | 44.985.091.121,00 | | 44.985.091.121,00 |

Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Retribusi-LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp1.677.307.848,00 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.1.8
Perbandingan Realisasi Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2022

| No | Uraian | Realisasi Pendapatan Retribusi - LO | Realisasi Pendapatan Retribusi - LRA | Selisih |
|----------|---|---|--|----------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5=(3-4)</i> |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 709.272.000,00 | 709.272.000,00 | - |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 1.596.367.000,00 | 1.531.797.690,00 | 64.569.310,00 |

| | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | - |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 1.305.794.000,00 | 1.305.794.000,00 | - |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar | 1.437.633.577,00 | 1.316.078.600,00 | 121.554.977,00 |
| 6 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 2.212.882.000,00 | 2.212.882.000,00 | - |
| 7 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 8.169.500,00 | 8.169.500,00 | - |
| 8 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 270.400.000,00 | 459.680.000,00 | (189.280.000,00) |
| 9 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 178.832.100,00 | 177.292.800,00 | 1.539.300,00 |
| 10 | Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan | 7.274.872.368,00 | 8.941.077.094,00 | (1.666.204.726,00) |
| 11 | Retribusi Terminal | 190.204.000,00 | 190.204.000,00 | - |
| 12 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 1.542.814.000,00 | 1.542.814.000,00 | - |
| 13 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 241.040.000,00 | 241.040.000,00 | - |
| 14 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 27.737.071.346,00 | 27.746.558.055,00 | (9.486.709,00) |
| 15 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 73.850.585,00 | 73.850.585,00 | - |
| 16 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 174.393.645,00 | 174.393.645,00 | - |
| 17 | Retribusi Izin Trayek | 29.220.000,00 | 29.220.000,00 | - |
| | Total | 44.985.091.121,00 | 46.662.398.969,00 | (1.677.307.848,00) |

Selisih antara Pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO sebesar Rp1.677.307.848,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp64.569.310,00, yang disebabkan oleh :
 - Realisasi piutang pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Sebesar Rp64.552.310,00
 - Koreksi Piutang Tahun Lalu pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp17.000,00.
2. Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp121.554.977,00 yang disebabkan adanya realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp121.554.977,00.
3. Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp189.280.000,00 yang disebabkan oleh adanya realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp189.280.000,00.
4. Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.539.300,00 yang disebabkan oleh :
 - Adanya realisasi Piutang tahun lalu pada Badan Keuangan sebesar Rp6.819.900,00 dan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp35.984.000,00
 - Adanya penambahan piutang pada Badan Keuangan sebesar Rp40.575.200,00 dan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.768.000,00.

5. Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan sebesar Rp1.666.204.726,00 yang disebabkan oleh adanya penambahan piutang tahun 2022 sebesar Rp1.667.101.726,00 dan koreksi atas piutang tahun lalu sebesar Rp897.000,00.
6. Terdapat selisih pada Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.486.709,00 yang disebabkan oleh adanya realisasi piutang sebesar Rp9.486.709,00 atas nama Roni Chaniago.

| 5.4.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | Tahun 2022 Rp | Tahun 2021 Rp |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 8.363.843.874,00 | 6,983,284,173.00 |

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 merupakan bagian laba/deviden yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas aktifitas Penyertaan Modal yang dilakukan pada Perusahaan Bank Nagari BPD Sumatera Barat dan pada PT. BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi. Selama Tahun 2022 realisasi Pendapatan-LO dari Dividen adalah sebesar Rp8.527.200.334,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.9
Perbandingan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA Tahun 2022

| No | Uraian Rekening | Realisasi LO | Realisasi LRA | Selisih |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) |
| | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 8,363,843,874.00 | 6,641,291,925.00 | 1,722,551,949.00 |
| 1 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga) | 8,363,843,874.00 | 6,641,291,925.00 | 1,722,551,949.00 |
| | - Bank Nagari | 7,934,638,854.00 | 6,252,795,492.00 | 1,681,843,362.00 |
| | - BPRS Jam Gadang | 429,205,020.00 | 388,496,433.00 | 40,708,587.00 |

Perbedaan antara realisasi LRA dan realisasi LO sebesar Rp1.722.551.949,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan piutang Bagian Laba/deviden yang dibagikan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 atas perhitungan tahun 2021 sebesar Rp6.641.291.925,00 yang terdiri dari Bank Nagari sebesar Rp6.252.795.492,00 dan PT. BPRS Perseroda Jam Gadang sebesar Rp388.496.433,00.
- Pengakuan dan pencatatan atas piutang Dividen 2022 yang akan disetor pada tahun 2023 sebesar Rp8.527.200.334,00, yang terdiri dari Bank Nagari sebesar Rp7.934.638.854,00

dan PT. BPRS Jam Gadang sebesar Rp429.205.020,00 yang menambah pendapatan di Laporan Operasional Tahun 2022.

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 23.331.319.170,85 | 23.916.450.033,94 |

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selama Tahun 2022 Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah sebesar Rp23.331.319.170,85, berikut perbandingan realisasi LRA serta rinciannya sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.4.1.10
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2022

| No | Uraian Rekening | Realisasi LO | Realisasi LRA | Selisih |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Rp | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3-4) |
| | LAIN-LAIN PAD YANG SAH - LO | 23.331.319.170,85 | 27.922,483,891.85 | (4,611,164,761.00) |
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 35,900,000.00 | 35,900,000.00 | - |
| 2 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 522,343,200.00 | 632,792,049.00 | (110,448,849.00) |
| 3 | Penerimaan Jasa Giro | 2,639,172,489.00 | 2,639,172,489.00 | - |
| 4 | Pendapatan Bunga | 4,244,628,513.40 | 4,244,628,513.40 | - |
| 5 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | - |
| 6 | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain | 142,636,531.00 | 142,636,531.00 | - |
| 7 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 191,880,143.75 | 191,880,143.75 | - |
| 8 | Pendapatan Denda Pajak | 336,613,399.00 | 334,802,457.00 | 1,810,942.00 |
| 9 | Pendapatan Denda Retribusi | 179,589,580.00 | 180,043,745.00 | (454,165.00) |
| 10 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 671,001,216.00 | 671,001,216.00 | - |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian | 2,663,715,363.70 | 2,663,715,363.70 | - |
| 12 | Pendapatan dari BLUD | 11,672,990,184.00 | 16,155,511,384.00 | (4,482,521,200.00) |
| 13 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah | 24,400,000.00 | 24,400,000.00 | - |
| 14 | Lain - lain PAD yang Sah Lainnya | 448,511.00 | - | 448,511.00 |

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan PAD yang tidak bisa ditampung dalam rekening Pajak dan Retribusi Daerah maupun dalam Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO selama Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp23.331.319.170,85

Dari tabel di atas realisasi pendapatan LO dan LRA terdapat selisih sebesar Rp4.611.164.761,00, yang dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini :

1. Terdapat selisih pada Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp110.448.849,00 yang disebabkan :
 - Adanya realisasi piutang Hasil dari Bangun Guna pada Badan Keuangan sebesar Rp90.562.849,00.
 - Realisasi Piutang Sewa BMD pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp18.240.000,00.
 - Penambahan Pendapatan Dierima Dimuka untuk Sewa BMD pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp72.523.000,00.
 - Pengurangan Pendapatan diterima dimuka untuk Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD pada Badan Keuangan sebesar Rp (70.877.000,00).
2. Terdapat selisih pada Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp1.810.942,00 yang disebabkan:
 - Adanya realisasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel sebesar Rp347.527,00.
 - Adanya penambahan Piutang Denda Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp178.248,00.
 - Adanya realisasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran sebesar Rp326.027,00.
 - Adanya penambahan piutang Denda Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp2.764.498,00.
 - Adanya realisasi piutang Denda Pajak Hiburan sebesar Rp458.250,00
3. Terdapat selisih pada Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp454.165,00 yang disebabkan:
 - Realisasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp55.000,00
 - Realisasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasarpada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp234.295,00.
 - Realisasi Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp164.520,00.
4. Terdapat selisih pada Pendapatan dari BLUD sebesar Rp4.482.521.200,00 yang disebabkan adanya realisasi Piutang Pendapatan BLUD Rp4.482.521.200,00 dari klain dana BPJS.
5. Terdapat Selisih PAD yang sah Lainnya sebesar Rp448.551,00

| | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.4.1.1.1 | Pendapatan Transfer | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | | Rp | Rp |
| | | 565.023.737.353,00 | 590.328.142.941,00 |

Adapun realisasi penerimaan Pendapatan Transfer selama tahun 2022 adalah sebesar Rp 565.023.737.353,00. adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.1.11

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022

| No | Uraian Rekening | Realisasi LO | Realisasi LRA | Selisih |
|----|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) |
| | PENDAPATAN TRANSFER - LO | 565.023.737.353,00 | 567.387.873.682,00 | (2.364.136.329,00) |
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 534.420.515.362,00 | 532.574.902.562,00 | 1.845.612.800,00 |
| 2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 30.603.221.991,00 | 34.812.971.120,00 | (4.209.749.129,00) |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 5.4.1.1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | | Rp | Rp |
| | | 534.420.515.362,00 | 558.483.516.783,00 |

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari Dana Perimbangan-LO dengan rincian yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO; Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO; dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO;. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA dan LO dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.4.1.12

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2022

| No | Uraian Rekening | Realisasi LO | Realisasi LRA | Selisih |
|----|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) |
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 534.420.515.362,00 | 532.574.902.562,00 | 1.845.612.800,00 |
| | Dana Perimbangan-LO | 534.420.515.362,00 | 532.574.902.562,00 | 1.845.612.800,00 |
| | - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO | 20.791.087.325,00 | 18.945.474.525,00 | 1.845.612.800,00 |
| | - Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO | 419.027.434.440,00 | 419.027.434.440,00 | - |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO | 38.100.592.208,00 | 38.100.592.208,00 | - |
| - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO | 56.501.401.389,00 | 56.501.401.389,00 | - |

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lo dibandingkan dengan realisasi anggaran terdapat selisih pada Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO sebesar Rp1.845.612.800,00. Selisih tersebut merupakan penambahan piutang selama tahun 2022 sebesar Rp1.845.612.800,00.

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | Rp | Rp |
| | 30.603.221.991,00 | 31.844.626.158,00 |

Pendapatan Transfer Antar Daerah LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Selama Tahun 2022 realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar Rp30.603.221.991,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp30.203.221.991,00 dan realisasi Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp400.000.000,00

Perbandingan antara realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan LRA serta rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.13 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah LO Tahun 2022

| No | Uraian Rekening | Realisasi LO | Realisasi LRA | Selisih |
|----|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) |
| A | Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO | 30,603,221,991.00 | 34,812,971,120.00 | (4,209,749,129.00) |
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil-LO | 30,203,221,991.00 | 34,412,971,120.00 | (4,209,749,129.00) |
| | - Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO | 30,203,221,991.00 | 34,412,971,120.00 | (4,209,749,129.00) |
| 2 | Bantuan Keuangan | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - |
| | - Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - |

Selisih antara realisasi LRA dan LO sebesar Rp4.209.749.129,00 merupakan realisasi piutang transfer provinsi berdasarkan realisasi yang diterima dengan alokasi yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/007/Pjk-Bapenda/2022 sebesar Rp4.209.749.129,00. Dan pada tahun 2022 adanya penambahan piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp3.781.987.835,00 berdasarkan surat Bapenda No.971.1/06/Pjk-Bapenda/2023 tentang Penetapan Alokasi Depenitif Dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. Sehingga saldo piutang Piutang Transfer Antar Daerah pada neraca sebesar Rp3.781.987.835,00.

| 5.4.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|---|--------------------------|---------------------------|
| | Rp | Rp |
| | 11.255.207.715,37 | 302.917.980.467,00 |

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui melalui penetapan atau tanpa penetapan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 sebesar Rp11.255.207.715,37 adalah akumulasi berupa pendapatan hibah yang dari pemerintah pusat, badan/ lembaga organisasi swasta dalam negeri berupa asset serta pengembalian belanja dan dana BOS serta pengembalian dana hibah tahun sebelumnya. Adapun rincian dari Pendapatan Hibah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.1.14
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 2022

| No | Uraian Rekening | Realisasi LO | Realisasi LRA | Selisih |
|----|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Rp | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3-4) |
| | PENDAPATAN HIBAH - LO | 11.255.207.715,37 | 217.587.457,37 | 11.037.620.258,00 |
| 1 | Pendapatan Hibah | 11.037.620.258,00 | - | 11.037.620.258,00 |
| 2 | Dana Darurat-LO | - | - | - |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 217.587.457,37 | 217.587.457,37 | - |

Selisih antara realisasi Pendapatan Hibah LRA dan LO sebesar Rp11.037.620.258,00 adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah untuk BPBD sebesar Rp721.158.500,00
2. Pendapatan Hibah untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Rp849.365.600,00
3. Pendapatan Hibah untuk Dinas Perhubungan Rp9.386.896.158,00
4. Pendapatan Hibah untuk Dinas Kesehatan Kota Rp80.200.000,00

Pengakuan dan pencatatan pendapatan hibah dikarenakan diterimanya Aset Tetap dari Pemerintah Pusat yang diperuntukan untuk BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya keterangan hibah berupa barang tersebut juga dapat dilihat pada BAB VI tentang Informasi Lainnya bagian Informasi Dana dan Aset yang Bersumber dari Non APBD Kota Bukittinggi pada Catatan atas Laporan Keuangan ini.

5.4.1.2 Beban**Tahun 2022****Tahun 2021****Rp****Rp****717.416.678.246,04****658.490.138.784,82**

Beban adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, dimana jumlah tersebut merupakan Beban pada Tahun 2022. Realisasi Beban Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.1.15
Beban Tahun 2022

| Uraian | 2022 | 2021 | Kenaikan/Penurunan |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (2-3) |
| BEBAN | 717,416,678,246.04 | 658,490,138,784.82 | 58,926,539,461.22 |
| Beban Pegawai | 303,024,268,021.66 | 300,840,522,762.25 | 2,183,745,259.41 |
| Beban Persediaan | 49,001,217,634.41 | 59,314,130,550.38 | (10,312,912,915.97) |
| Beban Jasa | 155,783,489,539.68 | 132,918,782,054.72 | 22,864,707,484.96 |
| Beban Pemeliharaan | 23,213,656,847.56 | 19,297,583,710.13 | 3,916,073,137.43 |
| Beban Perjalanan Dinas | 38,754,670,369.00 | 32,034,823,347.50 | 6,719,847,021.50 |
| Beban Subsidi | 2,910,989,266.00 | 0.00 | 2,910,989,266.00 |
| Beban Hibah | 40,192,987,711.16 | 21,027,307,017.43 | 19,165,680,693.73 |
| Beban Bantuan Sosial | 2,290,000,000.00 | 1,080,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
| Beban Penyisihan Piutang | 3,469,490,061.00 | 5,663,113,272.30 | (2,193,623,211.30) |
| Beban Lain-lain | 8,514,568,496.57 | 8,025,321,297.10 | 489,247,199.47 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 81,741,340,299.00 | 78,288,554,773.01 | 3,452,785,525.99 |
| Beban Bantuan Keuangan | 8,520,000,000.00 | 0.00 | 8,520,000,000.00 |

5.4.1.2.1 Beban Pegawai**Tahun 2022****Tahun 2021****Rp.****Rp****303.024.268.021,66****300.840.522.762,25**

Beban Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Beban Gaji dan Tunjangan DPRD, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Penggunaan objek tersebut didasarkan pada penggunaan model konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis No.04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

Realisasi Beban Pegawai dalam Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp303.024.268.021,66 dengan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp301.384.096.541,66. Selanjutnya, Realisasi Belanja dan Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1.16
Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2022.

| No | Uraian | Beban 2022 | Belanja 2022 | Selisih |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 |
| 1 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 165,383,630,273.00 | 165,379,234,960.00 | 4,395,313.00 |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 81,660,039,466.66 | 82,495,178,895.66 | (835,139,429.00) |
| 3 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 44,387,226,136.00 | 39,573,406,240.00 | 4,813,819,896.00 |
| 4 | Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 9,849,462,007.00 | 9,849,462,007.00 | - |
| 5 | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 1,216,458,905.00 | 1,216,458,905.00 | - |
| 6 | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 527,451,234.00 | 527,451,234.00 | - |
| 7 | Beban Pegawai BOS | 0.00 | 0.00 | - |
| 8 | Beban Pegawai BLUD | 0.00 | 2,342,904,300.00 | (2,342,904,300.00) |
| Jumlah | | 303,024,268,021.66 | 301,384,096,541.66 | 1,640,171,480.00 |

Selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai sebesar Rp1.640.171.480,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih antara Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp4.395.313,00. Selisih tersebut disebabkan oleh:
 - Pengurangan Beban Gaji dan Tunjangan ASN atas pembayaran Utang Belanja Pegawai sebesar Rp274.457.324,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Utang TPP pada Dinas Sosial sebesar Rp5.746.692,00.
 - 2) Pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada Sekreatiat DPRD sebesar Rp6.909.933,00.
 - 3) Pembayaran Utang Iuran BPJS Kesehatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp240.923.388,00.
 - 4) Pembayaran Utang TPP BPJS Kesehatan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp20.877.311,00.
 - Penambahan Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang disebabkan penambahan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp278.852.637,00, yang terdiri dari:

- 1) Penambahan Utang BPJS TPP pada Dinas PUPR sebesar Rp4.482.130,00.
 - 2) Penambahan Utang BPJS TPP pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp10.565.876,00.
 - 3) Penambahan Utang BPJS TPP pada Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp13.867.707,00.
 - 4) Penambahan Utang BPJS PNS 4% TPP dan Gaji Septembar sampai dengan Desember 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp19.374.195,00
 - 5) Penambahan Utang Iuran Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp230.562.729,00.
2. Selisih Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp835.139.429,00 yang disebabkan oleh:
- Pengurangan Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp1.044.215.785,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Utang TPP Tahun 2021 pada Dinas Sosial sebesar Rp164.396.186,00
 - 2) Pembayaran Utang TPP Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp194.284.854,00
 - 3) Pembayaran Utang TPP Tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp556.442.087,00
 - 4) Pembayaran utang BPJS TPP Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp4.482.130,00
 - 5) Pembayaran utang BPJS TPP Tahun 2021 pada Kecamatan Guguk Panjang sebesar Rp124.610.528,00
 - Penambahan Beban Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp213.558.486,00 yang terdiri dari:
 - 1) Penambahan Utang TPP Tahun 2022 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ruang sebesar Rp56.227.039,00.
 - 2) Penambahan Utang TPP Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp123.953.065,00.
 - 3) Penambahan Utang TPP Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.823.500,00.
 - 4) Penambahan Utang TPP Tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp7.752,00.

3. Selisih Beban dari Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebesar Rp4.813.819.896,00 yang disebabkan oleh:
- Pengurangan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif Lainnya ASN atas koreksi lebih catat Utang Jasa Layanan RSUD sebesar Rp2.310.946.497,00.
 - Pengurangan Beban Koreksi atas nilai Utang Remunerasi RSUD Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar Rp54.854.148,00
 - Penambahan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN atas reklas dari Beban Pegawai BLUD ke sebesar Rp7.101.962.823,00.
 - Penambahan Utang Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp77.657.718,00.
4. Selisih antara Beban Pegawai BLUD dengan Belanja Pegawai BLUD karena Belanja sebesar Rp2.342.904.300,00 dalam Laporan Operasional Tahun 2022 telah direklasifikasi ke Beban Pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga telah tergabung dengan Beban Pegawai seluruh SKPD

| 5.4.1.2.2 Beban Persediaan | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Rp | Rp |
| | 49.001.217.634,41 | 59.314.130.550,38 |

Dalam mencatat Beban Persediaan Pemerintah Kota Bukittinggi menggunakan pendekatan beban, dimana seluruh persediaan awal dan pembelian selama tahun berjalan dianggap sebagai beban dan kemudian pada akhir tahun baru dilakukan penyesuaian terhadap beban berdasarkan hasil *stock opname* persediaan oleh masing-masing SKPD. Pada tahun 2022 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp49.001.217.634,41.

Tabel 5.4.1.17
Beban Persediaan Tahun 2022

| No | Uraian | Beban 2022 | Belanja 2022 | Selisih |
|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Beban Barang Pakai Habis | 48.989.967.195,41 | 45.241.953.200,74 | 3.748.013.994,67 |
| 2 | Beban Barang Tak Habis Pakai | 11.250.439,00 | 10.950.439,00 | 300.000,00 |
| Jumlah | | 49.001.217.634,41 | 45.252.903.639,74 | 3.748.313.994,67 |

| | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.4.1.2.3 | Beban Jasa | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | | Rp | Rp |
| | | 155.783.489.539,68 | 132.918.782.054,72 |

Beban jasa yang Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp155.783.489.539,68 Beban Jasa pada Laporan Operasional tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.1.18
Beban Jasa Tahun 2022

| No | Uraian | Beban 2022 Rp | Belanja 2022 Rp | Selisih Rp |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3 - 4 |
| 1 | Beban Jasa Kantor | 122,295,701,520.99 | 122,177,702,989.99 | 117,998,531.00 |
| 2 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 7,606,995,810.00 | 7,680,266,210.00 | (73,270,400.00) |
| 3 | Beban Sewa Tanah | 2,270,461,483.00 | 2,270,461,483.00 | - |
| 4 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 2,930,859,944.00 | 2,930,859,944.00 | - |
| 5 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 1,950,919,870.00 | 1,950,919,870.00 | - |
| 6 | Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi | - | - | - |
| 7 | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 35,350,000.00 | 35,350,000.00 | - |
| 8 | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 714,683,017.40 | 773,978,551.40 | (59,295,534.00) |
| 9 | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 2,063,712,666.25 | 1,977,848,616.25 | 85,864,050.00 |
| 10 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 141,000,000.00 | 141,000,000.00 | - |
| 11 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 1,665,443,477.04 | 1,529,618,140.04 | 135,825,337.00 |
| 12 | Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN | 197,023,268.00 | 197,023,268.00 | - |
| 13 | Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi | 275,183,332.00 | 275,183,332.00 | - |
| 14 | Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 3,040,207,770.00 | 2,751,096,770.00 | 289,111,000.00 |
| 15 | Beban Barang dan Jasa BOS | 10,595,947,381.00 | 13,491,812,300.00 | (2,895,864,919.00) |
| | Jumlah | 155,783,489,539.68 | 158,183,121,474.68 | (2,399,631,935.00) |

Perbedaan belanja jasa dengan beban jasa dapat dijelaskan antara lain:

- Selisih antara Beban Jasa Kantor dengan Belanja Jasa Kantor sebesar Rp117.998.531,00 yang disebabkan oleh:
 - Pengurangan Beban Jasa Kantor sebesar Rp91.030.000,00 yang terdiri dari:
 - Pembayaran Utang Jasa Kantor pada Dinas Kesehatan Kota Sebesar Rp7.750.000,00.

- 2) Koreksi Utang Jasa Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp83.280.000,00.
- Penambahan Beban Jasa Kantor sebesar Rp209.028.531,00 yang terdiri dari:
 - 1) Penambahan Utang Belanja Kontribusi Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp33.960.000,00.
 - 2) Pengakuan Utang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp6.284.000,00.
 - 3) Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Jasa Kantor sebesar Rp165.242.310,00.
 - 4) Pengakuan Utang Belanja Tagihan Listrik pada Badan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp3.542.221.
2. Selisih antara Beban Iuran Jaminan/Asuransi dengan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp73.270.400,00 yang disebabkan oleh adanya pengurangan Beban Iuran Jaminan/Asuransi atas pembayaran utang BPJS pada Dinas Kesehatan Kota.
3. Selisih antara Beban Jasa Konsultansi Konstruksi dengan Belanja Beban Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp59.295.534,00 yang disebabkan oleh:
 - Adanya pengurangan Beban Jasa Konsultansi Konstruksi atas kapitalisasi Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebesar Rp78.695.004,00.
 - Pengakuan Utang 20% Perencanaan Penampung Pedagang Pasar Bawah Eks Pedagang Kuliner Stasiun/Parkir Tahun 2022 sebesar Rp19.399.470,00 pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
4. Selisih antara Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp85.864.050,00 yang disebabkan adanya belanja modal Bangunan Pembawa Irigasi menjadi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang disebabkan oleh konsultansi survey kondisi irigasi menggunakan E-Paksi.
5. Selisih antara Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp135.825.337,00 yang disebabkan adanya reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan Kota.
6. Selisih antara Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp289.111.000,00 yang disebabkan adanya reklas dari Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan Kota.
7. Selisih antara Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp2.895.864.919,00 yang disebabkan adanya reklas ke Beban Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

| 5.4.1.2.4 | Beban Pemeliharaan | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Rp | Rp |
| | | 23.213.656.847,56 | 19,297,583,710,13 |

Beban Pemeliharaan sebesar Rp23.213.656.847,56 merupakan Beban Pemeliharaan Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4.1.19
Beban Pemeliharaan Tahun 2022

| No | Uraian | Beban 2022 | Belanja 2022 | Selisih |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Rp | Rp | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3-4) |
| 1 | Beban Pemeliharaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 14.745.386.558,26 | 14.479.596.644,26 | 265.789.914,00 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2.878.801.245,30 | 2.616.255.512,60 | 262.545.732,70 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 3.239.405.954,00 | 3.217.713.404,00 | 21.692.550,00 |
| 5 | Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 2.350.063.090,00 | 2.350.063.090,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 23.213.656.847,56 | 22.663.628.650,86 | 550.028.196,70 |

Selisih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan sebesar Rp550.028.196,70 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan beban dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp265.789.914,00
2. Penambahan beban dari belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp262.545.732,70
3. Penambahan beban dari belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp21.692.550,00.

| 5.4.1.2.5 | Beban Perjalanan Dinas | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Rp | Rp |
| | | 38.754.670.369,00 | 32.034.823.347,50 |

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp38.754.670.369,00. Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.1.20
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022

| No | Uraian | Beban | Belanja | Selisih |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Rp | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3-4) |
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 38.754.670.369,00 | 38.444.404.647,00 | 310.265.722,00 |
| Jumlah | | 38.754.670.369,00 | 38.444.404.647,00 | 310.265.722,00 |

Selisih antara belanja dan beban perjalanan dinas sebesar Rp310.265.722,00 merupakan reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD. Sebagaimana tertuang pada DPA Kegiatan bahwa belanja barang dan jasa dicatat pada rekening Barang dan Jasa BLUD, begitu juga untuk beban BLUD yang secara langsung di catat pada Beban Barang dan Jasa BLUD, sehingga pada akhir tahun anggaran perlu di reklas sesuai dengan pembebanan pada pos masing-masing rekening sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5.4.1.2.6 Beban Subsidi

| | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|--|-------------------------|-------------------|
| | Rp | Rp |
| | 2.910.989.266,00 | 0 |

Beban Subsidi Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp2.910.989.266,00. Rincian Realisasi Beban Subsidi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.1.21
Beban Subsidi Tahun 2022

| No | Uraian | Beban | Belanja | Selisih |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| | | Rp | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3-4) |
| 1 | Beban Subsidi kepada BUMD | 2.574.989.266,00 | 2.574.989.266,00 | - |
| 2 | Beban Subsidi kepada Koperasi | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | - |
| Jumlah | | 2.910.989.266,00 | 2.910.989.266,00 | - |

| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5.4.1.2.7 | Beban Hibah | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | | Rp | Rp |
| | | 40.192.987.711,16 | 21.027.307.017,43 |

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk pemberian uang/barang atau jasa kepada lembaga/organisasi masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2022 yaitu sebesar Rp40.192.987.711,16. Tidak ada selisih antara Beban hibah dengan Belanja Pemerintah Kota Bukittinggi, berikut persandingannya:

Tabel 5.4.22
Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2022

| No | Uraian | Beban | Belanja | Selisih |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Rp | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3-4) |
| 1 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 11.507.400.481,73 | 11.507.400.481,73 | - |
| 2 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 20.403.961.659,43 | 20.403.961.659,43 | - |
| 3 | Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 951.289.900,00 | 951.289.900,00 | - |
| 4 | Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta | 6.624.278.680,00 | 6.624.278.680,00 | - |
| 5 | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 706.056.990,00 | 706.056.990,00 | - |
| | Jumlah | 40.192.987.711,16 | 40.192.987.711,16 | - |

| | | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.4.1.2.8 | Beban Bantuan Sosial | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | | Rp | Rp |
| | | 2.290.000.000,00 | 1.080.000.000,00 |

Beban Bantuan Sosial adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan Sosial yang direalisasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Beban Bantuan Sosial direncanakan kepada Keluarga dengan total beban selama tahun 2022 sebesar Rp2.290.000.000,00.

Tabel 5.4.1.23
Beban Bantuan Sosial Tahun 2022

| No | Uraian | Beban Rp | Belanja Rp | Selisih |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) |
| 1 | Beban Bantuan Sosial uang kepada individu | 60.000.000,00 | 0 | 60.000.000,00 |
| 2 | Beban Bantuan Sosial kepada keluarga | 2.230.000.000,00 | 2.230.000.000,00 | - |
| Jumlah | | 2.290.000.000,00 | 2.230.000.000,00 | 60.000.000,00 |

Selisih antara Belanja dan Beban Bantuan Sosial sebesar Rp60.000.000,00 yang merupakan Kewajiban yang belum dibayar atas telah terlaksananya pekerjaan bantuan sosial pada Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang disebabkan tidak tersedianya pada APBD Perubahan Tahun 2022.

| 5.4.1.2.9 | Beban Penyisihan Piutang | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Rp | Rp |
| | | 3,469,490,061.00 | 5.663.113.272,30 |

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp3,469,490,061.00 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.1.24
Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022

| No | Uraian | Realisasi |
|---------------|---|-------------------------|
| | | Rp |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak | 1,423,729,411.00 |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi | 1,564,905,469.00 |
| 3 | Beban penyisihan piutang hasil pengelolaan | - |
| 4 | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 480,855,181.00 |
| Jumlah | | 3,469,490,061.00 |

| 5.4.1.2.1 | Beban Lain-lain | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|-----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Rp | Rp |
| | | 8.514.568.496,57 | 8.025.321.297,10 |

Pada tahun 2022 terdapat realisasi Beban Lain-lain sebesar Rp8.514.568.496,57 yang timbul akibat Aset Rusak Berat/Usang, Belanja Modal *Exstracomptable* Pemerintah Kota Bukittinggi.

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 5.4.1.2.2 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | | Rp | Rp |
| | | 81,741,340,299.00 | 78.288.554.773,01 |

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap, Aset Lain-Lain serta Aset Tidak Berwujud yang dapat disusutkan/diamortisasikan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 adalah sebesar Rp81,741,340,299.00 dengan rincian seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.4.1.25
Beban Penyusutan Tahun 2022

| No | Uraian | Realisasi (Rp) |
|-----------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 38,068,103,188.00 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 18,672,937,674.00 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan | 24,548,286,473.00 |
| 4 | Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya | - |
| 5 | Beban Penyusutan Aset Lainnya | - |
| 6 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 452,012,964.00 |
| | Jumlah | 81,741,340,299.00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 5.4.1.2.3 | Beban Bantuan Keuangan | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
| | | Rp | Rp |
| | | 8.520.000.000,00 | 0 |

Beban Bantuan Keuangan merupakan beban yang dikeluarkan oleh suatu entitas untuk memberikan bantuan keuangan kepada pihak-pihak tertentu. Sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 Tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022. Realisasi Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2022 adalah sebesar Rp8.520.000.000,00.

5.4.1 Kegiatan Non Operasional

Tahun 2022
Rp
(1.124.522.900,71)

Tahun 2021
Rp
(839.250.495,16)

Kegiatan Non Operasional Pemko Bukittinggi merupakan pendapatan dan beban yang bukan merupakan aktifitas rutin, seperti Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Tahun 2022 terdapat defisit dari kegiatan ini dengan rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.26
Beban Non Operasional Tahun 2022

| Uraian | Realisasi |
|---|---------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | (1.124.522.900,71) |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | (1.124.522.900,71) |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 300.000,00 |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | (208.740.226,00) |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO | (916.082.674,71) |

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Tahun 2022
(Rp)
77.322.424.688,46

Tahun 2021
(Rp)
132.987.559.855,90

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan serta perubahan kas dan setara kas yang terjadi pada Kas Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2022. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.1
Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2022 dan 2021

| URAIAN | 2022 | 2021 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | - | |
| Arus Kas Masuk | - | |
| Pajak Daerah | 49,570,750,398.00 | 40,765,025,893.00 |
| Retribusi Daerah | 46,662,398,969.00 | 27,401,880,331.00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,641,291,925.00 | 5,482,031,608.00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 27,886,583,891.85 | 17,994,114,585.61 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 532,574,902,562.00 | 561,086,880,504.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 34,812,971,120.00 | 32,675,257,234.00 |
| Pendapatan Hibah | - | 0,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 217,587,457.37 | 3,086,628,530.00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 698,366,486,323.22 | 688,491,818,685.61 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Belanja Pegawai | 301,384,096,541.66 | 191,036,056,141.25 |
| Belanja Barang dan Jasa | 264,544,058,412.28 | 202,176,372,062.43 |
| Belanja Subsidi | 2,910,989,266.00 | - |
| Belanja Hibah | 40,192,987,711.16 | 15,024,545,864.43 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2,230,000,000.00 | 1,080,000,000.00 |
| Belanja Tidak Terduga | 271,437,350.00 | 1,844,107,190.00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 8,520,000,000.00 | - |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 620,053,569,281.10 | 411,161,081,258.11 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 78,312,917,042.12 | 277,330,737,427.50 |
| Arus Kas Masuk | | |
| Hasil Penjualan Tanah | | 0,00 |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | | 0,00 |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya | 35,900,000.00 | 143,235,768.00 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Pencairan Dana Cadangan | - | 26,756,453.00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 35,900,000.00 | 169,992,221.00 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,01 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48,131,479,720.00 | 30,066,387,660.80 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25,739,508,574.06 | 12,970,244,501.62 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 45,500,951,384.50 | 24,149,072,116.02 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4,633,690,566.00 | 369,627,390.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 10,000,000,000.00 | - |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 134,005,630,244.56 | 67,555,331,668.44 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (133,969,730,244.56) | (67,385,339,447.44) |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | 47,860,737,563.00 | - |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 47,860,737,563.00 | - |
| Arus Kas Keluar | | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | 47,860,737,563.00 | - |
| Koreksi SiLPa | 8,558,965.00 | 5,008,948,722.33 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 47,869,296,528.00 | 5,008,948,722.33 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | (8,558,965.00) | (5,008,948,722.33) |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas | (55,665,372,167.44) | 204,936,449,257.73 |
| Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas Di Bendahara Penerimaan | 132,987,559,855.90 | (77,170,835,364.66) |
| Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas Di Bendahara Penerimaan | 77,322,424,688.46 | 127,765,613,893.07 |
| Kas di BLUD | 12,610,034,870.69 | 3,081,986,359.83 |
| Kas Dana BOS | 1,014,071,646.00 | 2,139,959,603.00 |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | | |
| Kas Lainnya | 202.00 | - |
| Setara Kas | | 0,00 |
| Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan | 63,698,317,969.77 | 132,987,559,855.90 |

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**Tahun 2022
(Rp)
78.312.917.042,12****Tahun 2021
(Rp)
277.330.737.427,50**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari pendapatan daerah (selain penjualan aset tetap) dikurangi dengan belanja daerah (selain belanja modal) selama tahun 2022.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp78.312.917.042,12 yang merupakan selisih dari arus kas masuk sebesar Rp698.366.486.323,22 yang merupakan seluruh Realisasi APBD tahun 2022 dari Pos Pendapatan Daerah selain pendapatan dari penjualan aset tetap dengan Arus Kas Keluar Rp620.053.569.281,10 yang merupakan Realisasi APBD tahun 2022 dari Pos Belanja Daerah selain Belanja Modal, lebih rinci seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.5.2
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

| URAIAN | 2022 | 2021 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 2 |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | - | |
| Arus Kas Masuk | - | |
| Pajak Daerah | 49,570,750,398.00 | 40,765,025,893.00 |
| Retribusi Daerah | 46,662,398,969.00 | 27,401,880,331.00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6,641,291,925.00 | 5,482,031,608.00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 27,886,583,891.85 | 17,994,114,585.61 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 532,574,902,562.00 | 561,086,880,504.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 34,812,971,120.00 | 32,675,257,234.00 |
| Pendapatan Hibah | - | 0,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 217,587,457.37 | 3,086,628,530.00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 698,366,486,323.22 | 688,491,818,685.61 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Belanja Pegawai | 301,384,096,541.66 | 191,036,056,141.25 |
| Belanja Barang dan Jasa | 264,544,058,412.28 | 202,176,372,062.43 |
| Belanja Subsidi | 2,910,989,266.00 | - |
| Belanja Hibah | 40,192,987,711.16 | 15,024,545,864.43 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2,230,000,000.00 | 1,080,000,000.00 |

| URAIAN | 2022 | 2021 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 2 |
| Belanja Tidak Terduga | 271,437,350.00 | 1,844,107,190.00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 8,520,000,000.00 | - |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 620,053,569,281.10 | 411,161,081,258.11 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 78,312,917,042.12 | 277,330,737,427.50 |

| | | |
|--|---|--|
| 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi | Tahun 2022 (Rp) (133.969.730.244,56) | Tahun 2021 (Rp) (67.385.339.447.44) |
|--|---|--|

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap, aset lainnya serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Komponen penyusun laporan arus kas dari aktivitas investasi bersumber dari pendapatan atas penjualan investasi Pemerintah Kota Bukittinggi baik berupa aset tetap maupun investasi selain aset tetap dikurangi dengan pengeluaran investasi baik berupa investasi terhadap aset tetap maupun investasi dalam bentuk lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas ini adalah selisih antara arus kas masuk dari aktivitas investasi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar (Rp133.969.730.244,56) dengan rincian arus kas masuk sebagai berikut:

Arus kas masuk :

1. Penerimaan dari pencairan Dana Cadangan sebesar Rp0,00
2. Penjualan aset sebesar Rp35.900.000,00

Arus kas keluar:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.131.479.720,00
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.739.508.574,06
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp45.500.951.384,50
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.633.690.566,00
5. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00

Tabel 5.5.3
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

| URAIAN | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Arus Kas Masuk | | |
| Hasil Penjualan Tanah | | |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | | |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya | 35,900,000.00 | 143,235,768.00 |
| Pencairan Dana Cadangan | 0.00 | 26,756,453.00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 35,900,000.00 | 169,992,221.00 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Belanja Modal Tanah | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48,131,479,720.00 | 30,066,387,660.80 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 25,739,508,574.06 | 12,970,244,501.62 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 45,500,951,384.50 | 24,149,072,116.02 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 4,633,690,566.00 | 369,627,390.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 10,000,000,000.00 | 0.00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 134.005.630.244,56 | 67.555.331.668,44 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (133.969.730.244,56) | (67.385.339.447,44) |

| | | |
|---|---|---|
| 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran | Tahun 2022 (Rp) (8.321.965,00) | Tahun 2021 (Rp) (5.008.948.722,33) |
|---|---|---|

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah sebesar (Rp8.321.965,00) yang merupakan selisih dari penerimaan sebesar Rp47.860.974.563,00 dan pengeluaran Rp47.869.296.528,00. Rincian penerimaan dan pengeluaran pada aktivitas transitoris dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.4
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

| URAIAN | 2022 | 2021 |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | 47.860.974.563,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 47.860.974.563,00 | 0,00 |
| Arus Kas Keluar | 47.860.737.563,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga | 8.558.965,00 | 5.008.948.722,33 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 47.869.296.528,00 | 5.008.948.722,33 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | (8.321.965,00) | (5.008.948.722,33) |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 5.5.4 Kenaikan/ Penurunan Kas | Tahun 2022 (Rp) (55.665.135.167,44) | Tahun 2021 (Rp) 204.936.449.257,73 |
|--------------------------------------|--|---|

Angka 5.5.1 sampai dengan angka 5.5.4 di atas adalah menjelaskan kronologis atau pembagian dari mutasi kas daerah selama tahun 2022 yaitu terjadi penurunan kas daerah sebesar RpRp55.665.135.167,44 dari sebelumnya sebesar Rp132.987.559.855,90 sehingga posisi kas daerah menjadi Rp77.322.424.688,46 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.020.824,00;
2. Kas pada Kas BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.610.034.870,69;
3. Kas pada Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.014.071.646,00;
4. Kas pada Kas Dana BOK per 31 Desember 2022 sebesar Rp202,00;
5. Saldo pada Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.691.297.145,77.

Rincian posisi kas selama Tahun 2022 sebesar Rp77.322.424.688,46 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5.5
Saldo Kas dari Arus Kas

| URAIAN | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---|--------------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| Saldo Awal Kas di BUD,Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas Di Bendahara Penerimaan | 132.987.559.855,90 | (77.170.835.364,66) |
| Saldo Akhir Kas di BUD,Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas Di Bendahara Penerimaan | 77.322.424.688,46 | 127.765.613.893,07 |
| Kas di BLUD | 12.610.034.870,69 | 3.081.986.359,83 |
| Kas Dana BOS | 1.014.071.646,00 | 2.139.959.603,00 |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | | |

| URAIAN | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Kas Lainnya | 202,00 | - |
| Setara Kas | | 0,00 |
| Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan | 63.698.317.969,77 | 132.987.559.855,90 |

Selisih nilai Saldo Akhir Kas dengan nilai SiLPA adalah sebesar Rp237.000,00 yang merupakan Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp237.000 yang merupakan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 oleh RSUD Kota Bukittinggi sebesar Rp243.000,00 dan keterlanjuran pembayaran potongan gaji untuk Taspen sebesar Rp6.000,00

| 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | Tahun 2022 (Rp) | Tahun 2021 (Rp) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2.033.022.032.295,63 | 2.040.816.158.974,56 |

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif kesalahan perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir. Saldo awal ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.033.022.032.295,63. Berikut rincian penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

Tabel 5.6.1
Laporan Perubahan Ekuitas

| URAIAN | 2021 | 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| EKUITAS AWAL | 2.040.816.158.974,56 | 1.687.944.342.619,61 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (15.075.012.311,53) | 342.032.863.452,96 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: | | |
| Koreksi Ekuitas | 7.280.885.632,60 | 10.838.952.901,99 |
| EKUITAS AKHIR | 2.033.022.032.295,63 | 2.040.816.158.974,56 |

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai yang terdapat pada Ekuitas awal merupakan nilai Ekuitas pada Neraca LKPD Tahun 2021 yaitu sebesar Rp2.040.816.158.974,56;
2. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Kejadian Luar Biasa. Surplus/defisit Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar (15.075.012.311,53);
3. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.033.022.032.295,63;
4. Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengoreksi Ekuitas adalah sebesar Rp7.280.885.632,60 sebagai penambah/pengurang Ekuitas pada Tahun 2022.

BAB VI INFORMASI LAINNYA

6.1. Aset (Tanah) dalam Penelusuran

Pada Tahun 2013, di Buku Inventaris Sekretariat Daerah terdapat beberapa Aset Tanah yang diragukan keberadaannya sehingga Aset tersebut memerlukan penelusuran. Untuk proses lebih lanjut, karena Tanah tersebut tidak digunakan untuk penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, maka aset tersebut di pindahkan pencatatannya ke Pengelola pada Aset Lain-lain berupa 9 (sembilan) bidang tanah yang belum diketahui lokasi fisiknya. Tanah tersebut telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Bukittinggi dalam jangka waktu yang cukup lama dan hingga saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya untuk menelusuri keberadaan fisik tanah tersebut namun belum menemui titik terangnya. Rincian aset tanah yang masih dalam penelusuran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.1.1
Daftar Aset Tanah yang masih dalam Penelusuran**

| No | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak / Alamat | Asal usul | Nilai | Keterangan |
|--------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Tanah Untuk Jalan | | | | | 187.900.000,00 | Lokasi tidak diketahui |
| 2 | Tanah kosong | 715 | 1952 | Pinang Sabatang Kel Bukit Apit | Eks Jepang | 14.300.000,00 | Longsor masuk ngarai |
| 3 | Tanah kosong | 4.740.00 | 1952 | Pinang Sabatang Kel Bukit Apit | Pembelian | 127.980.000,00 | Longsor masuk ngarai |
| 4 | Tanah kosong | 430 | 1956 | Campago Guguk Bulek | Pembelian | 20.640.000,00 | Tidak ditemukan |
| 5 | Tanah kosong | 28.062.00 | 1945 | Ngarai Bawah | Eks Jepang | 31.963.000,00 | Dikuasai masyarakat. proses tambahan ganti rugi tidak selesai |
| 6 | Tanah kosong | 18.866.00 | 0 | Ateh Birugo Kelurahan Birugo | Pembelian | 394.639.000,00 | Dikuasai masyarakat |
| 7 | Tanah kosong | 5.642.00 | 1956 | Bukit Campago Kel Campago Guguk Bulek | | 1.547.014.000,00 | Tidak ditemukan |
| 8 | Tanah kosong | 600 | 1956 | Campago Guguk Bulek | Pembelian | 361.088.000,00 | Dirjen Pemasyarakatan II |
| 9 | Tanah kosong | 4.027.00 | 1956 | Bukit Campago Kel Campago GB | Eks Jepang | 198.095.000,00 | Tidak ditemukan |
| TOTAL | | 63.082.00 | | | | 2.883.619.000,00 | |

6.2. Kewajiban Kontingensi

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan koreksi pencatatan Kewajiban Jangka Pendek-Bagian Lancar Utang Jangka Pendek berupa Kredit Inpres Pasar (KIP) ke Kewajiban Kontingensi.

Koreksi tersebut dilakukan karena dalam konsultasi, koordinasi dan penelusuran kewajiban tersebut ke pemerintah pusat, pihak pemerintah pusat mengaku tidak memiliki piutang tersebut ke pemerintah Kota Bukittinggi, Maka pada tahun 2022 ini Pemerintah Kota Bukittinggi tidak lagi mencatatnya dalam komponen Neraca Tahun 2022 namun mengungkapkan dengan memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp999.500.000,00. Selama tahun 2022 tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan sehingga nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 tetap sebesar Rp999.500.000,00.

Utang Kredit Inpres Pasar (KIP) pada Kota Bukittinggi sampai saat ini belum jelas status kepemilikannya walaupun telah beberapa kali dikonfirmasi baik lisan maupun tulisan ke pihak Departemen Keuangan Republik Indonesia maupun Kementerian Keuangan RI dan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Jakarta.

Melalui konfirmasi tulisan langsung di Departemen Keuangan RI maupun via telepon dengan pihak Subdit Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Pemko Bukittinggi mendapatkan informasi bahwa angsuran KIP ini hanya menjadi Penerimaan Lain-lain Negara.

- 1) Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya :
 - a. Menghadiri undangan Sekretaris Dirjen Keuangan Daerah atas nama Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI. Undangan tersebut ditujukan selain kepada Pemko Bukittinggi, juga kepada pihak-pihak terkait Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, dengan agenda Pembahasan permasalahan Hutang Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari Kredit Inpres Pasar (KIP). Undangan rapat tersebut merupakan respon positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas Surat Walikota Nomor 970.1372/DPKAD.05/XII-2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Informasi mengenai Kredit Inpres Pasar (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi. Pada notulen rapat tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh pihak Pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya mengumpulkan dokumen perjanjian, bukti setor, surat tagihan dan menyampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan

Direktur Sistem Manajemen Investasi. Selanjutnya pihak-pihak tersebut akan menindaklanjutinya;

- b. Dalam rangka menindaklanjuti rapat tersebut, pada tanggal 13 Desember 2013 Pemko Bukittinggi telah mengirimkan kembali surat konfirmasi data dan status utang Kredit Inpres Pasar Sistem (KIP) Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 970.1970/DPKAD.05/XII-2013 kepada Dirjen Keuangan Daerah RI Kementerian Dalam Negeri. Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta jadwal rapat/diskusi langsung pada tanggal 19 Desember 2013. Beberapa Staf Pemko Bukittinggi telah melakukan rapat/diskusi sesuai permohonan agenda tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat di Kementerian Keuangan RI

- a) Dirjen Perbendaharaan dan Pemerintah Kota Bukittinggi sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang KIP. Pihak SMI pun sangat berharap mereka mampu membantu Pemko Bukittinggi dalam menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang telah disampaikan kepada mereka;
- b) Pemko Bukittinggi diharapkan bisa mendapatkan dan mencari dokumen yang menunjukkan tanggal mutasi kas daerah dari Bank Nagari ke pihak BRI sebagai bank penerusan pembayaran angsuran sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan pembayaran terakhir tanggal 28 Desember 2006, baik berupa rekening koran maupun keterangan konfirmasi dari pihak Bank Nagari dan BRI Cabang Bukittinggi.

2. Rapat di Kementerian Dalam Negeri RI

- a) Dirjen Keuangan Daerah (DKD) sangat mengapresiasi upaya yang telah dan tengah dilakukan demi jelasnya status hutang. Pihak DKD pun berharap pihak Dirjen Perbendaharaan akan mampu mengungkap data dan status dengan menelusuri data dan informasi Kredit Inpres Pasar (KIP) ini dengan petunjuk dokumen yang disampaikan Pemko Bukittinggi;
- b) Pihak DKD juga menyarankan agar Pemko Bukittinggi tetap memegang perjanjian awal dengan pihak BRI dan jika keuangan daerah memungkinkan saldo hutang KIP yang ada tersebut diangsur saja sembari menunggu kejelasan data dan status dari Kementerian Keuangan RI. Pemko Bukittinggi menanggapi bahwa demi efisiensi dan efektif serta tepat sarannya pengeluaran kas daerah. Pemko

Bukittinggi bertekad menunda pembayaran sampai mendapatkan data dan status yang jelas mengenai hutang Kredit Inpres Pasar (KIP) dari pemerintah pusat;

- c) Pihak DKD pun dalam rapat telah memohon maaf atas kekurangan informasi dan data yang dimiliki oleh DKD sekaitan dengan Kredit Inpres Pasar Pemko Bukittinggi, antara lain disebabkan karena perpindahan kantor yang sering, struktur organisasi kementerian yang telah berganti serta mutasi SDM yang cukup tinggi.

- 2) Pada tahun 2019 atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan rekonsiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Bukittinggi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 yang menyatakan bahwa utang KIP Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp999.500.00,00 sebagaimana yang tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel Tabel. 6.1.2
Daftar Rincian Utang Kredit Inpres Pasar (KIP)

| No | Nomor Perjanjian | Tanggal Perjanjian | Uraian Kredit Pasar | Realisasi Kredit (Rp) | Pelunasan S.d. Desember 2007 (Rp) | Tunggakan (Rp) |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5-6) |
| 1 | 15/1/Kep/GBI | 21 Maret 1984 | Pasar Banto TA 1982/1983 | 325.000.000,00 | 59.500.000,00 | 265.500.000,00 |
| 2 | 15/1/Kep/GBI | 21 Maret 1984 | Pasar Aur Tajungrang TA 1982/1983 | 275.000.000,00 | 27.500.000,00 | 247.500.000,00 |
| 3 | 15/1/Kep/GBI | 21 Maret 1984 | Pasar Atas TA 1982 | 460.000.000,00 | - | 460.000.000,00 |
| 4 | 16/4/Kep/GBI | 29 Maret 1986 | Pasar Aur Kuning TA 1983/1984 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | - |
| 5 | 16/4/Kep/GBI | 29 Maret 1986 | Pasar Bawah TA 1983/1984 | 285.000.000,00 | 258.500.000,00 | 26.500.000,00 |
| Total | | | | 1.645.000.000,00 | 645.500.000,00 | 999.500.000,00 |

- 3) Dalam masa audit Laporan Keuangan Tahun 2021 Pemko Bukittinggi telah kembali menyurati Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI untuk meminta konfirmasi mengenai status utang ini, dan telah dilakukan komunikasi telepon dengan petugas yang terkait. Dalam hasil komunikasi tersebut pihak Direktorat Sistem Manajemen Investasi akan berupaya menelusuri dan menentukan status utang ini dan akan mengikuti prosedur untuk

proses pemutihan jika memungkinkan nantinya. Sampai sekarang status masih menunggu kabar selanjutnya dari Kementerian Keuangan.

- 4) Untuk tahun 2022 belum ada peluang atau perkembangan yang berarti untuk utang ini, dan besar harapan Pemko Bukittinggi agar ada rekomendasi untuk penghapusan utang tersebut.

6.3. Kebijakan Pengelolaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 Untuk Pemulihan Ekonomi, Perlindungan Sosial dan Pengendalian Inflasi Pasca Pandemi Covid-19

6.3.1. Pergeseran dan Perubahan APBD 2022

Selama tahun 2022 tidak ada amanat pemerintah pusat ataupun kebutuhan daerah untuk mengadakan penyesuaian (refocussing) anggaran terkait kebutuhan anggaran untuk Pandemi Covid-19 beserta akibatnya. Aktivitas koreksi dan penyesuaian anggaran hanya pergeseran APBD dan perubahan APBD, pergeseran tersebut adalah 3 (tiga) kali sebelum perubahan dan 1 (satu) kali pergeseran pasca perubahan APBD.

6.3.2. Program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi

6.3.2.1. Program Pemerintah Pusat

Penanggulangan pandemi Covid-19 tak terlepas dari upaya pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, selama pandemi corona tersebut berlangsung, DPR RI bersama pemerintah menganggarkan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang salah satunya menasar perlindungan sosial bagi masyarakat.

Pandemi Covid-19 tak hanya menyisakan dampak kesehatan bagi rakyat Indonesia dan warga dunia. Namun juga memberikan dampak terhadap permasalahan sosial dan kelesuan ekonomi nasional. Tapi berkat Program PC-PEN yang fokus kepada dampakdampak tersebut, permasalahan dapat diatasi.

Berkaca pada PC-PEN tahun 2021, dinilai program tersebut terbukti efektif dan responsif. Tak hanya itu program PC-PEN tahun lalu memang terbukti mampu mengantisipasi dampak sosial dan kesehatan, sehingga dapat tetap mengakselerasi pemulihan ekonomi.

Momentum berlanjutnya pemulihan di tahun 2021 menjadi modal yang kuat bagi Walikota Bukittinggi untuk mengimplementasikan visi dan misi kerakyatan dan melanjutkan kebijakan pemerintah pusat di tahun 2022.

PC-PEN pada program perlindungan sosial bersama pemulihan ekonomi dianggap mampu menekan tingkat kemiskinan salah satunya melalui beberapa program. Itulah kenapa Pemerintah Kota Bukittinggi mendorong agar perlindungan sosial pada PC-PEN juga harus fokus untuk mengakselerasi pemulihan melalui berbagai program penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan.

Sektor perlindungan sosial tetap menjadi perhatian utama masyarakat luas. Tak hanya itu, pemulihan ekonomi masyarakat juga harus memperhatikan faktor sosial masyarakat yang ada.

Pemerintah diketahui tetap melanjutkan program perlindungan sosial. Program yang diutamakan merupakan lanjutan dari PEN tahuntahun sebelumnya, seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Alokasi anggaran itu untuk program bantuan sosial (bansos) sebagai penyangga apabila terjadi kembali pembatasan kegiatan masyarakat.

Program pemerintah pusat tersebut diejawantahkan dalam APBD daerah, yang bersumber dananya dari Dana Transfer Umum untuk pemulihan ekonomi dianggarkan sebesar Rp110.412.845.442,00 sebesar Rp94.823.912.006,00 yang terdiri dari:

- a. Program Perlindungan Sosial dianggarkan sebesar Rp45.893.253.147,00 terealisasi sebesar Rp42.121.812.057,00 dengan rincian sebagaimana daftar berikut ini:

Tabel 6.1.2.1. 1. Daftar Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang Diperuntukkan untuk Program Perlindungan Sosial

| No. | Perlindungan Sosial | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | Keterangan |
|---------------------|---|------------------------|------------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DINAS SOSIAL | | | | | |
| 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 33.305.500 | 31.935.500 | 22.337.500 | Perlinsos |
| 2 | Penyediaan Makanan | 76.850.000 | 100.000.000 | 40.171.200 | Perlinsos |
| 3 | Penyediaan Permakanan | 114.590.000 | 106.730.000 | 84.057.500 | Perlinsos |
| 4 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 120.727.750 | 117.067.750 | 96.795.400 | Perlinsos |
| 5 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 58.000.000 | 54.000.000 | 14.225.750 | Perlinsos |
| 6 | Pemberian Layanan Rujukan | 142.981.910 | 136.729.992 | 111.886.897 | Perlinsos |
| 7 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 167.972.610 | 262.580.492 | 245.279.583 | Perlinsos |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 8 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 237.697.700 | 237.657.500 | 230.067.500 | Perlinsos |
| 9 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 261.146.500 | 210.046.500 | 191.996.899 | Perlinsos |
| 10 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 305.087.620 | 311.323.784 | 226.060.330 | Perlinsos |
| 11 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 768.084.500 | 822.649.500 | 796.692.198 | Perlinsos |
| 12 | Pemberian Layanan Kedaruratan | 129.664.000 | 122.284.000 | 87.268.847 | Perlinsos |
| 13 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 544.070.000 | 637.426.250 | 574.370.545 | Perlinsos |
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | 15.488.949.000 | 15.903.269.000 | 14.336.935.846 | Perlinsos Lainnya |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | |
| 1 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 111.857.800 | 118.777.800 | 117.095.990 | Perlinsos Lainnya |
| 2 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 845.504.840 | 1.008.973.646 | 1.008.784.137 | Perlinsos Lainnya |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | |
| 1 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 143.853.400 | 138.028.400 | 110.629.450 | Perlinsos Lainnya |
| 2 | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 386.572.000 | 385.079.500 | 341.301.400 | Perlinsos Lainnya |
| 3 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 162.611.250 | 154.858.750 | 146.673.790 | Perlinsos Lainnya |
| 4 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 915.656.000 | 754.561.000 | 741.506.750 | Perlinsos Lainnya |
| 5 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 1.129.463.500 | 1.927.640.000 | 1.516.712.704 | Perlinsos Lainnya |
| 6 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 9.502.410.396 | 9.034.220.106 | 8.561.570.814 | Perlinsos Lainnya |
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 4.586.646.450 | 3.334.166.374 | 3.253.131.375 | Perlinsos Lainnya |
| 2 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 6.935.607.020 | 6.992.680.871 | 6.512.970.203 | Perlinsos Lainnya |
| DINAS KEBAKARAN | | | | | |
| 1 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.862.956.200 | 2.007.360.278 | 1.789.769.101 | Perlinsos Lainnya |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | | | | | |
| 1 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 243.301.600 | 285.356.600 | 283.933.094 | Perlinsos Lainnya |
| 2 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 752.039.650 | 697.849.554 | 679.587.254 | Perlinsos Lainnya |
| DINAS SOSIAL | | | | | |
| 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 33.305.500 | 31.935.500 | 22.337.500 | Perlinsos |
| 2 | Penyediaan Makanan | 76.850.000 | 100.000.000 | 40.171.200 | Perlinsos |
| 3 | Penyediaan Perumahan | 114.590.000 | 106.730.000 | 84.057.500 | Perlinsos |
| JUMLAH (1) | | 46.027.607.196 | 45.893.253.147 | 42.121.812.057 | |

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dianggarkan sebesar Rp64.519.592.295,00 yang terealisasi sebesar Rp52.702.099.949,00 yang rinciannya sebagaimana daftar di bawah ini:

Tabel 6.1.2.1.2 Daftar Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang Diperuntukkan untuk Program Pemberdayaan Ekonomi

| No. | Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Realisasi | Keterangan |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN | | | | | |
| 1 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 7.127.889.935 | 5.582.779.762 | 4.277.386.187 | Sarana PED |
| 2 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | 5.925.148.500 | 5.962.824.366 | 5.271.063.106 | |
| 3 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 189.976.000 | 128.656.000 | 121.142.185 | |

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------|------------------|------------------|--|
| 4 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 72.750.000 | 71.150.000 | 69.895.315 | |
| 5 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 5.692.313.510 | 4.084.168.046,00 | 3.978.522.266,00 | |
| 6 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1.084.718.950 | 1.402.733.232,00 | 1.361.528.147,00 | |
| 7 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 1.234.761.394 | 1.237.052.636 | 1.195.907.185 | |
| 8 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 10.793.000 | 6.953.000 | 4.758.300 | |
| 9 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 12.764.000 | 19.311.268 | 15.796.268 | |
| 10 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 21.788.000 | 30.788.000 | 23.512.500 | |
| 11 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | 500.491.000 | 487.541.000 | 415.011.982 | |
| DPMPTSPPTK | | | | | |
| 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 433.060.900 | 652.160.100 | 522.466.461 | Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik |
| 2 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 272.600.000 | 238.176.000 | 217.016.605 | |
| 3 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | 118.609.000 | 116.229.000 | 112.796.490 | |
| 4 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 67.265.000 | 67.265.000 | 66.095.800 | |
| 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 53.005.170 | 48.607.451 | 32.322.000 | |
| 6 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 52.035.000 | 17.864.000 | 16.993.800 | |
| 7 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 140.783.804 | 102.451.804 | 91.188.421 | |
| 8 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 340.670.516 | 549.218.916 | 533.775.830 | |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 9 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 444.517.000 | 782.142.000 | 626.190.192 | |
| 10 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas | 59.160.800 | 54.111.800 | 44.357.100 | |
| 11 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 803.924.890 | 908.958.668 | 836.002.227 | |
| DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | 142.864.550 | 140.929.550 | 118.940.850 | |
| 2 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 438.485.000 | 396.430.000 | 275.789.200 | |
| 3 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 3.469.451.850 | 1.111.232.827 | 979.267.642 | |
| 4 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | 298.442.500 | 0 | 0 | |
| 5 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 675.000.000 | 1.066.450.000 | 945.112.339 | |
| 6 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 3.281.291.642 | 3.241.042.706 | 3.073.780.941 | |
| 7 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 3.630.000.200 | 3.191.538.180 | 2.566.544.442 | |
| 8 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 2.744.567.000 | 3.314.615.525 | 3.133.672.257 | |
| 9 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 229.729.000 | 198.422.950 | 155.211.400 | Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik |
| 10 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 3.970.098.345 | 3.314.615.525 | 3.133.672.257 | |
| 11 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 347.029.200 | 387.322.750 | 311.630.800 | |
| 12 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 229.729.000 | 198.422.950 | 155.211.400 | |
| 13 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 584.091.000 | 440.641.000 | 278.630.280 | |

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 14 | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | 793.530.000 | 950.850.000 | 941.549.500 | |
| 15 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 914.900.430 | 2.079.840.430 | 1.822.440.038 | |
| 16 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 346.998.500 | 337.298.500 | 219.632.150 | |
| DINAS PERTANIAN | | | | | |
| 1 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 505.911.500 | 603.552.500 | 556.864.958 | |
| 2 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 111.560.000 | 107.760.000 | 5.102.250 | |
| 3 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 43.825.000 | 42.650.000 | 40.995.000 | |
| 4 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 217.899.000 | 296.649.000 | 289.308.779 | |
| 6 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 587.001.000 | 891.150.412 | 841.094.337 | |
| 8 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 218.672.340 | 327.952.340 | 305.709.209 | |
| 9 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | 98.848.000 | 95.038.000 | 86.599.200 | |
| 10 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 774.103.400 | 1.015.423.400 | 991.521.825 | |
| 11 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 370.609.870 | 370.308.504 | 308.813.658 | |
| 12 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil | 118.829.300 | 115.109.000 | 84.305.800 | |
| 13 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 25.329.000 | 22.769.000 | 20.012.702 | |
| 14 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 67.586.170 | 70.429.804 | 68.745.604 | Subsidi Pertanian |
| 15 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 250.252.944 | 259.934.690 | 244.492.579 | |
| 16 | Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 239.926.890 | 209.229.657 | 202.361.757 | |
| 17 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 23.648.000 | 22.473.000 | 21.910.400 | |
| 18 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 107.740.370 | 109.134.004 | 103.009.904 | |
| 19 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 231.727.370 | 237.676.654 | 177.541.604 | |

| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 22.218.942.000 | 6.060.278.680 | 1.304.189.053 | Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | 405.855.880 | 440.448.366 | 355.773.222 | |
| 3 | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | 140.323.570 | 244.954.604 | 199.532.137 | |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 29.475.000 | 40.723.000 | 31.006.520 | |
| 5. | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 4.880.620.000 | 4.080.523.000 | 3.798.099.204 | |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 5.913.178.160 | 3.052.412.330 | 2.649.522.627 | Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik |
| 2 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 146.008.130 | 137.267.830 | 127.047.838 | |
| 3 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 109.357.000 | 152.447.000 | 135.928.593 | |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | | | | | |
| 1 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 572.240.100 | 678.049.420 | 662.087.961 | Pemberdayaan UMKM lainnya/PED Sarpras Layanan Publik |
| 2 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 1.168.332.010 | 1.168.106.546 | 1.145.709.367 | |
| | JUMLAH (2) | 86.295.766.534 | 64.519.592.295 | 52.702.099.949 | |

Dalam proses Perubahan APBD Tahun 2022, terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Terbitnya PMK tersebut adalah untuk mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial. Maka, diproseslah di perubahan APBD anggaran belanja tersebut sebesar

Rp2.236.268.913,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.672.268.913,00. Daftar anggaran dan realisasi belanja tersebut sebagai berikut:

**Tabel 6.1.2.1.3. LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL
(PMK 134/PMK/.07/2022)
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2022**

| No. | Uraian | Jenis Akun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | | |
|------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | | | Jumlah | Sumber Pendanaan | | Jumlah | % |
| | | | | DAU | DBH | | |
| (a) | (b) | (c) | (f)=(d)+(e) | (h) | (i) | (j)=(h)+(i) | (k)=(j)/(f) |
| I | BANTUAN SOSIAL | | | | | | |
| | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Dinas Sosial) | Belanja Subsidi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | 1.000.000.000 | 100 |
| | Subtotal BANTUAN SOSIAL | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | - | 1.000.000.000 | 100 |
| II | PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA | | | | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas PMPTSP) | Belanja Barang dan Jasa | 336.268.913 | 206.671.340 | 129.597.573 | 336.268.913 | 100 |
| | Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA | | 336.268.913 | 206.671.340 | 129.597.573 | 336.268.913 | 100 |
| III | SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI | | | | | | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan) | Belanja Subsidi | 400.000.000 | 336.000.000 | - | 336.000.000 | 84,00 |
| | Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI | | 400.000.000 | 336.000.000 | - | 336.000.000 | 84,00 |
| IV | PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA | | | | | | |
| | Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan (Dinas Pertanian) | Belanja Subsidi | 500.000.000 | - | - | - | 0,00 |
| | Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA | | 500.000.000 | - | - | - | 0,00 |
| | JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA. 2022 | | 2.236.268.913 | 1.206.671.340 | 129.597.573 | 1.672.268.913 | 74,78 |

6.3.3. Program APBD - Tabungan Utsman

Tabungan Utsman Adalah program Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membantu masyarakat pasca pandemi covid-19 dalam mendapatkan modal dari perbankan dengan margin/

bunga yang ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Tujuan Tabungan Utsman adalah untuk meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro.

Target masyarakat yang dibantu adalah pelaku usaha yang tidak memiliki agunan untuk mendapatkan modal dari perbankan serta untuk mengatasi agar pelaku usaha mikro khususnya di Kota Bukittinggi tidak terjerat oleh rentenir. Syarat yang harus dipenuhi nasabah BPRS untuk mendapatkan subsidi margin ini adalah :

- a. Mempunyai usaha tetap dan berada di Kota Bukittinggi
- b. Identitas diri (KTP) Kota Bukittinggi
- c. Tidak termasuk dalam kualitas kredit dalam perhatian dan/atau macet (BI Checking)

Sesuai dengan salah satu *Visi Misi* Pemerintah Bukittinggi untuk menjadikan Kota Bukittinggi “**HEBAT**” dalam sektor ekonomi kerakyatan, bertolak dari kondisi selama ini para pelaku ekonomi skala UMKM selama ini yang kurang diperhatikan, kurang diberi peluang dan tempat yang sepatutnya, sehingga pemerintah kota seyogyanya dapat memberikan perubahan baik bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha apalagi pasca Pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan sendi ekonomi masyarakat.

Ini merupakan inisiasi dari Walikota Bukittinggi H. Erman Safar, SH, dengan sistem kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan BPRS Jam Gadang (Perseroda), namun dalam penyiapannya juga melakukan studi banding dan koordinasi ke daerah lain.

Program ini dapat dilaksanakan dengan menyediakan Belanja Subsidi untuk pembayaran margin/ bunga pinjaman oleh pelaku usaha dimana margin/ bunga yang dibantu Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar 19%/ tahun, dimana Belanja Subsidi untuk pembayaran margin/ bunga dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada APBD Kota Bukittinggi pada pos Belanja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Pada Tahun 2022 Dana awal yang disediakan untuk pembayaran subsidi margin ini adalah sebesar Rp. 1.575.000.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada APBD Kota Bukittinggi di Tahun 2022 pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Masyarakat menyambut program ini dengan antusias yang besar dimana pada bulan Maret tahun 2022 tersebut terealisasi pinjaman kepada masyarakat sebesar Rp. 2.535.500.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah).

Oleh karena antusias, minat masyarakat serta daya manfaat program yang tinggi tersebut, maka masyarakat maka Tabungan Utsman pada Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022

dana anggarannya ditambah Rp1.000.000.000,00 sehingga total jumlah anggaran tahun 2022 menjadi Rp2.575.000.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)

Dana bantuan yang sudah tersalurkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp12.239.500.000 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) dengan subsidi margin yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp2.574.989.266 (dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah) atau terealisasi sebesar 99,99%.

Penerima manfaat program bantuan subsidi margin Tabungan Utsman ini di tahun 2022 adalah sebanyak 1.956 nasabah pada semua kecamatan di Kota Bukittinggi dengan rincian Kecamatan Guguk Panjang 820 orang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 764 orang dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 363 orang.

Sistem pengembalian adalah dengan sistem menabung dan dijemput oleh petugas BPRS Jam Gadang setiap hari atau setiap minggu sesuai dengan akad perjanjian antara BPRS Jam Gadang dengan nasabah, Untuk pengembalian nasabah tidak dikenakan biaya apapun sebagaimana saat melakukan proses peminjaman semua biaya administrasi juga tidak dikenakan kepada nasabah.

Pada tahun 2023 anggaran yang disediakan pada APBD Kota Bukittinggi untuk Program Tabungan Utsman ini adalah sebesar Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) pada SOTK baru yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

6.3.4. Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK)

6.3.4.1. Pendapatan BKK dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Kota Bukittinggi

Penerimaan pendapatan tersebut dicatat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp400.000.000 tanggal 9 Agustus 2023. Pendapatan tersebut diperuntukkan untuk giat pariwisata Kota Bukittinggi yakni objek wisata di Kota Bukittinggi.

6.3.4.2. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK)

Untuk menjalankan Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama Pasal 12 ayat (1) POINT “A” yang menyatakan bahwa salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Pendidikan, serta dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kota Bukittinggi, yakni Hebat dalam Sektor Pendidikan, Pemerintah Kota Bukittinggi merasa perlu adanya jaminan pelaksanaan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi pada APBD Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus (BKK) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemko Bukittinggi memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus berada di tangan pemerintah provinsi.

Wujud konkret BKK ini berupa pembebasan iuran komite sekolah (dahulu sering disebut SPP) kepada murid SMA, SMK dan SLB Negeri/Swasta yang memiliki KTP Kota Bukittinggi atau terdaftar dalam Kartu Keluarga warga Kota Bukittinggi dan bersekolah pada SMA, SMK dan SLB Negeri/Swasta yang berada/domisili di Kota Bukittinggi. Besaran nominal anggaran pemberian BKK dari Pemko Bukittinggi kepada Pemprov Sumatera Barat secara terperinci untuk masing-masing sekolah telah dituangkan dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022.

Pelaksanaan BKK ini selanjutnya telah dikemas dalam sebuah kerjasama daerah antara Pemprov Sumatera Barat dan Pemko Bukittinggi, yakni dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur dan Walikota serta Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi.

Kebijakan untuk pembebasan biaya iuran komite (uang SPP) bagi seluruh pelajar SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta yang ber KTP dan Kartu Keluarga Kota Bukittinggi telah disosialisasikan kepada seluruh siswa, termasuk kepada pengelola sekolah SMA, SMK dan SLB swasta yang ada di Kota Bukittinggi.

BKK kepada Pemerintah Provinsi yang diperuntukkan untuk disalurkan kepada sekolah negeri direalisasikan 2 (dua) kali yaitu:

1. Pada tanggal 30 Juni 2022 dengan SP2D Nomor: 0966/LS/2022 yang dibebankan kepada Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp6.419.250.000,00.
2. Pada tanggal 2 Desember 2022 dengan SP2D Nomor: 2926/LS/2022 yang dibebankan kepada Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp2.100.750.000,00.

Sehingga, jumlah realisasi keseluruhan adalah Rp8.520.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp8.766.666.667,00 atau sebesar 97,19%.

Sampai dengan terealisasinya Belanja Bantuan Keuangan untuk sekolah negeri tahap pertama, sama sekali belum ada realisasi bantuan bagi SMA, SMK dan SLB swasta di Kota Bukittinggi, sementara pihak sekolah telah menghentikan pungutan iuran komite (SPP) dari para murid. Kondisi ini dirasakan sangat berat oleh SMA, SMK dan SLB Swasta, mengingat belanja rutin untuk operasional sekolah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kondisi tersebut pihak sekolah swasta meminta Pemko Bukittinggi segera menanggulangi permasalahan yang ada, atau mereka kembali akan memungut iuran komite (SPP) dari para murid.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dengan ditolaknya penyaluran BKK bagi SMA, SMK dan SLB swasta oleh Pemprov Sumatera Barat, sementara disisi lain anggaran BKK ini terkait langsung dengan penyelenggaraan urusan pemerintah wajib yaitu pendidikan, diambil kebijakan dengan alternatif penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui mekanisme keperluan mendesak untuk bulan Januari s.d. Juni 2022 (satu semester). Sedangkan untuk semester berikutnya direncanakan dianggarkan melalui Belanja Hibah pada APBD Perubahan Tahun 2022.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 CaLK

| NO | PENERIMA BANTUAN | ALAMAT | JUMLAH PADA APBD TA 2022 (Rp) | REALISASI/SP2D | | | SPJ | SISA DANA YANG DISETORKAN KE KAS DAERAH (Rp) | SETORAN SISA DANA HIBAH | | | | KETERANGAN |
|----|----------------------|---|-------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | HIBAH | TANGGAL | NOMOR | JUMLAH (Rp) | | | NO. REKENING PENYETORAN | TANGGAL PENYETORAN | NOMOR BUKTI SETORAN | NILAI SETORAN (Rp) | |
| 1 | SLB Al Azhar | Jl. TDR Parak Kongsi Kel.Bukit Apit Puhun Kec.Guguk Panjang, Bukittinggi | 118.600.000 | 07/11/2022 | 2562/LS/2022 | 118.600.000 | 118.600.000 | | - | - | - | - | laporan telah diserahkan |
| 2 | SLB Al Ikhlas | Jl. Paninjauan | 125.400.000 | 14/11/2022 | 2661/LS/2022 | 125.400.000 | 125.400.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 3 | SLB Autisme YPPA | Jl. Pintu Kabun Jirek Gg. Mawar | 88.800.000 | 23/11/2022 | 2806/LS/2022 | 88.800.000 | 88.800.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 4 | SLB Karakter Mandiri | Jl. Abdul Manan Campago Ipuh | 99.000.000 | 07/11/2022 | 2560/LS/2022 | 99.000.000 | 99.000.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 5 | SLB Permata Bunda | Jl. H.Burhan Birugo | 56.400.000 | 15/11/2022 | 2689/LS/2022 | 56.400.000 | 56.400.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 6 | SLB Restu Ibu | Jl. Kubu Tanjung No.90 Kubu Tanjung | 81.200.000 | 15/11/2022 | 2688/LS/2022 | 81.200.000 | 81.200.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 7 | SMAS Islam Al Ishlah | Jl. Mr Assaat No.52 B Banto Darano | 210.000.000 | 18/11/2022 | 2743/LS/2022 | 210.000.000 | 210.000.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 8 | SMAS Karya Bakti | Jl.Diponegoro No.8 | 165.800.000 | 10/11/2022 | 2611/LS/2022 | 165.800.000 | 165.800.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 9 | SMAS Pembangunan | Jl. Jend. Sudirman Asrama Kodim 0304 Agam | 295.680.000 | 14/11/2022 | 2660/LS/2022 | 295.680.000 | 293.160.000 | 2.520.000 | 0200.0101.00 276.1 | 06/01/20 23 | 003761 | 2.520.000 | laporan telah diserahkan |
| 10 | SMAS Psm Bukittinggi | Jl.Dr. A. Rivai No.17 Kelurahan Kayu Kubu Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 151.200.000 | 22/11/2022 | 2764/LS/2022 | 151.200.000 | 151.200.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 11 | SMAS Taruna Bangsa | Jl.Syech Jamil Djambek No.33 Kel. Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 84.200.000 | 18/11/2022 | 2736/LS/2022 | 84.200.000 | 84.200.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 12 | SMAS Xaverius | Jl.Bagindo Azis Chan Kel.Bukit Cangang Kayu Ramang | 303.400.000 | 11/11/2022 | 2614/LS/2022 | 303.400.000 | 303.400.000 | 69.048 | 0200.01.01.0 0276.1 | 31-Jan- 23 | 003789 | 69.048 | bunga bank |

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 CaLK

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------|--------|------------------|--------------------------|
| | | Kec,Guguk Panjang Kota Bukittinggi | | | | | | | | | | | |
| 13 | SMK Elektronika Indonesia Bukittinggi | Jl.Prof Hamka No.55 Pakan Kurai Bukittinggi | 60.800.000 | 11/11/2022 | 2613/LS/2022 | 60.800.000 | 58.400.000 | 2.400.000 | 0200.01.01.0 0201.9 | 04-Jan-23 | 003760 | 2.400.000 | laporan telah diserahkan |
| 14 | SMK Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi | Jl.Kesehatan No.20 Kel.Bukit Apit Puhun Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 268.000.000 | 07/11/2022 | 2563/LS/2022 | 268.000.000 | 268.000.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 15 | SMK Gajah Tongga | Jl.Umar Gafar No.4 Kelurahan Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 119.600.000 | 15/11/2022 | 2687/LS/2022 | 119.600.000 | 119.600.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 16 | SMK Gema Nusantara Bukittinggi | Jl.Birugo Bungo No.137 A Bukittinggi | 409.000.000 | 10/11/2022 | 2610/LS/2022 | 409.000.000 | 409.000.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 17 | SMK Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi | Jl.Kusuma Bhakti No.99 Bukittinggi | 147.400.000 | 11/11/2022 | 2634/LS/2022 | 147.400.000 | 146.200.000 | 1.200.000 | 0200.01.01.0 0201.9 | 05-Jan-23 | 003767 | 1.200.000 | laporan telah diserahkan |
| 18 | SMK Paramitha Bukittinggi | Jl.Veteran No.79 Jirek Bukittinggi | 63.800.000 | 23/11/2022 | 2805/LS/2022 | 51.800.000 | 51.800.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 19 | SMK Pembangunan Bukittinggi | Jl.Iskandar Tejda Kusuma Kel.Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 164.200.000 | 11/11/2022 | 2642/LS/2022 | 164.200.000 | 164.200.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 20 | SMK Pembina Bangsa | Jl.Syeck Jamil Jambek No.33 Kel.Pakan Kurai Kec.Guguk Panjang Bukittinggi | 357.000.000 | 22/11/2022 | 2759/LS/2022 | 357.000.000 | 357.000.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| 21 | SMK Teknologi Muhammadiyah | Jl.Prof Dr.Hamka Kel.Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 284.800.000 | 07/11/2022 | 2561/LS/2022 | 284.800.000 | 284.800.000 | | | | | | laporan telah diserahkan |
| | JUMLAH | | 3.654.280.000 | | | 3.642.280.000 | 3.636.160.000 | 6.189.048 | - | - | - | 6.189.048 | |

Beberapa dokumen dalam pelaksanaan BKK Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- a. MoU abatara Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Walikota se Sumatera Barat perihal Kerjasama Antar Daerah tanggal 06 September 2021;
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemko Bukittinggi dengan Pemprov Sumatera Barat tentang bantuan keuangan khusus bagi SMA, SMK dan SLB Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 No. 421/436/Disdikbud/III/2022 dan No. 120-014/PKS/GSB-2022 tanggal 17 Maret 2022.
- c. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
- d. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022;
- e. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-70-2022 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022;
- f. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-97-2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022;
- g. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-148-2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-54-2022 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Penerima BKK TA 2022;
- h. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 903/393/SKPD/BPKAD-2022 tanggal 15 April 2022 perihal BKK dari Kota Bukittinggi.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.4. INFORMASI DANA DAN ASET YANG BERSUMBER DARI NON APBD KOTA BUKITTINGGI

Pada tahun 2022 tidak terdapat dana yang bersumber dari selain APBD, namun terdapat penambahan aset tahun 2022 yang bersumber dari selain APBD yaitu sebesar Rp11.037.620.258,00.

6.4.1. Aset Hibah

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat hibah aset dari beberapa donator hibah kepada Pemerintah Kota Bukittinggi dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 6.2.1 Daftar Aset Non APBD

| NO | SKPD/PPKD YANG MENCATAT | INSTANSI PEMBERI | URAIAN | JUMLAH (RP) | STATUS NERACA |
|----|----------------------------------|---|--|--------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dinas Perhubungan | Kementerian Perhubungan | Area Traffic Control System (ATCS) (Berita Acara Serah Terima Hibah Pembangunan dan Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) Kota Bukittinggi tanggal 20 Oktober 2022) | 9.386.896.158,00 | Tercatat |
| 2 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Bank Nagari | 1 Unit Videotron | 843.365.600,00 | Tercatat |
| | | | 1 unit PC (Perjanjian) | 6.000.000,00 | Tercatat |
| | | | (Berita Acara Serah Terima Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Bentuk Videotron Nomor BN.028/BA/UM/09-2022, Nomor 02/BAST/BK.06/IX/2022 tanggal 16 September 2022) | | |
| 3 | Dinas Kesehatan | Hj. Asma | Tanah Bangunan Poskeskel (1 kavling tanah luas 100m2 (Berita Acara Serah Terima Aset Berupa Tanah dari Hj. Asma kepada Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 15 September 2022)). | 80.200.000,00 | Tercatat |
| 4 | BPBD | | Alat SAR | 220.594.000,00 | Tercatat |
| | | | Alat Komunikasi | 42.773.500,00 | Tercatat |
| | | | Alat Angkutan Darat Bermotor | 307.791.000,00 | Tercatat |
| | | | Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 150.000.000,00 | Tercatat |
| | | | Jumlah Tercatat | 11.037.620.258,00 | |
| 3 | PPKD | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Area Traffic Control System (ATCS). Peralatan Mesin (Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor: PL.02.04-Bb3-PJNW1-SB/1350 Nomor 03/BAST/BK.06/XII/2022 | 2.012.570.000,00 | Belum Tercatat |
| 6 | Dinas Kesehatan (RSUD) | BTN KC Padang | Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) berupa Bantuan Penghijauan Taman dan Area Terbuka Bermain Anak di RSUD Kota Bukittinggi oleh BTN KC Padang ke Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 13 Desember 2022. | 35.000.000,00 | Belum Tercatat |
| | | | Jumlah Belum Tercatat | 2.047.570.000,00 | |
| | | | Jumlah Semua Hibah Aset Tahun 2022 | 13.085.190.258,00 | |

6.5. Kebijakan Pembatasan/Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama Tahun 2022

Tahun 2022, tidak terdapat kebijakan PPKM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, karena Pandemi Covid-19 sudah dapat dikendalikan dengan tidak adanya kasus baru.

6.6. Informasi Sengketa Tanah untuk Pembangunan Gedung DPRD Kota Bukittinggi

Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki tanah yang berasal dari pengadaan tahun anggaran 2007 yang diperuntukan untuk Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-147-2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Tanah ini tercatat pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi selaku Pengguna Barang pada Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A) Kode Register 01.01.02.02.002.000002 seluas 5.528 m² beralamat di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Ganting, tanggal 18-06-2007, SU Nomor 12/MG/2007 tanggal 25-05-2007 atas nama Syafri. Pengurusan balik nama sertifikat setelah pembelian saat itu tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dikarenakan terjadi peristiwa pidana yang melanda pejabat Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2009 dan dilakukannya upaya pemblokiran oleh pihak Yayasan Fort De Kock yang diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.

Pada tanggal 27 Juli 2019 Pihak Yayasan Fort De Kock melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada :

- a) Syafri St Pangeran (Tergugat I)
- b) H. Arjulis Dt.Basa (Tergugat II)
- c) Muhammad Nur (Terggat III)
- d) Walikota Bukittinggi (Tergugat IV)
- e) Hj.Tessi Levino, SH (Tergugat V)

Proses hukum di pengadilan terus berjalan sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020, Walikota Bukittinggi mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Tahun 2022 Mahkamah Agung RI menetapkan Putusan Nomor 2108 K/PDT/2022, tanggal 28 Juli 2022 yang memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi. Pada tanggal 4 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi memanggil para pihak dalam rangka melakukan *aanmaning*. Pada tanggal 14 Oktober 2022 Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi menerbitkan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PN Bkt *jo* Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bkt, menjelaskan bahwa :

- a. Amar ke-5 hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Para Tergugat dan tidak termasuk Pemerintah Kota Bukittinggi selaku Tergugat IV.
- b. Amar ke-5 berupa “*Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan serta melanjutkan kembali seluruh Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 23 November 2005, di legalisasi oleh Hj. Tessi Levino, SH, Notaris di Bukittinggi dengan Nomor: 150/D/XI/2005 secara penuh dan tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku*“, telah diganti dengan penetapan secara limitatif berupa hanya eksekusi pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 1.243.800.000,- yang dihitung dari nilai jual harga tanah sesuai PPJB di atas sebesar Rp 225.000,- x 5528 M2, dan tidak ada kewajiban lain termasuk penyerahan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Gantiang, Luas 5.528 m².

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi sampai saat ini tidak menyerahkan aset berupa tanah beserta sertifikat kepada pihak Yayasan Fort De Kock. Dalam kelanjutannya, pihak Yayasan Fort De Kock telah melakukan okupasi atau penyerobotan lahan SHM Nomor 655/Kel. Manggis Gantiang, Luas 5.528 m² yang menjadi aset Pemerintah Kota Bukittinggi.

Langkah yang telah dilakukan dalam rangka upaya pengamanan barang milik daerah Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

Tabel 6.4.0.1 Langkah dan Upaya Pengamanan barang Milik Daerah yang Dilakukan

| Nama Instansi | Waktu | Kegiatan |
|---|------------------------------|--|
| a) BPKP Perwakilan Sumatera Barat | 29 November 2022 | BPKP tidak memberikan opini karena permasalahan terkait hukum (surat BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat No. PE.08.00/S-475/PW03/3/2023 tanggal 27 Februari 2023) |
| b) Komisi Pemberantasan Korupsi RI | 16 Februari 2023 | Pertemuan secara daring di BCC Kota Bukittinggi tentang ekspose kronologis dan proses hokum di pengadilan oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. |
| | 27 Februari s/d 1 Maret 2023 | Pertemuan di KPK RI Jakarta dalam rangka konsultasi dengan hasil : 1. Proses persertifikatan tanah agar segera terus dilanjutkan. 2. KPK akan memfasilitasi mediasi dengan para pihak. |
| c) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan | 14 Maret 2023 | Pertemuan di BPK Perwakilan Sumatera Barat dengan hasil : |

| | | |
|----------------|--|--|
| Sumatera Barat | | <ol style="list-style-type: none">1. Agar Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan informasi eimbang /press release kepada public terhadap putusan-putusan pengadilan dan langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi2. Agar permasalahan ini diinformasikan dalam Calk pada point informasi/penjelasan lain-lain. |
|----------------|--|--|

Ke depan, Pemerintah Kota Bukittinggi akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang disarankan oleh KPK dan BPK Perwakilan Sumatera Barat.

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi merupakan amanat dari paket peraturan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai kepada peraturan pemerintah dan peraturan menteri menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelola keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus mempertanggungjawabkan kepada publik (*stake holders*) mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu Pemerintah Daerah Otonom, dalam hal pengelolaan keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi setiap tahunnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah laporan keuangan berbasis akrual sebagai amanah dari paket Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini dalam hal pengelolaan keuangan.

LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disajikan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Sebagai bagian dari LKPD, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disajikan untuk memberikan informasi ataupun penjelasan, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dalam pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022, dalam rangka penungkapan penuh (*full disclosure*). Dengan demikian diharapkan para pembaca dan pengguna dapat memahami secara komprehensif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi ini secara bebas dari kesalahan penafsiran.

Laporan Keuangan ini juga dilampiri dengan daftar-daftar pendukung serta laporan keuangan BUMD PDAM Tirta Jam Gadang dan BPR Jam Gadang, yang mana keduanya

adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan juga fokus investasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

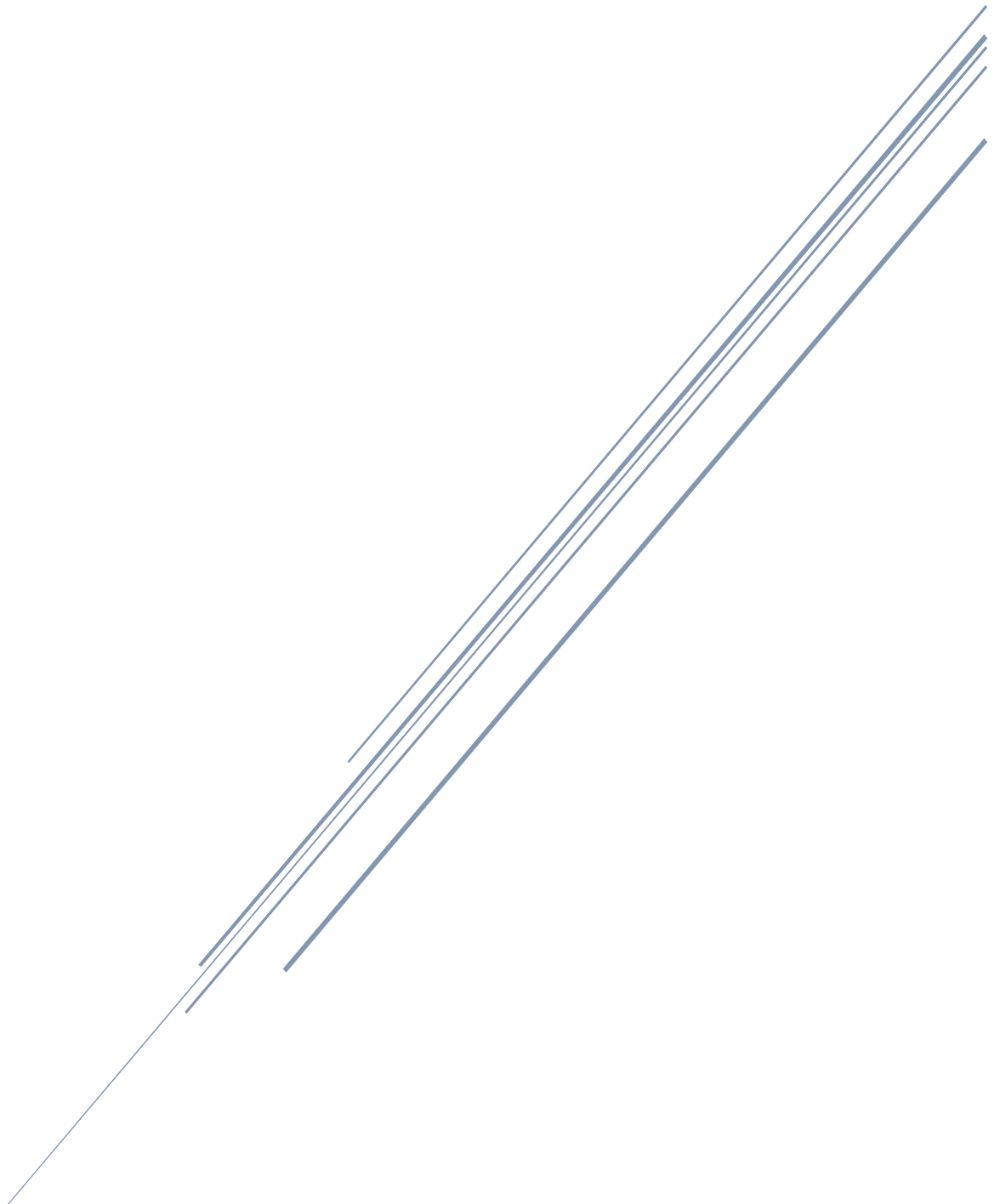
Sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan tersebut di atas, mudah-mudahan manfaatnya melebihi muatannya sehingga berdampak strategis untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang serta juga dapat dikembangkan menjadi sumber data penelitian ilmiah dan analisis keuangan.

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN CALK

Calk LKPD TA 2022



Tahun Anggaran
2022

adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan juga fokus investasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan tersebut di atas, mudah-mudahan manfaatnya melebihi muatannya sehingga berdampak strategis untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang serta juga dapat dikembangkan menjadi sumber data penelitian ilmiah dan analisis keuangan.

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR



PERUMDA AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

R. Panorama No. 3 Telp. (0752) 21125-35329 Fax. (0752) 35329 Bukittinggi 26166

Email : pdamhki@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BUDI SUHENDRA, S.T.
Alamat kantor : Jl. Panorama No.3, Bukittinggi
Alamat rumah : Jl. Jambak Dalam
Kelurahan Bukik Apik Puhun - Kecamatan Guguak Panjang
Kota Bukittinggi
Nomor Telp : (0752) 21125
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;
2. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern yang diterapkan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bukittinggi, 03 Januari 2023
DIREKTUR

METERAI TEMPEL
0321/00410-3519

BUDI SUHENDRA, S.T.

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
NERACA**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

| ASET | Cat | 2022 | 2021 |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Aset Lancar | | | |
| Kas dan Setara Kas | B.4,C.1 | 3.443.845.591 | 3.976.783.595 |
| Piutang Air dan Non Air | B.5,C.2 | 1.559.757.365 | 1.488.388.165 |
| Akumulasi Penyisihan Piutang | B.5,C.2 | (246.642.459) | (256.963.536) |
| Persediaan | B.6,C.3 | 817.286.320 | 833.176.700 |
| Piutang Pajak | | - | - |
| Biaya dibayar dimuka | B.7,C.4 | 150.000 | 18.333.300 |
| Sub Total Aset Lancar | | 5.574.396.817 | 6.059.718.223 |
| Aset Tidak Lancar | | | |
| Aset Tetap : | | | |
| Harga Perolehan | B.8,C.5 | 43.198.721.115 | 42.841.678.341 |
| Akumulasi Penyusutan | | (19.766.151.133) | (18.601.428.555) |
| Nilai Buku Aset Tetap | | 23.432.569.981 | 24.240.249.786 |
| - Aset Tidak Lancar Lainnya | C.6 | 1.309.261.000 | 1.309.261.000 |
| TOTAL ASET | | 30.316.227.799 | 31.609.229.009 |
| KEWAJIBAN dan EKUITAS | | | |
| KEWAJIBAN | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Utang Usaha | C.7 | - | 79.000.000 |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | C.8 | 1.943.328.658 | 1.005.949.744 |
| Utang Pajak | C.9 | 285.169.468 | 55.236.592 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | C.10 | 57.010.200 | 51.047.400 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | C.11 | 37.830.000 | 40.040.000 |
| Sub Total Kewajiban Jangka Pendek | | 2.323.338.326 | 1.231.273.736 |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Cadangan Dana | C.12 | 7.097.803.903 | 7.435.727.880 |
| Sub Total Kewajiban Jangka Panjang | | 7.097.803.903 | 7.435.727.880 |
| EKUITAS | | | |
| Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan | A.2, C.13 | 1.177.102.241 | 1.177.102.241 |
| Penyertaan Modal Pemda | A.2, C.14 | 16.496.904.508 | 16.496.904.508 |
| Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan | A.2, C.15 | 14.544.620.510 | 14.544.620.510 |
| Hibah | A.2, C.16 | 972.316.208 | 972.316.208 |
| Laba (Rugi) Ditahan | | (12.355.398.290) | (10.346.825.769) |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | | 59.540.392 | 98.109.695 |
| Sub Total Ekuitas | | 20.895.085.569 | 22.942.227.393 |
| TOTAL KEWAJIBAN dan EKUITAS | | 30.316.227.799 | 31.609.229.009 |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG
LAPORAN LABA (RUGI)**

Untuk Tahun yang Berakhir per 31 Desember 2022 dan 2021

| URAIAN | Cat | 2022 Rp | 2021 Rp |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Air | B.13, C17 | 11.243.997.300 | 11.307.359.209 |
| Pendapatan Non Air | B.13, C18 | 653.164.950 | 789.234.250 |
| Jumlah Pendapatan Usaha | | <u>11.897.162.250</u> | <u>12.096.593.450</u> |
| BEBAN OPERASIONAL | | | |
| Beban Operasional | B.13, C19 | 10.715.719.353 | 10.882.039.162 |
| Beban Penyusutan | | <u>1.164.722.578</u> | <u>1.191.677.111</u> |
| Jumlah Beban Operasional | | <u>11.880.441.931</u> | <u>12.073.716.273</u> |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | | |
| | B.13, C20 | | |
| Pendapatan Non Operasional | | 170.148.506 | 152.098.448 |
| Beban Non Operasional | | <u>(31.189.447)</u> | <u>(29.479.969)</u> |
| Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional | | <u>138.959.059</u> | <u>122.618.478</u> |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL BERSIH SEBELUM PAJAK | | 155.679.378 | 145.495.655 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN | | <u>96.138.985</u> | <u>47.385.960</u> |
| LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK | | <u>59.540.392</u> | <u>98.109.695</u> |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
T E N T A N G
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022
PT. BPR SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)**

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : Feri Irawan, SE, ME |
| Alamat Kantor | : Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi |
| Nomor Telepon | : 0752 33877 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : Dewi Fitria, SE |
| Alamat Kantor | : Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi |
| Nomor Telepon | : 0752 33877 |
| Jabatan | : Direktur |
| 3. Nama | : Rismal Hadi, S.STP, M.Si |
| Alamat Kantor | : Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi |
| Nomor Telepon | : 0752 33877 |
| Jabatan | : Komisaris Utama |
| 4. Nama | : Uskavinov SE, MM |
| Alamat Kantor | : Jl. Soekarno - Hatta No. 52 A Bukittinggi |
| Nomor Telepon | : 0752 33877 |
| Jabatan | : Komisaris |

Untuk dan atas nama Direksi dan Komisaris PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) menyatakan bahwa :

1. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Dengan persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris, Direksi telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan pedoman akuntansi perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) serta pedoman akuntansi yang diterapkan otoritas perbankan.
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan terlampir.
4. Laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (Perseroada)

BANK JAM GADANG

Syariah



Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Telp. (0752) 628703 HP. 0852 7478 8880

Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroada) telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroada) telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jumlah transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroada) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroada), serta sistem pengendalian internal dalam PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroada).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Feri Irawan, SE, ME
Direktur Utama

Rismal Hadi, S.STP, M.Si
Komisaris Utama

Bukittinggi, 11 Januari 2023




Dewi Fitria, SE
Direktur


Uskavinov SE, MM
Komisaris

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)

NERACA

31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

| Uralan | Catatan | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| ASET | | | |
| Kas | 3 | 708.712.589 | 353.843.953 |
| Penempatan Pada Bank Lain | 4 | 21.201.900.689 | 13.511.463.901 |
| Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | | (20.646.158) | (16.628.047) |
| Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan | | 21.181.254.531 | 13.494.835.854 |
| Pembiayaan yang diberikan | 5 | 48.306.703.113 | 35.975.076.887 |
| Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | | (410.271.927) | (190.062.924) |
| Jumlah Setelah Dikurangi Penyisihan | | 47.896.431.186 | 35.785.013.963 |
| Aset Tetap dan Inventaris | 6 | 1.305.656.450 | 1.158.726.450 |
| Akumulasi Penyusutan | | (778.317.603) | (616.524.906) |
| Nilai Buku | | 527.338.847 | 542.201.544 |
| Aset Lain-Lain | 7 | 671.297.911 | 480.758.416 |
| Jumlah Aset | | 70.985.035.064 | 50.656.653.730 |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | | |
| KEWAJIBAN | | | |
| Kewajiban Segera | 8 | 67.716.142 | 38.387.086 |
| Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan | 9 | 34.706.809 | 25.821.798 |
| Hutang Pajak | 10 | 69.410.361 | 40.526.396 |
| Tabungan Wadiah | 11 | 39.843.387.835 | 36.443.484.297 |
| Deposito | 12 | 8.307.287.000 | 5.651.887.000 |
| Simpanan dari bank lain | 13 | 9.100.000.000 | 500.000.000 |
| Kewajiban Lain-Lain | 14 | 1.538.958.396 | 26.742.660 |
| Administrasi Pembiayaan | 15 | 552.722.484 | - |
| Jumlah Kewajiban | | 59.514.189.027 | 42.726.849.237 |
| EKUITAS | | | |
| Modal Disetor | 1b | 9.165.900.000 | 6.165.900.000 |
| Cadangan | 15 | | |
| Cadangan umum | | 915.708.974 | 749.791.734 |
| Cadangan tujuan | | 184.526.557 | 454.405.793 |
| Belum Ditentukan Tujuannya | | 1.204.710.506 | 559.706.966 |
| Jumlah | | 2.304.946.037 | 1.763.904.493 |
| Jumlah Ekuitas | | 11.470.846.037 | 7.929.804.493 |
| Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | | 70.985.035.064 | 50.656.653.730 |

11 Januari 2023



Feri Irawan, SE, ME
Direktur Utama



Dewi Fitria, SE
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)

LAPORAN LABA-RUGI


Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2022

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2021

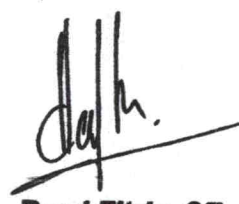
(Jumlah Dinyatakan Dalam Rupiah)

| Uraian | Catatan | 2022 | 2021 |
|--|---------|----------------------|--------------------|
| PENDAPATAN OPERASIONAL | | | |
| Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana | 16 | | |
| Dari penempatan pada bank syariah lain | | 444.945.695 | 125.247.042 |
| Pembiayaan yang diberikan | | 6.405.684.099 | 2.330.778.432 |
| Jumlah Pendapatan Operasional | | 6.850.629.794 | 2.456.025.474 |
| Beban Bagi Hasil kepada Pemilik Dana | 17 | | |
| Kepada Bank Lain | | 349.160.041 | 15.675.062 |
| Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank | | 597.925.245 | 146.572.721 |
| Jumlah Beban Bagi Hasil Kepada Pemilik Dana | | 947.085.286 | 162.247.783 |
| Pendapatan Bagi Hasil - Bersih | | 5.903.544.508 | 2.293.777.691 |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 18 | 582.705.614 | 368.930.663 |
| Beban Operasional | 19 | 506.633.858 | 251.495.310 |
| Beban Operasional Lainnya | 20 | 4.541.656.161 | 1.758.674.919 |
| Jumlah Beban Operasional | | 5.048.290.019 | 2.010.170.229 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | | 1.437.960.103 | 652.538.125 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | | |
| Pendapatan Non Operasional | 21 | 14.315.000 | - |
| Beban Non Operasional | | (36.306.878) | (16.892.329) |
| Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional | | (21.991.878) | (16.892.329) |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | | 1.415.968.225 | 635.645.796 |
| Pajak Penghasilan | | (211.257.719) | (75.938.830) |
| LABA (RUGI) BERSIH | | 1.204.710.506 | 559.706.966 |

11 Januari 2023



Feri Irawan, SE, ME
Direktur Utama



Dewi Fitria, SE
Direktur

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

DAFTAR TANAH PEMERINTAH DAERAH

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|------------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I | 1,265 | RD Sekretaris Daerah | 1,012,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I | 2,532 | Rumah Dinas Walikota | 4,873,600,000 | Sekretariat Daerah |
| 3 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I | 427 | RD Wakil Walikota | 85,400,000 | Sekretariat Daerah |
| 4 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I | 402 | RD Wakil Walikota | 80,400,000 | Sekretariat Daerah |
| 5 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 54 | Rumah Dokter | 24,300,000 | Dinas Kesehatan |
| 6 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 200 | Rumah Dinas Dokter | 40,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 7 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 391 | Rumah Dinas Dokter | 234,600,000 | Dinas Kesehatan |
| 8 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 108 | Rumah Medis | 48,600,000 | Dinas Kesehatan |
| 9 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 80 | Rumah Dokter Gigi | 36,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 10 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 120 | Rumah Dinas | 60,000,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 11 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 1,096 | Kantor BPSK | 876,800,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 12 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 900 | Kantor Kel. Campago Guguak Bulek | 225,000,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 13 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 450 | Rumah Dinas | 112,500,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 14 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 450 | Rumah Dinas | 112,500,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 15 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 167 | Rumah Dinas | 10,688,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 16 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 1,464 | Rumah Dinas | 200,010,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 17 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 2,500 | Rumah Dinas | 320,000,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 18 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 200 | Rumah Dinas | 243,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 19 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 329 | Rumah Dinas | 636,871,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 20 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 330 | Rumah Dinas | 66,000,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 21 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 302 | Rumah Dinas | 60,400,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 22 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 299 | Rumah Dinas | 59,800,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 23 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 294 | Rumah Dinas | 58,800,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 24 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 297 | Rumah Dinas | 59,400,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 25 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 750 | Rumah Jabatan Ketua DPRD | 185,287,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 26 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 10,000 | Rumah Dinas | 36,000,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 27 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 200 | Rumah Dinas | 243,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 28 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 450 | Penggatian Rumah PUSIDO | 112,500,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 29 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 225 | Rumah Dinas | 90,000,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 30 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 275 | Rumah Dinas | 82,500,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 31 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 494 | Rumah Dinas | 612,813,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 32 | Tanah Bangunan Pasar | 18,740 | Bangunan Pasar Ateh | 20,475,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 33 | Tanah Bangunan Pasar | 10,285 | Bangunan Pasar Bawah | 12,194,307,400 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 34 | Tanah Bangunan Pasar | 5,816 | Bangunan Pasar Aur Tanjungkang | 6,895,692,600 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 35 | Tanah Bangunan Pasar | 21,939 | Bangunan Pasar Simpang Aur | 32,909,190,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 36 | Tanah Bangunan Gudang | 2,620 | Gudang PU | 657,509,579 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 37 | Tanah Bangunan Gudang | 2,610 | Gudang PU | 652,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 38 | Tanah Bangunan Gudang | 400 | Gudang Buku | 600,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 39 | Tanah Bangunan Terminal Darat | 2,382 | Terminal Angdes dan Parkir | 190,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 40 | Tanah Bangunan Terminal Darat | 2,427 | Gedung Parkir | 4,342,450,000 | Dinas Perhubungan |
| 41 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4,093 | DPKAD, Bappeda & Kesbangol Linmas | 6,139,500,000 | Badan Keuangan |
| 42 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,720 | Kantor Dinas Dukcapil | 750,000,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 43 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 988 | Gudang Farmasi | 296,400,000 | Dinas Kesehatan |
| 44 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 33,972 | Rencana RSUD | 8,000,000,000 | Dinas Kesehatan |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|----------------------------------|-----------|--|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4,800 | Komplek Perkantoran (Kantor DPP, KPU, KAN) | 4,410,000,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 46 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,262 | KANTOR UPTD METROLOGI | 412,500,000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan |
| 47 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 8,540 | Gedung Kantor | 1,708,000,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 48 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 200 | Bangunan kantor | 471,200,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 49 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 7,664 | Taman Panorama dan Lobang Jepang | 3,832,000,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 50 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 30,281 | Bangunan TMSBK dll | 52,991,750,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 51 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4,160 | Medan Nan Balinduang | 6,240,000,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 52 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 33,829 | Taman Benteng | 59,200,750,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 53 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,990 | Dinas PU | 1,592,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 54 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,425 | Kantor Pemerintah | 2,546,229,125 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 55 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,000 | Kantor Pemerintah | 1,794,450,325 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 56 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,371 | Kantor Pemerintah | 2,668,439,125 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 57 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 600 | Kantor DISKOPERINDAG | 480,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 58 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 600 | Kantor DISKOPERINDAG | 480,000,000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 59 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,000.00 | Gedung Kantor Dinas Sosnaker | 800,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 60 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 748.00 | Kantor Pelayanan Terpadu | 598,400,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 61 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,325.00 | Kantor Pol PP | 542,500,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 62 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,256.00 | Kantor Dishubkominfo | 1,012,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 63 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 267.00 | Kantor DPMPSTP | 213,600,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 64 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,010.00 | DISDIKPORA | 2,020,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 65 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 894.00 | SKB | 447,250,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 66 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,626.00 | SDN 10 ATTS | 569,100,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 67 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 564.00 | Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah | 282,000,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 68 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 5,000.00 | Gedung Kantor Dinas Pertanian | 6,426,600,000 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 69 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 9,465.00 | Kolam Talao dan BPP Model | 3,786,000,000 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 70 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2,000.00 | Pasar Ternak | 500,000,000 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 71 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 131.00 | Rencana RPH Bukittinggi | 271,834,469 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 72 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 239.00 | Kantor PP dan KB | 239,000,000 | Dinas Sosial |
| 73 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 625.00 | Inspektorat | 437,500,000 | Inspektorat |
| 74 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 450.00 | Kantor Lurah Birugo | 202,500,000 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 75 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 940.00 | Kantor Lurah Belakang Balok | 577,160,000 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 76 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,187.00 | Kantor Camat ABTB | 474,800,000 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 77 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2,628.00 | Kantor Lurah Aur Kuning, Balai Penyuluhan KB | 854,100,000 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 78 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 748.00 | Kantor Lurah Ladang Cakiah | 2,305,683,500 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 79 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,143.00 | Kantor Lurah Pakan Labuah & Puskesmas Tigo Baleh | 3,341,446,200 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 80 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 160.00 | Tanah Kantor Camat ABTB | 64,000,000 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 81 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 456.00 | Halaman Kantor Camat ABTB | 182,400,000 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 82 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2,850.00 | Kantor Camat Guguk Panjang | 2,137,500,000 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 83 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 202.00 | Kantor Kel.ATTS | 141,400,000 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 84 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 202.00 | Kantor Kel.B.Cangang | 270,900,000 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 85 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 721.00 | | 360,500,000 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 86 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 150.00 | Kantor Kel. Pakan Kurai | 59,500,000 | Kecamatan Guguk Panjang |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|---------------------------------------|--------------|--|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 87 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 528.00 | Kantor Lurah Bukit Apit | 158,400,000 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 88 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 398.00 | Kantor Kelurahan | 597,000,000 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 89 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 338.00 | Kantor lurah Tarok dipo | 236,600,000 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 90 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 709.00 | kantor Pemerintahan | 4,171,500,000 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 91 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,198.00 | TANAH UNTUK KANTOR LURAH AUA TAJUNGKANG TANGAH SAWAH JL. SYECH SULAIMAN ARRASULI | 4,550,000,000 | Kecamatan Guguk Panjang |
| 92 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2,993.00 | Kantor Kec. MKS | 2,095,100,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 93 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 63.00 | Posyandu dan Balai Pemuda | 18,900,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 94 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 222.00 | Kantor Kel. Kubu Gulai Bancah | 99,900,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 95 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 471.00 | Kantor Kel.Campago Ipuh | 188,400,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 96 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 590.00 | Kantor Kel. P Anak Air | 236,000,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 97 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 150.00 | Kantor Kel.M. Gantiang | 60,000,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 98 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 166.00 | Kantor Kel. Gampago Guguk Bulek | 74,700,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 99 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 615.00 | Kantor Lurah Koto Selayan | 140,342,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 100 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 319.00 | Kantor Lurah Puhu Pintu Kabun | 63,800,000 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan |
| 101 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 12,378.00 | Dekranasda | 594,144,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 102 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 4,000.00 | Eks Kantor Imigrasi Bukittinggi | 570,000,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 103 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 688.00 | DPD Golkar | 45,569,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 104 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2,614.00 | Kantor DKP | 5,871,250,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 105 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 712.00 | Eks. SD | 200,643,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 106 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 40,000.00 | Ktr Balaikota | 12,000,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 107 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 12,788.00 | Balaikota | 922,192,400 | Sekretariat Daerah |
| 108 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 2,028.00 | Balaikota | 83,385,252 | Sekretariat Daerah |
| 109 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1,472.00 | Kantor Sekretariat DPRD | 3,680,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 110 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 4,583.00 | SDN 04 Garegeh | 963,500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 111 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 4,533.00 | SDN 05 Puhun Pintu Kabun | 1,359,900,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 112 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 4,963.00 | Komp. SDN 10 Sapiran | 714,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 113 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 3,603.00 | SMPN 5 | 1,570,800,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 114 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,627.00 | SDN 02 Aur Kuning | 976,200,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 115 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,351.00 | SDN 04 Birugo | 1,351,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 116 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,909.00 | SDN 10 Puhun Pintu Kabun | 763,600,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 117 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,635.00 | SDN 11 Campago Guguk Bulek | 490,500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 118 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 818.00 | SDN 12 Bukit Cangang | 654,400,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 119 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,206.00 | SDN 05 Tarok Dipo | 882,400,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 120 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,476.00 | SDN 06 ATTS | 516,600,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 121 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,175.00 | SDN 06 Pulai Anak Aia | 434,100,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 122 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,329.00 | SDN 07 Kubu Gulai Bancah | 1,048,050,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 123 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,000.00 | SDN 08 Tarok Dipo | 700,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 124 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,627.00 | SDN 09 Belakang Balok | 2,206,680,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 125 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,531.00 | SDN 19 ATTS | 612,400,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 126 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,572.00 | SDN 17 Manggis Ganting | 471,600,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 127 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,331.00 | SDN 18 Tarok Dipo | 532,400,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 128 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,368.00 | SDN 18 CGB | 410,400,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 129 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,873.00 | SDN 09 Manggis Ganting | 936,500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 130 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,204.00 | SDN 08 Kubu Tanjung | 602,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 131 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,094.00 | SDN 08 Campago Ipuh | 837,600,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 132 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,900.00 | SDN 07 Belakang Balok | 1,520,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 133 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 714.00 | SDN 11 Aur Kuning | 285,600,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 134 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,800.00 | SDN 12 P. Pintu Kabun | 540,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 135 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,575.00 | SDN 13 Kubu Gulai Bancah | 708,750,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 136 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,904.00 | SDN 15 Pulau Anak Aia | 666,400,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 137 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,664.00 | SDN 16 Campago Ipuh | 499,200,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 138 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,447.00 | SDN 03 Pulau Anak Aia | 434,100,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 139 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,141.00 | SDN 02 Percontohan | 570,500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 140 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,205.00 | SDN 01 Ladang Cakiah | 602,500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 141 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,000.00 | SDN 14 Tanjung Alam | 239,700,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 142 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 10,529.00 | SMPN 4 | 10,529,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 143 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,547.00 | SDN 06 Parit Antang | 618,800,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 144 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,255.00 | SDN 16 Tarok Dipo | 789,250,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 145 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,989.00 | SDN 17 Pakan Kurai | 795,600,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 146 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,090.00 | SMPN 1 | 3,135,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 147 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,167.00 | SMPN 08 | 1,300,200,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 148 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 996.00 | SDN 04 Bukit Apit Puhun | 199,200,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 149 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 4,200.00 | SMPN 2 | 1,020,600,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 150 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,850.00 | SMPN 6 | 1,710,000,001 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 151 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,893.00 | TK Negeri Pembina | 1,135,800,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 152 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 5,764.00 | SMPN 7 | 1,570,800,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 153 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,744.00 | Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi | 130,800,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 154 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,618.00 | SDN 01 BPA | 1,309,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 155 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,965.00 | SDN 01 Campago Ipuh | 482,500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 156 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,253.80 | SDN 03 Pakan Labuah | 626,900,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 157 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,916.00 | SDN 03 Pakan Kurai | 1,020,600,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 158 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 825.00 | SDN 02 CGB | 412,500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 159 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,428.00 | SDN 14 ATTS | 2,428,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 160 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,071.00 | SDN 13 Bukit Apit Puhun | 724,850,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 161 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,600.00 | SDN 11 Bukit Apit Puhun | 560,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 162 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,600.00 | SDN 05 Birugo | 678,400,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 163 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,864.00 | SDN 07 Bukit Cangang | 652,400,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 164 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 4,770.00 | Tanah Bangunan SMPN 3 Bukittinggi | 214,560,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 165 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 200.00 | Komp. SDN 10 Sapiran | 40,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 166 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 785.00 | Lapangan Olahraga SMP 2 | 223,725,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 167 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,120.00 | SMP Negeri 2 Bukittinggi | 1,570,800,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 168 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,442.00 | Gedung LBK | 736,800,000 | Dinas Sosial |
| 169 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 2,071.00 | SD Al Azhar | 202,521,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 170 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 1,833.00 | eks SDN 1 Luak Anyia | 549,900,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 171 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 40.00 | Tanah Kosong | 32,000,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 172 | Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan | 10,341.00 | Tanah Kosong | 827,280,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 173 | Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan | 20,558.00 | Balairung Sari | 6,167,400,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 174 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 1,505.00 | Puskesmas Mandiangin | 677,250,000 | Dinas Kesehatan |
| 175 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 1,139.00 | Puskesmas Perkotaan | 697,200,000 | Dinas Kesehatan |
| 176 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Pustu Ujung Bukit | 90,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 177 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Puskesmas | 100,000,000 | Dinas Kesehatan |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|--|-----------|------------------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 178 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 2,300.00 | Bangunan Puskesmas mandiingin Plus | 724,500,000 | Dinas Kesehatan |
| 179 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 204.00 | Bangunan Poskeskel | 102,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 180 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | - | Rencana Puskesmas Birugo | 2,604,458,500 | Dinas Kesehatan |
| 181 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Posyandu | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 182 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 183 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 2,507.00 | DKK, Puskesmas GGP dan UPT Labor | 2,005,600,000 | Dinas Kesehatan |
| 184 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Bangunan Pustu Pintu Kabun | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 185 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 700.00 | Poskeskel Belakang Balok | 429,800,000 | Dinas Kesehatan |
| 186 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Pustu Pulai Anak Air | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 187 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 38.00 | Pembangunan Pustu Panganak | 11,400,000 | Dinas Kesehatan |
| 188 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 800.00 | Puskesmas Tigo Baleh | 160,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 189 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Pembangunan Pustu Kuriman | 50,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 190 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 220.00 | Poskeskel Pulai Anak Air | 35,200,000 | Dinas Kesehatan |
| 191 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Pustu Kb. tanjung | 40,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 192 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Pembangunan Gedung Pustu Pabidikan | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 193 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 326.00 | Pustu Manggis Ganting | 65,200,000 | Dinas Kesehatan |
| 194 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Pustu Garegeh | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 195 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 261.00 | Pustu Tabek Gadang | 52,200,000 | Dinas Kesehatan |
| 196 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 40.00 | Posyandu | 20,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 197 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 200.00 | Pustu Guguak Bulek | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| 198 | Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga | 24.00 | Pos Ronda | 4,800,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 199 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 1,928.00 | Gedung Parkir Representatif | 3,374,000,000 | Dinas Perhubungan |
| 200 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 2,824.00 | Rumah Potong Hewan | 2,118,000,000 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 201 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 400.00 | LPK Bukittinggi | 25,600,000 | Dinas Sosial |
| 202 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 4,200.00 | Lapangan Badminton/ Sport Hall | 2,100,000,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 203 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 2,683.00 | Lapangan tenis / Atas Ngarai | 1,341,350,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 204 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 1,624.00 | Lapangan Basket / Atas Ngarai | 812,100,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 205 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 2,480.00 | Kolam Renang | 620,000,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 206 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 20,718.00 | Lapangan Bola | 5,179,500,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 207 | Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup | 621.00 | Lapangan Olah Raga | 434,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 208 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 1,113.00 | Tanah Kosong untuk Gedung Kantor | 278,250,000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 209 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 9,336.00 | Halaman SKB | 4,668,250,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 210 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 1,455.00 | Demplot Penyuluh Pertanian | 353,628,690 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 211 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 1,010.00 | Puskeswan | 262,621,310 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 212 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 18,069.00 | Rusunawa Bukittinggi | 2,058,169,908.20 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 213 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 12,400.00 | Tanah Kosong | 1,984,000,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 214 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 2,582.00 | Tanah Kosong / Rumah TNI | 123,936,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 215 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 35,700.00 | Ditempati Kodim | 1,285,200,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 216 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 170.00 | Tanah Kosong | 110,500,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 217 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 5,300.00 | Tanah Kosong Rencana Mussabata | 2,120,000,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 218 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 3,170.00 | Tanah Kosong | 792,500,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 219 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 1,050.00 | Penggantin Rumah PUSIDO | 262,500,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 220 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 4,293.00 | Tanah Yayasan Kasih Bunda | 206,601,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 221 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 1,000.00 | Tanah Kosong | 1,753,818,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 222 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 681.00 | Tanah Kosong | 844,789,000 | Pengelola Barang Milik Daerah |
| 223 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 2,424.00 | Tanah Kosong | 909,000,000 | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 224 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 2,764.00 | Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD) | 621,900,000 | Sekretariat DPRD |
| 225 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 5,528.00 | Tanah Kosong (Renc. Ktr DPRD) | 1,382,000,000 | Sekretariat DPRD |
| 226 | Tanah Lapangan Apel/Upacara | 500.00 | Pool Kendaraan Sekretariat Daerah | 200,000,000 | Sekretariat Daerah |
| 227 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 11,986.00 | Jalan | 5,853,962,400 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 228 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,666.00 | Jalan | 159,936,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 229 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,194.00 | Jalan Kota Kolektor | 380,289,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 230 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 12,462.00 | Jalan | 4,910,028,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 231 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 834.00 | Jalan Kota Kolektor | 344,799,429 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 232 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,122.00 | Jalan | 375,870,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 233 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 5,112.00 | Jalan Kota Kolektor | 1,864,176,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 234 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 847.00 | Jalan | 22,869,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 235 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 7,280.00 | Jalan Kota Kolektor | 1,941,333,333 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 236 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 6,059.00 | Jalan | 496,838,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 237 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 4,348.00 | Jalan Kota Kolektor | 156,528,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 238 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 681.00 | Jalan | 136,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 239 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,338.00 | Jalan Kota Kolektor | 448,230,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 240 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,589.00 | Jalan | 76,272,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 241 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,520.00 | Jalan Kota Kolektor | 309,320,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 242 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 5,850.00 | Jalan | 3,141,450,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 243 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 5,240.00 | Jalan Kota Kolektor | 1,362,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 244 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 8,355.00 | Jalan | 2,147,235,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 245 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 4,920.00 | Jalan Kota Kolektor | 1,648,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 246 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 8,372.00 | Jalan | 5,910,632,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 247 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,048.00 | Jalan Kota Kolektor | 950,272,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 248 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 17,207.00 | Jalan | 6,838,061,800 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 249 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,344.00 | Jalan Kota Kolektor | 832,608,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 250 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 10,908.00 | Jalan | 1,658,016,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 251 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,175.00 | Jalan Kota Kolektor | 753,004,167 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 252 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,087.00 | Jalan | 1,432,368,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 253 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,254.00 | Jalan Kota Kolektor | 349,239,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 254 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 9,579.00 | Jalan | 5,562,525,300 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 255 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,044.00 | Jalan Kota Kolektor | 349,740,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 256 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 6,061.00 | Jalan | 2,521,376,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 257 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,836.00 | Jalan Kota Kolektor | 918,918,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 258 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,081.00 | Jalan | 475,924,700 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 259 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 5,484.00 | Jalan Kota Kolektor | 1,140,672,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 260 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,515.00 | Jalan | 703,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 261 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 4,384.00 | Jalan Kota Kolektor | 566,632,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 262 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 6,623.00 | Jalan | 3,337,992,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 263 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,060.00 | Jalan Kota Kolektor | 190,550,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 264 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 5,612.00 | Jalan | 2,340,204,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 265 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 5,684.00 | Jalan Kota Kolektor | 284,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 266 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,937.00 | Jalan | 1,553,474,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 267 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 8,323.00 | Jalan Kota Kolektor | 796,927,250 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 268 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,447.00 | Jalan | 707,183,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 269 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,370.00 | Jalan Kota Kolektor | 116,920,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 270 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 626.00 | Jalan | 80,128,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 271 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,938.00 | Jalan Kota Kolektor | 32,154,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 272 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 892.00 | Jalan | 24,084,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 273 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 17,586.00 | Jalan Kota Kolektor | 791,370,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 274 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,351.00 | Jalan | 247,908,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 275 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,836.00 | Jalan Kota Kolektor | 287,946,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 276 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,035.00 | Jalan | 251,505,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 277 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,236.00 | Jalan Kota Kolektor | 500,889,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 278 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,134.00 | Jalan | 696,276,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 279 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 4,550.00 | Jalan Kota Kolektor | 319,637,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 280 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 767.00 | Jalan | 49,088,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 281 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,236.00 | Jalan Kota Kolektor | 405,794,400 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 282 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,611.00 | Jalan | 268,933,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 283 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,980.00 | Jalan Kota Kolektor | 238,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 284 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 237.00 | Jalan | 15,168,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 285 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,844.00 | Jalan Kota Kolektor | 602,359,200 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 286 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 570.00 | Jalan | 193,515,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 287 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,613.00 | Jalan Kota Kolektor | 70,551,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 288 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,108.00 | Jalan | 269,824,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 289 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,021.00 | Jalan Kota Kolektor | 916,873,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 290 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,929.00 | Jalan | 308,640,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 291 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 5,810.00 | Jalan Kota Kolektor | 244,020,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 292 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 566.00 | Jalan | 161,310,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 293 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,800.00 | Jalan Kota Kolektor | 264,100,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 294 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 237.00 | Jalan | 67,545,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 295 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 7,644.00 | Jalan Kota Kolektor | 1,892,654,400 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 296 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 513.00 | Jalan | 33,345,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 297 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,124.00 | Jalan Kota Kolektor | 271,872,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 298 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 320.00 | Jalan | 16,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 299 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,680.00 | Jalan Kota Kolektor | 127,344,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 300 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 327.00 | Jalan | 93,195,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 301 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 4,184.00 | Jalan Kota Bukittinggi | 359,824,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 302 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,588.00 | Jalan | 42,876,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 303 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 12,696.00 | Jalan Kota Kolektor | 2,374,152,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 304 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,833.00 | Jalan | 150,306,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 305 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,817.00 | Jalan Kota Kolektor | 1,309,905,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 306 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 997.00 | Jalan | 63,808,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 307 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 8,560.00 | Jalan Kota Kolektor | 2,448,160,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 308 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 252.00 | Jalan | 50,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 309 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 8,340.00 | Jalan Kota Kolektor | 333,600,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 310 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 866.00 | Jalan | 41,568,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 311 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 828.00 | Jalan Kota Lokal | 235,980,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 312 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 6,892.00 | Jalan | 1,385,292,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 313 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,120.00 | Jalan Kota Lokal | 295,680,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 314 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,221.00 | Jalan | 182,122,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 315 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 536.00 | Jalan Kota Lokal | 70,752,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 316 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,008.00 | Jalan | 40,160,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 317 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,392.00 | Jalan Kota Lokal | 1,206,864,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 318 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,420.00 | Jalan | 404,700,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 319 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,320.00 | Jalan Kota Lokal | 563,760,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 320 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 461.00 | Jalan | 92,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 321 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,025.00 | Jalan Kota Lokal | 1,087,425,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 322 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 511.00 | Jalan | 102,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 323 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 648.00 | Jalan Kota Lokal | 255,312,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 324 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 541.00 | Jalan | 108,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 325 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,908.00 | Jalan Kota Lokal | 495,603,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 326 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 920.00 | Jalan | 24,840,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 327 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,680.00 | Jalan Kota Lokal | 478,800,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 328 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 522.00 | Jalan | 148,770,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 329 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 258.00 | Jalan Kota Lokal | 86,430,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 330 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 305.00 | Jalan | 25,010,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 331 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,974.50 | Jalan Kota Lokal | 441,794,375 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 332 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 422.00 | Jalan | 67,520,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 333 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,120.00 | Jalan Kota Lokal | 49,280,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 334 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 654.00 | Jalan | 186,390,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 335 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,560.00 | Jalan Kota Lokal | 493,653,333 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 336 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 880.00 | Jalan | 250,800,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 337 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,330.00 | Jalan Kota Lokal | 215,525,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 338 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 249.00 | Jalan | 70,965,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 339 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 885.00 | Jalan Kota Lokal | 31,860,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 340 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 327.00 | Jalan | 109,545,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 341 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,200.00 | Jalan Kota Lokal | 43,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 342 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 582.00 | Jalan | 93,120,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 343 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,264.00 | Jalan Kota Lokal | 549,020,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 344 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,031.00 | Jalan | 10,310,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 345 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,775.00 | Jalan Kota Lokal | 699,350,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 346 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 982.00 | Jalan | 328,970,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 347 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 378.00 | Jalan Kota Lokal | 67,000,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 348 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 451.00 | Jalan | 128,535,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 349 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 756.00 | Jalan Kota Lokal | 42,336,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 350 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 850.00 | Jalan | 170,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 351 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 990.00 | Jalan Kota Lokal | 75,240,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 352 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,246.00 | Jalan | 52,332,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 353 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 518.00 | Jalan Kota Lokal | 103,600,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 354 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,059.00 | Jalan | 743,337,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 355 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 303.00 | Jalan Kota Lokal | 40,905,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 356 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,311.00 | Jalan | 324,472,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 357 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 308.00 | Jalan Kota Lokal | 121,352,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 358 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 7,097.00 | Jalan | 393,173,800 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 359 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,056.00 | Jalan Kota Lokal | 460,416,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 360 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 692.00 | Jalan | 168,156,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 361 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,908.00 | Jalan Kota Lokal | 626,301,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 362 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 196.00 | Jalan | 16,072,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 363 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 297.00 | Jalan Kota Lokal | 117,018,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 364 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 347.00 | Jalan | 98,895,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 365 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 477.00 | Jalan Kota Lokal | 130,380,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 366 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 710.00 | Jalan | 113,600,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 367 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 408.00 | Jalan Kota Lokal | 116,280,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 368 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 488.00 | Jalan | 78,080,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 369 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 600.00 | Jalan Kota Lokal | 73,050,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 370 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 411.00 | Jalan | 65,760,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 371 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 626.00 | Jalan | 100,160,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 372 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 665.00 | Jalan Kota Lokal | 95,760,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 373 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 631.00 | Jalan | 100,960,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 374 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,890.00 | Jalan Kota Lokal | 92,295,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 375 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 355.00 | Jalan | 56,800,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 376 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 236.00 | Jalan Kota Lokal | 94,478,667 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 377 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,042.00 | Jalan | 85,444,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 378 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,212.00 | Jalan Kota Lokal | 223,008,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 379 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,249.00 | Jalan | 52,458,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 380 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 300.00 | Jalan Kota Lokal | 9,825,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 381 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,162.00 | Jalan | 74,368,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 382 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 385.00 | Jalan Kota Lokal | 18,480,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 383 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 924.00 | Jalan | 263,340,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 384 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 464.00 | Jalan | 132,240,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 385 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,584.00 | Jalan Kota Lokal | 384,912,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 386 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 510.00 | Jalan | 65,280,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 387 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,230.00 | Jalan Kota Lokal | 54,120,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 388 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 820.00 | Jalan | 159,080,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 389 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 762.00 | Jalan Kota Lokal | 134,112,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 390 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 737.00 | Jalan | 14,740,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 391 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,115.00 | Jalan Kota Lokal | 181,890,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 392 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 635.00 | Jalan | 212,725,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 393 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 448.00 | Jalan Kota Lokal | 38,528,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 394 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,298.00 | Jalan | 184,688,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 395 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 500.00 | Jalan Kota Lokal | 205,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 396 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,229.00 | Jalan | 58,992,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 397 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,002.00 | Jalan Kota Lokal | 103,206,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 398 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,727.00 | Jalan | 2,288,378,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 399 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 680.00 | Jalan Kota Lokal | 65,280,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 400 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,967.00 | Jalan | 912,688,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 401 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 300.00 | Jalan Kota Lokal | 60,450,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 402 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 376.00 | Jalan | 107,160,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 403 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 752.50 | Jalan Kota Lokal | 293,475,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 404 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 5,960.00 | Jalan | 1,197,960,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 405 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | - | Jalan | 230,384,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 406 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 204.00 | Jalan Kota Lokal | 25,194,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 407 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,940.00 | Jalan | 45,590,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|-------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 408 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,062.00 | Jalan Kota Lokal | 172,752,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 409 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 477.00 | Jalan | 12,879,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 410 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 438.00 | Jalan Kota Lokal | 124,830,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 411 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,422.00 | Jalan | 28,440,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 412 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 519.00 | Jalan Kota Lokal | 147,915,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 413 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 666.00 | Jalan | 161,838,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 414 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 846.00 | Jalan Kota Lokal | 172,020,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 415 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,020.00 | Jalan Kota Kolektor | 626,280,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 416 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,752.00 | Jalan Kota Kolektor | 918,048,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 417 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 396.00 | Jalan Kota Lokal | 112,860,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 418 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 380.00 | Jalan Kota Lokal | 108,300,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 419 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 320.00 | Jalan Kota Lokal | 91,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 420 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 429.00 | Jalan Kota Lokal | 122,265,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 421 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 456.00 | Jalan Kota Lokal | 110,580,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 422 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 579.00 | Jalan Kota Lokal | 165,015,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 423 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 944 | Jalan Kota Lokal | 99,120,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 424 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 273 | Jalan Kota Lokal | 17,403,750 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 425 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 462 | Jalan Kota Lokal | 112,035,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 426 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 429 | Jalan Kota Lokal | 35,875,125 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 427 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 795 | Jalan Kota Lokal | 164,167,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 428 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 621 | Jalan Kota Lokal | 99,360,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 429 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 270 | Jalan Kota Lokal | 56,295,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 430 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,515 | Jalan Kota Lokal | 567,367,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 431 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 453 | Jalan Kota Lokal | 129,105,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 432 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,860 | Jalan Kota Lokal | 225,060,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 433 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,976 | Jalan Kota Lokal | 326,032,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 434 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,125 | Jalan Kota Lokal | 157,218,750 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 435 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,640 | Jalan Kota Lokal | 884,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 436 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,175 | Jalan Kota Lokal | 286,012,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 437 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 456 | Jalan Kota Lokal | 64,296,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 438 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 632 | Jalan Kota Lokal | 126,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 439 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,368 | Jalan Kota Lokal | 224,352,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 440 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,312.5 | Jalan Kota Lokal | 374,062,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 441 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 681 | Jalan Kota Lokal | 51,245,250 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 442 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,536 | Jalan Kota Lokal | 80,306,667 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 443 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 651 | Jalan Kota Lokal | 256,494,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 444 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,232 | Jalan Kota Lokal | 168,516,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 445 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 4,436 | Jalan Kota Lokal | 119,772,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 446 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,538 | Jalan Kota Lokal | 111,037,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 447 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,242 | Jalan Kota Lokal | 59,616,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 448 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,697 | Jalan Kota Lokal | 1,040,143,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 449 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,804 | Jalan Kota Lokal | 486,912,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 450 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,776 | | 75,520,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 451 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,141 | | 763,263,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 452 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,232 | | 107,136,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 453 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 6,072 | | 163,944,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|-------------------------------|--------------|---|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 454 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,232 | | 229,896,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 455 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 260 | | 87,100,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 456 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,984 | | 253,952,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 457 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 273 | | 54,600,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 458 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 219 | | 43,800,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 459 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 207 | | 41,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 460 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 252 | | 50,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 461 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,002 | | 200,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 462 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,854 | | 1,301,508,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 463 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 775 | | 480,112,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 464 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,275 | | 238,425,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 465 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 480 | | 137,280,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 466 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 4,960 | | 1,319,360,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 467 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 681 | | 272,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 468 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,580 | | 119,290,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 469 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 916 | | 183,200,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 470 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,812 | | 659,568,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 471 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,725 | | 458,850,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 472 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,875 | | 498,750,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 473 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,128 | | 457,122,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 474 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,500 | | 354,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 475 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 600 | | 218,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 476 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,836 | | 734,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 477 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 337.50 | | 96,525,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 478 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,875 | | 536,250,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 479 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 660 | | 264,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 480 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,497 | | 279,939,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 481 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 937.50 | | 341,250,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 482 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,692 | | 172,288,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 483 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,995 | | 127,680,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 484 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,204 | | 205,056,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 485 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 900 | | 67,950,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 486 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,500 | | 144,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 487 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 960 | | 92,160,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 488 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 500 | | 100,750,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 489 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 270 | | 72,900,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 490 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 270 | | 54,405,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 491 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 516 | | 103,974,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 492 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 916 | | 94,348,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 493 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 432 | | 44,496,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 494 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 282 | | 58,797,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 495 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 465 | | 132,525,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 496 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,200 | | 224,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 497 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,200 | | 224,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 498 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,295 | | 259,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 499 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,312 | | 262,500,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | 6 | Harga (Rp) | SKPD |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 500 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 720 | | 144,000,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 501 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 1,480 | | 94,720,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 502 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 2,600 | | 743,600,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 503 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 3,616 | | 347,136,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 504 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 476 | | 1,140,680,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 505 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 493 | | 1,283,700,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 506 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 169 | | 307,910,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 507 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 482 | | 1,629,610,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 508 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 118 | Jalan Kantor DPRD | 381,400,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 509 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 75 | Jalan Kantor DPRD | 309,300,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 510 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 49 | | 131,900,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 511 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 32 | Jalan Kantor DPRD | 65,900,125 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 512 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 357 | Jalan | 1,043,653,800 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 513 | Tanah Untuk Jalan Kotamadya | 54 | | 157,863,600 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh |
| 514 | Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat | 2,592 | Taman Jam Gadang | 69,984,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 515 | Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat | 772 | Museum RKBH | 772,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 516 | Tanah Untuk Makam Umum | 50,400 | Rencana Taman Pemakaman Umum | 764,717,000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 517 | Tanah Untuk Makam Umum | 1,297 | TANAH PEMAKAMAN | 62,256,000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 518 | Tanah Lapangan Taman lainnya | 6,720 | Taman Ngarai Maaram Kota Bukittinggi | 3,359,875,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 519 | Tanah Lapangan Taman lainnya | 2,643 | Kawasan Jalur Hijau | 2,390,628,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 520 | Tanah Lapangan Taman lainnya | 2,220 | Taman Hutan | 355,200,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 521 | Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu | 100 | puskesmas | 80,200,000 | Dinas Kesehatan |
| | | | | 566,289,788,505.20 | |

DAFTAR ASET TAK BERWUJUD

| No. | Nama Aset Tidak Berwujud | Tahun | Nilai | SKPD |
|-----|--|-------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SOFTWARE MICROSOFT SQL SERVER | 2009 | 30,470,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | SOFTWARE NORTON ANTI VIRUS | 2010 | 2,700,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3 | SOFTWARE ANTI VIRUS | 2012 | 3,470,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | SOFTWARE WEB | 2012 | 38,812,000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | software PBB | 2012 | 836,000,000 | Badan Keuangan |
| 6 | software pendapatan | 2015 | 48,125,000 | Badan Keuangan |
| 7 | software windows/server 2012 r2 | 2015 | 17,490,000 | Badan Keuangan |
| 8 | software windows 7 / 64 bit | 2015 | 2,970,000 | Badan Keuangan |
| 9 | software windows 7 / 64 bit | 2015 | 2,970,000 | Badan Keuangan |
| 10 | software windows 7 / 64 bit | 2015 | 2,970,000 | Badan Keuangan |
| 11 | software windows 7 / 64 bit | 2015 | 2,970,000 | Badan Keuangan |
| 12 | software windows 7 / 64 bit | 2015 | 2,970,000 | Badan Keuangan |
| 13 | software windows 7 / 64 bit | 2015 | 2,970,000 | Badan Keuangan |
| 14 | software windows 7 / 64 bit | 2015 | 2,970,000 | Badan Keuangan |
| 15 | software aktivasi hamci | 2016 | 3,485,000 | Badan Keuangan |
| 16 | website pajak | 2017 | 48,400,000 | Badan Keuangan |
| 17 | software windows server 2016 | 2017 | 14,300,000 | Badan Keuangan |
| 18 | software c | 2017 | 20,185,000 | Badan Keuangan |
| 19 | APLIKASI WEBGIS PBMD | 2019 | 95,933,420 | Badan Keuangan |
| 20 | Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah | 2014 | 216,609,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| 21 | Pemutakhiran Dokumen Strategis Sanitasi Kota | 2019 | 29,888,250 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| 149 | RISET POTENSI PAJAK RETRIBUSI DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 S.D 2026 | 2021 | 199,925,000 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| 150 | RENCANA INDUK KELITBANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026 | 2021 | 56,677,500 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| 22 | APLIKASI CAPIL | 2010 | 39,985,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 23 | APLIKASI DOKUMENTASI CAPIL | 2013 | 9,900,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 24 | Software Lisensi Mikrotik dan Instalasinya | 2017 | 1,730,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 25 | Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan | 2018 | 5,000,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 26 | Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan | 2018 | 5,000,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 27 | Aplikasi Otomatisasi Integrasi Data Alat Baca KTP-el untuk Adm Pemerintahan | 2018 | 5,000,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 28 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 29 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 30 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 31 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 32 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 33 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No. | Nama Aset Tidak Berwujud | Tahun | Nilai | SKPD |
|-----|--|-------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 35 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 36 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 37 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 38 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 39 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 40 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 41 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 42 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 43 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 44 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 45 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 46 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 47 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 48 | Aplikasi Otomatisasi Dokumen Administrasi Pemerintahan melalui Chip KTP-el (ABAKA) dan integrasi ke server DWH | 2020 | 3,750,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 49 | PT. PERMATA GEMILANG SEJAHTERA | 2020 | 40,000,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 50 | PT. PERMATA GEMILANG SEJAHTERA | 2020 | 25,000,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 51 | Perangkat Lunak Sistem Informasi | 2018 | 53,900,000 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 52 | Software Infokus | 2009 | 164,450,000 | Dinas Kesehatan |
| 53 | Software Infokus | 2011 | 23,400,000 | Dinas Kesehatan |
| 54 | Software Infokus | 2011 | 29,150,000 | Dinas Kesehatan |
| 55 | Software | 2015 | 7,689,000 | Dinas Kesehatan |
| 56 | Software | 2015 | 7,689,000 | Dinas Kesehatan |
| 57 | Software | 2015 | 7,689,000 | Dinas Kesehatan |
| 58 | Software | 2015 | 7,689,000 | Dinas Kesehatan |
| 59 | Software | 2015 | 7,689,000 | Dinas Kesehatan |
| 60 | Software | 2015 | 7,689,000 | Dinas Kesehatan |
| 61 | Software | 2015 | 7,689,000 | Dinas Kesehatan |
| 62 | Kajian DED | 2017 | 139,564,000 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 63 | website | 2007 | 44,900,900 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 64 | software utk komputer rumah adat | 2016 | 164,699,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 65 | master plan kawasan TIC | 2017 | 49,000,000 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |

| No. | Nama Aset Tidak Berwujud | Tahun | Nilai | SKPD |
|-----|---|-------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | Kajian penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pelayanan Kota | 2011 | 382,470,990 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 67 | Kajian penyusunan RDTR Kota Bukittinggi | 2011 | 423,921,300 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 68 | Kajian pembuatan blok blad kawasan Ladang Cakiah - Koto Selayan | 2011 | 90,408,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 69 | Kajian pembuatan blok blad Puhun Pintu Kabun dan Kubu Gulai Bancah | 2013 | 148,088,600 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 70 | Kajian Dua Jalur Jalan Soekarno Hatta | 2013 | 213,665,100 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 71 | Kajian Pembuatan Blok Blad Kelurahan | 2014 | 285,203,500 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 72 | Kajian Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang | 2014 | 693,985,600 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 73 | Kajian Blok Blad Kawasan Kelurahan | 2015 | 177,716,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 74 | Kajian Penyusunan RDTR dan PZ Kecamatan ABTB | 2015 | 204,029,350 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 75 | Kajian Aktualisasi Data Jalan | 2015 | 48,580,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 76 | Kajian/ Penyusunan RTBL Kawasan Koridor By Pass | 2017 | 363,787,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 77 | Kajian/ Dokumen Pendataan Bangunan | 2017 | 317,655,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 78 | Aplikasi GIS Tanah dan Bangunan | 2018 | 47,632,255 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 79 | Data Base Daerah Irigasi Kota Bukittinggi | 2019 | 97,689,000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 80 | APLIKASI PERIZINAN UNTUK 11 JENIS IZIN YANG DITERBITKAN OLEH KPPT | 2008 | 67,000,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 81 | APLIKASI PERIZINAN ONLINE (36 BUAH TEMPLATE PERIZINAN) | 2014 | 25,938,000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 82 | BUKU RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL RUPM TAHUN 2019 -2025 | 2019 | 251,670,540 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 83 | RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA (NASKAH AKADEMIK DAN RTIK) | 2019 | 191,501,200 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 84 | Website Official dan API | 2020 | 45,629,630 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 85 | Android Application - Counter Screen | 2020 | 34,222,222 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 86 | Web Application - Counter service and Government Manag | 2020 | 91,259,259 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 87 | Web Application - Registration Screen | 2020 | 96,962,963 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 88 | Virtual Private Server | 2020 | 9,125,926 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja |
| 89 | Software Pembelajaran | 2011 | 21,422,500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 90 | Aplikasi Pembelajaran | 2012 | 5,769,500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 91 | Aplikasi Pembelajaran | 2012 | 5,769,500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 92 | Software Perpustakaan elektronik, software pembelajaran IPS, TIK, PKN dan Keterampilan Edukatif | 2012 | 5,769,500 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 93 | Pembelajaran interaktif bahasa inggris, IPA dan Matematika | 2012 | 5,764,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 94 | Software Pusat Sumber Belajar Vitual | 2013 | 95,700,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 95 | Software Pusat Sumber Belajar Vitual | 2013 | 102,300,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 96 | Website | 2013 | 48,400,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 97 | Aplikasi Pembelajaran | 2014 | 4,500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 98 | Bel masuk digital | 2015 | 1,750,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 99 | microsoft windows server 2012 | 2016 | 3,386,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| No. | Nama Aset Tidak Berwujud | Tahun | Nilai | SKPD |
|-----|---|-------|------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | Microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 101 | Microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 102 | PAKET SOFTWARE ENGINE | 2016 | 35,475,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 103 | PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP | 2016 | 28,295,050 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 104 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 105 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 106 | PAKET SOFTWARE ENGINE | 2016 | 35,475,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 107 | PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP | 2016 | 30,630,600 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 108 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 109 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 110 | PAKET SOFTWARE ENGINE | 2016 | 35,475,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 111 | PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SMP | 2016 | 30,311,600 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 112 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 113 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 114 | PAKET SOFTWARE ENGINE | 2016 | 35,200,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 115 | PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD | 2016 | 30,026,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 116 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 117 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 118 | PAKET SOFTWARE ENGINE | 2016 | 35,200,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 119 | PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD | 2016 | 30,026,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 120 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 121 | PAKET SOFTWARE ENGINE | 2016 | 30,200,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 122 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 123 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 124 | PAKET KONTEN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) TIK SD | 2016 | 30,026,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 125 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 126 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 127 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 128 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 129 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 130 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 131 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 132 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 133 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 134 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 135 | microsoft office standar 2016 | 2016 | 862,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 136 | Software | 2017 | 800,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 137 | Bel Otomatis | 2018 | 500,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| 138 | Software | 2015 | 2,000,000 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| No. | Nama Aset Tidak Berwujud | Tahun | Nilai | SKPD |
|-----|---|-------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 139 | Sistem Monitoring Jaringan | 2008 | 12,799,000 | Dinas Perhubungan |
| 140 | Sistem Informasi PKB | 2018 | 39,576,900 | Dinas Perhubungan |
| 141 | Aplikasi Aksara Perpustakaan | 2012 | 86,790,000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 142 | OS SERVER | 2019 | 2,862,600 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 143 | DED | 2019 | 98,658,000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 144 | SIG UNTUK DATABASE PERUMAHAN | 2021 | 86,850,000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 145 | SIG DATABASE PSU | 2021 | 92,654,000 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 146 | Windows OS Server 2012 R2 | 2016 | 23,100,000 | Inspektorat |
| 147 | Aplikasi E-Pembangunan | 2018 | 27,954,146 | Sekretariat Daerah |
| 148 | Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi | 2019 | 63,800,000 | Sekretariat Daerah |
| 149 | Software | 2022 | 24,420,000 | DPMPTSP |
| 150 | Aplikasi E-Lapkes | 2022 | 39,600,000 | DKK |
| 151 | Software Aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan | 2022 | 97,785,000 | DISDUKCAPIL |
| 152 | Lisensi dan Franchise Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik | 2022 | 8,944,380 | DISKOMINFO |
| 153 | Software/Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan - SDK | 2022 | 11,100,000 | DKK |
| | Total | | 8,352,406,781 | |

DAFTAR KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

| No. | SKPD | Keterangan | Nilai Kontrak (ribuan Rp) |
|-----|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretariat Daerah | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (DED TEBING KANTOR WALIKOTA) | 47,684,943.15 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Kantor Arsip Dokumentasi dan Museum Seintifik Sejarah Alam (MUSSABATA) | 673,522,080.00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | DED Kantor DPRD Kota Bukittinggi | 371,762,400.00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Manajemen Konstruksi Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi Tahun I (Pertama) | 173,803,850.00 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung YPAC | 47,616,000.00 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kota Bukittinggi | 86,901,925.00 |
| 7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sport Hall | 434,097,000.00 |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Rancangan Pra Konsep Pembangunan Kembali Pasar Atas | 49,821,000.00 |
| 9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan DED Pasar Lereng | 270,618,488.80 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Awning Minangkabau Night Market | 85,182,811.95 |
| 11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pengawasan Pembangunan Awning MInang Kabau Night Market | 35,991,000.00 |
| 12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Gerbang Balaikota Bukittinggi dan Pedestrian | 38,544,000.00 |
| 13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pasar Lereng | 675,538,600.00 |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota | 49,960,000.00 |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota | 49,960,000.00 |
| 16 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Peerencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota | 19,968,000.00 |
| 17 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Pembangunan Jalan Dalam Kota | 19,430,000.00 |
| 18 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | gg lubang Tendo dan Jl. Kurai Menuju Perbatasan dengan Kelurahan Parit Antang | 17,411,000.00 |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Rehab Trotoar serta Jembatan di Depan Kedai Nasi Salero Kampuang serta Perbatasan Kelurahan Pakan Labuah | 12,228,000.00 |
| 20 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan DED Jalan Kantor DPRD | 97,818,000.00 |
| 21 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Peningkatan Jalan Konsolidasi By.Pass | 39,796,000.00 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2023 (DAK Fisik Bidang Jalan 2022) | 99,525,375.00 |
| 23 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Konsultansi Perencanaan Peningkatan Trotoar (Paket 1) (Jl. Panorama Baru) | 22,046,600.00 |
| 24 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Konsultansi Perencanaan Peningkatan Trotoar (Paket2) | 90,780,000.00 |
| 25 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jl. Sutan Syahril | 49,753,000.00 |
| 26 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Batang Tambuo | 24,600,000.00 |
| 27 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jembatan Jalan Bahder Johan | 32,224,000.00 |
| 28 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) | 12,950,000.00 |
| 29 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Pendukung Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK Tahap 2 | 49,482,000.00 |
| 30 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan DAK Irigasi (2020) | 72,000,000.00 |
| 31 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Konsultansi Perencanaan Pembangunan Saluran irigasi Tahun 2019 | 19,884,000.00 |
| 32 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Pembangunan Saluran Pembagi Air Jembatan Besi | 24,900,000.00 |
| 33 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Peningkatan Drainase Paket 4 (pasar atas - a.yani) | 69,085,500.00 |
| 34 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Paket 2 (Jl. A. Yani - Simp. Tembok) | 69,008,500.00 |
| 35 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Peningkatan Drainase Paket 2 (Batang Masang) | 37,465,138.04 |
| 36 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Lanjutan Pengedaman Tebing Ikua Labuah (putus kontrak) | 186,536,220.00 |
| 37 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Perbaikan Intake WTP SPAM Panorama Baru | 4,978,000.00 |
| 38 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya (Solar Cell) di Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi | 22,484,000.00 |
| 39 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan | 63,000,000.00 |
| 40 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkung dan Riol Kel.Campago Ipuh | 47,880,000.00 |
| 41 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Rehab Jaling Kel.Campago Ipuh | 11,638,476.00 |
| 42 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Peningk. Jalan Labuah Baru Kel. PPK | 5,237,314.00 |
| 43 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Peningk. Jln.Manunggal Jl. Angku Basa Kel. PT | 1,745,771.00 |
| 44 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Lanjutan Peningk Jaling Komp Ponpes Madinatul M Kel.CGB | 6,465,820.00 |
| 45 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Peningkatan Jaling RW 1 Kubu Tabak Ladang Cakiah | 11,982,667.00 |
| 46 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Peningkatan Jaling depan MDA Al Manzari Panorama RW 2 Kayu Kubu | 1,497,833.00 |

| No. | SKPD | Keterangan | Nilai Kontrak (ribuan Rp) |
|-----|--|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Peningkatan Jaling panorama dalam RW 2 Kel Kayu Kubu | 10,484,833.00 |
| 48 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pengecoran bahu jalan Komp.Perum Ganting Permai RW 4 Kel.PAA | 2,980,230.00 |
| 49 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkung gg. S.Biru Kel.Campago Ipuh | 8,709,303.00 |
| 50 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pengecoran jalan guguk panjang RW 2 dan RW 3 Kel BCKR | 11,985,710.00 |
| 51 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pembukaan Jalan Samping Kantor Yakult | 3,704,312.00 |
| 52 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perbaikan Jalan Lingkung RW I Kelurahan Aur Kuning | 3,367,556.00 |
| 53 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan Jaling RW I Kubu Tabak Kel. Ladang Cakiah | 7,854,773.00 |
| 54 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan jalan dan drainase Kel. Koto Selayan | 6,456,492.00 |
| 55 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan Jalan Lingkung Kel. Pakan Labuah | 3,873,896.00 |
| 56 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan jalan lingkungan dan drainase belakang SDN 17 Kelurahan Pakan Kurai | 12,062,081.00 |
| 57 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan jalan dan drainase Gang Tenggara menenggang Kel.Pakan Kurai | 10,051,734.00 |
| 58 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan jalan dan drainase RT.01/RW.03 Kel. Pakan Kurai | 21,462,185.00 |
| 59 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan jalan lingkung dan drainase lingkungan jalan Sanjai Dalam Kel.Manggis Ganting | 12,061,383.00 |
| 60 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan jalan dan drainase belakang Hoky kelurahan Manggis Gantiang | 15,596,617.00 |
| 61 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan pada tanah konsolidasi By Pass Kelurahan Aur Kuning | 58,886,000.00 |
| 62 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan Jalan Lingkung Perumahan Ar-Rahmah Kel.Camp Guguk Bulek | 52,162,000.00 |
| 63 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan Pembangunan riol jl Kejaksanaan dalam Kel.Belakang Balok | 28,804,000.00 |
| 64 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pembuatan riol blk komp ganting permai Kel.PAA | 3,578,182.00 |
| 65 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Perencanaan pembuatan riol komp perum ganting permai RW2 Kel.PAA | 2,981,818.00 |
| 66 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan Drainase jln.Banda redex RT.05/RW.06 Kel.Pakan Kurai | 8,380,525.00 |
| 67 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan Drainase Jalan Lingkar dalam Kel. Camp Ipuah | 5,375,096.00 |
| 68 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan Riol Kel.Campago Guguk Bulek | 5,375,096.00 |
| 69 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan drainase Lingkungan Kel.Kubu Gulai Bancah | 6,935,607.00 |
| 70 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Peningkatan drainase Lingkungan Kel. ATTS | 6,242,046.00 |
| 71 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pembuatan sumur resapan di Gang Pepaya, Tengah Jua | 10,056,630.00 |
| 72 | Dinas Perhubungan | DED Traffic Light ATCS 2 Titik Persimpangan (Realisasi 7 Titik dari Total 9 Titik) | 18,574,200.00 |
| 73 | Dinas Perhubungan | DED Pembangunan Gedung Kantor DISHUB | 79,649,600.00 |
| 74 | Dinas Perhubungan | DED Rehab Gedung Parkir Roda 2 dan 4 | 78,418,400.00 |
| 75 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | MUSHALLA (KDP 2018 : 19.611.222.49 + 2019 : 327.395.262.09) | 347,006,484.57 |
| 76 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | perencanaan sekolah | 35,609,600.00 |
| 77 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SDN 05 Tarok Dipo | 71,406,400.00 |
| 78 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | SDN 11 Aur Kuning | 66,859,200.00 |
| 79 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | 74,055,200.00 |
| 80 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PEMBANGUNAN SDN 05 TAROK DIPO | 2,963,340,555.24 |
| 81 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Lanjutan Pembangunan, Perencanaan dan pengawasan SDN 05 Tarok Dipo | 832,027,467.84 |
| 82 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | DED Pembangunan SDN 16 Tarok Dipo | 79,619,220.00 |
| 83 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh 2.523.768.534,08 Perencanaan 71.738.150 Pengawasan 69.780.150 | 2,665,286,834.08 |
| 84 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Lanjutan Pembangunan SDN 08 Kubu Tanjung 743.584.065.55 Perencanaan 44.735.000 Pengawasan 44.729.467 | 833,048,532.55 |
| 85 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembayaran Termyn I 80% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan SMP N 9 Bukittinggi | 79,840,000.00 |
| 86 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | POKIR 2022 | 198,804,103.99 |
| 87 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rehab gedung kantor | 94,995,200.00 |
| 88 | Dinas Sosial | DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial | 79,620,000.00 |
| 89 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pembayaran Termyn I Sebesar 11,95 % Pekerjaan Pembangunan RPH | 90,770,953.51 |
| 90 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pembayaran 85 % Pekerjaan Perencanaan Pembangunan RPH Kota Bukittinggi | 79,225,950.00 |
| 91 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Pembangunan RPH Bukittinggi | 202,557,218.42 |
| 92 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pembayaran 15 % Perencanaan Pekerjaan Pembangunan RPH | 13,981,050.00 |

| No. | SKPD | Keterangan | Nilai Kontrak (ribuan Rp) |
|-----|--|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 93 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pembayaran Termyn II sebesar 81,50 % Pekerjaan Pembangunan RPH | 528,294,545.30 |
| 94 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pembayaran Termyn III sebesar 95 % Pekerjaan Pembangunan RPH | 140,524,070.28 |
| 95 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pembayaran Termyn IV sebesar 5 % Pekerjaan Pembangunan RPH | 50,639,304.61 |
| 96 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pengawasan Pembangunan RPH | 69,868,000.00 |
| 97 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan RPH | 79,840,000.00 |
| 98 | Dinas Pertanian dan Pangan | Pembayaran termyn I sebesar 80% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan IPAL RPH | 63,840,000.00 |
| 99 | Dinas Pertanian dan Pangan | BM Pembangunan RPH Rumah Potong Hewan (Fisik dan Pengawasan) | 1,600,760,871.17 |
| 100 | Dinas Pertanian dan Pangan | Review Perencanaan RPH 80% | 35,655,675.74 |
| 101 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | DED PEMBANGUNAN KANOPI JL. MINANGKABAU | 77,704,000.00 |
| 102 | Dinas Lingkungan Hidup | 80% Pekerjaan Perencana RTH Ngarai Maaram | 79,824,800.00 |
| 103 | Dinas Lingkungan Hidup | | 12,760,000.00 |
| 104 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Perencanaan Kantor Informasi Destinasi | 326,221,600.00 |
| 105 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | perencanaa diorama lobang jepang | 29,756,000.00 |
| 106 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | PERENCANAAN KOLAM RENANG | 39,647,200.00 |
| 107 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | PERENCANAAN SPORTHALL | 49,650,000.00 |
| 108 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | PENYUSUNAN DED KANDANG TAHAP II TMSBK | 79,648,800.00 |
| 109 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Fisik kandang tahap II TMSBK (zone reptil dan harimau)2020 | 14,395,000,000.00 |
| 110 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Pengawasan kandang tahap II (zone reptil da harimau)2020 | 378,680,720.00 |
| 111 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Hutang DED Pemeliharaan Kandang Satwa Tahap II | 19,912,200.00 |
| 112 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Pembangunan Kandang Satwa Fisik (lanjutan kandang tahap 2) tahun 2021 | 226,017,924.00 |
| 113 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Hutang Pemeliharaan DED Kantor Pusat Informasi | 81,555,400.00 |
| 114 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | Pembayaran DED Pembangunan Kantor Camat ABTB Termyn I | 158,840,000.00 |
| 115 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | Pembayaran Thermin I DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Birugo | 35,380,000.00 |
| 116 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | DED Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan | 111,576,960.00 |
| 117 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | Stasiun Tahap I (Perencanaan I : 77.597.880, Termin I 40% (uang muka) : 93.866.429,04, Termin II 70% : | 2,724,184,551.96 |
| 118 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | DED Sport Hall 2022 | 76,372,656.02 |
| 119 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Pembuatan Gerbang Geopark Sianok Maninjau 2022 | 208,987,128.15 |
| 120 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | revitalisasi benteng fort de kock 2022 | 2,202,318,277.80 |
| 121 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Jalur pejalan kaki (pedestrian) | 17,422,560.00 |
| 122 | Kec.ABTB | DED Pembangunan Kantor LC Termin I | 79,070,288.00 |
| | | Total | 37,618,883,121.17 |

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN PER SKPD PER KELOMPOK BARANG

| No. | Nama SKPD | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | TOTAL AKUMULASI ASET TETAP |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Peralatan dan Mesin | Gedung dan Bangunan | Jalan, Irigasi dan Jaringan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sekretariat DPRD | 13,143,516,878.00 | 1,854,476,019.00 | - | 14,997,992,897.00 |
| 2 | Sekretariat Daerah | 29,753,103,089.00 | 7,938,970,376.00 | - | 37,692,073,465.00 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 13,633,512,500.00 | 2,117,270,502.00 | 404,218,737,793.00 | 419,969,520,795.00 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 1,746,508,773.00 | 336,705,585.00 | 32,293,246,102.00 | 34,376,460,460.00 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 11,392,122,712.00 | 8,346,132,029.00 | - | 19,738,254,741.00 |
| 6 | Dinas Kesehatan | 47,301,607,225.00 | 10,683,021,623.00 | 468,191,752.00 | 58,452,820,600.00 |
| 7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 47,266,896,960.00 | 56,959,725,921.00 | - | 104,226,622,881.00 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3,022,311,008.00 | 14,055,440.00 | - | 3,036,366,448.00 |
| 9 | Dinas Sosial | 1,414,619,971.00 | 561,780,770.00 | - | 1,976,400,741.00 |
| 10 | Dinas Kebakaran | 11,790,782,455.00 | 608,530,228.00 | 251,316,872.00 | 12,650,629,555.00 |
| 11 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil | 3,353,999,944.00 | 1,144,777,321.00 | - | 4,498,777,265.00 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB | 4,188,669,072.00 | 698,122,997.00 | - | 4,886,792,069.00 |
| 13 | Dinas Pertanian dan Pangan | 7,745,704,813.00 | 4,748,910,637.00 | 1,762,576,651.00 | 14,257,192,101.00 |
| 14 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 4,290,353,544.00 | 25,947,810,121.00 | 961,345,136.00 | 31,199,508,801.00 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 4,596,612,270.00 | 786,816,925.00 | - | 5,383,429,195.00 |
| 16 | Pengelola | 1,096,244,970.00 | 3,826,464,613.00 | 1,300,634,515.00 | 6,223,344,098.00 |
| 17 | Badan Keuangan | 8,564,305,025.00 | 1,896,421,980.00 | - | 10,460,727,005.00 |
| 18 | Inspektorat | 1,792,699,577.00 | 451,952,574.00 | - | 2,244,652,151.00 |
| 19 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 2,593,280,420.00 | 837,231,838.00 | - | 3,430,512,258.00 |
| 20 | Dinas Lingkungan Hidup | 13,801,319,258.00 | 4,117,678,158.00 | 55,163,533.00 | 17,974,160,949.00 |
| 21 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 6,894,134,927.00 | 7,638,944,228.00 | 4,743,862,187.00 | 19,276,941,342.00 |
| 22 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 637,607,947.00 | - | - | 637,607,947.00 |
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja | 4,089,664,243.00 | 1,078,773,206.00 | - | 5,168,437,449.00 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 2,088,883,471.00 | - | - | 2,088,883,471.00 |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 2,534,217,993.00 | 321,352,726.00 | - | 2,855,570,719.00 |
| 26 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 7,753,322,842.00 | - | - | 7,753,322,842.00 |
| 27 | Kecamatan Guguk Panjang | 3,006,645,828.00 | 2,534,236,220.00 | - | 5,540,882,048.00 |
| 28 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | 2,586,609,421.00 | 2,564,648,927.00 | - | 5,151,258,348.00 |
| 29 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | 3,396,229,459.00 | 3,478,060,620.00 | - | 6,874,290,079.00 |
| | Total | 265,475,486,595.00 | 151,492,871,584.00 | 446,055,074,541.00 | 863,023,432,720.00 |

REKAPITULASI ASET TAK BERWUJUD DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

| No. | Nama SKPD | Aset Tidak Berwujud | Akumulasi Penyusutan |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sekretariat DPRD | - | - |
| 2 | Sekretariat Daerah | 91,754,146 | 68,360,813 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3,494,831,695 | 3,459,012,395 |
| 4 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 278,162,000 | 160,556,967 |
| 5 | Dinas Perhubungan | 52,375,900 | 52,375,900 |
| 6 | Dinas Kesehatan | 321,523,000 | 310,793,000 |
| 7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 710,859,250 | 710,859,250 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - | - |
| 9 | Dinas Sosial | - | - |
| 10 | Dinas Kebakaran | - | - |
| 11 | Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil | 362,050,000 | 198,791,750 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB | - | - |
| 13 | Dinas Pertanian dan Pangan | - | - |
| 14 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | - | - |
| 15 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja | 837,729,740 | 507,574,943 |
| 16 | Pengelola | 0.00 | - |
| 17 | Badan Keuangan | 1,104,708,420 | 1,074,329,504 |
| 18 | Inspektorat | 23,100,000 | 23,100,000 |
| 19 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | 503,099,750 | 290,637,296 |
| 20 | Dinas Lingkungan Hidup | 139,564,000 | 139,564,000 |
| 21 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | 258,599,900 | 258,599,900 |
| 22 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | - | - |
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja | - | - |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | 75,452,000 | 75,452,000 |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 89,652,600 | 88,555,270 |
| 26 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 8,944,380 | 269,786 |
| 27 | Kecamatan Guguk Panjang | - | - |
| 28 | Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | - | - |
| 29 | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | - | - |
| | TOTAL | 8,352,406,781.00 | 7,418,832,774.00 |

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG SERTA REALISASI

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 (Rp) | Keputusan/ Nomor/ Tanggal | Realisasi Dana APBD(Rp) | Realisasi DAK (Rp) | Persentase Realisasi |
|---|----------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | |
| 1 | Emi Fitri | Jl. Mandiangin Gang Melur No.36 F RT.005 RW.001 | 50,000,000.00 | SK WAKO No.188.45-184-2022 / Tanggal 13 Juli 2022 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 2 | Novri Yanti | Jl. Prof Bahder Johan RT.005 RW.002 | 50,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 3 | Ade Putra | Jl. Prof Bahder Johan RT.005 RW.002 | 50,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 4 | Hidayat | Jl.BAHDER JOHAN RT 005 RW 002 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 5 | Rossi | JL. BAHDER JOHAN RT 005 RW 002 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 6 | Ervina | JANGKAK C. IPUH RT 001 RW 004 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 7 | Hendrizon | JANGKAK RT 001 RW 004 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 8 | Erival | Jl. Ipuh Mandiangin RT 003 RW 002 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 9 | Nelda Hariance | Ipuah Mandiangin RT 006 RW 002 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 10 | Erdanita | JL Mandiangin Kubu Balirik RT 002 RW 002 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 11 | Mardaud S | Mandiangin RT.001 RW.001 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 12 | Syawal | Jl. Veteran NO. 174 C RT.001 RW.005 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 13 | Syafrizal | Jl. Veteran RT.001 RW.001 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 14 | Sofia Elizana | Kabun Pulasan RT 003 RW 003 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 15 | Rismijon | Kabun Pulasan RT 003 RW 006 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 16 | Armi Yakup | Jl. Kabun Pulasan RT 004 RW 003 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 17 | Nurma | Jl. Angku Basa NO. 30 RT 001 RW 002 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 18 | Ratna | Jln bahder Johan RT 001 RW 005 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 19 | Rosminati | Kabun Pulasan Dalam RT 004 RW 003 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 20 | Yasrizal | Jl. Pejuang 45 No.17C RT.001 RW.001 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 21 | Yulia Silfiani | Jl. Pejuang 45 No. 17C RT.001 RW.001 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 22 | Sefri Wati | Jl. Pendidikan Ateh Lurah RT.004 RW.003 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 23 | Linda Yulianty | Jln. Padang Gamuak RT.002 RW.005 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 24 | Novia Antoni D | Jl. Hamka Ujung Bukit RT.003 RW.006 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 25 | Yulia Rini | Jl. Ladang Anduang RT.003 RW.003 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 26 | Syafruddin | Ladang Andung RT.003 RW.003 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 27 | Mitra Wati | Jl. St. Syahrir No. 24 A RT 003 RW 003 | 50,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100 % |
| 28 | Epi Rafles | Jln. Dr. Hamka Gg Ubk No. 2 RT 003 RW 006 | 50,000,000.00 | sda | - | 20,000,000.00 | 40 % |
| 29 | Hendra | Jln. ST. Syahril Gg.Pelajar No.67 RT.001 RW.004 | 50,000,000.00 | sda | - | 20,000,000.00 | 40 % |
| 30 | Lidya Yeni | Jl. Baiturridwan RT.004 RW.002 | 22,500,000.00 | SK WAKO No.188.45-129-2022 / Tanggal 30 Mei 2022 | 22,500,000.00 | - | 100 % |
| 31 | Rukmaini | Jl. Ibrahim Musa No 51 A RT.001 RW.002 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 32 | Nurtini | Jl. Unggek Dt Bagindo I No 61 RT.004 RW.002 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | - | 100 % |
| 33 | Yuanita | Jl. Unggek Dt Bagindo II No 61 RT.004 RW.002 | 10,000,000.00 | | sda | 10,000,000.00 | - |
| 34 | Cut Elfiza | Jl. Tabek Tuhua RT.001 RW.003 | 35,000,000.00 | sda | 35,000,000.00 | - | 100 % |
| 35 | Yulinar | Jl. Bukit Sangkut RT.003 RW.004 | 35,000,000.00 | sda | 35,000,000.00 | - | 100 % |
| 36 | Fitra Rahayu | Jl. Lapau Batu RT.002 RW.003 | 35,000,000.00 | sda | 35,000,000.00 | - | 100 % |
| 37 | Afriwati | Jl. Mesjid RT.003 RW.002 | 17,500,000.00 | sda | 17,500,000.00 | - | 100 % |
| 38 | Fitri Handayani | Kabun Pulasan RT.003 RW.003 | 15,000,000.00 | sda | 15,000,000.00 | - | 100 % |
| 39 | Alfitra Jonitra | Jln. Panganak RT.003 RW.002 | 15,000,000.00 | sda | 15,000,000.00 | - | 100 % |
| 40 | Devi Marwina | Jl. Jambak Muko No.11 RT.001 RW.002 | 15,000,000.00 | sda | 15,000,000.00 | - | 100 % |
| 41 | Fefi Yenita Rayu | Jl. Abdul Manan RT.003 RW.001 | 40,000,000.00 | sda | 40,000,000.00 | - | 100 % |
| 42 | Eriani | Talao RT.001 RW.005 | 30,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | - | 100 % |
| 43 | Indra Wilis | Jalan Panorama No.53 RT.003 RW.002 | 20,000,000.00 | sda | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 44 | Asna | Jl. Mangkuto Ameh RT.001 RW.002 | 30,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | - | 100 % |
| 45 | Jeni Sri Angreni | JL. Saaddudin Djambak No. 95 RT.001 RW.004 | 20,000,000.00 | sda | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 46 | Jonni Irwan | Perumahan Gantiang Permai RT 003 RW 004 | 20,000,000.00 | sda | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 47 | Refni Netti | JL Kubu Tanjung RT.002 RW.002 | 25,000,000.00 | sda | 25,000,000.00 | - | 100 % |
| 48 | Rina Apri | Jl. Padat Karya IA Kuriman Panorama Baru RT.002 RW.001 | 15,000,000.00 | sda | 15,000,000.00 | - | 100 % |
| 49 | Saemar | JL Kubu Tanjung RT.001 RW.002 | 30,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | - | 100 % |
| 50 | Kamba Murni | JL Kubu Tanjung NO. 84 RT.002 RW.003 | 25,000,000.00 | sda | 25,000,000.00 | - | 100 % |
| 51 | Rolan Syahrul Afandi | Kubu Tanjung RT.002 RW.003 | 60,000,000.00 | sda | 60,000,000.00 | - | 100 % |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 (Rp) | Keputusan/ Nomor/ Tanggal | Realisasi Dana APBD(Rp) | Realisasi DAK (Rp) | Persentase Realisasi |
|-----|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | SYAMSTAR | Jl. Ladang Cakiah No. 96 RT.001 RW.002 | 50,000,000.00 | sda | 50,000,000.00 | - | 100 % |
| 53 | Efrina | Jl. Sumur RT.002 RW.001 | 50,000,000.00 | sda | 50,000,000.00 | - | 100 % |
| 54 | Emma Jusria | Simpang Limau RT.003 RW.002 | 40,000,000.00 | sda | 40,000,000.00 | - | 100 % |
| 55 | Sumiarti | Jln. Prof. Hamka 55 D RT.002 RW.004 | 40,000,000.00 | sda | 40,000,000.00 | - | 100 % |
| 56 | Armen | Pakan Kurai RT.001 RW.005 | 35,000,000.00 | sda | 35,000,000.00 | - | 100 % |
| 57 | Ermawati. | Jl. ST. Syahrir Simpang Aur Dalam Gang Pelajar No RT.001 RW.004 | 35,000,000.00 | sda | 35,000,000.00 | - | 100 % |
| 58 | Erniwati | JL. PANORAMA BARU NO. 65 A | 20,000,000.00 | sda | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 59 | Gusrina Wati | Jalan Masjid Darussalam RT.001 RW.005 | 50,000,000.00 | sda | 50,000,000.00 | - | 100 % |
| 60 | Deswati | Jl. Situpo Raya RT.003 RW.006 | 20,000,000.00 | sda | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 61 | Herman/Alfialis | Jl. Dn Dt Majo Basa Nan Kuniang RT.001 RW.003 | 30,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | - | 100 % |
| 62 | Andrizal | Jl. Lubuk Sebaris RT.004 RW.006 | 20,000,000.00 | sda | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 63 | ALIUMAR | Gurun Panjang RT.004 RW.006 | 20,000,000.00 | sda | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 64 | Annesa Suwandy | Jl. Parak Congkak RT.002 RW.004 | 30,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | - | 100 % |
| 65 | Andi Difta | Panorama Baru RT.001 RW.001 | 22,500,000.00 | sda | 22,500,000.00 | - | 100 % |
| 66 | MAWARDI | Jl. Bermawi Kapalo Koto Rt.002 Rw.001 | 40,000,000.00 | sda | - | - | 0 % |
| 67 | Meldawati | Bukit Lampasa RT.005 RW.002 | 30,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | - | 100 % |
| 68 | Yuneliza R | Parit Antang RT.001 RW.001 | 40,000,000.00 | sda | 40,000,000.00 | - | 100 % |
| 69 | Nora Fitrianis | Pulai Anak Air RT.002 RW.004 | 20,000,000.00 | sda | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 70 | YUNIMAR | Parit Antang RT.002 RW.001 | 50,000,000.00 | sda | 50,000,000.00 | - | 100 % |
| 71 | Arnawita | Jl. Parit Antang Balai Banyak RT.001 RW.002 | 25,000,000.00 | sda | 25,000,000.00 | - | 100 % |
| 72 | Nover Riko | Jln Panorama Baru RT.002 RW.001 | 15,000,000.00 | sda | 15,000,000.00 | - | 100 % |
| 73 | Yusminiarti | Jl. Parit Natuang RT.002 RW.002 | 22,500,000.00 | sda | 22,500,000.00 | - | 100 % |
| 74 | Syafrizal | Jl. Kurai Ekor Labuah No. 1 RT.001 RW.002 | 40,000,000.00 | sda | 40,000,000.00 | - | 100 % |
| 75 | Wirda | Jl. Kurai Balai Banyak NO.35 RT.002 RW.003 | 50,000,000.00 | sda | 50,000,000.00 | - | 100 % |
| 76 | Gusmiwati | Jl. Kurai Balai Banyak RT.001 RW.003 | 50,000,000.00 | sda | 50,000,000.00 | - | 100 % |
| 77 | Yaslim M | Jln. Panorama Baru RT.002 RW.001 | 15,000,000.00 | sda | 15,000,000.00 | - | 100 % |
| 78 | Desmawarni | Jl. Kurai Balai Banyak No.42 RT.002 RW.003 | 30,000,000.00 | sda | 30,000,000.00 | - | 100 % |
| 79 | Desnawati | Pulai Anak Air RT.001 RW.004 | 20,000,000.00 | sda | 20,000,000.00 | - | 100 % |
| 80 | Nursiah | JL Bahder Johan RT.001 RW.005 | - | | - | | |
| 81 | Maiyulis | Panganak RT 003 / RW 002 | - | | - | | |
| 82 | Isna | JL. Angku Basa No 73 RT.001 RW.005 | - | | - | | |
| 83 | Doni Efrengki | Jl. Sukarno Hatta GG Swadya RT 007 RW 001 | - | | - | | |
| 84 | Yusnida | Kabun Pulasan Dalam RT 004 RW 003 | - | | - | | |
| 85 | Attrita | Jl. Hamka No. 10 C RT 001 RW 006 | - | | - | | |
| 86 | Jesnawati | Jl. Angku Basa No 106 G RT 001 RW 002 | - | | - | | |
| 87 | Zulfauzi | JL. Angku Basa No 140 RT.001 RW.006 | - | | - | | |
| 88 | Yusnani | Jalan Pincuran Gaung NO 8 RT.004 RW.002 | - | | - | | |
| 89 | Syofni | Jl. Gurun Tigo RT.003 RW.005 | - | | - | | |
| 90 | Yasnil | Jl. Hamka No. 15 E RT.002 RW.006 | - | | - | | |
| 91 | Salmi | Jl. Bermawi No, 15 K. Koto RT.001 RW.002 | - | | - | | |
| 92 | Ridwan | Jl. Puding Mas No 23 RT.001 RW.004 | - | | - | | |
| 93 | Yong Bastian | Jl. H. Miskin No. 8 Surau Gadang Mandiangin RT.002 RW.003 | - | | - | | |
| 94 | Insuarlis | Ranjau RT.003 RW.003 | - | | - | | |
| 95 | Ermawati | Jl. Gurun Panjang RT.004 RW.006 | - | | - | | |
| 96 | Mayulis | JL Prof Dr Bahder Johan RT.007 RW.002 | - | | - | | |
| 97 | Efrizal M | Kabun Pulasan RT 002 RW 006 | - | | - | | |
| 98 | Deswita | JL. Diponegoro No. 50 A RT.004 RW.004 | - | | - | | |
| 99 | Desy Hartati | Jl. Sumur No. 31 RT.002 RW.001 | - | | - | | |
| 100 | Rumiza Leli | JL. ST Syahrir Gg Pelajar No.83 RT.001 RW.004 | - | | - | | |
| 101 | Yulidar Detty, HJ | Jl. Veteran No. 125 C RT.001 RW.001 | - | | - | | |
| 102 | Erni Yusnita | Jl. Ipuh Mandiangin RT.006 RW.002 | - | | - | | |
| 103 | Yuni Berti | Jl. Veteran No. 51 RT 002 RW 002 | - | | - | | |
| 104 | Ernawati | JL Angku Basa No.108 RT.002 RW.001 | - | | - | | |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 (Rp) | Keputusan/ Nomor/ Tanggal | Realisasi Dana APBD(Rp) | Realisasi DAK (Rp) | Persentase Realisasi |
|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 105 | Nofendra | JL Bahder Johan RT.001 RW.005 | - | | - | | |
| Jumlah Total | | | 2,910,000,000.00 | | 2,230,000,000.00 | 580,000,000.00 | |

DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH TAHUN 2022 SERTA REALISASI

1) HIBAH BERUPA UANG

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| 1 | MIS AL IKHWAN | Jl. Pintu Kabun No.99 | - | - | | |
| 2 | SD ISLAM AL AZHAR 67 BUKITTINGGI | Jl. Mr. Asaad No. 70 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 3 | SD ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI | Jl. Mr. Asaat No. 52 B Banto Darano | 15,000,000.00 | | | - % |
| 4 | SD ISLAM CENDEKIA | Jl. Veteran No. 202 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 5 | SD ISLAM EXCELLENT PLUS | Jl. Adinegoro tengah jua I no. 2 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 6 | SD ISLAM SJECH M. DJAMIL DJAMBEK | Jl. Syech Djamil Djambek | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 100 % |
| 7 | SD ISLAM TERPADU MASYITHAH | Jl. Abdul Hafis Djalil | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 8 | SDIT ADZKIA BUKITTINGGI | Jl. Prof. Hamka No.33 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 9 | SDIT AL AZHAR DARUL JANNAH | Jl. TDR. Parak Konsi Bukit Apit Puhun | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 10 | SDIT CAHAYA HATI | Jl. Pabelokan, Kel. Pakan Labuah | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | | 100 % |
| 11 | SDIT INSAN KAMIL | Jl. Sutan Syahrir | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 12 | SDIT SYAHIRAL ILMU | Jl. Parak Congkak | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 13 | SD JAMIYYATUL HUJJAJ BUKITTINGGI | Jl. Jam"iyyatul Hujjaj, Tarok Dipo | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 14 | SD LEBAH PEMBELAJAR | Jl. By Pass, Manggis Ganting | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 15 | SD SEKOLAH ALAM BUKITTINGGI | Jl. M. Yamin No. 51 Aur Kuning | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 16 | SDS FRANSISKUS | Jl. Bagindo Azizchan No. 11 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 17 | SDS IT ULUL ALBAB BUKITTINGGI | Jl.Raya By Pass Kel. Pulai Anak Air | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 18 | SDS TRISULA PERWARI | Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 44 A | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 19 | SD SURYA KIDS | Jl. Veteran No. 78 B Jirek | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 20 | SD SWASTA ISLAM AL FALAH | Jl. Mesjid Nurul Huda Panganak | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 100 % |
| 21 | SD SWASTA ISLAM AL FALAH | Jl. Mesjid Nurul Huda Panganak | 384,300,000.00 | 384,300,000.00 | | 100 % |
| 22 | SDS FRANSISKUS | Jl. Bagindo Azizchan No. 11 | 317,700,000.00 | 317,700,000.00 | | 100 % |
| 23 | SDIT INSAN KAMIL | Jl. Sutan Syahrir | 595,800,000.00 | 586,665,300.00 | | 98 % |
| 24 | SDI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK | | 146,700,000.00 | 146,668,275.00 | | 100 % |
| 25 | SD ISLAM AL AZHAR 67 BUKITTINGGI | Jl. Mr. Asaad No. 70 | 424,760,000.00 | 399,404,367.00 | | 94 % |
| 26 | SD ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI | Jl. Mr. Asaat No. 52 B Banto Darano | 673,200,000.00 | 673,200,000.00 | | 100 % |
| 27 | SD ISLAM CENDEKIA | Jl. Veteran No. 202 | 93,962,900.00 | 89,080,343.00 | | 95 % |
| 28 | SD ISLAM EXCELLENT PLUS | Jl. Adinegoro tengah jua I no. 2 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 | | 100 % |
| 29 | SD ISLAM TERPADU MASYITHAH | Jl. Abdul Hafis Djalil | 279,900,000.00 | 279,900,000.00 | | 100 % |
| 30 | SDIT ADZKIA BUKITTINGGI | Jl. Prof. Hamka No.33 | 85,500,000.00 | 85,500,000.00 | | 100 % |
| 31 | SDIT AL AZHAR DARUL JANNAH | Jl. TDR. Parak Konsi Bukit Apit Puhun | 215,707,000.00 | 214,718,489.00 | | 100 % |
| 32 | SDIT CAHAYA HATI | Jl. Pabelokan, Kel. Pakan Labuah | 490,500,000.00 | 490,500,000.00 | | 100 % |
| 33 | SDIT SYAHIRAL ILMU | Jl. Parak Congkak | 449,100,000.00 | 449,100,000.00 | | 100 % |
| 34 | SD JAMIYYATUL HUJJAJ BUKITTINGGI | Jl. Jam"iyyatul Hujjaj, Tarok Dipo | 577,779,298.00 | 577,657,430.00 | | 100 % |
| 35 | SD LEBAH PEMBELAJAR | Jl. By Pass, Manggis Ganting | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 | | 100 % |
| 36 | SD SEKOLAH ALAM BUKITTINGGI | Jl. M. Yamin No. 51 Aur Kuning | 59,400,000.00 | 59,379,753.00 | | 100 % |
| 37 | SDS IT ULUL ALBAB BUKITTINGGI | Jl.Raya By Pass Kel. Pulai Anak Air | 34,170,000.00 | 34,080,000.00 | | 100 % |
| 38 | SD SURYA KIDS | Jl. Mr. Asaad No. 70 | 110,700,000.00 | 110,700,000.00 | | 100 % |
| 39 | SDS TRISULA PERWARI | Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 44 A | 48,600,000.00 | 48,600,000.00 | | 100 % |
| 40 | DEWAN PENDIDIKAN KOTA BUKITTINGGI | Jl. Dr. A Rivai No.9 Atas Ngarai | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 4,395,200.00 | 91 % |
| 41 | MTsS AL MA"ARIF | Jl. Koto Selayan | - | - | | |
| 42 | SMP ISLAM AL AZHAR 39 BUKITTINGGI | Jl. Mr. Asaad No. 70 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi |
|----|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 43 | SMP ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI | Jl. Mr. Asaat No. 52 B | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 | | 100 % |
| 44 | SMPIT CAHAYA HATI BUKITTINGGI | Jl. Veteran RT 03/RW 01 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | | 100 % |
| 45 | SMPIT SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI | Jl. Syech Djamil Djambek | 13,125,000.00 | 13,125,000.00 | | 100 % |
| 46 | SMP JAMIYYATUL HUJAJ BUKITTINGGI | Jl. Sumurapak Jamiyyatul Hujaj | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 47 | SMPS PSM BUKITTINGGI | Jl. Dr. A. Rivai No. 17 | 53,750,000.00 | 53,750,000.00 | | 100 % |
| 48 | SMPS XAVERIUS BUKITTINGGI | Jl. Bagindo Azizchan No. 11 | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 | | 100 % |
| 49 | SMP ISLAM AL AZHAR 39 BUKITTINGGI | Jl. Mr. Asaad No. 70 | 108,900,000.00 | 107,374,000.00 | | 99 % |
| 50 | SMP ISLAM AL ISHLAH BUKITTINGGI | Jl. Mr. Asaat No. 52 B | 564,300,000.00 | 537,901,449.00 | 175,622,798.00 | 64 % |
| 51 | SMPIT CAHAYA HATI BUKITTINGGI | Jl. Veteran RT 03/RW 01 | 135,300,000.00 | 135,300,000.00 | | 100 % |
| 52 | SMPIT SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI | Jl. Syech Djamil Djambek | 71,500,000.00 | 71,500,000.00 | | 100 % |
| 53 | SMP JAMIYYATUL HUJAJ | Jl. Syech Djamil Djambek | 53,900,000.00 | 53,285,616.00 | | 99 % |
| 54 | SMPS PSM BUKITTINGGI | Jl. Dr. A. Rivai No. 17 | 62,700,000.00 | 60,763,658.00 | | 97 % |
| 55 | SMPS XAVERIUS BUKITTINGGI | Jl. Bagindo Azizchan No. 11 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | | 100 % |
| 56 | RA AL IKHWAN | | | | | |
| 57 | RA AL IKHWAN | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 100 % |
| 58 | KB An Naufa | Jl. Luak Anyia Gulai Bancah | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 59 | KB Az Zahrah | Jl. Veteran Depan M. Al Falah | 82,000,000.00 | 82,000,000.00 | | 100 % |
| 60 | KB Bougenvill | Jl. H. Miskin Palolok | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 61 | KELOMPOK BERMAIN AL IKHWAN | Komplek Masjid Muslimin Pintu Kabun | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 | | 100 % |
| 62 | SPS BUAH HATI | Jl. Ladang Cakiah | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 100 % |
| 63 | SPS MATA HATI | Jl. Prof. DR. Hamka Pakan Kurai | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 100 % |
| 64 | SPS NURUL HUDA | Bukik Cangang Kayu Ramang | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 100 % |
| 65 | SPS NURUL ILMI | Jl. Adinegoro Komplek Mushalla Al Manar | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 66 | SPS PALAPA SAIYO | Jl. Bermawi Kapalo Koto | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | 100 % |
| 67 | SPS TERINTEGRASI AL IKHWAN ROSE | Jl. Anggur Komplek M. Muslimin Pintu Kabun | 53,000,000.00 | - | | - % |
| 68 | TK Aisyiyah I | Jln Perintis kemerdekaan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 69 | TK Aisyiyah II | Jln Padang Ngamuk | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 70 | TK Aisyiyah III | Jn Ladang cakiah | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 71 | TK Aisyiyah IV | Jln Hamka | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 100 % |
| 72 | TK Aisyiyah V | jln Adinegoro | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 73 | TK Asas | Jln H Miskin | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 100 % |
| 74 | TK As Salam | Garegeh | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 75 | TK Cerdas Ceria | JLn M Yamin | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 100 % |
| 76 | TK Flora Pertanian | Jln S.DJ .Jambek | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 77 | TK Gajah Tongga | Jln Umar Gafar | - | - | | |
| 78 | TK GENIUS KIDS II | Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | | 100 % |
| 79 | TK Harapan Mama | Jl M Syafei | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 80 | TK Ibnu Sina | Jln Birugo Puhun | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 81 | TK INKLUSI INSPIRASI SEMUT-SEMUT | By Pass Manggis Gantiang | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 82 | TK IRSYADDUNNAAS | Kabun Pulasan Dalam Bukittinggi | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 83 | TK ISLAM ADZKIA | Jl. Hamka Tarok Dipo, Kel. Tarok Dipo | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 84 | TK ISLAM AL-AZHAR | Jl. A. Karim No. 4, Kel. Benteng Pasar Atas | 15,000,000.00 | - | | - |
| 85 | TK ISLAM AL-AZHAR 48 | Jl. Mr. Asaat, Kel. Campago Guguk Bulek | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 86 | TK ISLAM AL-FALAH | Jl. Soekarno Hatta, Kel. Pulau Anak Air | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 100 % |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi |
|-----|--|--|------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 87 | TK ISLAM AL-FURQAN | Jl. Abd. Manan Sarojo, Kel. Campago Guguk Bulek | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 88 | TK ISLAM AL-ISHLAH | Jl. Mr. Asaat Banto Darano, Kel. Campago Guguk Bulek | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | | 100 % |
| 89 | TK ISLAM AL-MUBARAK | Jl. Bukit Apit Puhun | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 90 | TK ISLAM AL-WIRDAH | Jl. Jend. Sudirman Bukittinggi | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 91 | TK Islam Excellent | Jl. Adi negoro Tanah Jua No. 1 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 92 | TK ISLAM JAMIYATUL HUJJAJ | Jl. Tuanku Nan Renceh Kel Kayu Kubu | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 93 | TK ISLAM MASYITHAH | Jl. Jend. Sudirman Bukittinggi | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 94 | TK Islam Riyadhul Ilmi | Jl Ipuh Mandiangain Surau Gandang | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | | 100 % |
| 95 | TK ISLAM SEMAI BENIH BANGSA AL AKKABAH | wirdah | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 96 | TK Kartika 1-57 | Jl. Ombilin Belakang Balok | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 97 | TK Kartika 1 - 58 | Jl. Urip Sumoharjo | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | | 100 % |
| 98 | TK KEMALA BHAYANGKARI | Jl. Sudirman Birugo | - | - | | |
| 99 | TK Kemala Bhayangkari 11 | Jl. Jend Sudirman No. 23 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 100 | TK Kenari | Jl. Kinantan Pintu Kabun | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | | 100 % |
| 101 | TK Khalifah 35 | Jl. Yos Sudarso No.10 B. Benteng | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 102 | TK kuntum Mekar | Jln Sudirman | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 103 | TK Melur Putih | Jln Kurai | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 104 | TK Mutiara | Jl. Perintis Kemerdekaan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 105 | TK MUTIARA INSANI | Jl. Syaadudin Jambek | - | - | | |
| 106 | TK PAUD Berbasis Mesjid Al Abrar | Jln Dr Arivai kompleks RSAM | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 107 | TK PERTIWI AL-WUSTHA | Jl. Soekarno Hatta Ganting, Kel. Manggis Ganting | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 108 | TK Qurratu Aini | Jln Ipuh Surau Gadang | 67,250,000.00 | 67,250,000.00 | | 100 % |
| 109 | TK S TUNAS BANGSA | Jl. Batang Masang Belakang Balok | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 | | 100 % |
| 110 | TK Surya Kids | Jln Soekarno Hatta | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 100 % |
| 111 | TK Surya Kids Duo Platinum | Jln Jendral Sudirman Birugo | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 112 | TK SURYA KIDS TIGO | Jl. Kubu Tanjung | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | | 100 % |
| 113 | TK TALI KASIH BUNDA | Jl. H. Bilal Dt. Majo Indo Manggih Gantiang | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | | 100 % |
| 114 | TK TELADAN PERTIWI TUNAS HARAPAN | Jl. Panorama No 30 Kel. Kayu Kubu | 15,000,000.00 | - | | - |
| 115 | TK Trisula Perwari | Jln Syech Ibrahim Musa | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 116 | TPA AVICENA | Jalan Kabun Pulasan Tembok | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 117 | TPA MITRA BUNDA | Jl. Havid Djalil RT 003/001 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 118 | KB Az Zahrah | Jl. Veteran Depan M. Al Falah | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | | 100 % |
| 119 | KB Bougenvill | Jl. H. Miskin Palolok | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | | 100 % |
| 120 | KB DAARUL ULUUM | Jl. Birugo Bungo | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 100 % |
| 121 | KB DAUD HKBP | Jl. M. Syafei No. 26 Tarok Dipo | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 100 % |
| 122 | KB DUTA WAHANA | Jl. Teuku Umar No. 10 A | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | | 100 % |
| 123 | KB INKLUSI INSPIRASI SEMUT-SEMUT | Jl By Pas No 23 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | | 100 % |
| 124 | KB ISLAM EXCELLENT | Jl. Adinegoro Tanah Jua 1, Kel. Aur Kuning | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | | 100 % |
| 125 | KB KASIH IBU AL WUSTHA | Jl. Soekarno Hatta Sanjai | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 100 % |
| 126 | KB KHALIFAH 35 | Jl. Saaduddin Jambek Kelurahan Pulai Anak Air | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | | 100 % |
| 127 | KB SERUNI | Jl. AK Gani No. 14 C Guguk Bulek | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | | 100 % |
| 128 | KB SURYA KIDS | Jl. Soekarno Hatta No. 81 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | | 100 % |
| 129 | KB TUNAS BANGSA | Jl. Batang Masang No. 7 Kel Blkng Balok | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | 100 % |
| 130 | KB TUNAS HARAPAN | Jl. Abdul Manan No. 26 Sarojo | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 100 % |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi |
|-----|--|---|------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 131 | KELOMPOK BERMAIN AL IKHWAN | Komplek Masjid Muslimin Pintu Kabun | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 | | 100 % |
| 132 | SPS ANGGUR AL-WUSTA | Jl. Soekarno Hatta | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | | 100 % |
| 133 | SPS FLAMBOYAN | Jl. Kehakiman I Belakang Balok | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | | 100 % |
| 134 | SPS MAISHARAH | Jl. Tarok Bungo | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | | 100 % |
| 135 | SPS MATA HATI | Jl. Prof. DR. Hamka Pakan Kurai | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | | 100 % |
| 136 | SPS PALAPA SAIYO | Jl. Bermawi Kapalo Koto | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | | 100 % |
| 137 | TAMAN KANAK-KANAK ASAS | jl.. Haji Miskin No 2 Surau Gadang | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | | 100 % |
| 138 | TK Gajah Tongga | Jln Umar Gafar | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | | 100 % |
| 139 | TK INKLUSI INSPIRASI SEMUT-SEMUT | By Pass Manggis Gantiang | 61,800,000.00 | 61,800,000.00 | | 100 % |
| 140 | TK ISLAM AL-FALAH | Jl. Soekarno Hatta, Kel. Pulau Anak Air | 55,800,000.00 | 55,800,000.00 | | 100 % |
| 141 | TK ISLAM MASYITHAH | Jl. Jend. Sudirman Bukittinggi | 55,200,000.00 | 55,200,000.00 | | 100 % |
| 142 | TK ISLAM SEMAI BENIH BANGSA AL AKKABAH | Jl. Byas Pass Lakuang, Kel. Pulau Anak Air | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 | | 100 % |
| 143 | TK Kartika 1 - 58 | Jl. Urip Sumoharjo | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | | 100 % |
| 144 | TK Kemala Bhayangkari | Jl. Jend. Sudirman No 23 Birugo | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 | | 100 % |
| 145 | TK Qurratu Aini | Jln Ipuh Surau Gadang | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | | 100 % |
| 146 | TK Surya Kids Duo Platinum | Jln Jendral Sudirman Birugo | 44,400,000.00 | 44,400,000.00 | | 100 % |
| 147 | TPA AISYIYAH I | Jl. P. KemerdekaanNo. 28 Kel ATTS | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | | 100 % |
| 148 | TPA AL MISBAH | Jl. M. Nurul Wathan No. 13 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | | 100 % |
| 149 | TPA AVICENA | Jalan Kabun Pulasan Tembok | 6,600,000.00 | 3,486,000.00 | | 53 % |
| 150 | TPA CEMARA | Jl. Veteran No. 32 F | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 100 % |
| 151 | TPA IBNU SINA YARSI | Jl. Sudirman Birugo puhun | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 | | 100 % |
| 152 | TPA IBUNDA | Jl. Perwira II No. 18 Belakang Balok | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | | 100 % |
| 153 | TPA ISLAM EXCELLENT | Jl. Adinegoro Tanah Jua 1 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | | 100 % |
| 154 | TPA MARDI WIDAYAT | Jl. Bgd. Azis Chan No. 14 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | | 100 % |
| 155 | TPA MITRA BUNDA | Jl. Havid Djalil RT 003/001 | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | | 100 % |
| 156 | TPA MUTIARA | Jl Perintis Kemerdekaan No 28 Bukittinggi | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | | 100 % |
| 157 | TPA MUTIARA BUNDA | Jl. Sumurapak Bukittinggi | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 100 % |
| 158 | TPA NAFHA | Jl. Bukit Apit | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | | 100 % |
| 159 | TPA TUNAS BANGSA | Jl. Batang Masang No. 7 Kel Belakang Balok | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | | 100 % |
| 160 | KB Aisyiyah I | Jl. P. Kemerdekaan Kel ATTS | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 161 | KB Al-Azhar | Jl. A. Karim No. 4 Kel Benteng Pasar Atas | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | | 100 % |
| 162 | KB Al-Falah | Jl. Soekarno Hatta No. 8F | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | | 100 % |
| 163 | KB ASSALAAM | Jalan Dj Mangkuto Ameh Garegeh Bujkittinggi | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | | 100 % |
| 164 | KB Berbasis Masjid Al Abrar | Jl. DR. A. Rivai Kayu Kubu | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | | 100 % |
| 165 | KB CREATIVE KIDS | Jl Prof. Hamka No 23 Pakan Kurai | | | | |
| 166 | KB GENIUS KIDS | Jl. Anggur No. 1 Pintu Kabun | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 | | 100 % |
| 167 | KB GENIUS KIDS III | Jl. M. Yamin No. 16 Aur Atas | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | | 100 % |
| 168 | KB MUTIARA | Jl Perintis Kemerdekaan No 28 Bukittinggi | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | | 100 % |
| 169 | SPS AR RAHIM | Jl. Dt. Mangkuto Ameh | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | | 100 % |
| 170 | SPS BUAH HATI | Jl. Ladang Cakiah | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | | 100 % |
| 171 | SPS DAHLIA | Jl. Haviz Jalil Birugo | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 | | 100 % |
| 172 | SPS LENTERA | Jl. Pincuran Gaung Tarok | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | | 100 % |
| 173 | SPS NURUL HUDA | Bukik Cangang Kayu Ramang | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | | 100 % |
| 174 | SPS NURUL ILMI | Jl. Adinegoro Komplek Mushalla Al Manar | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi |
|-----|-----------------------------------|--|------------------|----------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 175 | SPS Semai Benih Bangsa Batu Hampa | Jl konsolidasi Ujung Bukik | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 100 % |
| 176 | TK Aisiyiah I | Jln Perintis kemerdekaan | 103,800,000.00 | 103,800,000.00 | | 100 % |
| 177 | TK Aisiyiah II | Jln Padang Ngamuk | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 | | 100 % |
| 178 | TK Aisiyiah III | Jn Ladang cakiah | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 | | 100 % |
| 179 | TK Aisiyiah IV | Jln Hamka | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | | 100 % |
| 180 | TK Aisiyiah V | jln Adinegoro | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 | | 100 % |
| 181 | TK ASSALAAM | Jl. Dj Dt Mangkuto Ameh Garegeh | 30,600,000.00 | 30,600,000.00 | | 100 % |
| 182 | TK Cerdas Ceria | JLn M Yamin | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 100 % |
| 183 | TK Flora Pertanian | Jln S.DJ .Jambek | 34,200,000.00 | 34,200,000.00 | | 100 % |
| 184 | TK GENIUS KIDS II | Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | | 100 % |
| 185 | TK Ibnu Sina | Jln Birugo Puhun | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 | | 100 % |
| 186 | TK IRSYADDUNNAAS | Kabun Pulasan Dalam Bukittinggi | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | | 100 % |
| 187 | TK ISLAM ADZKIA | Jl. Hamka Tarok Dipo, Kel. Tarok Dipo | 73,200,000.00 | 73,200,000.00 | | 100 % |
| 188 | TK ISLAM AL-AZHAR | Jl. A. Karim No. 4, Kel. Benteng Pasar Atas | 73,800,000.00 | 73,800,000.00 | | 100 % |
| 189 | TK ISLAM AL-AZHAR 48 | Jl. Mr. Asaat, Kel. Campago Guguk Bulek | 54,600,000.00 | 54,600,000.00 | | 100 % |
| 190 | TK ISLAM AL-FURQAN | Jl. Abd. Manan Saroyo, Kel. Campago Guguk Bulek | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 | | 100 % |
| 191 | TK ISLAM AL-ISHLAH | Jl. Mr. Asaat Banto Darano, Kel. Campago Guguk Bulek | 63,600,000.00 | 63,600,000.00 | | 100 % |
| 192 | TK ISLAM AL-MUBARAK | Jl. Bukit Apit Puhun | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 100 % |
| 193 | TK ISLAM AL-WIRDAH | Jl. Jend. Sudirman Bukittinggi | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | | 100 % |
| 194 | TK Islam Excellent | Jl. Adi negoro Tanah Jua No. 1 | 61,800,000.00 | 61,800,000.00 | | 100 % |
| 195 | TK ISLAM JAMIYATUL HUJJAJ | Jl. Tuanku Nan Renceh Kel Kayu Kubu | 76,200,000.00 | 76,200,000.00 | | 100 % |
| 196 | TK Islam Nurul Hidayah | JLn Kubu Tanjung tigo Baleh | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 100 % |
| 197 | TK Islam Riyadhul Ilmi | Jl Ipuh Mandiangain Surau Gandang | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 100 % |
| 198 | TK Kartika 1-57 | Jl. Ombilin Belakang Balok | 17,400,000.00 | 17,400,000.00 | | 100 % |
| 199 | TK Kenari | Jl. Kinantan Pintu Kabun | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 100 % |
| 200 | TK Khalifah 35 | Jl. Yos Sudarso No.10 B. Benteng | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | | 100 % |
| 201 | TK Melur Putih | Jln Kurai | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | | 100 % |
| 202 | TK Mutiara | Jl. Perintis Kemerdekaan | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | | 100 % |
| 203 | TK Mutiara Insani | Jln Perintis Kemerdekaan | 8,400,000.00 | 4,437,000.00 | 3,963,000.00 | 6 % |
| 204 | TK PAUD Berbasis Mesjid Al Abrar | Jln Dr Arivai kompleks RSAM | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | | 100 % |
| 205 | TK PERTIWI AL-WUSTHA | Jl. Soekarno Hatta Ganting, Kel. Manggis Ganting | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 100 % |
| 206 | TK S HARAPAN MAMA | Jl. Melati Tarok Bukittinggi | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | | 100 % |
| 207 | TK S KUNTUM MEKAR | Jl. Sudirman Bukittinggi | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 | | 100 % |
| 208 | TKS TRISULA PERWARI | Tengah Sawah | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | | 100 % |
| 209 | TK S TUNAS BANGSA | Jl. Batang Masang Belakang Balok | 16,200,000.00 | 16,200,000.00 | | 100 % |
| 210 | TK Surya Kids | JLn Soekarno Hatta | 103,800,000.00 | 103,800,000.00 | | 100 % |
| 211 | TK SURYA KIDS TIGO | Jl. Kubu Tanjung | 31,800,000.00 | 31,800,000.00 | | 100 % |
| 212 | TK TALI KASIH BUNDA | Jl. H. Bilal Dt. Majo Indo Manggih Gantiang | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | | 100 % |
| 213 | TK TELADAN PERTIWI TUNAS HARAPAN | Jl. Panorama No 30 Kel. Kayu Kubu | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 100 % |
| 214 | TPA AMANAH | Jl. Dt. Mangkuto Ameh | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 100 % |
| 215 | TPA CERDAS CERIA | Jl. M. Yamin No. 16 Aur Atas | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 | | 100 % |
| 216 | TPA KASIH BUNDA | Jl. Dr. Arivai Komplek RSAM Bukittinggi | | | | |
| 217 | TPA PRIMA ASUH | Jalan Umar Ghafar No. 2 Bukittinggi | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | 100 % |
| 218 | TPA QURRATU AINI | Jl. Ipuh Surau Gadang | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | | 100 % |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 219 | TPA SURYA KIDS | Jl. Soekarno Hatta No. 81 | 21,000,000.00 | | | - % |
| 220 | KB Adzkia | Jl. Dr. Prof Hamka TAROK Dipo | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 100 % |
| 221 | KB An Naufa | Jl. Luak Anyia Gulai Bancah | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 100 % |
| 222 | Paket A PKBM Al Ma'arif | Jl. Gunjo Koto Selayan | 89,700,000.00 | 89,700,000.00 | | 100 % |
| 223 | Paket B PKBM Kasih Bundo | JL. BAHAR KAMIL Manggis Gatiang | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | | 100 % |
| 224 | PAKET B PKBM SERBA GUNA | JL. ABDUL MANAN NO.26 CAMPAGO IPUH | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 100 % |
| 225 | Paket C PKBM Kasih Bundo | JL. BAHAR KAMIL Manggis Gatiang | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | | 100 % |
| 226 | Paket C PKBM Serba Guna | Jl. ABDUL MANAN NO.26 CAMPAGO IPUH | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 100 % |
| 227 | Paket A PKBM Kasih Bundo | JL. BAHAR KAMIL Manggis Gatiang | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | | 100 % |
| 228 | SPNF SKB Kota Bukittinggi | Jl. Gurun Panjang | 250,500,000.00 | 250,500,000.00 | 202.00 | 100 % |
| 229 | Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bukittinggi | Bukittinggi | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 | | 100 % |
| 230 | Kerapatan Adat Kurai. | Jalan Kurai Balai Banyak Tigo Baleh Bukittinggi | - | - | | |
| 231 | Kerapatan Adat Nagari/KAN Aua Birugo. | Kelurahan Aua Birugo (Jl. Sudirman No. 64 Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi, Sumatera Barat 26181) | - | - | | |
| 232 | Kerapatan Adat Nagari/KAN Guguk Panjang. | Kel. Guguk Panjang (Jl. Cindua Mato, Benteng Ps. Atas Kec. Guguk Panjang Bukittinggi Sumatera Barat 26136) | - | - | | |
| 233 | Kerapatan Adat Nagari/KAN Koto Selayan. | Kel. Koto Selayan (Jl. Sumur Koto Selayan Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi Sumatera Barat 26131) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 1,157,050.00 | 97 % |
| 234 | Kerapatan Adat Nagari/KAN Mandiangin. | Kel. Mandiangin (Jl. H. Miskin No. 1 Campago Ipuh Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi Sumatera Barat 26123) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 477,940.00 | 99 % |
| 235 | Kerapatan Adat Nagari/KAN Tigo Baleh. | Kel. Pakan Labuah (Jl. Tigobaleh No. 7 Parit Antang Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi Sumatera Barat 26131) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 3,864,865.00 | 90 % |
| 236 | Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau/LKAAM | Jl. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 6,161,300.00 | 95 % |
| 237 | Persatuan Wanita Kurai. | Jalan Kurai Balai Banyak Tigo Baleh Bukittinggi Sumatera barat | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 100 % |
| 238 | Aliran Silek Tradisional Harimau Singgalang Kota Bukittinggi. | Jalan Guru Tuo Gg. Mustik Puhun Pintu Kabun Kec. MKS | 75,625,000.00 | 75,625,000.00 | | 100 % |
| 239 | Perguruan Silat Budi Satria. | Panganak Kecamatan Mandiangin | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100 % |
| 240 | Sanggar Mahoni | Kelurahan Birugo | - | - | | |
| 241 | Sanggar Seni Cahaya Ameh | Jl. Pincuran Gaung (Belakang SD 05 Tarok Dipo RT 02/RW 02 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | 100 % |
| 242 | Sanggar Seni Rabuang Kuniang | Jl. Angku Basa Komp. Gaya Baru No. 8 A | 85,750,000.00 | 85,750,000.00 | | 100 % |
| Total Dinas Pendidikan | | | 13,969,979,198.00 | 13,772,801,680.00 | 195,642,355.00 | 97 % |
| DINAS KESEHATAN | | | | | | |
| 1 | UTD PMI KOTA BUKITTINGGI | Jl.Dr.Abdul Rivai No 17A | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | - | 100 % |
| Total Dinas Kesehatan | | | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 | - | 100 |
| DINAS SOSIAL | | | | | | |
| 1 | Gerkatin | Jalan Situpo Raya No.20 y, RT.IV. RW.3 | 20,001,500.00 | 20,000,000.00 | | 100 % |
| Total Dinas Sosial | | | 20,001,500.00 | 20,000,000.00 | - | 100 |
| DINAS PARIWASATA PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | | |
| 1 | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi | Jln A Rivai atas Ngarai | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 890,400.00 | 100 % |
| 2 | Bukittinggi Inline Skate BISC Kota Bukittinggi | Jl.By Pass | | | | |
| 3 | IPSI Kota Bukittinggi | Jl. Teuku Umar No. 9 C Benteng Pasar Atas | | | | |
| 4 | Kelompok Olahraga Muaythai Gezi | Jln Arivai Atas Ngarai | | | | |
| 5 | Kelompok olahraga Taekwondo Dojang kota Bukittinggi | Jln Sudirman | | | | |
| 6 | Kelompok PBSI Kota Bukittinggi | JL. A.Rivai sporthall Bukittinggi | | | | |
| 7 | Kodim | jl.sudirman komplek asrama kodim | | | | |
| 8 | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Guguak | Jl.Prof.Hamka No.37 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 2,919,722.00 | 98 % |
| 9 | Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI) Kota Bukittinggi | Jl.Ahmad Yani | 93,550,000.00 | 93,550,000.00 | | 100 % |
| 10 | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bukittinggi | Jl. Dr. A. Rivai No. 17-A, Bukittinggi, Bukit Apit Puhun, Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat | 2,560,593,000.00 | 2,560,593,000.00 | 283,486,758.00 | 89 % |
| 11 | Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI) Kota Bukittinggi | Jl.Ahmad Yani | 93,550,000.00 | | | - % |
| 12 | Yayasan Jantung Sehat Indonesia (YJI) Kota Bukittinggi | Jl.Perwira No.23 | 25,000,000.00 | | | - % |
| 13 | Gerakan Pramuka Kota Bukittinggi | Jl. Kehakiman, Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 100 % |
| Total Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | | | 3,647,693,000.00 | 3,529,143,000.00 | 287,296,880.00 | |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi | |
|----|--|---|------------------|------------------|----------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | |
| 1 | Baznas Kota Bukittinggi | Jl.Mutiara Tengah Sawah Bukittinggi | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | 2,284,000.00 | 99 % | |
| 2 | Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bukittinggi | Jl. Sudirman, Kel.Sapiran kec.Aur Birugo Tigo Baleh kota Bukittinggi | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 | | 100 % | |
| 3 | Forum Komunikasi Pondok Al Qur'an Kota Bukittinggi | Kampus Aqabah Jl.St Syahril Kelurahan Tarok Dipo Bukittinggi | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 44,500.00 | 100 % | |
| 4 | LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kota Bukittinggi | Jl. Batang Ombilin II No.10, Kel.Belakang Balok, Kec. ABTB, Kota Bukittinggi | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 100 % | |
| 5 | Markas Qur'an Ashabul Qur'an | Jl. Situpo Raya 20 Z 3 Gg Mawar Kel.Pakan Kurai kec. Gg Panjang Kota Bukittinggi | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | | 100 % | |
| 6 | Masjid Jami" Tarok | Bukittinggi | 5,000,000,000.00 | 5,000,000,000.00 | | 100 % | |
| 7 | Masjid Mukhlisin | Jl.Soekarno Hatta Km.3 kel.Manggis Ganting kec.MKS kota Bukittinggi | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | |
| 8 | Masjid Tablighiyah | Bukittinggi | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 100 % | |
| 9 | MDTA Al Muttaqin | Jl. Kabun Pulasan Kelurahan Puhun Tembok Kec. MKS Kota Bukittinggi | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 | | 100 % | |
| 10 | MDTA ARRABIYAH | Jl. N.Dj Dt. Mangkuto Ameh Kelurahan Koto Selayan | 40,000,000.00 | | | - % | |
| 11 | MDTA Istiqamah | Jl.Sumur Kelurahan ladang Cakiah Kec.ABTB Kota Bukittinggi | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100 % | |
| 12 | MDTA Nurul Yakin | Jl.Pincuran Gaung Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang kota Bukittinggi | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | | 100 % | |
| 13 | MDTA SYUKRA | Jl. Ipuh Mandiangin Kel.Campago Ipih Kec.MKS Kota Bukittinggi | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 36,998,000.00 | 72 % | |
| 14 | MDTA TABLIGHIYAH | Jl. Soekarno Hatta KM 3 Garegeh Bukittinggi | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | | 100 % | |
| 15 | Mejid Jamik Tarok | Jl. Hamka Simp Bengke Kelurahan Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi | | | | | |
| 16 | Mesjid AL Furqan Sarajo Bukittinggi | Jl. Abdul Manan Kelurahan Campago Gg.Bulek Kec.MKS kota Bukittinggi | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | | 100 % | |
| 17 | Mesjid Al Ikhwan Panorama | Jl. Panorama, Kel. Kayu Kubu, Kec.Guguk Panjang, Kota Bukittinggi | 100,000,000.00 | 97,086,000.00 | | 97 % | |
| 18 | Mesjid Al Ishlah | Jl.BUKIT APIT No.25 Kelurahan Bukit Apit Puhun kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100 % | |
| 19 | Mesjid BAITUL AMIN | Jl. Jend.Sudirman Asrama Polres Bukittinggi | | | | | |
| 20 | Mesjid Baiturrahman | Jl.banto Darano RT.02 / RW.04 kelurahan Campago Gg.Bulek Kec.MKS Kota Bukittinggi | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 100 % | |
| 21 | Mesjid Jamik Aur Kuning | Jl.Prof M.Yamin SH Kelurahan Aur Kuning Kec. ABTB Kota Bukittinggi | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 100 % | |
| 22 | Mesjid Jamik Gansala Bukittinggi | Jl.Anak Air kel.Pulai anak air Kec.MKS Kota Bukittinggi | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | - % | |
| 23 | Mesjid Jamik Gunjo Bukittinggi | Jl. N.J.Dt.Mangkuto Ameh nN.26, Kel.Koto Selayan, Kec.MKS, Kota Bukittinggi | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | | 100 % | |
| 24 | Mesjid Mukhlisin | Jl.Soekarno Hatta KM 3 Kelurahan Manggis Ganting Kec.MKS Kota Bukittinggi | | | | | |
| 25 | Mesjid NURUL HUDA Panganak | Jl. Tabek Tuhua, Kel.Puhun Pintu Kabun, Kec.MKS, Kota Bukittinggi | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100 % | |
| 26 | MUI Kota Bukittinggi | Jl.Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Samping Pengadilan Agama Bukittinggi | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | | 100 % | |
| 27 | Mushalla Al Firdaus | Jl.Ipuh Loweh Kelurahan Campago Ipuh Kec.MKS Kota Bukittinggi | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | | 100 % | |
| 28 | Mushalla Al Ikhlas Asrama Kodim | Jl.Asrama Kodim Kelurahan Sapiran Kec.ABTB Bukittinggi | | | | | |
| 29 | Mushalla Al Ikhlas Panganak | Jl.Panganak Atas Bukittinggi | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 100 % | |
| 30 | Mushalla AL IKHLAS Pintu Kabun | Jl. Pintu Kabun, Kel.Puhun pintu Kabun, Kec. MKS, Kota Bukittinggi | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | | 100 % | |
| 31 | Mushalla Al Wadi | Ateh Ngarai, Kel. Kayu Kubu, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi | 100,000,000.00 | - | | - | |
| 32 | Mushalla An Nur Gantiang | Jl.Ganting Kelurahan Manggis Ganting Kec.MKS Kota Bukittinggi | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % | |
| 33 | Mushalla Bai"aturridhwan | jl. Bai"aturridhwan No. 4 Kel. ATTS Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % | |
| 34 | Mushalla HAQQUL KHAFFI | Jl.Panorama Baru Kel.Puhun Pintu Kabun Kec. MKS Kota Bukittinggi | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 100 % | |
| 35 | Mushalla NUR RABBANI Bukittinggi | Jl. Batu Hampa, Kel.Tarok Dipo, kec.Guguk Panjang, Kota Bukittinggi | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % | |
| 36 | Mushalla Nurul falah | Kelurahan Puhun Pintu kabun | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 100 % | |
| 37 | Mushalla NURUL FALAH | Jl.Pintu Kabun Kel.Puhun Pintu Kabun Kec.MKS Kota Bukittinggi | | | | | |
| 38 | Mushalla Nurul Iman Jangkak | Jl. Jangkak Kelurahan Campago Ipuh Kec.MKS Kota Bukittinggi | | | | | |
| 39 | Mushalla /Surau Bunjo Birugo Puhun | Jl. Birugo Puhun, Kel.Birugo, Kec.ABTB, Kota Bukittinggi | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100 % | |
| 40 | Pondok Pesantren Madinatul Munawarah Bukittinggi | Jl.Abdul manan Kel.Campago Gg Bulek Kec. MKS | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 9,909,915.00 | 90 % | |
| 41 | Rumah Tahfizh Ukhwatul Qur'an | Tabek gadang Kel.aur kuning | | 50,000,000.00 | | | |
| 42 | SURAU BATU LADANG CAKIAH | Jl. Ladang Cakiah Kel.Ladang Cakiah, Kec.ABTB, Kota Bukittinggi | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % | |
| 43 | TPQ Al Huda Gulai bancah | Jl.By Pass KM 1 Kelurahan Kubu Gulai Bancah Bukittinggi | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | | 100 % | |
| 44 | TPQ Ash Shabirin | Jl.Situpo Raya kelurahan Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 100 % | |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi |
|--|--|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | TPQ BABUSSALAM | Jl.Ujung Bukit Kelurahan Tarok Dipo Kec.Gg Panjang Kota BKT | | | | |
| 46 | TPQ Syadali Jannah | Jl. Mr. Asaa"at Simpang Guguak Bulek Bukittinggi | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 100 % |
| 47 | Lembaga Didikan Subuh (LDS) Kota Bukittinggi | Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 100 % |
| 48 | Masjid Al Mutatahahirin Baruah | Jl. Sa'aduddin Jambek RT 01 RW 04 Kel.Pulai Anak Aia Kec.MKS kota Bukittinggi | 881,650,000.00 | - | | - |
| 49 | MDTA "Arabiyah | jl. Nj.Dt.Mangkuto Ameh | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 100 % |
| 50 | Mushalla Al Anshar Bukik Lampasa | Jl. Bukik Lampasa Kelurahan Puhun Pintu Kabun | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 51 | Mushalla Al Mannar | Jl. Aur Kuning Kel.Aur Kuning Kec.ABTB Kota Bukittinggi | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | | 100 % |
| 52 | Mushalla Al Muttaqin Bukit Apit Puhun | Jl. Jambak Muko | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100 % |
| 53 | Mushalla An Nur Pabidikan | Jl. Pabidikan Kelurahan Puhun Pintu Kabun | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 54 | Mushalla Babussalam | Ujung Bukik Tarok Dipo Bukittinggi | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 55 | MUSHALLA BAITURRAHMAN | JL.SUTAN SYAHRIL JEMBATAN BESI KELURAHAN TAROK DIPO KOTA BUKITTINGGI | 219,500,000.00 | 219,500,000.00 | 7,000,000.00 | 97 % |
| 56 | Pondok Tahfidz Ukhwatul Qur"an | Tabek Gadang Aur Kuning | 50,000,000.00 | | | - % |
| 57 | SURAU MANGGIH | Kelurahan Aur Kuning kecamatan ABTB | 200,000,000.00 | 198,950,000.00 | | 99 % |
| 58 | SLB Al Azhar | Jl. TDR Parak Kongsi Kel.Bukit Apit Puhun Kec.Guguk Panjang, Bukittinggi | 118,600,000.00 | 118,600,000.00 | | 100 % |
| 59 | SLB AL IKHLAS | Jl. Paninjauan | 125,400,000.00 | 125,400,000.00 | | 100 % |
| 60 | SLB AUTISME YPPA | Jl. Pintu Kabun Jirek Gg. Mawar | 88,800,000.00 | 88,800,000.00 | | 100 % |
| 61 | SLB KARAKTER MANDIRI | Jl. Abdul Manan Campago Ipuh | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | | 100 % |
| 62 | SLB PERMATA BUNDA | Jl. H.Burhan Birugo | 56,400,000.00 | 56,400,000.00 | | 100 % |
| 63 | SLB RESTU IBU | Jl. Kubu Tanjung No.90 Kubu Tanjung | 81,200,000.00 | 81,200,000.00 | | 100 % |
| 64 | SMAS ISLAM AL ISHLAH | Jl. Mr Assaat No.52 B Banto Darano | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | | 100 % |
| 65 | SMAS Karya Bakti | Jl.Diponegoro no.8 | 165,800,000.00 | 165,800,000.00 | | 100 % |
| 66 | SMAS PEMBANGUNAN | Jl. Jend. Sudirman Asrama Kodim 0304 Agam | 295,680,000.00 | 295,680,000.00 | | 100 % |
| 67 | SMAS PSM Bukittinggi | Jl.Dr. A. Rivai No.17 Kelurahan Kayu Kubu Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 151,200,000.00 | 151,200,000.00 | | 100 % |
| 68 | SMAS Taruna Bangsa | Jl.Syech Jamil Djambek No.33 Kel. Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 84,200,000.00 | 84,200,000.00 | | 100 % |
| 69 | SMAS Xaverius | Jl.Bagindo Azis chan Kel.Bukit Cangang Kayu Ramang Kec,Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 303,400,000.00 | 303,400,000.00 | | 100 % |
| 70 | SMK Elektronika Indonesia Bukittinggi | Jl.Prof Hamka No.55 Pakan Kurai Bukittinggi | 60,800,000.00 | 60,800,000.00 | | 100 % |
| 71 | SMK Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi | Jl.Kesehatan No.20 Kel.Bukit Apit Puhun Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 268,000,000.00 | 268,000,000.00 | | 100 % |
| 72 | SMK Gajah Tongga | Jl.Umar gafar No.4 Kelurahan Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 119,600,000.00 | 119,600,000.00 | | 100 % |
| 73 | SMK Gema Nusantara Bukittinggi | Jl.Birugo Bungo No.137 A Bukittinggi | 409,000,000.00 | 409,000,000.00 | | 100 % |
| 74 | SMK Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi | Jl.Kusuma Bhakti No.99 Bukittinggi | 147,400,000.00 | 147,400,000.00 | | 100 % |
| 75 | SMK Paramitha Bukittinggi | Jl.Veteran No.79 Jirek Bukittinggi | 63,800,000.00 | 51,800,000.00 | | 81 % |
| 76 | SMK Pembangunan Bukittinggi | Jl.Iskandar Tejda Kusuma Kel.Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 164,200,000.00 | 164,200,000.00 | | 100 % |
| 77 | SMK Pembina Bangsa | jl.Syech Jamil Jambek no.33 kel.Pakan Kurai kec.Guguk Panjang Bukittinggi | 357,000,000.00 | 357,000,000.00 | | 100 % |
| 78 | SMK Teknologi Muhammadiyah | Jl.Prof Dr.Hamka Kel.Tarok Dipo Kec.Guguk Panjang Kota Bukittinggi | 284,800,000.00 | 284,800,000.00 | | 100 % |
| Total Sekretariat Daerah | | | 3,654,280,000.00 | 18,417,816,000.00 | 556,236,415.00 | 489 % |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | | | | | | |
| 1 | KORPRI | Bukittinggi | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 15,995,144.00 | 89 % |
| Total BKPSDM | | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 15,995,144.00 | |
| KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN | | | | | | |
| 1 | Karang Taruna Bhakti Muda Kel. Pulai Anak Air | Jl. Sa"aduddin Jambek No. 90 | 64,607,000.00 | 64,602,500.00 | | 100 % |
| 2 | Karang Taruna Kel. Campago Ipuh | Jl. H. Miskin, Kel. Campago Ipuh | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 100 % |
| 3 | Karang Taruna Kel Manggis Ganting | Jl. Bahar Kamil RT.01/RW.02 Ganting | 200,000,000.00 | 199,564,086.43 | | 100 % |
| 4 | Karang Taruna Teratai Putih | Jl. Campago No. 21 Inkorba Kelurahan Campago Guguk Bulek | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 100 % |
| 5 | Rumah Tahfiz BQC Syukur Nikmat Kel. Puhun Pintu Kabun | Kelurahan Puhun Pintu Kabun | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 100 % |
| 6 | Rumah Tahfiz Bukittinggi Qur"an Center (BQC) Kel. Campago Ipuh | Kelurahan Campago Ipuh | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 119,080.00 | 100 % |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi |
|---|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Rumah Tahfiz TPQ/RTQ Syadali Jannah | Jl. Mr. Asaat Simpang Guguk Bulek Bukittinggi | 280,000,000.00 | 279,480,000.00 | | 100 % |
| 8 | BKMT Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | Jln Abdul Manan No.2 Kelurahan Campago Ipuh | 50,000,000.00 | 49,950,000.00 | | 100 % |
| 9 | BKMT Mesjid Al Wustha | Jln. Sanjai Dalam RT 01/RW 01 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 10 | BKMT Permata Masjid Al Muthathahirin Baruah | Pulai Anak Air | 50,000,000.00 | 49,973,000.00 | | 100 % |
| 11 | PKK Kelurahan Manggis Ganting | Jln. Sanjai Dalam | 100,000,000.00 | 99,999,900.00 | | 100 % |
| 12 | Rumah Tahfiz | Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | | | | |
| 13 | Karang Taruna Bhakti Muda Kel. Pulai Anak Air | Jl. Sa'aduddin Jambek No. 90 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 100 % |
| 14 | Karang Taruna Kel Kubu Gulai Bancah | Jl. Kusuma Bhakti Gulai Bancah | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 100 % |
| 15 | PKK Kelurahan Campago Ipuh | Jl. H. Miskin, Kelurahan Campago Ipuh | 30,000,000.00 | 29,914,500.00 | | 100 % |
| 16 | PKK KELURAHAN PUHUN TEMBOK | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 100 % |
| 17 | Pokdewis | Jl. Sanjai Dalam Rt.01/RW.01 | 50,000,000.00 | - | | - |
| 18 | PKK Kecamatan Mandiangin Koto Selayan | Jl. Abdul Manan, No. 2, Kelurahan Campago Ipuh | 30,000,000.00 | 29,986,650.00 | | 100 % |
| 19 | PKK Kelurahan Campago Ipuh | Jl. H. Miskin, Kelurahan Campago Ipuh | 50,000,000.00 | 49,950,000.00 | | 100 % |
| 20 | PKK Kelurahan Manggis Ganting | Jln. Sanjai Dalam | 50,000,000.00 | 49,999,950.00 | | 100 % |
| Total Kecamatan MKS | | | 1,500,607,000.00 | 1,449,420,586.43 | 119,080.00 | 97 % |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Guguk Panjang | | | | | | % |
| 1 | Kube Gempita Maju | RT 04/04 Tarok Dipo | 20,000,000.00 | - | | - |
| 2 | Kube Parak Tinggi | Parak Tinggi, Tarok Dipo | 20,000,000.00 | - | | - |
| 3 | Rumah Tahfiz Quran | Bukittinggi | | | | |
| 4 | Rumah Tahfiz Al Ikhlas | Kelurahan Bukit Apit Puhun | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 466,889.00 | 100 % |
| 5 | Rumah Tahfiz Bunayya Tarok Dipo | Tarok Dipo | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 78,550.00 | 100 % |
| 6 | MARKAS QUR"AN ASHABUL QUR"AN | Pakan Kurai | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 159,480.00 | 100 % |
| 7 | LPM Kelurahan Tarok Dipo | Tarok Dipo, Bukittinggi | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 100 % |
| 8 | LPM Kelurahan Tarok Dipo | Tarok Dipo, Bukittinggi | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 100 % |
| 9 | Karang Taruna Kelurahan Kayu Kubu | Kelurahan Kayu Kubu | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 10 | KWT Ibu-Ibu Pejuang Keluarga | RW 2 Kelurahan ATTS | 20,000,000.00 | - | | - |
| 11 | Poskeskel Batuhampa | Tarok Dipo | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 100 % |
| 12 | Poskeskel Padang Gamuak | Tarok Dipo | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 100 % |
| 13 | Poskeskel Sejahtera | Tarok Dipo | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 100 % |
| 14 | TP PKK Kelurahan ATTS | Jl. Sijolang Dt P Basa 1 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 15 | TP PKK Kelurahan ATTS | Jl. Sijolang Dt P Basa 1 | | | | |
| 16 | TP PKK Kelurahan ATTS | Jl. Sijolang Dt P Basa 1 | | | | |
| 17 | TP PKK Kel. Tarok Dipo | Jln. Batu Hampa Konsolidasi Ujung Bukit, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 100 % |
| Total Kecamatan Guguk Panjang | | | 1,025,000,000.00 | 965,000,000.00 | 704,919.00 | 94 % |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh | | | | | | |
| 1 | BKMT Permata mushalla darul muttaqin | Jl. Perawat Kelurahan Belakang Balok | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 100 % |
| 2 | BKMT PERMATA MUSHALLA ISTIQAMAH SUMUA | JL SUMUA | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 100 % |
| 3 | KARANG TARUNA TUNAS GEMA | JL. M. YAMIN SH | 59,000,000.00 | 59,000,000.00 | | 100 % |
| 4 | PTQ UKHWATUL QURAN | Jl. Puding Mas Tabek Gadang Kel. Aur Kuning | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 2,587,000.00 | 99 % |
| 5 | RTQ Surau Balai Banyak | jl. kurai | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | | 100 % |
| 6 | Rumah Tahfidz Daarul Muttaqin | Jl. Perawat No 141 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | | 100 % |
| 7 | bkmt mesjid istiqamah | ladang cakiah | | | | |
| 8 | BKMT Permata Darul Muttaqin | Jl. perawat RT 03 RW 01 Kelurahan Belakang Balok | | | | |
| 9 | Karang taruna kelurahan birugo | birugo | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 100 % |
| 10 | LPM Kecamatan | Bukittinggi | | | | |
| 11 | LPM Kelurahan Belakang Balok | Jl. Batang Masang no 1 Kelurahan Belakang Balok | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 100 % |

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase Realisasi |
|----|--|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | LPM PARIT ANTANG | Jl. Kurai no 49 Kelurahan Parit Antang | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | | 100 % |
| | Total Kecamatan ABTB | | 1,079,000,000.00 | 1,079,000,000.00 | 2,587,000.00 | 100 % |
| | 8.01.1.05.0.00.04.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | |
| 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | BUKITTINGGI | 109,829,568.00 | 109,829,568.00 | | 100 % |
| 2 | PARTAI DEMOKRAT | BUKITTINGGI | 139,843,998.00 | 139,843,998.00 | | 100 % |
| 3 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | BUKITTINGGI | 141,731,010.00 | 141,731,010.00 | | 100 % |
| 4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | BUKITTINGGI | 74,824,128.00 | 74,824,128.00 | | 100 % |
| 5 | PARTAI Keadilan Sejahtera | BUKITTINGGI | 122,970,282.00 | 122,970,282.00 | | 100 % |
| 6 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | BUKITTINGGI | 29,590,536.00 | - | | - |
| 7 | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT | BUKITTINGGI | 53,684,124.00 | 53,684,124.00 | | 100 % |
| 8 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | BUKITTINGGI | 63,173,880.00 | 63,173,880.00 | | 100 % |
| 9 | PERSATUAN WARGA LIMA PULUH KOTA | Pulai Anak Air | - | - | | |
| 10 | PAGUYUBAN PERANTAU JAWA (PAPERJA) BUKITTINGGI-AGAM | BUKITTINGGI | - | - | | |
| 11 | FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA | BUKITTINGGI | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,104,950.00 | 99 % |
| 12 | KELOMPOK SADAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT | BUKITTINGGI | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | 100 % |
| | Total Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | | 910,647,526.00 | 881,056,990.00 | 1,104,950.00 | |

2) HIBAH BERUPA BARANG

| No | Nama Penerima | Alamat Penerima | Pagu APBD P 2022 | Realisasi (Rp) | Pengembalian | Persentase |
|----|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| 1 | Kantor Polisi Sektor Kota Bukittinggi | Jln. Soekarno Hatta Bukittinggi | 200,000,000.00 | 199,763,427.28 | - | 100 % |
| 2 | Kantor Polisi Sektor Kota Bukittinggi | Jln. Soekarno Hatta Bukittinggi | 18,000,000.00 | 16,703,675.16 | - | 93 % |
| 3 | Kantor Polisi Sektor Kota Bukittinggi | Jln. Soekarno Hatta Bukittinggi | 18,000,000.00 | 17,773,708.50 | - | 99 % |
| 4 | Kejaksaan Negeri Bukittinggi | Jl. Adhyaksa No. 198, Belakang Balok | 15,000,000.00 | 12,225,540.00 | - | 82 % |
| 5 | Kejaksaan Negeri Bukittinggi | Jl. Adhyaksa No. 198, Belakang Balok | 200,000,000.00 | 191,969,846.79 | - | 96 % |
| | Total Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | 451,000,000.00 | 438,436,197.73 | - | |
| | TOTAL HIBAH | | | 41,252,674,454.16 | 1,059,686,743.00 | |

adalah Badan Usaha Milik Daerah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan juga fokus investasi Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan tersebut di atas, mudah-mudahan manfaatnya melebihi muatannya sehingga berdampak strategis untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang serta juga dapat dikembangkan menjadi sumber data penelitian ilmiah dan analisis keuangan.

WALIKOTA BUKITTINGGI

ERMAN SAFAR